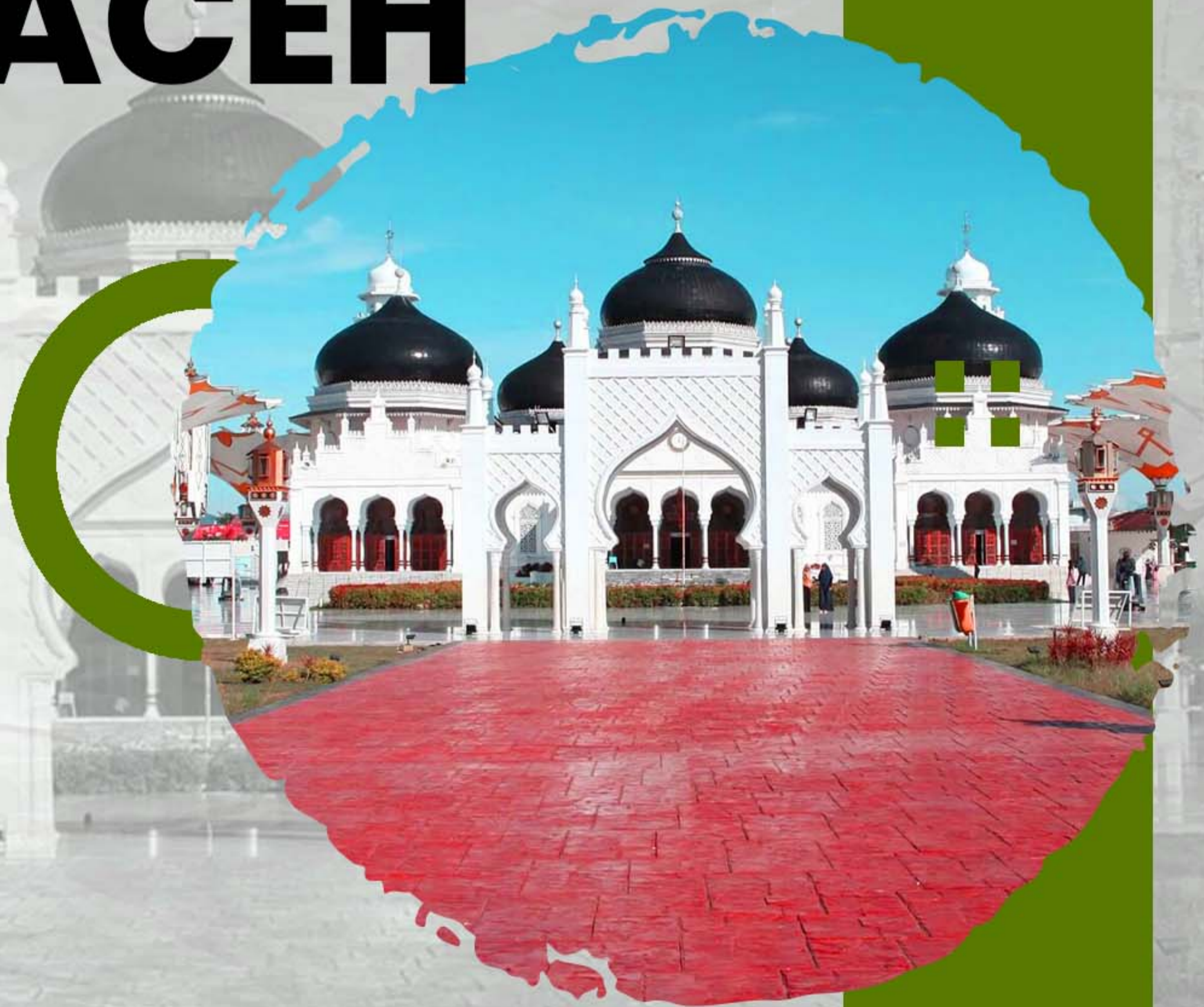


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI ACEH





**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI ACEH





Peta Pembinaan Provinsi Aceh

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Sindy Tervia, S.Stat
2. Adinda Aura Salsabil, S.Stat
3. Nuril Fikri Aulia, S.E, M.Si

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	3
C. TUJUAN	3
D. RUANG LINGKUP	4

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN ACEH BARAT	6
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	7
Aspek Satuan Inovasi Daerah	8
B. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	15
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	16
Aspek Satuan Inovasi Daerah	17
C. KABUPATEN ACEH BESAR	25
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	26
Aspek Satuan Inovasi Daerah	27
D. KABUPATEN ACEH JAYA	33
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	34
Aspek Satuan Inovasi Daerah	35
E. KABUPATEN ACEH SELATAN	44
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	45
Aspek Satuan Inovasi Daerah	46
F. KABUPATEN ACEH SINGKIL	52
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	52
Aspek Satuan Inovasi Daerah	53
G. KABUPATEN ACEH TAMIANG	59
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	60
Aspek Satuan Inovasi Daerah	61
H. KABUPATEN ACEH TENGAH	70
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	71
Aspek Satuan Inovasi Daerah	72
I. KABUPATEN ACEH TENGGARA	85
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	86
Aspek Satuan Inovasi Daerah	86
J. KABUPATEN ACEH TIMUR	95
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	96
Aspek Satuan Inovasi Daerah	97

K. KABUPATEN ACEH UTARA	105
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	105
Aspek Satuan Inovasi Daerah	107
L. KABUPATEN BENER MERIAH	114
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	114
Aspek Satuan Inovasi Daerah	116
M. KABUPATEN BIREUEN	124
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	125
Aspek Satuan Inovasi Daerah	126
N. KABUPATEN GAYO LUES	137
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	138
Aspek Satuan Inovasi Daerah	139
O. KABUPATEN NAGAN RAYA	145
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	146
Aspek Satuan Inovasi Daerah	147
P. KABUPATEN PIDIE	154
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	155
Aspek Satuan Inovasi Daerah	156
Q. KABUPATEN PIDIE JAYA	162
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	163
Aspek Satuan Inovasi Daerah	164
R. KABUPATEN SIMEULUE	171
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	172
Aspek Satuan Inovasi Daerah	173
S. KOTA BANDA ACEH	179
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	180
Aspek Satuan Inovasi Daerah	181
T. KOTA LANGSA	188
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	189
Aspek Satuan Inovasi Daerah	190
U. KOTA BANDA ACEH	196
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	196
Aspek Satuan Inovasi Daerah	197
V. KOTA SABANG	203
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	204
Aspek Satuan Inovasi Daerah	205
W. KOTA SUBULUSSALAM	212
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	213
Aspek Satuan Inovasi Daerah	214

BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

221

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat¹⁴
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten

Aceh Besar²⁷

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Besar

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Timur

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Timur

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Timur

Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Timur

Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Utara

Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Utara

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara

Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara

Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bener Meriah

Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bener Meriah

Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bener Meriah

Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Bener Meriah

Gambar 133. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bireuen

Gambar 134. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bireuen

Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Bireuen

Gambar 136. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bireuen

Gambar 137. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Bireuen

Gambar 138. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bireuen

Gambar 139. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kabupaten Bireuen

Gambar 140. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bireuen

Gambar 141. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Bireuen

Gambar 142. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen

Gambar 143. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen

Gambar 144. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 145. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 146. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 147. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 148. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 149. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 150. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 151. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 152. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 153. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 154. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

Gambar 155. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 156. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 157. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 158. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 159. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 160. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 161. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 162. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 163. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 164. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nagan Raya

Gambar 165. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah pada Kabupaten Nagan Raya

Gambar 166. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pidie

Gambar 167. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pidie

Gambar 168. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Pidie

Gambar 169. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pidie

Gambar 170. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Pidie

Gambar 171. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pidie

Gambar 172. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kabupaten Pidie

Gambar 173. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pidie

Gambar 174. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Pidie

Gambar 175. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie

Gambar 176. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Pidie

Gambar 177. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 178. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 179. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 180. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 181. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya¹⁶⁵

Gambar 182. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 183. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 184. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 185. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 186. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 187. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Pidie Jaya

Gambar 188. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Simeulue

Gambar 189. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Simeulue

Gambar 190. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Simeulue

Gambar 191. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Simeulue

Gambar 192. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Simeulue

Gambar 193. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Simeulue

Gambar 194. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kabupaten Simeulue

Gambar 195. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kabupaten Simeulue

Gambar 196. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Simeulue

Gambar 197. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Simeulue

Gambar 198. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Simeulue

Gambar 199. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banda Aceh

Gambar 200. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banda Aceh

Gambar 201. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Banda Aceh

Gambar 202. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banda Aceh

Gambar 203. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banda Aceh

Gambar 204. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banda Aceh

Gambar 205. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Banda Aceh

Gambar 206. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Banda Aceh

Gambar 207. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Banda Aceh

Gambar 208. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banda Aceh

Gambar 209. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Banda Aceh

Gambar 210. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Langsa

Gambar 211. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Langsa

Gambar 212. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Langsa

Gambar 213. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Langsa

Gambar 214. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Langsa

Gambar 215. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Langsa

Gambar 216. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Langsa

Gambar 217. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Langsa

Gambar 218. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Langsa

Gambar 219. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Langsa

Gambar 220. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Langsa

Gambar 221. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Lhoksumawe

Gambar 222. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Lhoksumawe

Gambar 223. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Lhoksumawe

Gambar 224. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Lhoksumawe

Gambar 225. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Lhoksumawe

Gambar 226. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Lhoksumawe

Gambar 227. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Lhoksumawe

Gambar 228. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Lhoksumawe

Gambar 229. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Lhoksumawe

Gambar 230. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Lhoksumawe

Gambar 231. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Lhoksumawe

Gambar 232. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sabang

Gambar 233. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sabang

Gambar 234. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Sabang

Gambar 235. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sabang

Gambar 236. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Sabang

Gambar 237. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sabang

Gambar 238. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Sabang

Gambar 239. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Sabang

Gambar 240. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Sabang

Gambar 241. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sabang

Gambar 242. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Sabang

Gambar 243. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Subulussalam

Gambar 244. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Subulussalam

Gambar 245. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Subulussalam

Gambar 246. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Subulussalam

Gambar 247. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Subulussalam

Gambar 248. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Subulussalam

Gambar 249. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Subulussalam

Gambar 250. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Subulussalam

Gambar 251. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Subulussalam

Gambar 252. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Subulussalam

Gambar 253. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Subulussalam

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Barat beserta Skor Kematangannya
- Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Barat Daya beserta skor Kematangannya
- Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Besar beserta Skor Kematangannya
- Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Jaya beserta Skor Kematangannya
- Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Selatan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Singkil beserta Skor Kematangannya
- Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tamiang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tengah beserta Skor Kematangannya
- Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tenggara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Timur beserta Skor Kematangannya
- Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Utara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Bener Meriah beserta Skor Kematangannya
- Tabel 14. Daftar Inovasi Kabupaten Bireun beserta Skor Kematangannya
- Tabel 15. Daftar Inovasi Kabupaten Gayo Lues beserta Skor Kematangannya
- Tabel 16. Daftar Inovasi Kabupaten Nagan Raya beserta Skor Kematangannya
- Tabel 17. Daftar Inovasi Kabupaten Gayo Pidie beserta Skor Kematangannya
- Tabel 18. Daftar Inovasi Kabupaten Pidie Jaya beserta Skor Kematangannya
- Tabel 19. Daftar Inovasi Kabupaten Simeulue beserta Skor Kematangannya
- Tabel 20. Daftar Inovasi Kota Banda Aceh beserta Skor Kematangannya
- Tabel 21. Daftar Inovasi Kota Langsa beserta Skor Kematangannya
- Tabel 22. Daftar Inovasi Kota Lhoksumawe beserta Skor Kematangannya
- Tabel 23. Daftar Inovasi Kota Sabang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 24. Daftar Inovasi Kota Sabang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 25. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 26. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Barat
- Tabel 27. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Barat Daya
- Tabel 28. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 29. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021
- Tabel 30. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Jaya

Tabel 31. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 32. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 33. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Tamiang

Tabel 34. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan

Tabel 35. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 36. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 37. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 38. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 39. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Bener Meriah

Tabel 40. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Biereun Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 41. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Bener Meriah

Tabel 42. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 43. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Gayo Lues

Tabel 44. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 45. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Nagan Raya

Tabel 46. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Pidie Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 47. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pidie

Tabel 48. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 49. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 50. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Simeulue Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 51. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Simeulue

Tabel 52. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Banda Aceh Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 53. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Banda Aceh

Tabel 54. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Langsa Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 55. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Langsa

Tabel 56. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Lhoksumawe Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 57. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Lhoksumawe

Tabel 58. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Sabang Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 59. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Sabang

Tabel 60. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Subulussalam Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Tabel 61. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Subulussalam



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan pada tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman

indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelebagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya

daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Aceh. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah

- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhoksumawe, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator output dan outcome. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

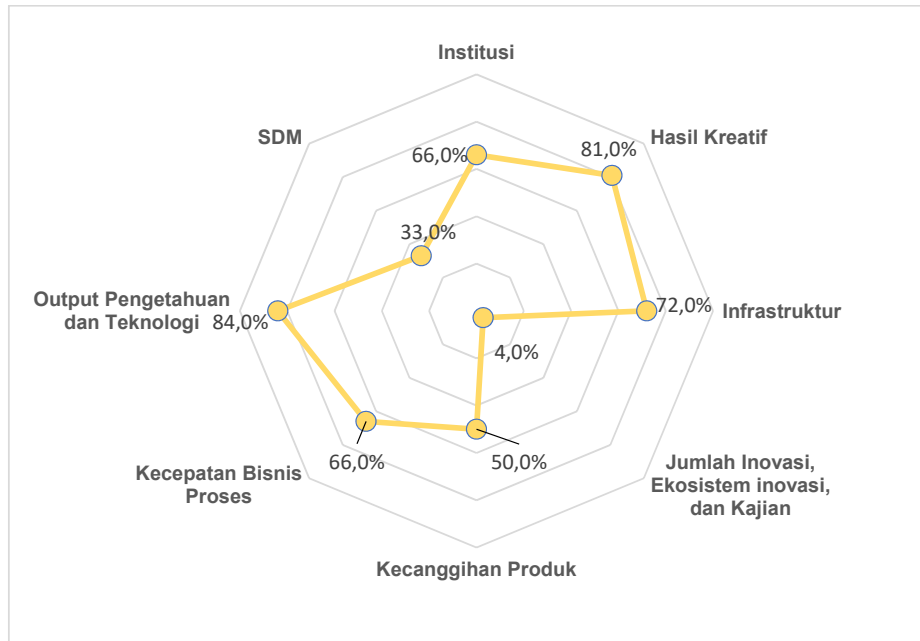
Aspek	Variabel	Indikator
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
		Roadmap SiDA
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
		Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi



BAB II

***INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA***

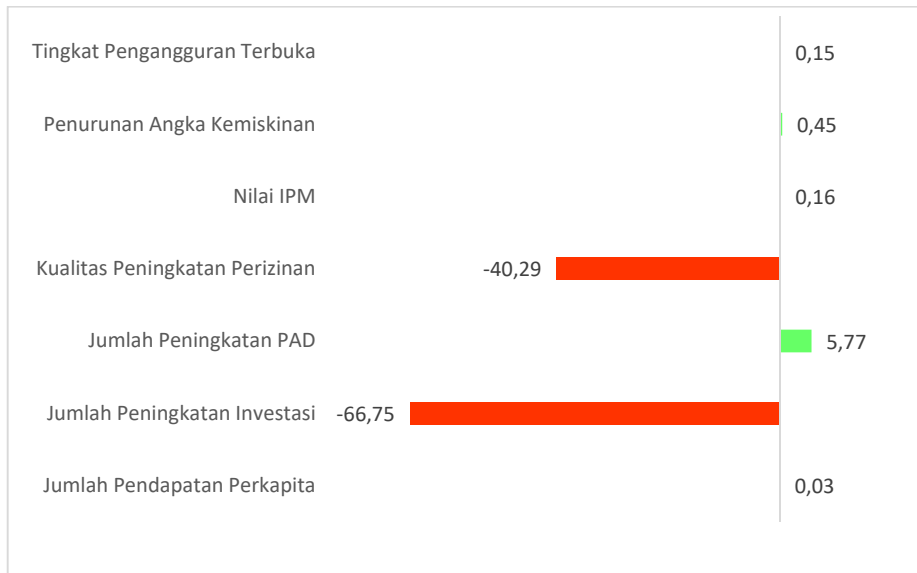
A. KABUPATEN ACEH BARAT



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 84,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih sangat rendah, hanya sebesar 4,0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat

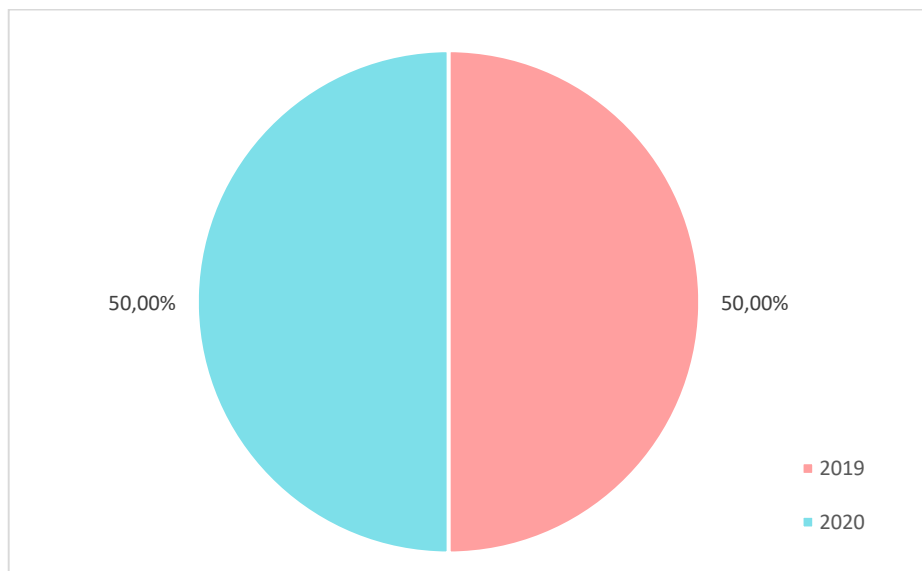
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat sudah mengalami perkembangan yang signifikan walaupun beberapa di antaranya masih belum signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,15%. Dengan kata lain, pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 0,15% dibandingkan tahun 2019, di mana nilai tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0,92%. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami penurunan sebesar 40,29% di mana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengalami penurunan pada Jumlah Investasi sebesar 62,04% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0,45%.

Jumlah Peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat terlihat meningkat sebesar 5,77%, namun angka tersebut masih berada di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Selanjutnya, jumlah

Pendapatan Perkapita meningkat sebesar 0,03%, namun nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1,85%. Demikian pula dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan sebesar 0,16% dimana nilai tersebut juga sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir, indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan angka 0,45%, artinya terjadi penurunan pada angka kemiskinan sebesar 0,45%, dan nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebanyak 0,02%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

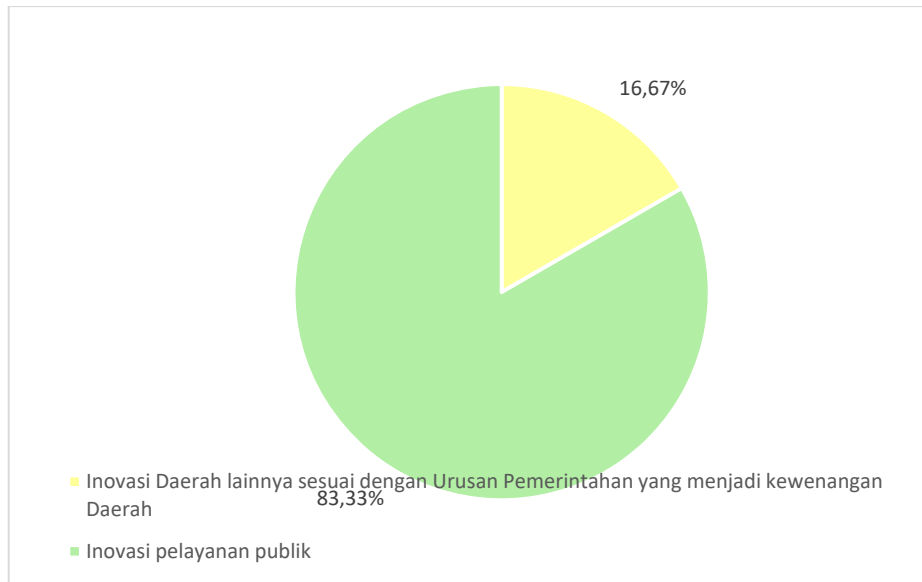
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, terdapat proporsi yang sama antara inovasi yang dilaporkan dan telah diterapkan oleh Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2019 dan 2020. Dari total 6 inovasi yang dilaporkan, terdapat 3 (50,00%) inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019 dan 3 (50,00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

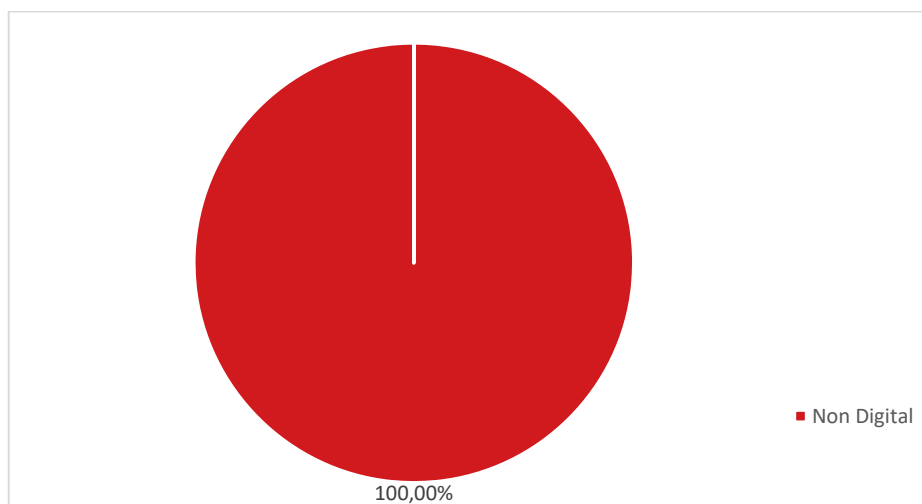
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, Kabupaten Aceh Barat memiliki dua bentuk inovasi, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya. Dari sisi proporsi, bentuk inovasi didominasi oleh inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 5 (83,33%) inovasi. Sementara itu, 1 (16,67%) inovasi tersisa yang dilaporkan oleh Kabupaten Agam merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

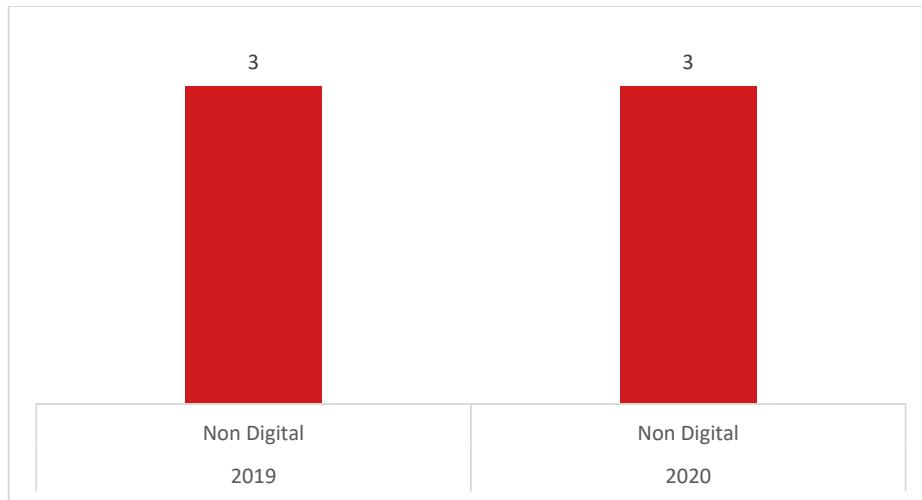
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 berdasarkan jenis inovasinya, keseluruhan inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Barat (sebanyak 6 inovasi) merupakan inovasi non digital.

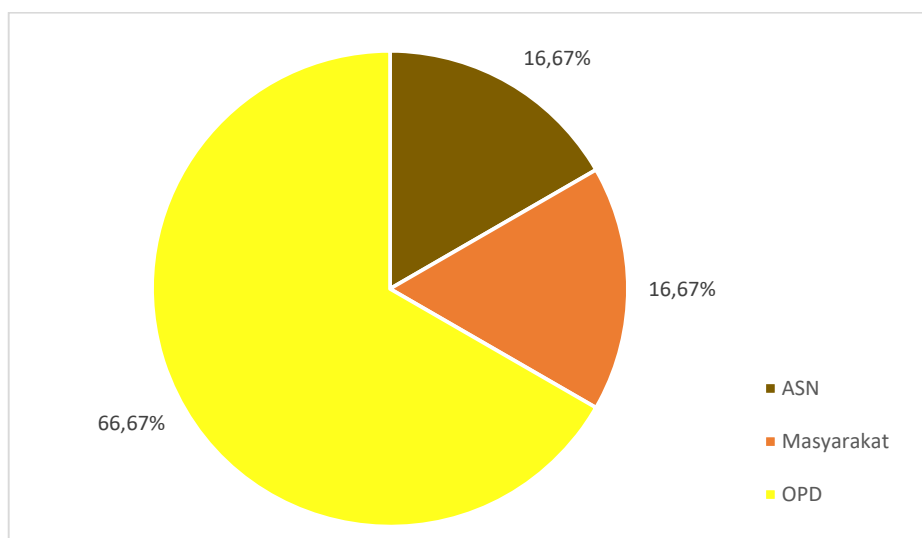
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Barat

Secara umum jumlah inovasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa inovasi digital yang diterapkan baik pada tahun 2019 maupun tahun 2020 adalah sebanyak masing-masing 3 inovasi.

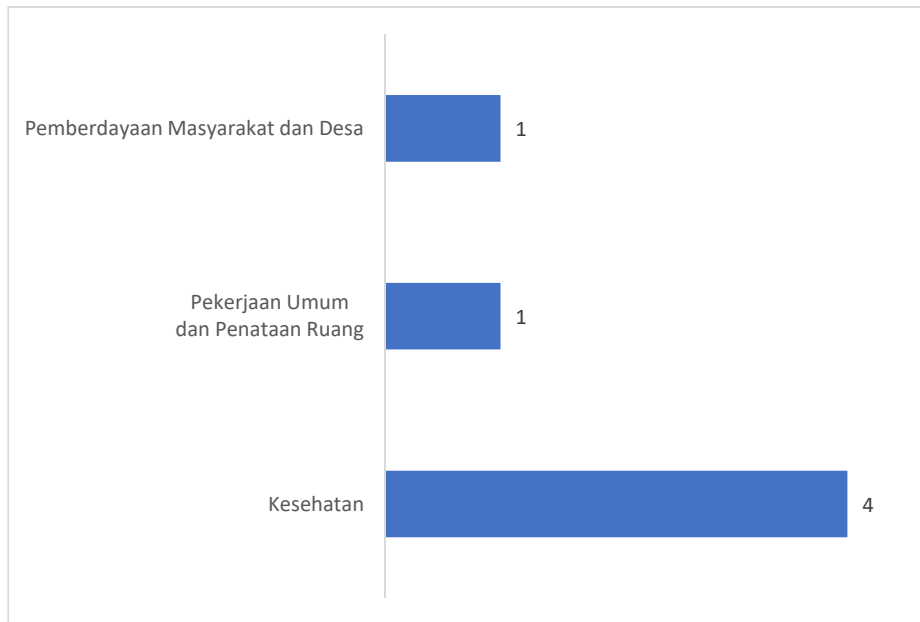
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 4 (66,67%) inovasi. Lebih lanjut, sebanyak 1 (16,67%) inovasi diinisiasi oleh ASN dan 1 (16,67%) inovasi sisanya diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

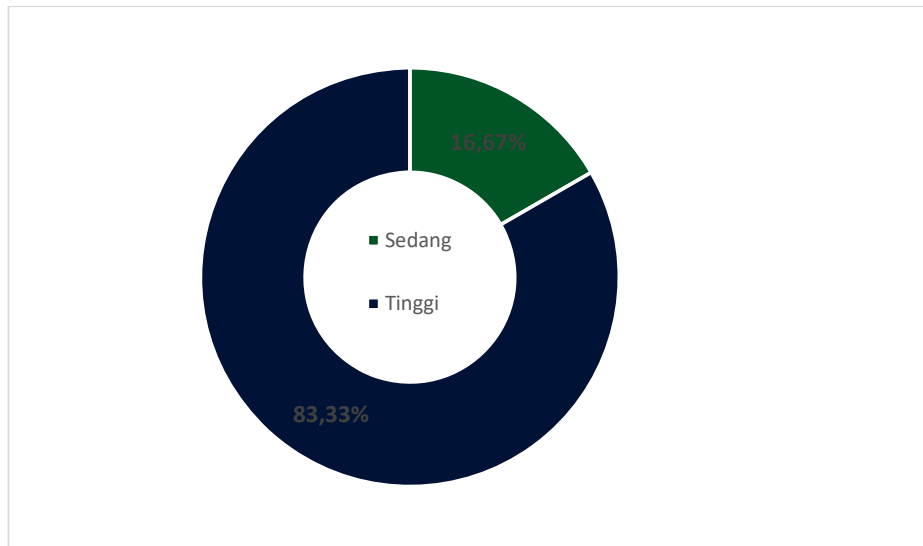
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Barat berdasarkan urusan pemerintahan tersebar pada tiga urusan, di antaranya adalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan kesehatan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 4 inovasi dari 6 inovasi yang dilaporkan. Sementara itu, 2 inovasi sisanya adalah inovasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan jumlah inovasi pada masing-masing urusan sebanyak 1 inovasi.

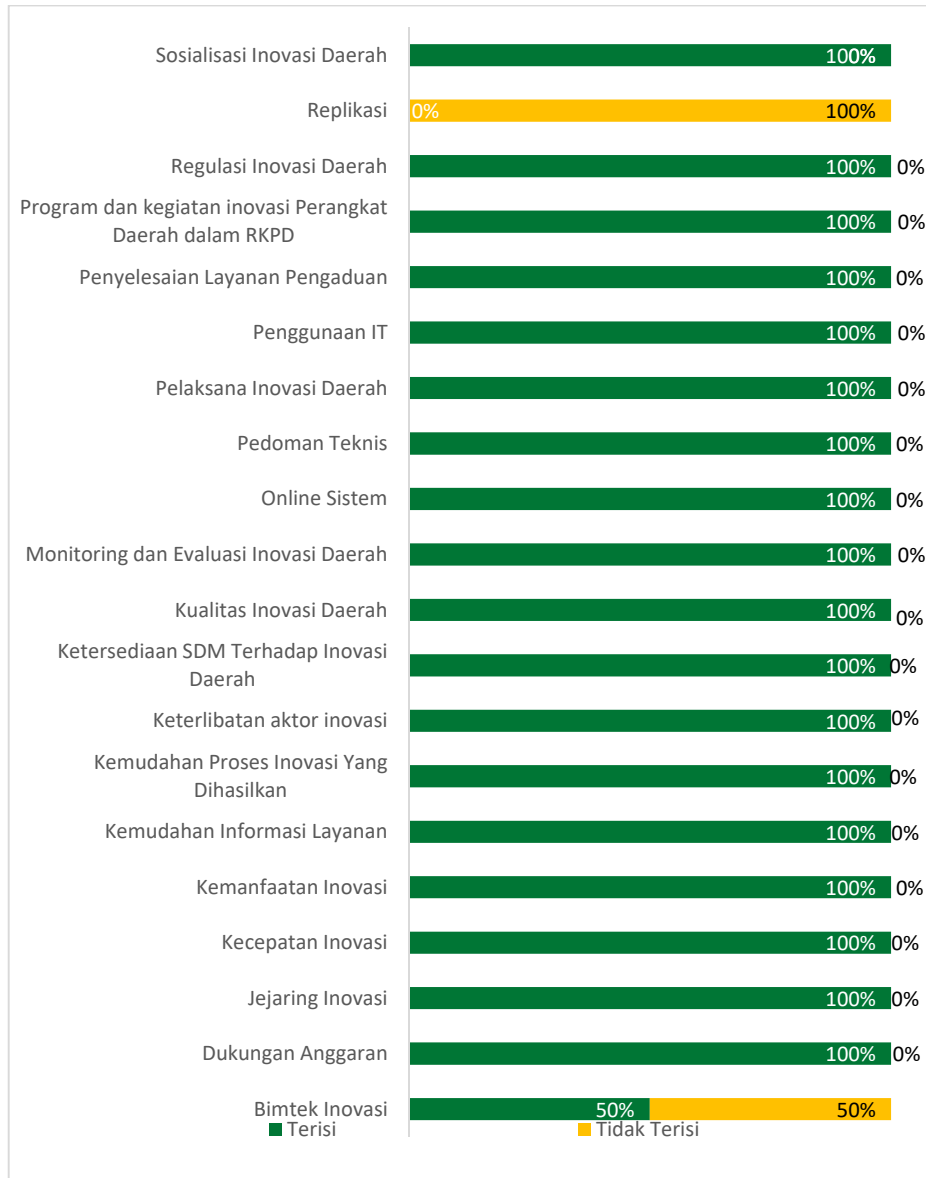
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sejumlah 5 (83,33%) inovasi. Selain itu, terdapat 1 (16,67%) inovasi yang memiliki skor sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

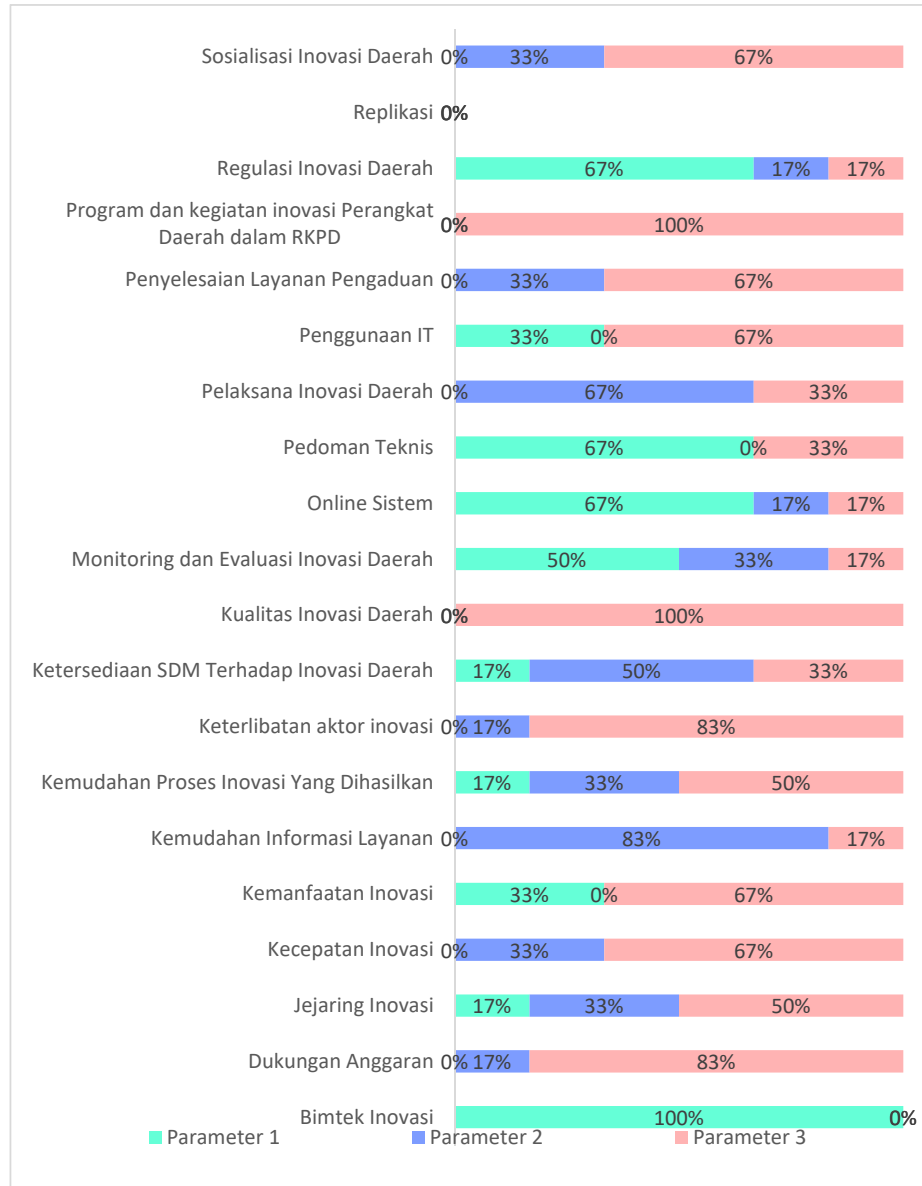


Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat

Dari 6 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 7,50% sedangkan 92,50% lainnya telah terisi data pendukung. Berdasarkan gambar di atas, hampir seluruh indikator telah memiliki persentase sebesar 100%. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Namun, di sisi lain terdapat dua indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data

pendukung di bawah 100%, yaitu indikator replikasi dan indikator bimtek inovasi. Adapun indikator dengan presentase tingkat keterisian data pendukung paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebanyak 0%. Dengan kata lain seluruh inovasi yang dilaporkan masih belum terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat

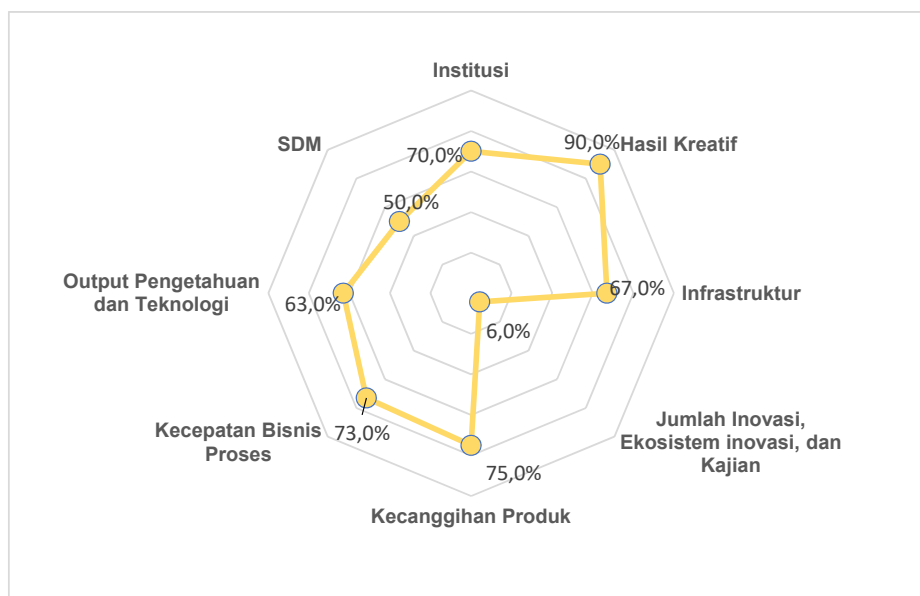
Daerah dalam RKPD serta Kualitas Inovasi Daerah sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan sebesar 83%, artinya 83% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kemudahan Informasi Layanan termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 100%. Dengan kata lain, seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi. Namun, perlu diingat bahwa hanya terdapat 3 inovasi yang terisi data pendukung dari indikator Bimtek Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Barat beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Tim Reaksi Cepat Dinas PUPR Aceh Barat	127
BUSER BAGIBUR	102
HARI KESEHATAN DESA	105
Permenkes Imut	90
GEUNANG	105
GAMPONG MUSLIMIN	122

B. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 90,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih sangat rendah, hanya sebesar 6,0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya

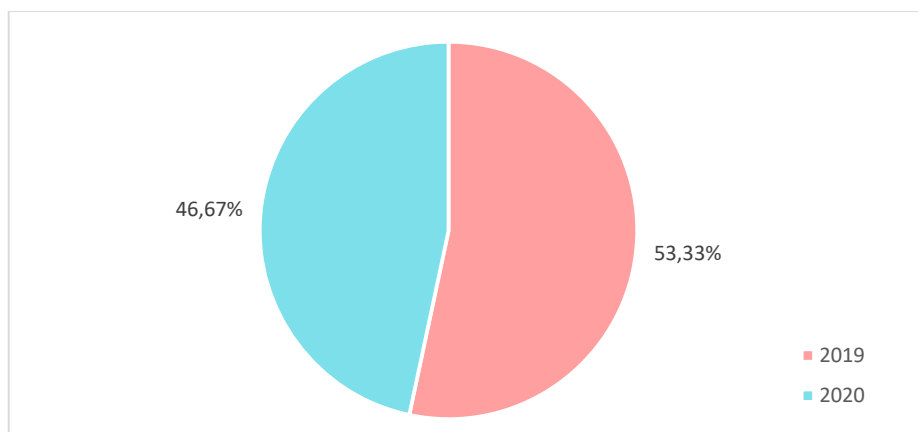
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya belum mengalami perkembangan yang signifikan, terutama pada Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan. Berdasarkan bagan di atas, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 1.203,50% atau menurun lebih dari 10 kali lipat. Nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Indikator lainnya yang mengalami penurunan adalah Jumlah Peningkatan Investasi, yakni sebesar 41,27%.

Meskipun kedua indikator tersebut mengalami penurunan, indikator lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kenaikan sebesar 0,37%. Artinya, pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 0,37% dibandingkan

tahun 2019. Indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan angka 0,33%, yang berarti bahwa Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Daya menurun sebesar 0,33%. Angka tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yaitu turun sebesar 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan sebesar 0,19% dimana nilai tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan sebesar 15,32%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%, capaian Kabupaten Aceh Barat Daya sudah melampaui standar yang ditentukan. Terakhir, Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan kenaikan sebesar 0,31%, dan nilai tersebut sudah lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

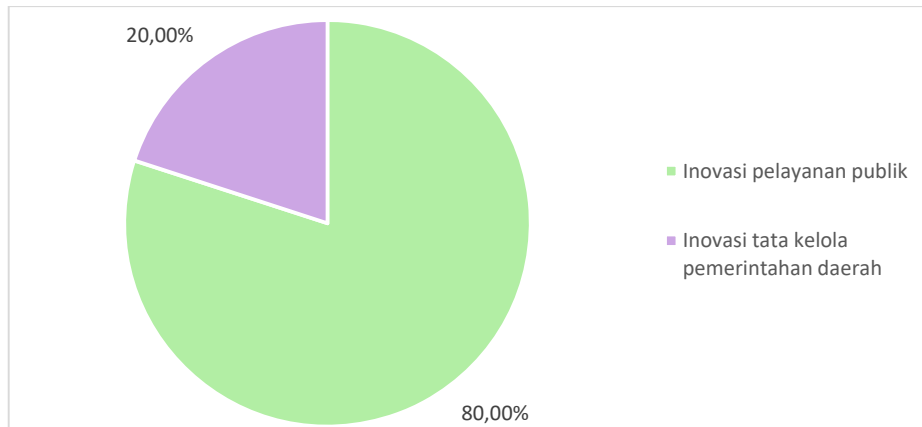
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 8 (53,33%) inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 7 (46,67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

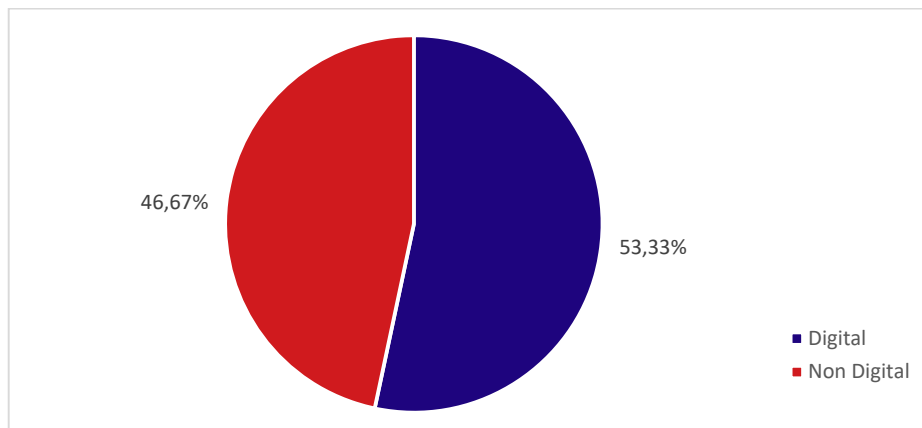
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintah daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 12 (80%) inovasi dan 3 (20%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

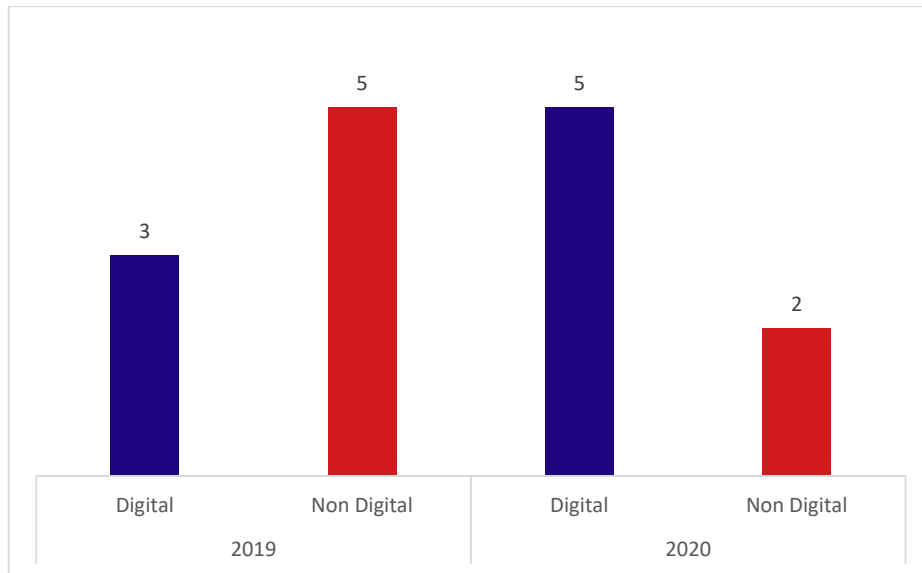
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (53,33%) dari 17 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan inovasi digital dan 7 (46,67%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

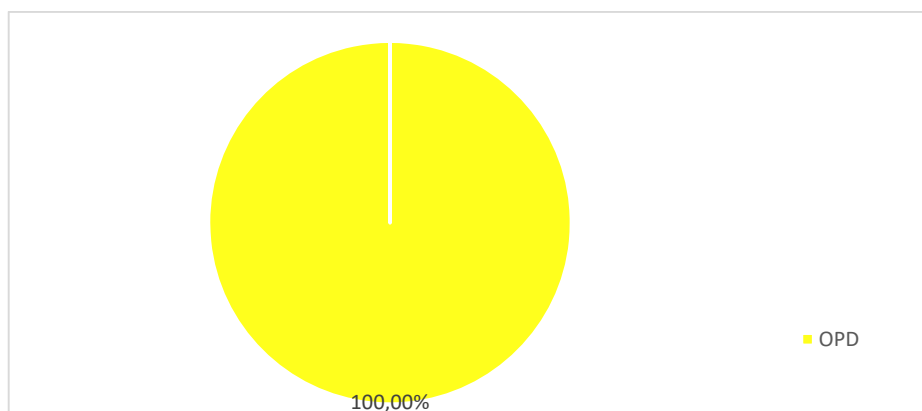
d. **Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan bagan di atas, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami perkembangan yang bertolak belakang. Pada tahun 2019, jumlah inovasi digital yang dilaporkan adalah sebanyak 3 inovasi, kemudian meningkat menjadi 5 inovasi pada tahun 2020. Sebaliknya, inovasi non digital yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 5 inovasi. Namun, pada tahun 2020 jumlah inovasi non digital menurun menjadi 2 inovasi.

e. **Berdasarkan Inisiator Inovasi**

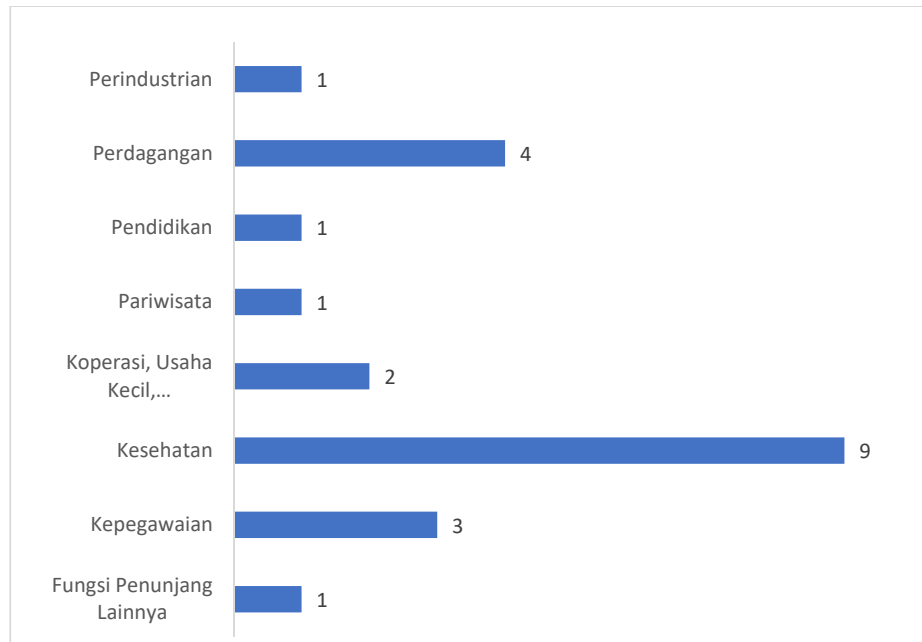


Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat diinisiasi oleh Organisasi Perangkat Daerah

(OPD). Di sisi lain, inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

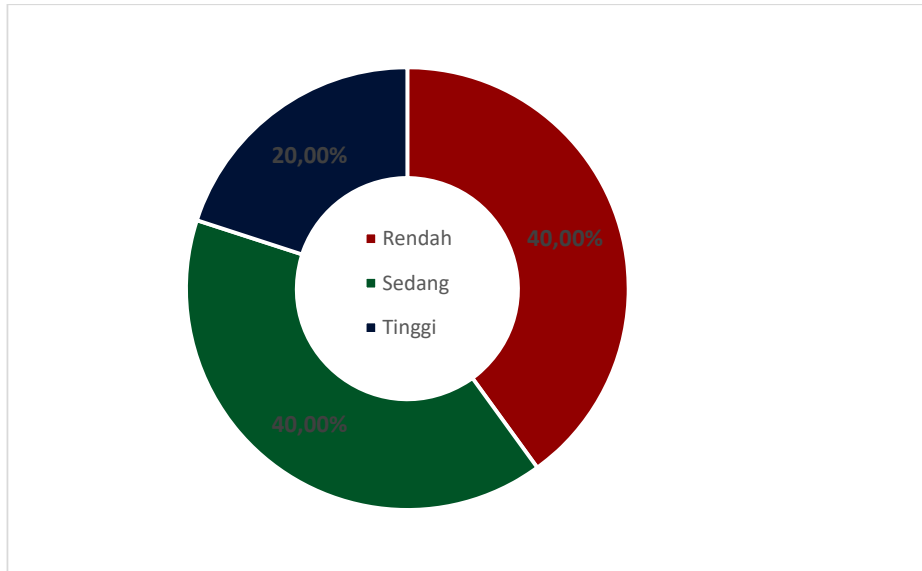
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya tersebar ke dalam 8 urusan pemerintahan yang berbeda. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan termasuk dalam urusan kesehatan dengan total 9 inovasi. Selain urusan kesehatan, urusan wajib pelayanan dasar yang terlapor adalah urusan Pendidikan, dengan jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi. Sementara itu, 4 inovasi termasuk dalam urusan perdagangan, 3 inovasi termasuk dalam urusan kepegawaian, dan 2 inovasi termasuk dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Adapun urusan perindustrian, pariwisata, dan fungsi penunjang lainnya juga memiliki inovasi yang terkait dengan jumlah sebanyak masing-masing 1 inovasi.

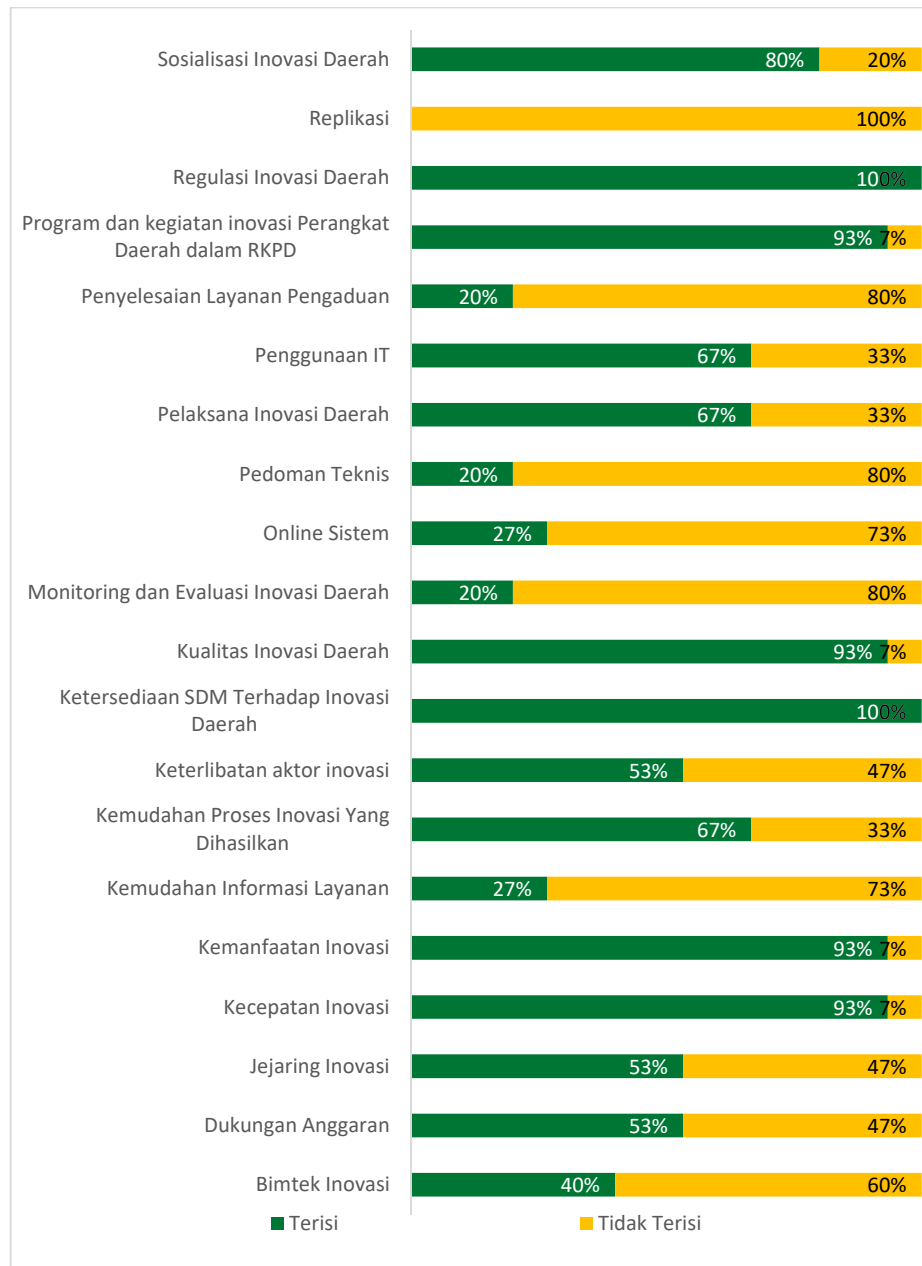
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Barat Daya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Melihat diagram di atas, terdapat proporsi yang seimbang antara inovasi dengan skor kematangan rendah dan sedang, yakni masing-masing sebanyak 6 dari 15 inovasi (40%). Sementara itu, 3 (20%) inovasi sisanya sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

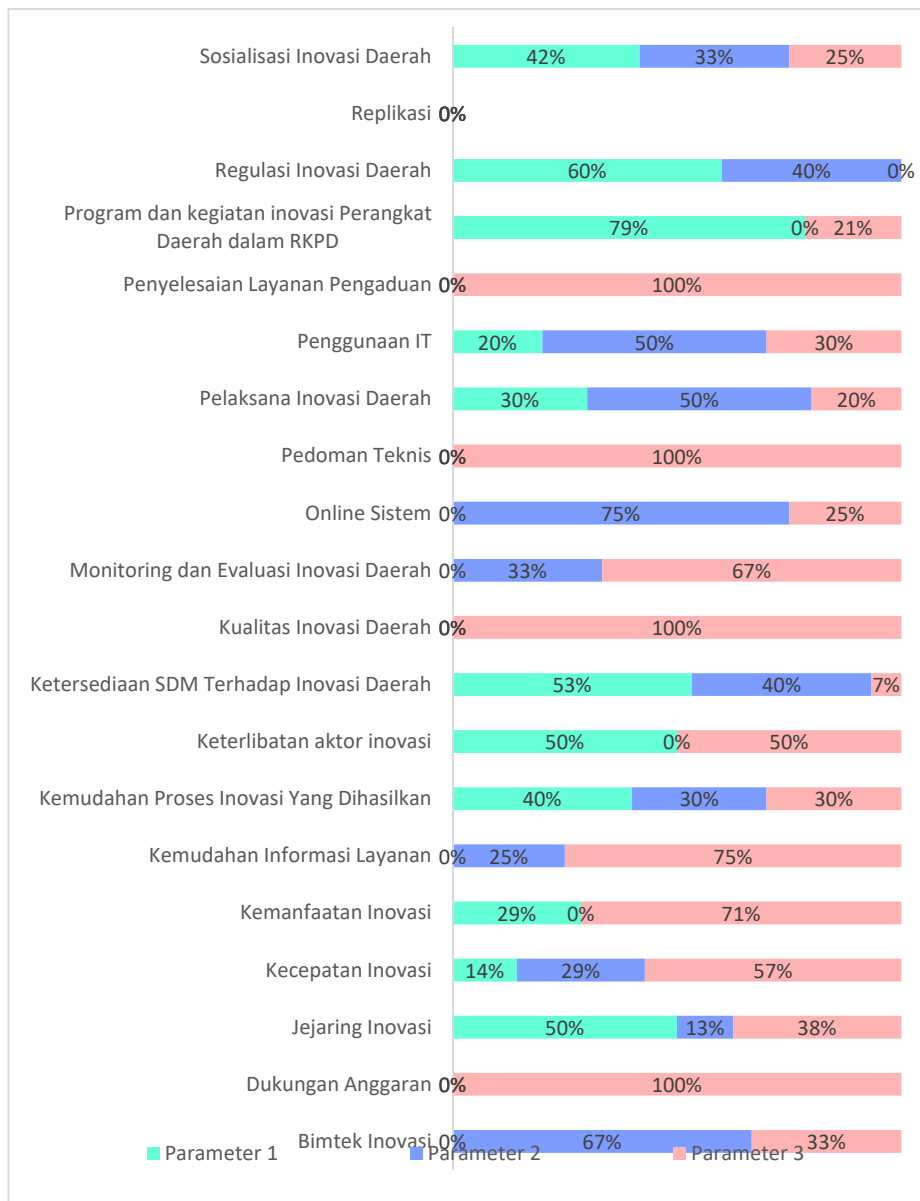


Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 41,67% sedangkan 58,33% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah. Artinya,

seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Barat Daya telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sementara itu, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 0% artinya belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3

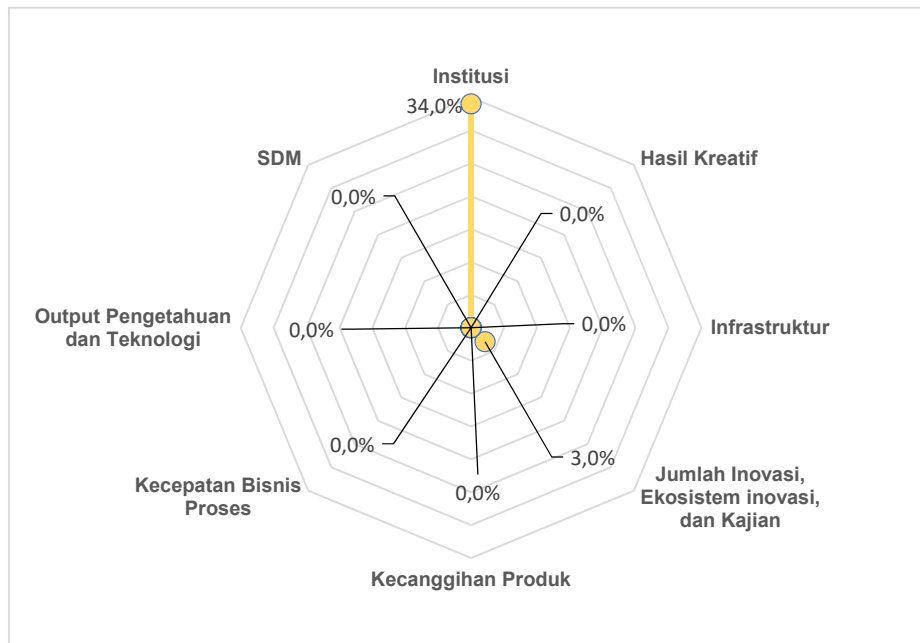
(tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Pedoman Teknis, Kualitas Inovasi Daerah, dan Dukungan Anggaran, masing-masing sebesar 100%. Artinya, seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator *Online System* sebesar 75% artinya 75% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Program dan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD sebesar 79%. Artinya 79% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Program dan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Barat Daya beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Barat Daya beserta skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Belanja di Mini Market/Swalayan Bebas Covid-19	0
Restoran Kabupaten Aceh Barat Daya Bebas Covid-19	46
Menginap di Hotel Grand Leuser Kabupaten Aceh Barat Daya Bebas Covid-19	40
Berkunjung dengan Nyaman, Aman, Sehat dan Bersih di sektor Pariwisata Bebas Covid-19	42
Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Berkas (SiTANKAS)	134
Percepatan Pelayanan Penyerahan SK Pensiun Bagi yang memasuki Batas Usia Pensiun” Melalui Layanan Aplikasi Sitankas (Sistem Pelayanan Kepegawaian Tanpa Berkas)	131
Percepatan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Periode April dan Oktober Tahun 2019” Melalui Layanan Aplikasi Sitankas (Sistem Pelayanan Kepegawaian Tanpa Berkas)	136
Gerakan Edukasi Masyarakat Peduli Anak Remaja (GEMPAR)	72
Pos Unit Kesehatan Kerja Tuah Syedara	68
Dusanak (Sudut Sayang Anak)	62
Jum’at Berkah dan Mise (Minuman Sehat)	67
Ketuk Pintu Ketuk Hati	63
Celengan Saldo Nol Rupiah	12
TPA Masjid Agung Baitul Ghafur	45
TOKOPIKA - Sahabat UMKM	51

C. KABUPATEN ACEH BESAR



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Besar memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 34,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi masih belum mencapai skor maksimal (parameter 3). Di sisi lain, variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian memiliki skor capaian sebesar 3% dan variabel-variabel lainnya masih memiliki capaian 0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Besar

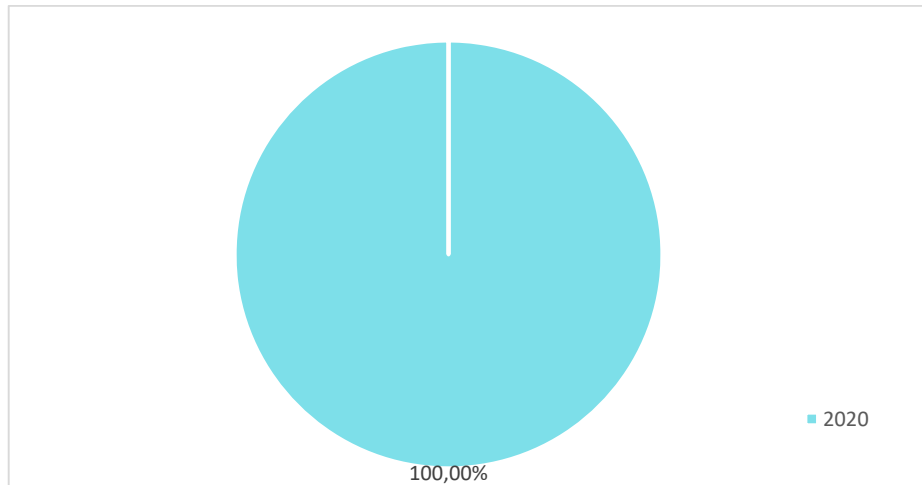
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Besar, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak mengalami perubahan pada sebagian besar indikatornya. Data menunjukkan adanya perubahan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Aceh Barat turun sebesar 21,46% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai penurunan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1,85%. Sementara itu, Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 1,51%. Meskipun demikian, kenaikan yang dicapai belum dapat melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%.

Selain kedua indikator tersebut, indikator capaian lainnya terlihat tidak mengalami perubahan. Indikator-indikator tersebut di antaranya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, nilai Indeks Pembangunan Manusia, Kualitas Peningkatan Perizinan, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, nilai Indeks Pembangunan Manusia sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah, yakni sebesar 0% atau tetap. Sementara itu, indikator lainnya masih belum mencapai standar yang ditetapkan. Sebagai informasi, berdasarkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 0,92% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Selain itu, Penurunan Angka Kemiskinan

ditargetkan mencapai angka 0,02% atau turun sebesar 0,02%, Kualitas Peningkatan Perizinan ditargetkan naik 5%, dan Jumlah Peningkatan Investasi ditargetkan naik sebesar 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

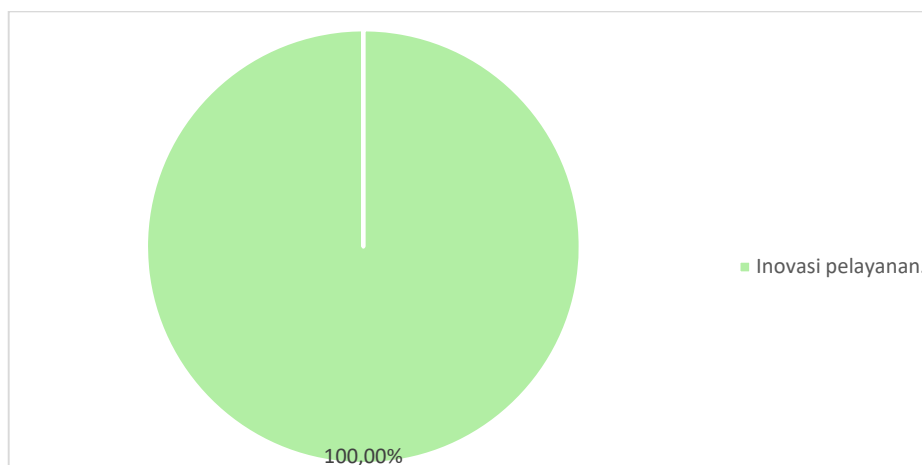
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar telah diterapkan sejak tahun 2020 yaitu sebanyak 7 inovasi. Sementara itu, tidak ada inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019.

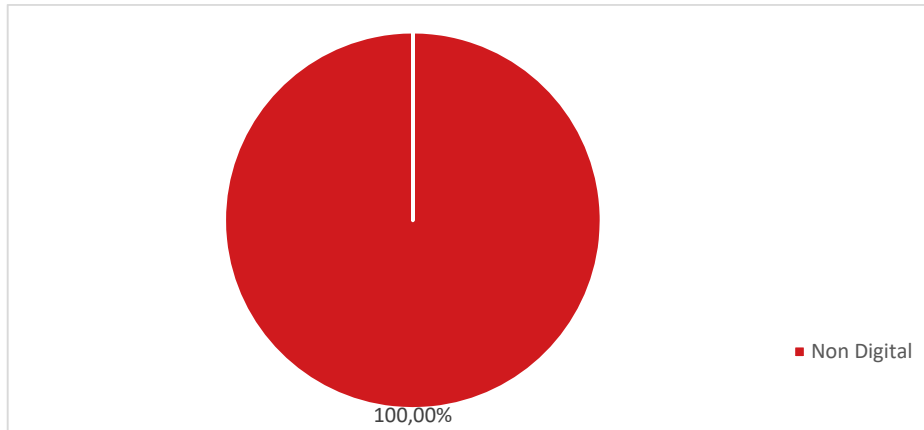
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan bentuknya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar hanya berupa inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 7 inovasi. Sementara itu, inovasi tata kelola pemerintahan dan bentuk inovasi lainnya belum terlapor.

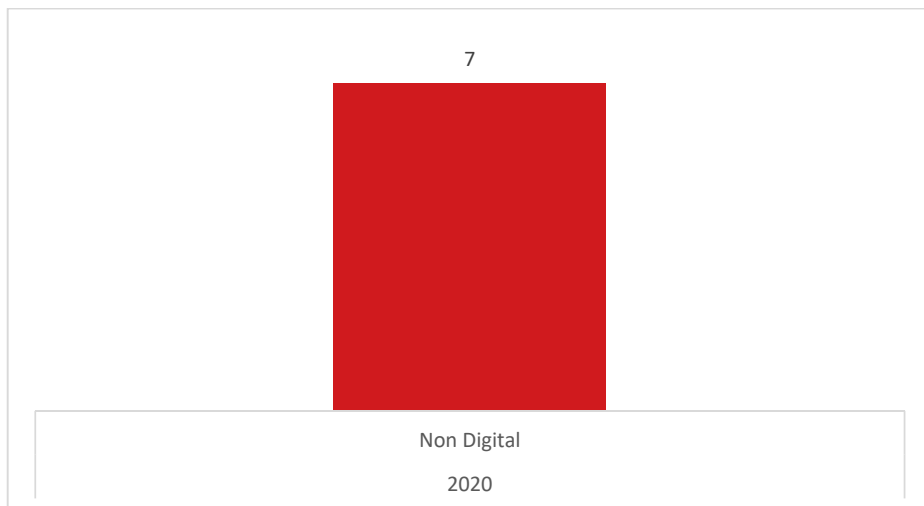
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, seluruh inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Besar merupakan inovasi non digital. Sementara itu, inovasi digital dan inovasi digital belum dilaporkan pada tahun 2021.

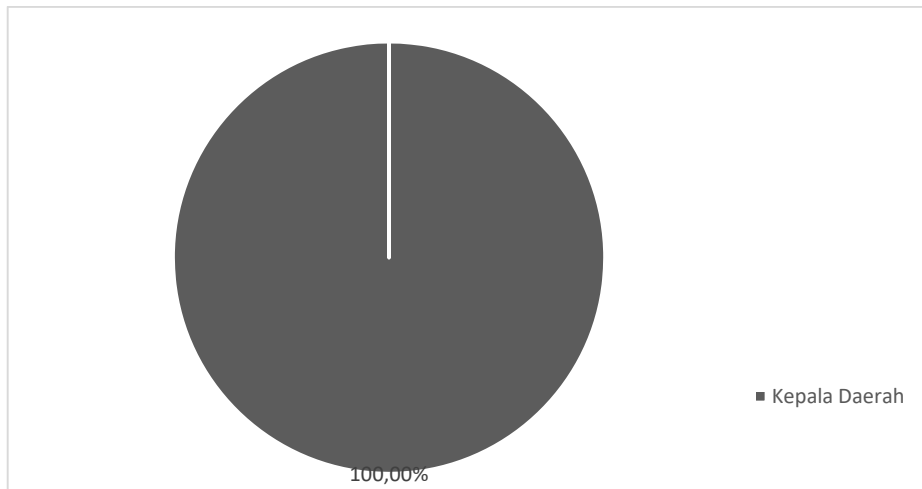
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 tidak ada inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar baik inovasi digital, non digital, maupun teknologi. Seluruh inovasi dilaporkan pada tahun 2020 dan merupakan inovasi non digital. Pada tahun 2020, inovasi digital dan inovasi teknologi belum terlaporkan.

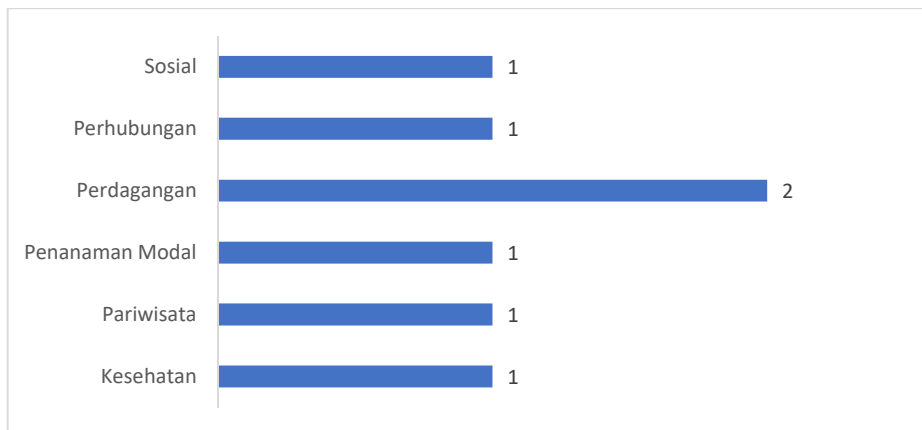
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Besar

Gambar di atas menunjukkan bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh OPD, ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

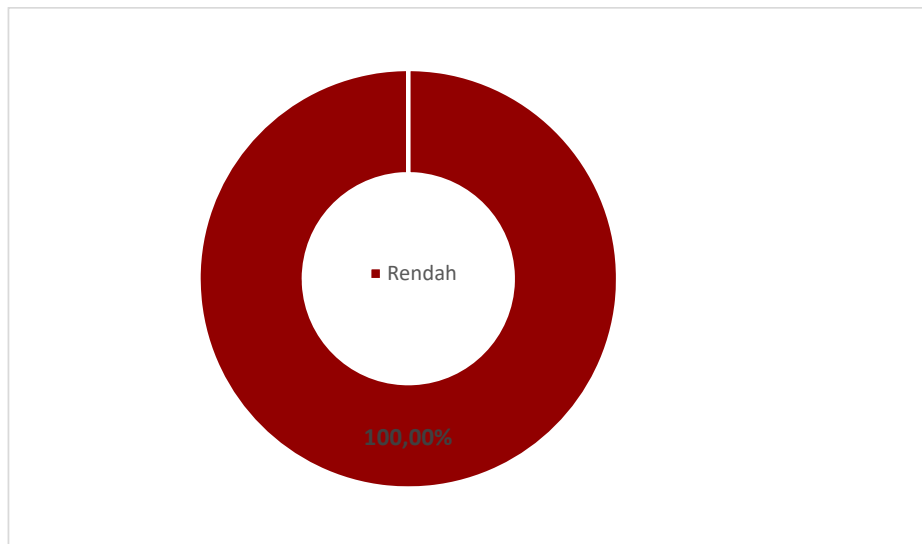
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Besar

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Besar berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dan sosial masing-masing sebanyak 1 inovasi. Inovasi terbanyak yang dilaporkan merupakan inovasi di bidang perdagangan yakni sebanyak 3 inovasi. Sementara itu, terdapat masing-masing 1 inovasi pada urusan perhubungan, penanaman modal, dan pariwisata.

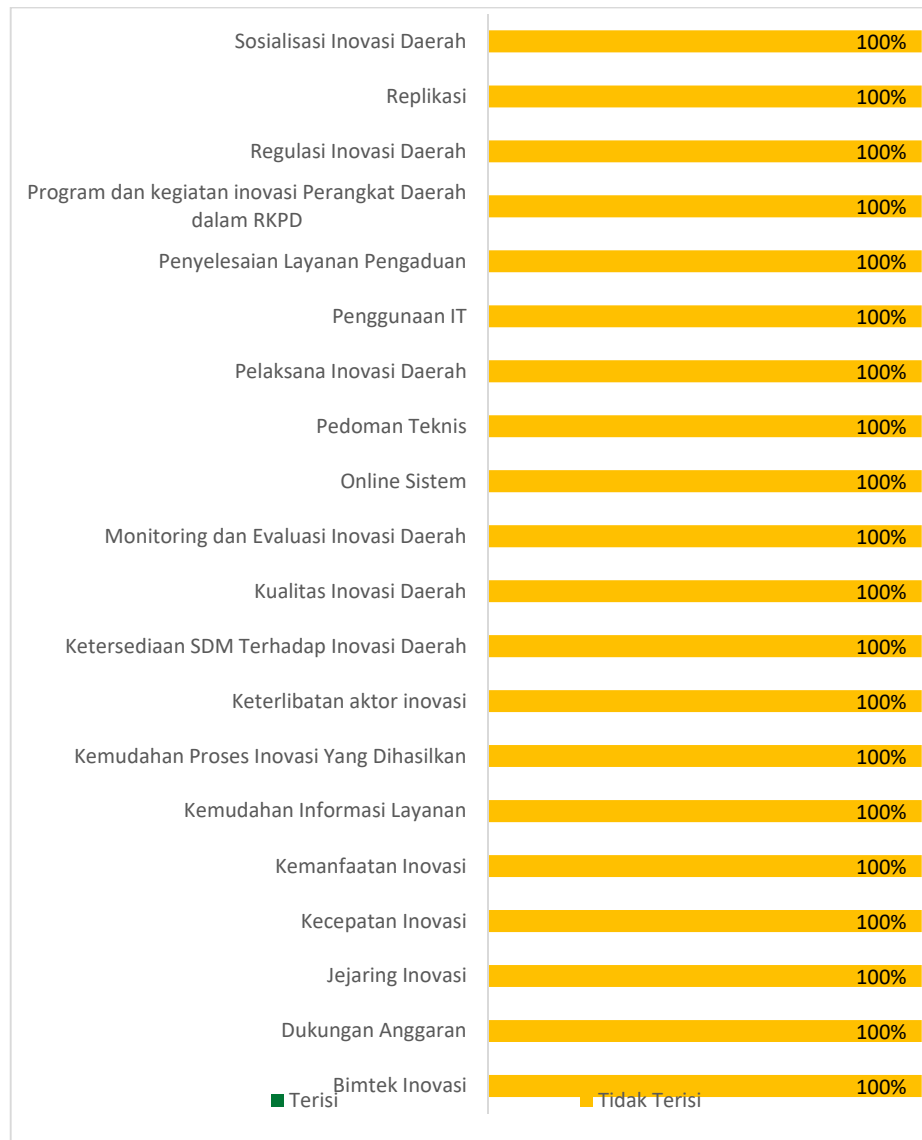
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Besar

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi mencapai skor kematangan rendah. Dengan kata lain, ketujuh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar masih mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

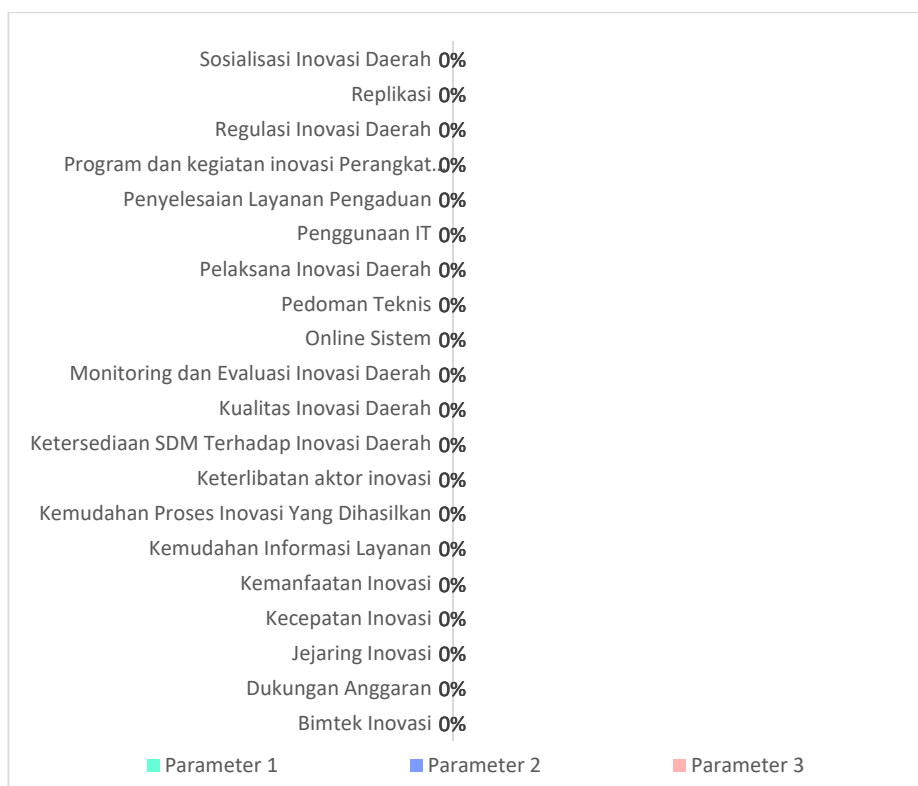
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% sedangkan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, seluruh indikator dalam satuan inovasi daerah masih belum terisi data pendukung yang diperlukan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa seluruh indikator masih belum terisi data pendukung yang diperlukan, baik pada parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu).

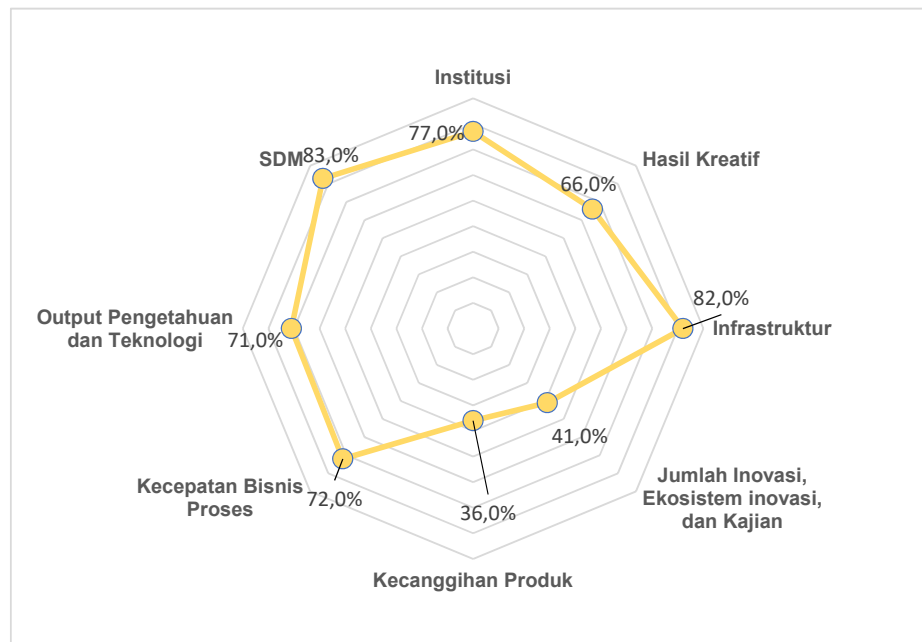
j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Besar beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Besar beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Belanja di Mini Market/Swalayan Bebas Covid-19	0
Restoran Kabupaten Aceh Barat Daya Bebas Covid-19	46
Menginap di Hotel Grand Leuser Kabupaten Aceh Barat Daya Bebas Covid-19	40
Berkunjung dengan Nyaman, Aman, Sehat dan Bersih di sektor Pariwisata Bebas Covid-19	42
Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Berkas (SiTANKAS)	134
Percepatan Pelayanan Penyerahan SK Pensiun Bagi yang memasuki Batas Usia Pensiun” Melalui Layanan Aplikasi	131

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Sitankas (Sistem Pelayanan Kepegawaian Tanpa Berkas)	
Percepatan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Periode April dan Oktober Tahun 2019” Melalui Layanan Aplikasi Sitankas (Sistem Pelayanan Kepegawaian Tanpa Berkas)	136
Gerakan Edukasi Masyarakat Peduli Anak Remaja (GEMPAR)	72
Pos Unit Kesehatan Kerja Tuah Syedara	68
Dusanak (Sudut Sayang Anak)	62
Jum’at Berkah dan Mise (Minuman Sehat)	67
Ketuk Pintu Ketuk Hati	63
Celengan Saldo Nol Rupiah	12
TPA Masjid Agung Baitul Ghafur	45
TOKOPIKA - Sahabat UMKM	51

D. KABUPATEN ACEH JAYA

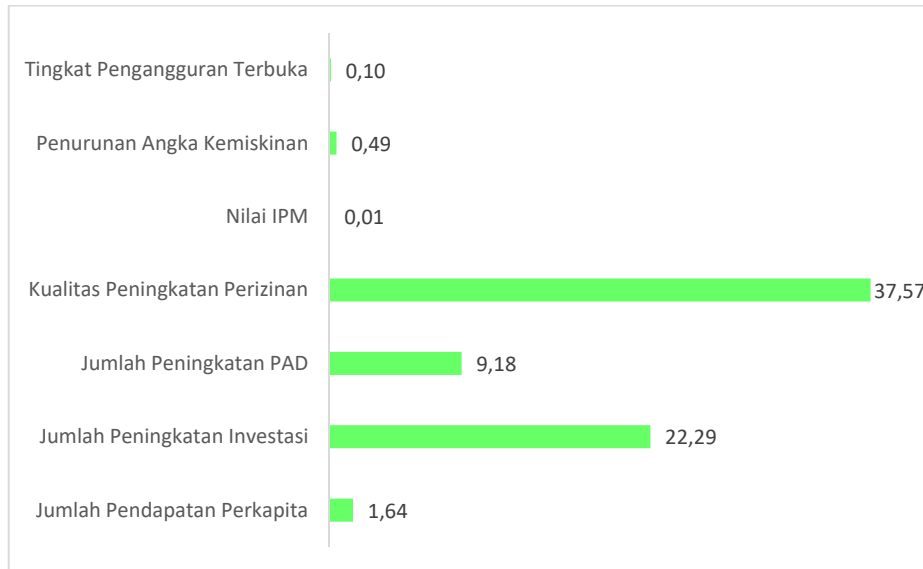


Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Jaya memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian terendah adalah variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dengan skor capaian sebesar 41,0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor

indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



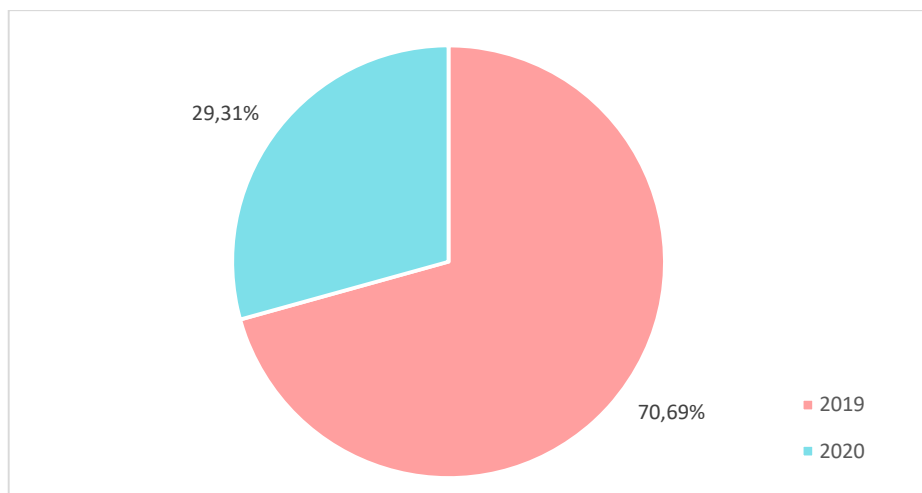
Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Jaya

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Aceh Jaya sudah memiliki capaian yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan keseluruhan indikator capaian yang bernilai positif. Adapun indikator dengan persentase pertumbuhan paling signifikan adalah Kualitas Peningkatan Perizinan, yakni sebesar 37,57%. Nilai tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana indikator Kualitas Peningkatan Perizinan naik 5% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi Kabupaten Aceh Jaya naik sebesar 22,29% pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Capaian ini sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut naik sebesar 0,45%. Selanjutnya, indikator dengan persentase capaian tertinggi ketiga adalah Jumlah Peningkatan PAD dengan persentase kenaikan sebesar 9,18%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah (naik sebesar 8%), angka capaian Kabupaten Aceh Jaya sudah sedikit di atas standar yang ditetapkan. Adapun Jumlah Pendapatan Perkapita terpantau naik sebesar 1,64%, melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut turun sebesar 1,85%. Penurunan Angka Kemiskinan berada pada angka 0,49%, artinya angka kemiskinan

mengalami penurunan sebesar 0,49% dibandingkan periode sebelumnya. Besarnya penurunan tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana angka kemiskinan turun sebesar 0,02%. Demikian pula dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang juga mengalami kemajuan. Data menunjukkan adanya perubahan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 0,10%. Dengan kata lain, jumlah pengangguran pada tahun 2020 menurun sebanyak 0,10% dibandingkan pada tahun 2019. Indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Terakhir, nilai IPM menunjukkan kenaikan yang sangat sedikit, hanya sebesar 0,01%. Meskipun demikian, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana nilai IPM tidak mengalami perubahan (0%) atau tetap.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

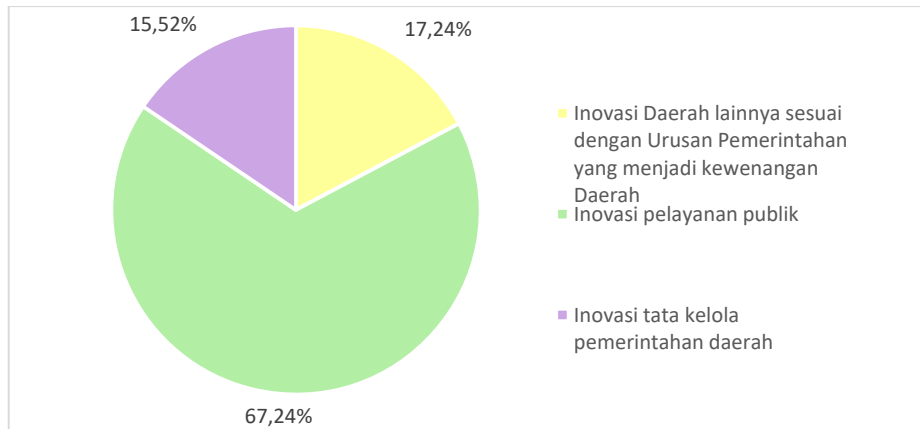
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Jaya telah diterapkan sejak tahun 2019 yaitu sebanyak 41 (70,69) inovasi dari 58 inovasi. Sementara itu, 17 (29,31%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2020.

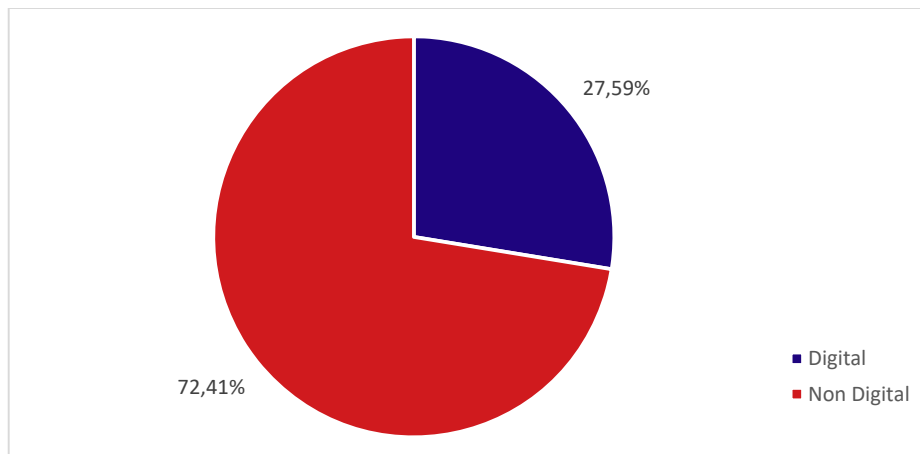
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Jaya terdiri atas inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah, dan inovasi daerah lainnya. Sebagian besar inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebanyak 39 (67,24%) inovasi. Sementara itu, 10 (17,24%) inovasi merupakan inovasi lainnya dan 9 (15,52%) inovasi lainnya termasuk ke dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

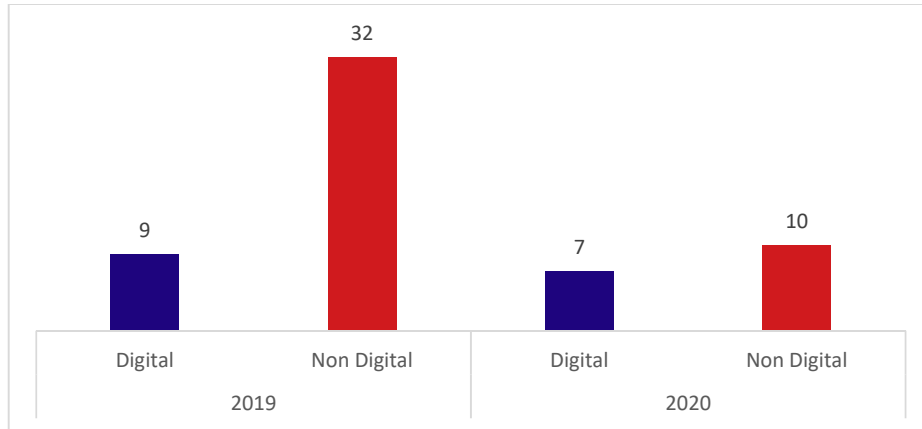


Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Jaya merupakan inovasi non digital. Jumlah inovasi non digital yang dilaporkan adalah sebanyak 42 (72,41%) dari total 58 inovasi. Sementara itu, 16 (27,59%) inovasi

sisanya merupakan inovasi digital dan inovasi teknologi belum dilaporkan pada tahun 2021.

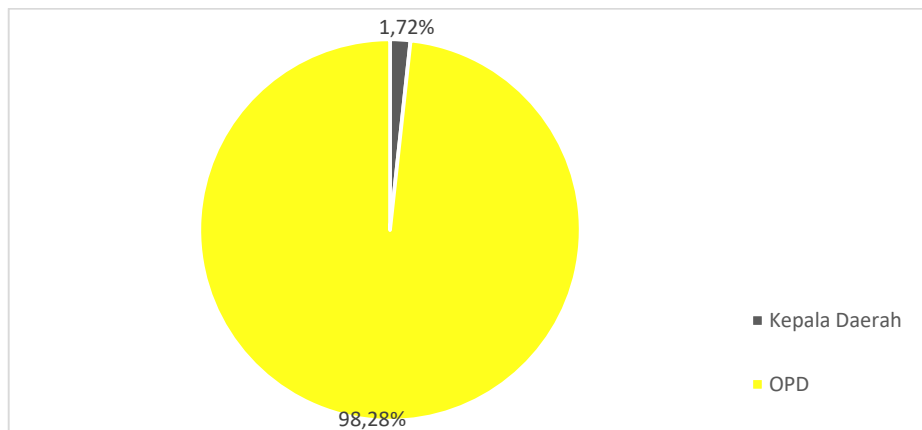
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan yang signifikan antara tahun 2019 dan tahun 2020, khususnya pada inovasi non digital. Pada tahun 2019, jumlah inovasi non digital yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Jaya adalah sebanyak 32 inovasi, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 10 inovasi. Adapun inovasi digital yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 inovasi, kemudian pada tahun 2020 terdapat sedikit perubahan inovasi menjadi 7 inovasi.

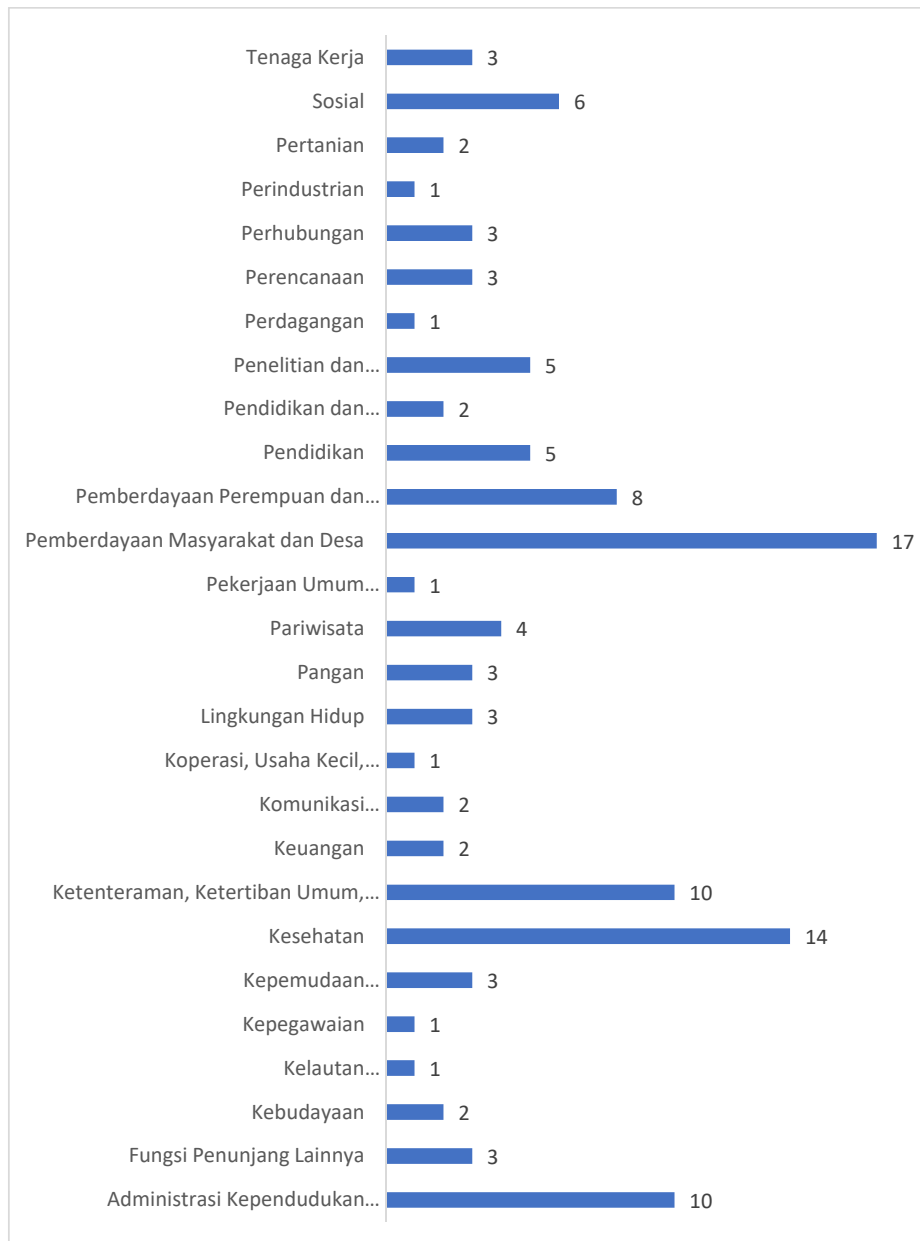
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Jaya

Gambar di atas menunjukkan bahwa inovasi di Kabupaten Aceh Jaya hanya diinisiasi oleh dua unsur, yakni OPD dan Kepala Daerah. Hampir keseluruhan inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh OPD, yakni sebanyak 57 (98,28%) inovasi dari total 58 inovasi. Sementara itu, 1 (1,72%) inovasi sisanya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

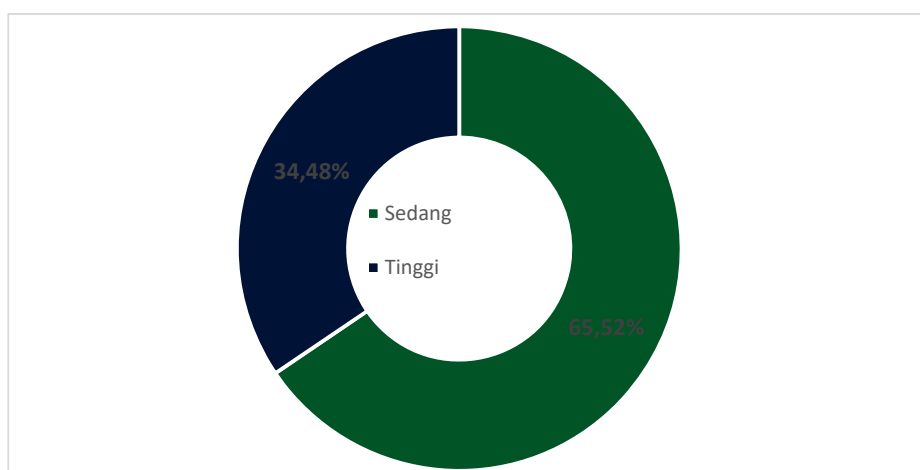
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Jaya

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Jaya tersebar pada berbagai urusan pemerintahan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, di antaranya adalah urusan sosial sebanyak 6 inovasi, pendidikan sebanyak 5 inovasi, pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 1 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebanyak 10 inovasi, serta urusan kesehatan sebanyak 14 inovasi. Jumlah inovasi terbanyak yang dilaporkan adalah sebanyak 17 inovasi, yang merupakan inovasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selanjutnya, terdapat 10 inovasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 8 inovasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta 5 inovasi pada urusan penelitian dan pengembangan. Selain itu, 4 inovasi termasuk dalam urusan pariwisata dan terdapat masing-masing 3 inovasi pada urusan tenaga kerja, perhubungan, perencanaan, pangan, lingkungan hidup, kepemudaan dan olah raga, serta fungsi penunjang lainnya. Adapun urusan pertanian, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informatika, keuangan, serta kebudayaan memiliki jumlah inovasi sebanyak 2 inovasi pada masing-masing urusan. Terakhir, terdapat masing-masing 1 inovasi pada urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, kepegawaian, serta kelautan dan perikanan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

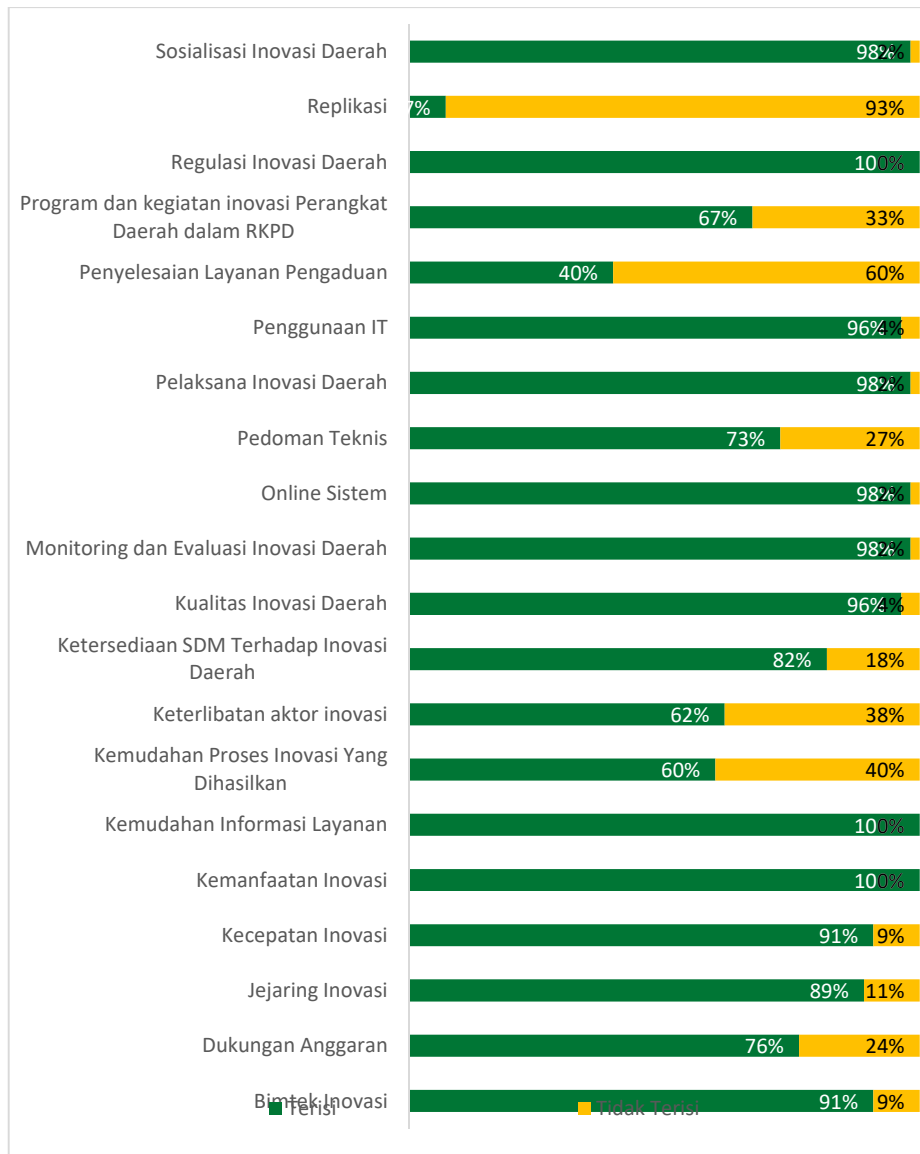


Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Jaya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tidak ada yang mencapai skor kematangan rendah. Inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Jaya telah mencapai skor kematangan sedang dan tinggi.

Sebagian besar inovasi yang dilaporkan mencapai skor kematangan sedang, yakni sebanyak 38 (65,52%) inovasi. Sementara itu, 20 (34,48%) inovasi sisanya telah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

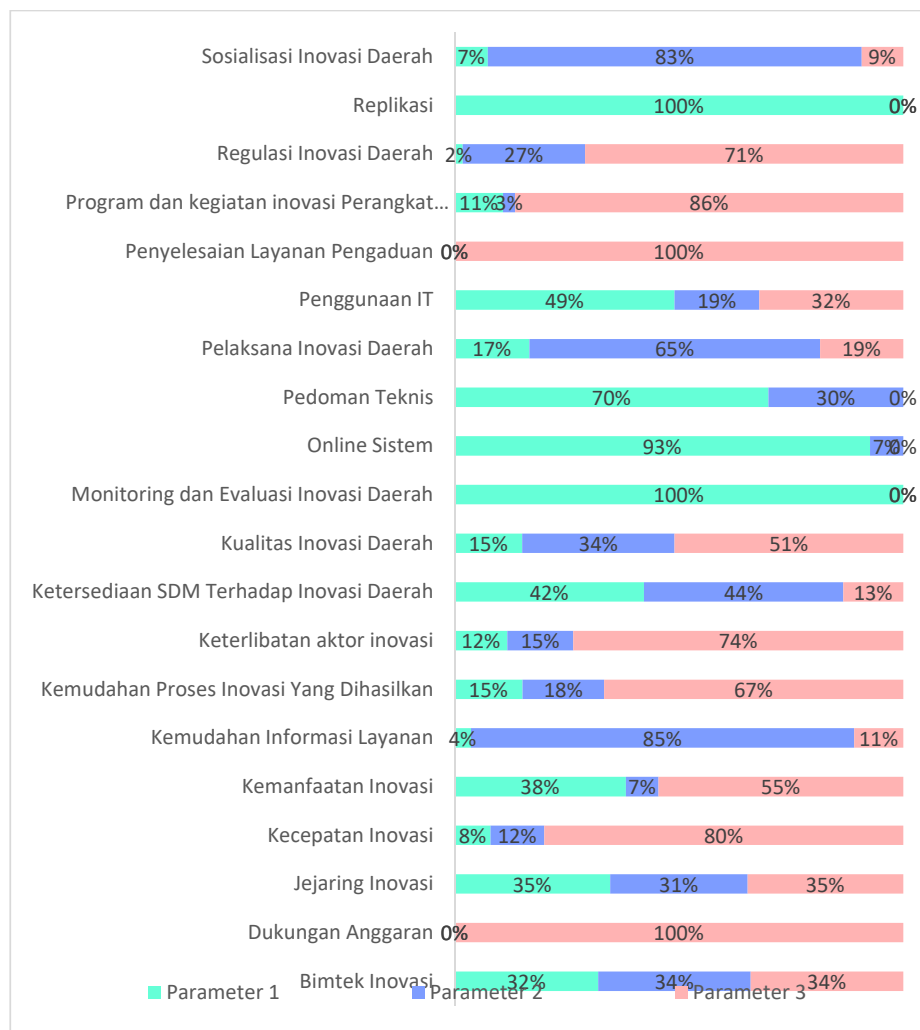
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya

Dari 58 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Jaya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 18,82% sedangkan 81,18% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Jaya telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sementara itu, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 7% artinya 7% dari keseluruhan inovasi terlapor telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan Dukungan Anggaran, masing-masing sebesar 100%. Artinya, seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Informasi Layanan sebesar 85%. Artinya 85% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi serta Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator-indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Jaya beserta Skor Kematangannya

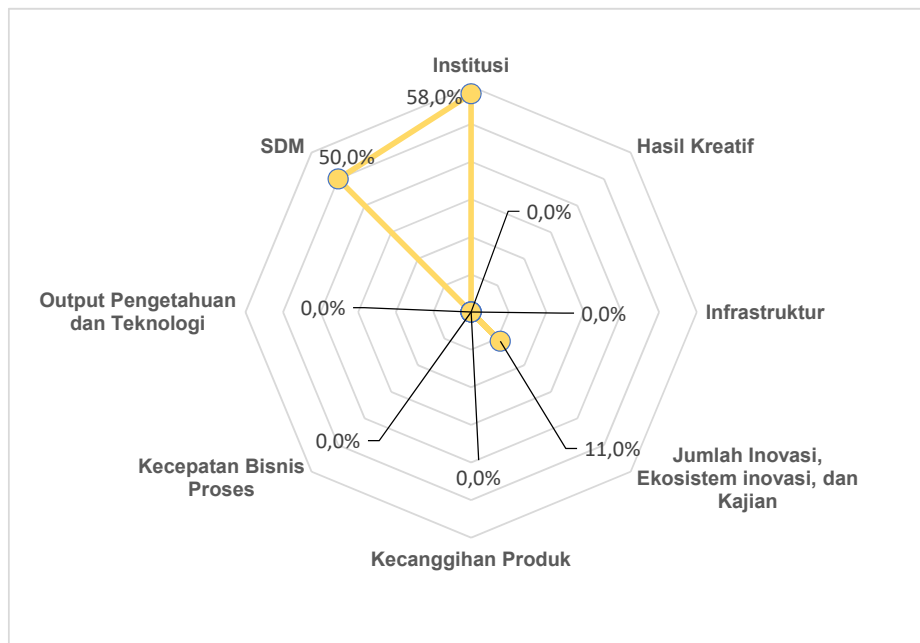
Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Jaya beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
LAYANG PHON (Layanan Pemangkasan/Penebangan Pohon)	109
Aceh Jaya Cerdas	108
DOMPOL (DOKUMEN KEPENDUDUKAN PUSKESMAS ONLINE)	121
GaSi GaSeh TEUMAREM (Gampong Siaga Keluarga Sehat)	105
GeLaS MaMie (Gerakan Lansia Sehat Masyarakat Gampong Alue Mie)	108
KADOKPILUGam (Kunjungan Aparatur Jemput Dokumen Pencatatan Sipil Untuk Gampong)	99
LABA AJA (LAHIR BAYI AKTE JADI)	98
PEREGAM (Petugas Registrasi Gampong)	109
PENSISPENDAT SO TAN GIS (PEMBUATAN SISTEM PENGELOLAAN DATA BASE DAN INFORMASI JEMBATAN BERBASIS WEBGIS)	97
SISBERMADU (Sistem Informasi Sewa Bersama Terpadu)	107
WISMU (WISUDA IMUNISASI)	64
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya (Lilin Opera)	92
IPREH RAJA (Informasi Pembangunan Terintegrasi Wisata Halal Rakyat Aceh Jaya)	95
FORMASI (Futsal Optimal Bersama Masyarakat Meraih Prestasi)	97

Nama Inovasi	Skor Kematangan
PEUKONG ADAT NGOEN BUDAYA (PEUDAB)	108
MESEKAT MANIS (Menggerakkan Empati Masyarakat untuk Melengkapi Imunisasi Anak dengan Wisuda dan Sertifikat Imunisasi)	72
TAMPAN BERSIN (Pembuatan Sampan Fiber Bermesin)	77
SALEUM PEUT SA	103
SPIDOL (Surat Pindah Datang Online)	99
PEMUDA KEKAR (Pemutakhiran Data Kartu Keluarga)	105
DISDUKCAPIL SIAGA (Disdukcapil siap antar dokumen warga)	102
Penyediaan Tunjangan Konsumsi Santri (PINGAN SANTRI)	99
Anda cari Kerja Kami Solusinya (ANDELUSI)	97
Asistensi Sosial Lanjut Usia Resiko Tinggi (Aslureti)	105
PENINGKATAN EKONOMI DENGAN OBJEK WISATA ISLAMI PANTAI (PENG TAEK DENGAN OWIP)	75
MATA SEUMANTOK (RUMAH DATA PAYA SEUMANTOK)	57
RADAR (Perawat Terstandarisasi)	73
SABUKA (SAWEU BUET KADER)	78
SAGITA (SEHAT GIGI BALITA)	71
BAKSO HAJI SATPOL PP, WH dan LINMAS	105
SISTEM INOVASI DAN KELITBANGAN ACEH JAYA (SI-ABANG AJAY)	122
PELONCAT (Penerbitan Dokumen Lanjut Usia dan Orang Cacat)	99
Uji Petik Kendaraan Bermotor terhadap Penumpang dan Barang (Upeti Perang)	89
SIRUP KELAPA (INOVASI SIRKEL)	71
SITAMPAN JAYA (SISTEM INFORMASI KETAHANAN PANGAN ACEH JAYA)	88
REKAM MEDIK ELEKTRONIK (RME)	84
Program Wisata Edukasi Konservasi Penyu Aroen Meubanja (PENYU)	64
LARAS (LAYANAN REHABILITASI SOSIAL)	101
TUK BEDUK BA'WA (TAMONG UE KANTOE BEK DUK BAK WARONG)	108
Forum Anak Aceh Jaya (FORAYA)	93
Sosialisasi Ketertiban Umum dan Syari'at sesuai dengan Qanun (SALEUM RAQAN)	106
Teknologi Pupuk Organik Cair (T-POC)	92
Majelis Ta'alumul Qur'an Aceh Jaya (MATA RAYA)	104
MEDIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA ACEH JAYA (MANTAP BAJAY)	105
PENINGKATAN INOVASI ACEH JAYA (PENA JAYA)	109
PEDULI PTM (Penyakit Tidak Menular)	60

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Goldamil (Skreening Golongan Darah Pada Ibu Hamil Trimester)	70
Kelas Ayah	74
PEUCARONG GAMPONG (Pecerdik Aparatur Organisasi Pemerintahan Gampong)	70
PODIUM BALITA SEHAT	67
Nacobaka (Pembinaan Cabang Olahraga Binaan Kabupaten Aceh Jaya)	96
KAWAN (Kesbangpol Ajak Warga untuk Anti Narkoba)	81
Camat Saweu Gampong (CAT SAGO)	72
KASIHKU (Gerakan Sehat Ibu Hamil Pante Kuyun)	71
Wisata Nilam Sampoiniet	82
Kosinyasi Proses kenaikan pangkat PNS	89
USIAGA (UGD Siap AntarJaga 24 Jam)	85
Andesting (Advokasi Desa Bebas Stunting)	74

E. KABUPATEN ACEH SELATAN



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Selatan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 50,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel SDM cukup mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian terendah adalah variabel Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk,

Kecepatan Bisnis Proses, serta Output Pengetahuan dan Teknologi dengan skor capaian sebesar 0%. Dengan kata lain, masih belum ada capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut dan berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Selatan

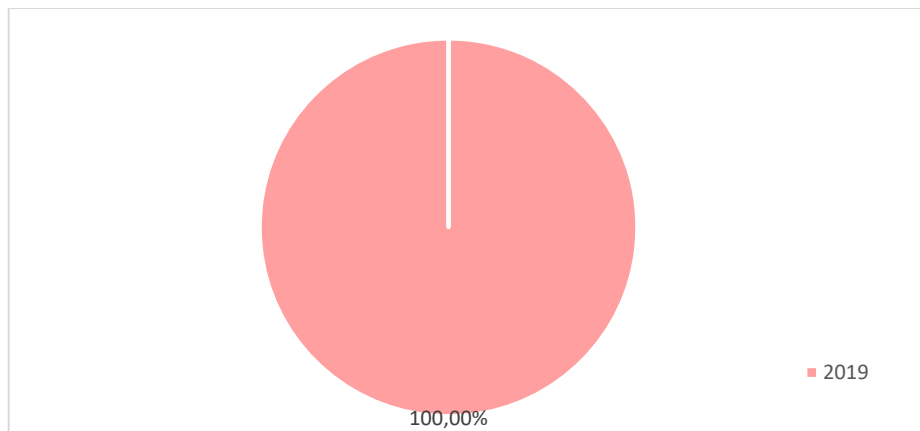
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Aceh Selatan masih belum memiliki capaian yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator capaian yang masih bernilai negatif. Jumlah Peningkatan Investasi menjadi indikator dengan tingkat penurunan terbesar, yakni sebesar 75,68%. Nilai tersebut belum melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana indikator Jumlah Peningkatan Investasi seharusnya naik sebesar 0,45% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan juga turun sebesar 16,62% pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Capaian ini masih belum melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana terdapat kenaikan sebesar 5% pada indikator tersebut. Demikian pula dengan Jumlah Peningkatan PAD, di mana indikator ini mengalami penurunan sebesar 4,00%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah (naik sebesar 8%), angka capaian Kabupaten Aceh Selatan masih di bawah standar yang ditetapkan. Selain tiga indikator tersebut, satu indikator lainnya yakni Jumlah Pendapatan Perkapita juga memiliki besaran capaian yang bernilai negatif. Jumlah Pendapatan Perkapita terpantau turun sebesar 1,18%. Meskipun demikian,

capaian Kabupaten Aceh Selatan sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut turun sebesar 1,85%.

Adapun indikator-indikator yang memiliki capaian dengan nilai positif adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Selatan terpantau mengalami kenaikan sebesar 0,04%. Dengan kata lain, jumlah pengangguran pada tahun 2020 menurun sebanyak 0,04% dibandingkan pada tahun 2019. Capaian yang diperoleh telah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Selanjutnya, Penurunan Angka Kemiskinan menunjukkan angka 0,22%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Selatan menurun sebesar 0,22% dan sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Sebagai informasi, standar yang ditetapkan adalah penurunan angka kemiskinan sebesar 0,02%. Terakhir, nilai IPM menunjukkan kenaikan yang cukup sedikit, yakni 0,22%. Meskipun demikian, kenaikan tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana nilai IPM tidak mengalami perubahan (0%) atau tetap.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, hanya ada 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan dan telah diterapkan sejak tahun 2019. Masih belum terdapat inovasi yang diterapkan sejak tahun 2020.

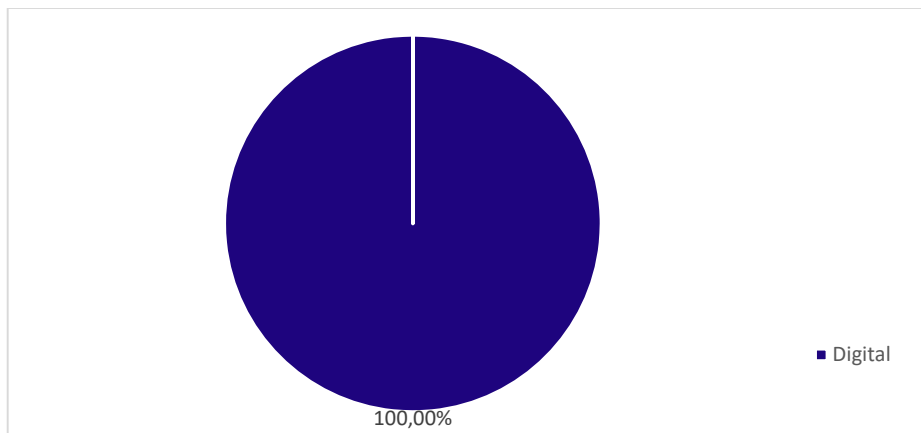
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan bentuknya, satu-satunya inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, inovasi pelayanan publik dan inovasi lainnya belum dilaporkan.

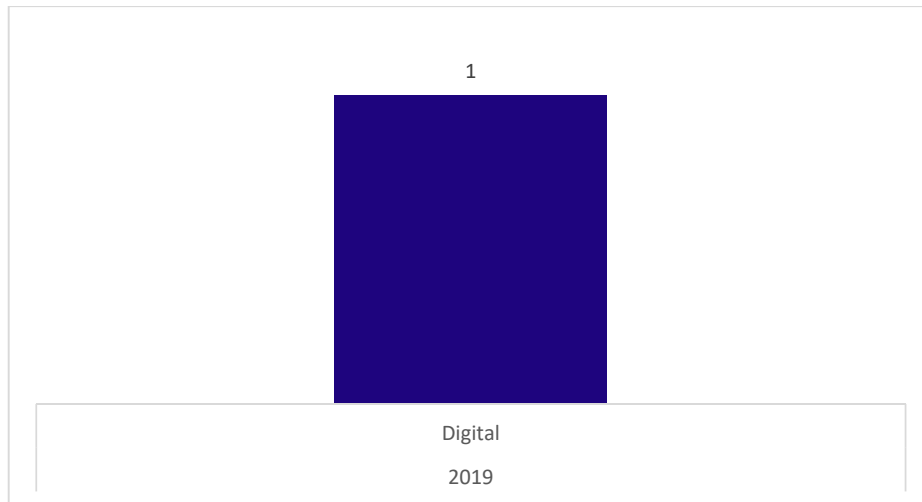
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, satu inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan merupakan inovasi digital. Sementara itu, inovasi non digital dan inovasi teknologi belum dilaporkan pada tahun 2021.

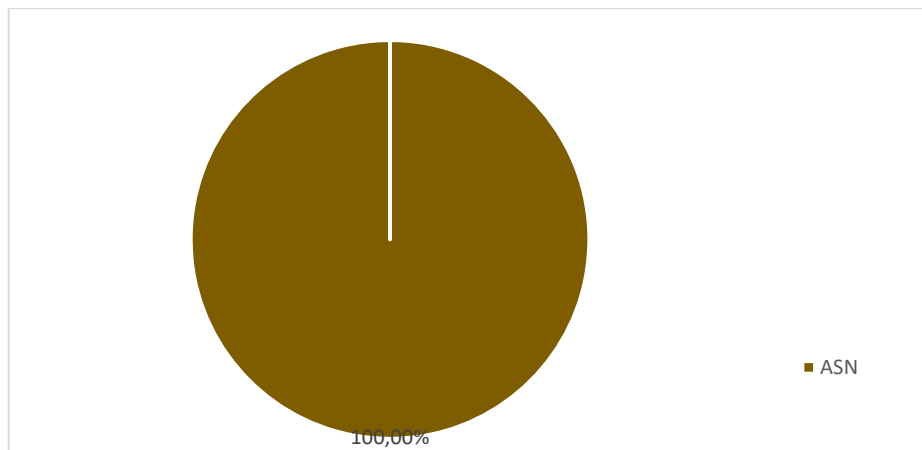
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak 1 inovasi pada tahun 2019 dan merupakan inovasi digital.

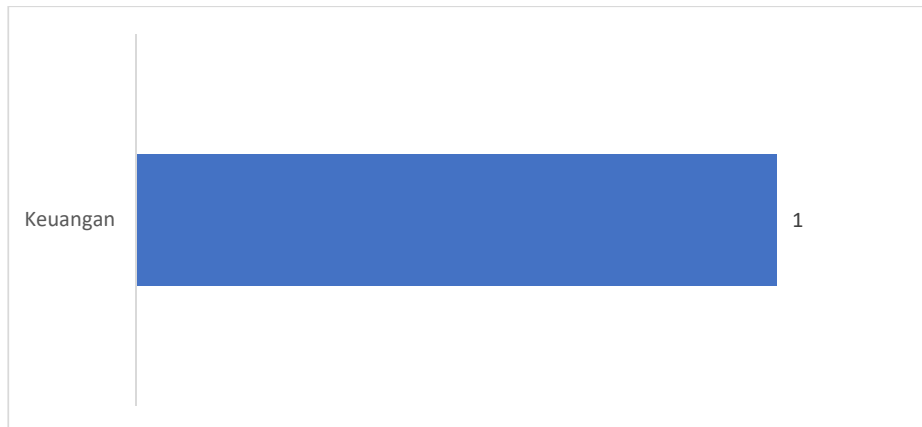
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Selatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa inovasi di Kabupaten Aceh Selatan hanya diinisiasi oleh satu unsur, yakni ASN dengan 1 inovasi. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh OPD, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

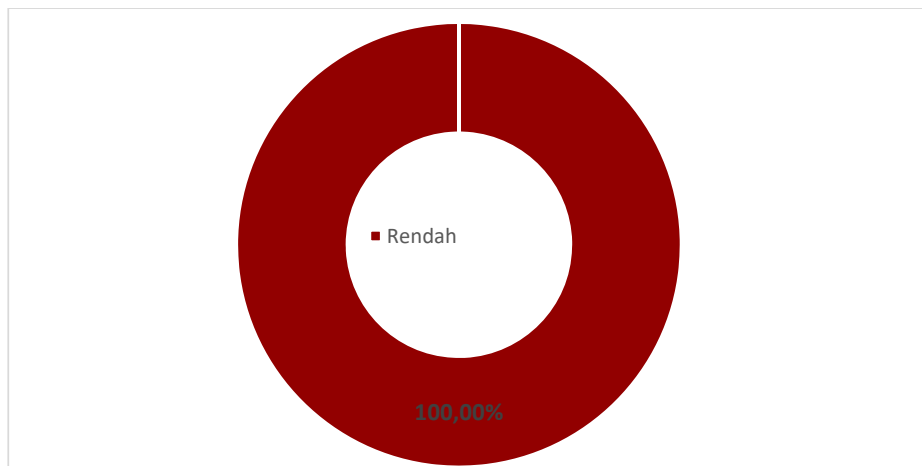
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Selatan

Bagan di atas menunjukkan bahwa inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Selatan termasuk dalam urusan keuangan. Sementara itu, belum ada inovasi yang dilaporkan terkait urusan wajib pelayanan dasar.

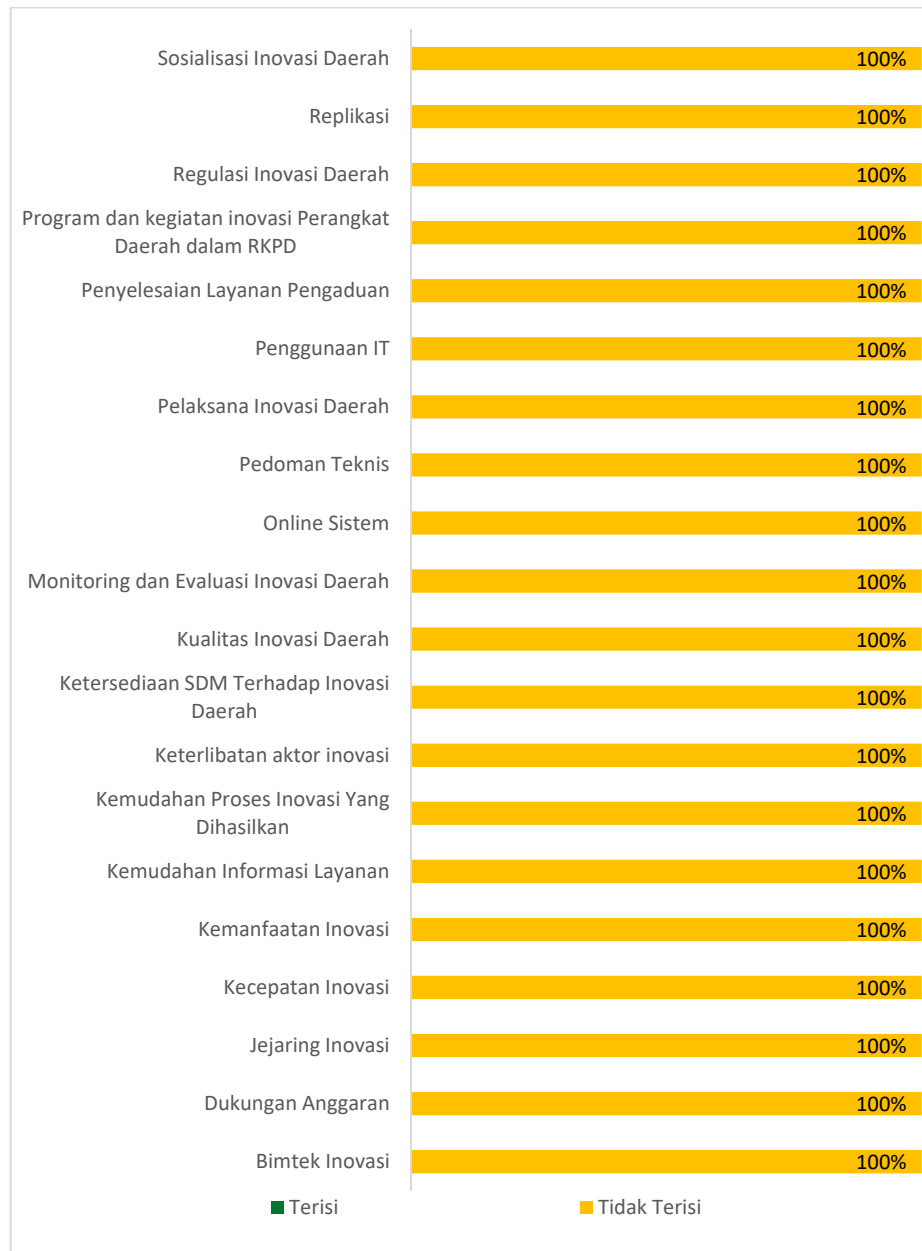
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Selatan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

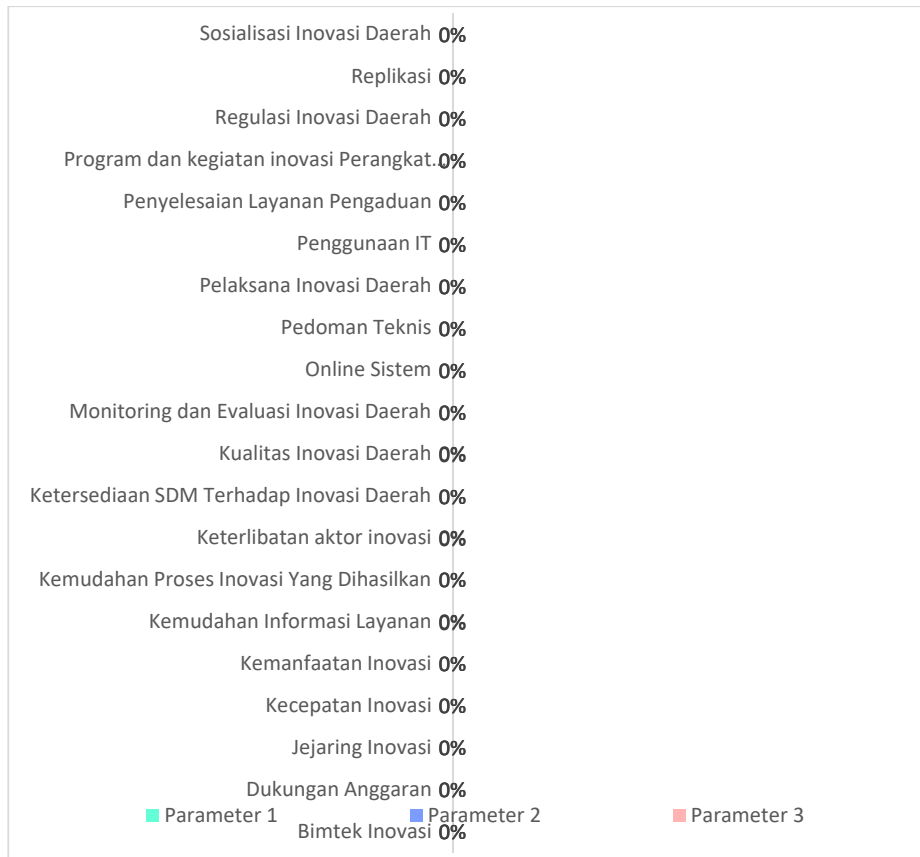
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan

Satu inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar memiliki rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah sebesar 100%, sedangkan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, seluruh indikator dalam satuan inovasi daerah masih belum terisi data pendukung yang diperlukan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan

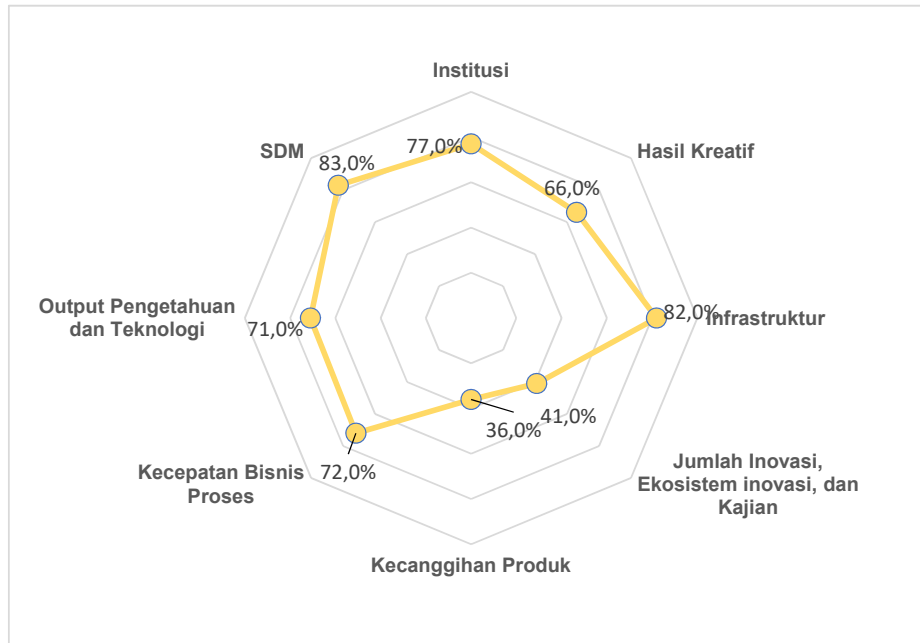
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa seluruh indikator masih belum terisi data pendukung yang diperlukan, baik pada parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu).

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Selatan beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ACTION PLAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK MELALUI NOTIFIKASI SMS KEPADA AUDITAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN	0

F. KABUPATEN ACEH SINGKIL



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Singkil memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian terendah adalah variabel Kecanggihan Produk, dengan skor capaian sebesar 36,0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

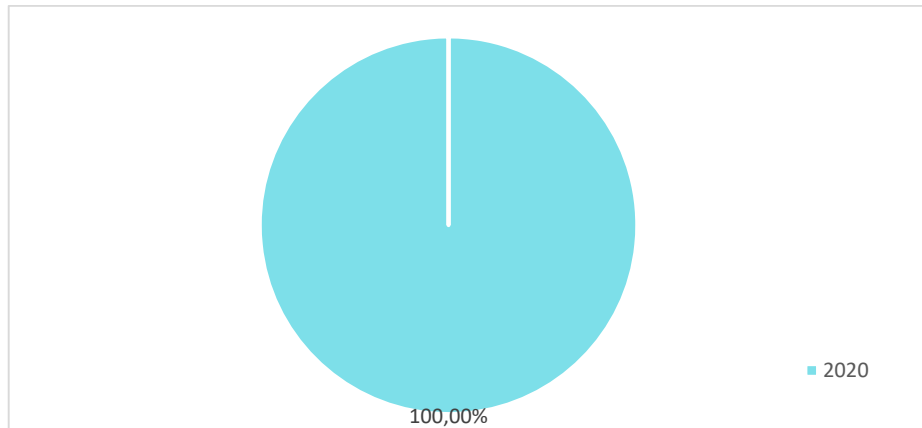
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil tidak melakukan pengisian dan tidak ada data pendukung pada seluruh indikator - indikator pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

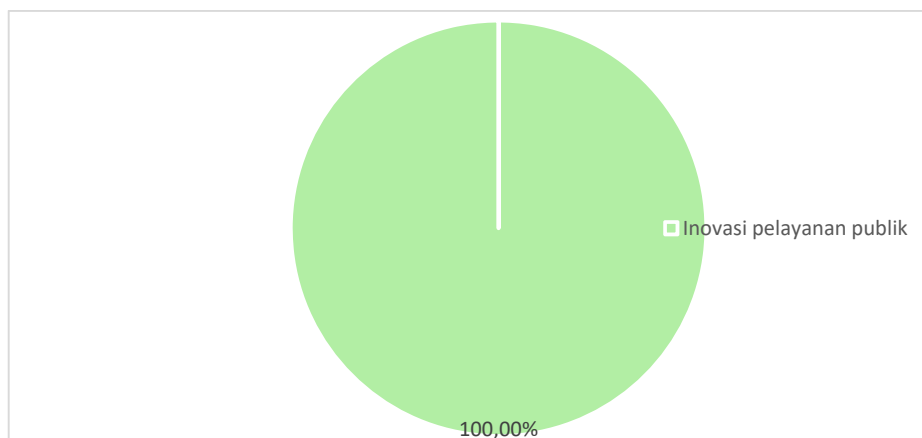
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Singkil telah diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 4. Sementara itu, belum ada inovasi yang diterapkan sejak tahun 2019.

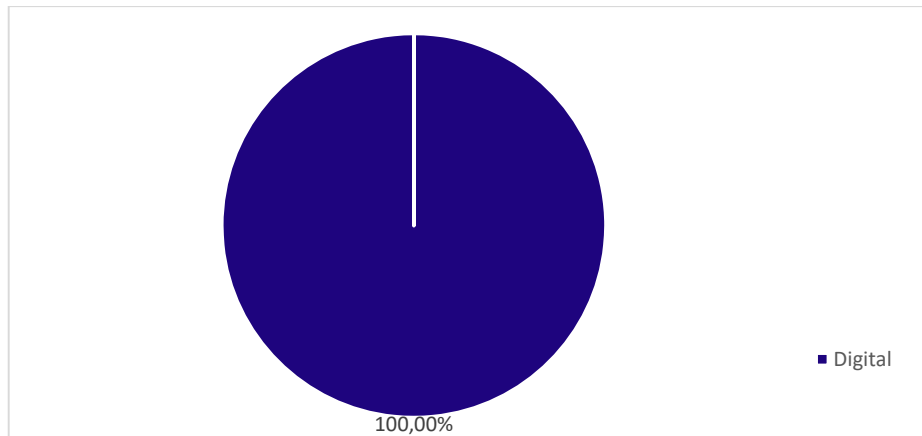
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan bentuknya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Singkil merupakan inovasi pelayanan publik. Sementara itu, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya belum terlapor.

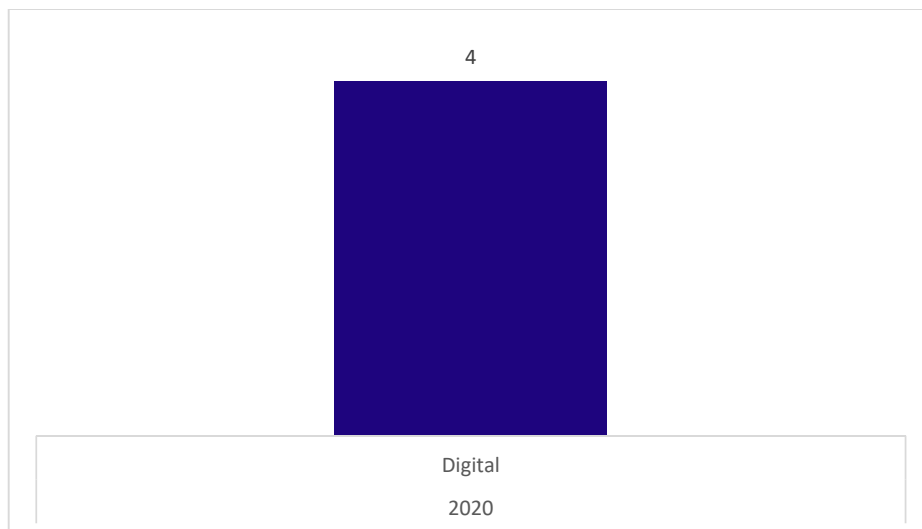
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, seluruh inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Singkil merupakan inovasi digital. Sementara itu, inovasi non digital dan inovasi teknologi belum dilaporkan pada tahun 2021.

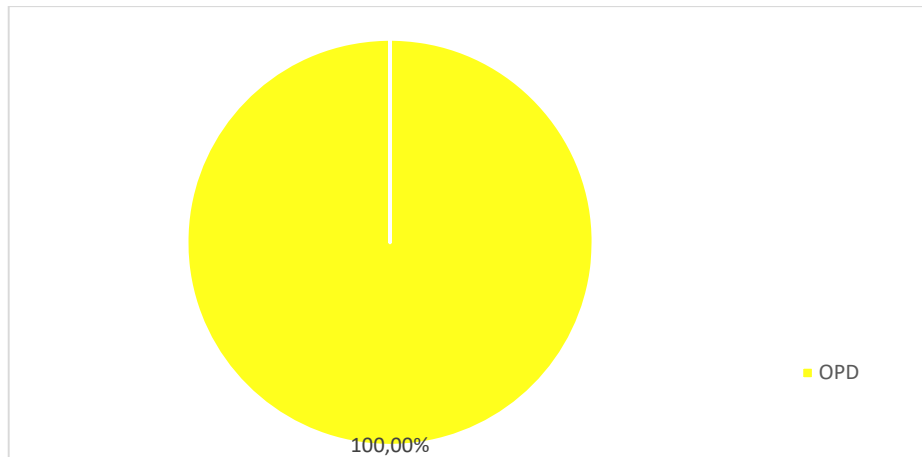
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Singkil

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Singkil adalah sebanyak 4 inovasi pada tahun 2020 dan merupakan inovasi digital.

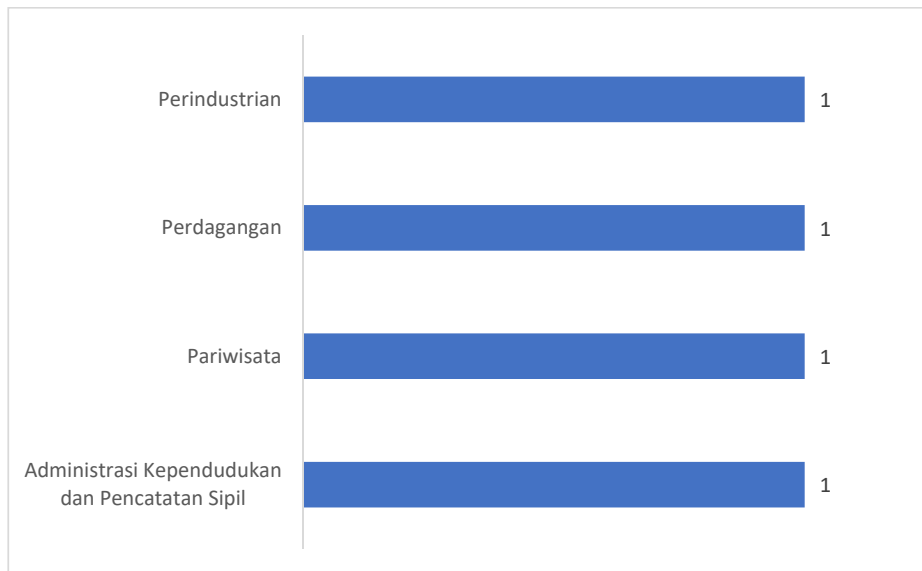
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Singkil

Gambar di atas menunjukkan bahwa inovasi di Kabupaten Aceh Selatan hanya diinisiasi oleh satu unsur, yakni OPD dengan jumlah inovasi sebanyak 4 inovasi. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

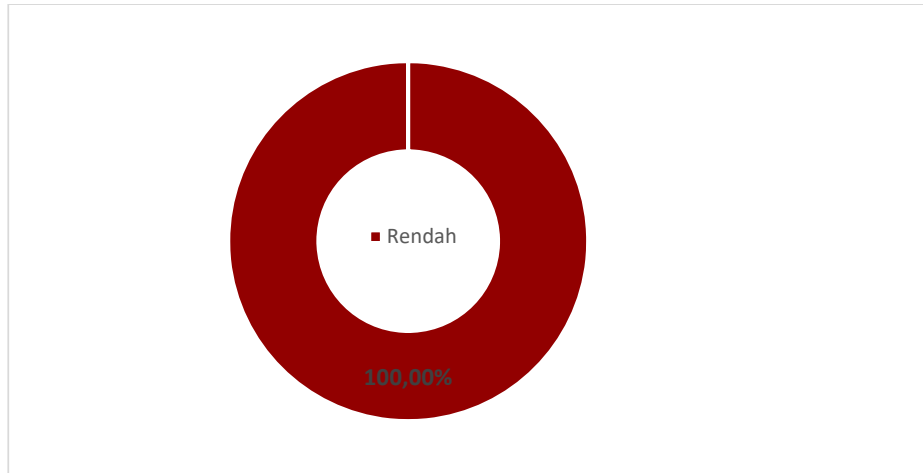


Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Singkil

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Singkil tersebar pada empat urusan pemerintahan. Keempat urusan pemerintahan tersebut di antaranya adalah perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, dengan jumlah inovasi masing-masing 1 inovasi. Sementara itu, belum ada inovasi terlapor terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar.

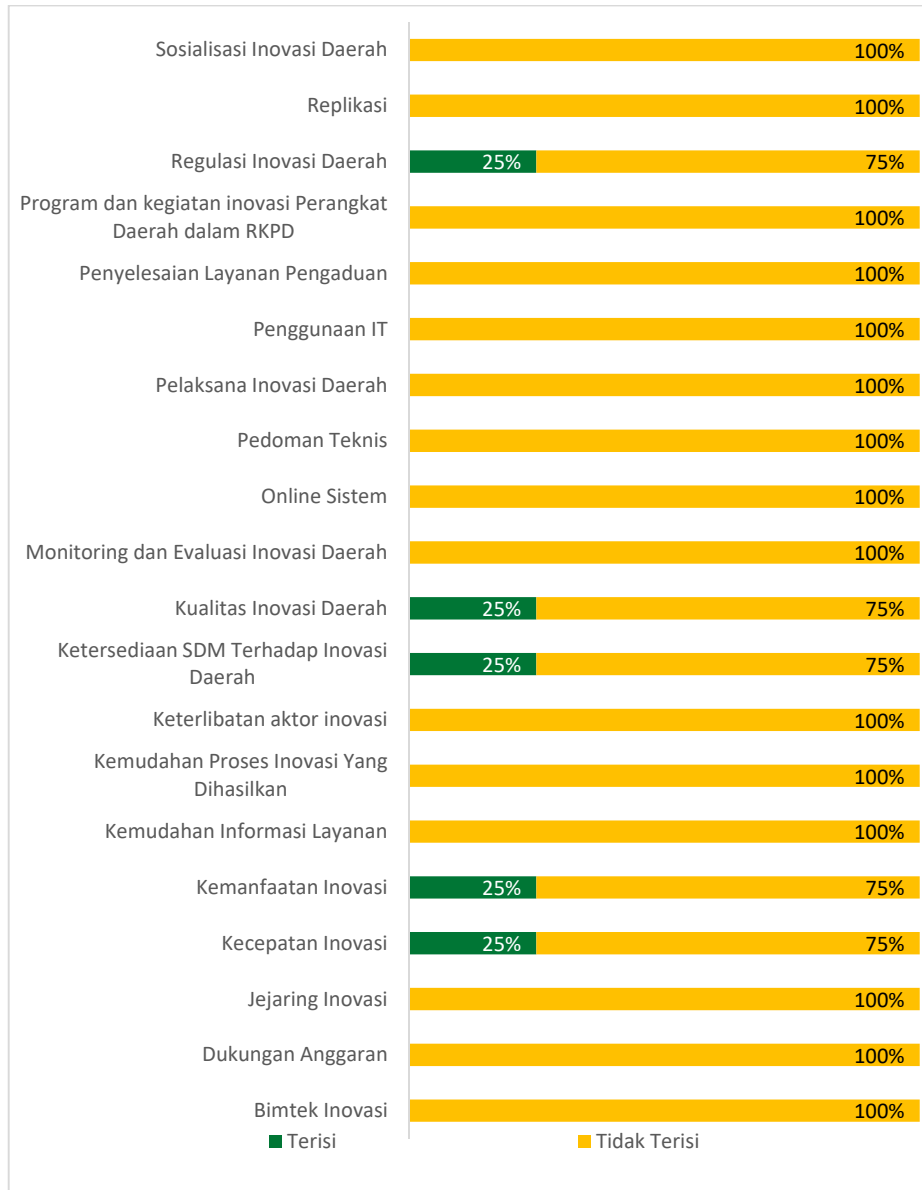
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Singkil

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

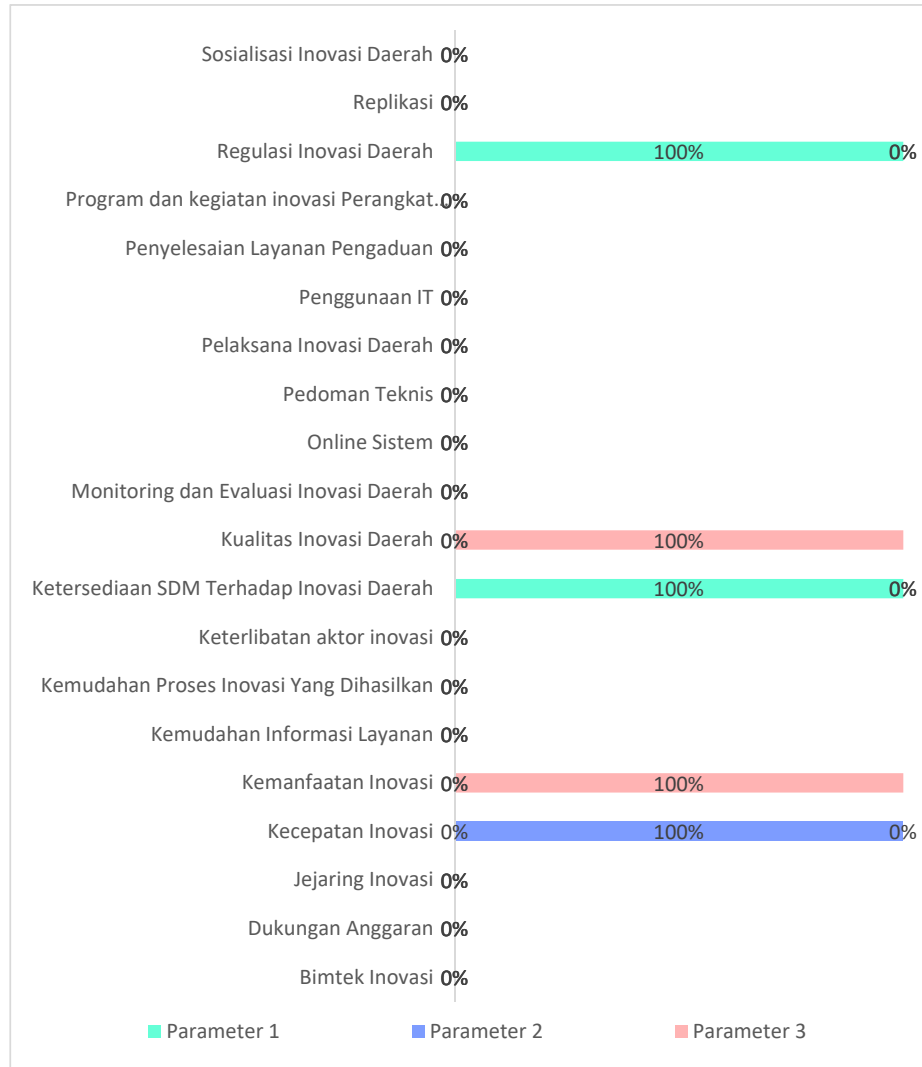


Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Dari 58 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Singkil, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 93,75% sedangkan 6,25% lainnya telah terisi data pendukung. Dapat disimpulkan bahwa masih sedikit inovasi yang sudah terisi data pendukung yang diperlukan. Terdapat beberapa indikator dengan tingkat keterisian 25%, yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, dan Kecepatan Inovasi. Artinya,

25% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Singkil telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sementara itu, indikator-indikator lainnya menunjukkan angka keterisian sebesar 0%. Dengan kata lain, belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) tertinggi adalah Kualitas Inovasi Daerah dan Kemanfaatan Inovasi, masing-masing sebesar 100%. Artinya, seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga.

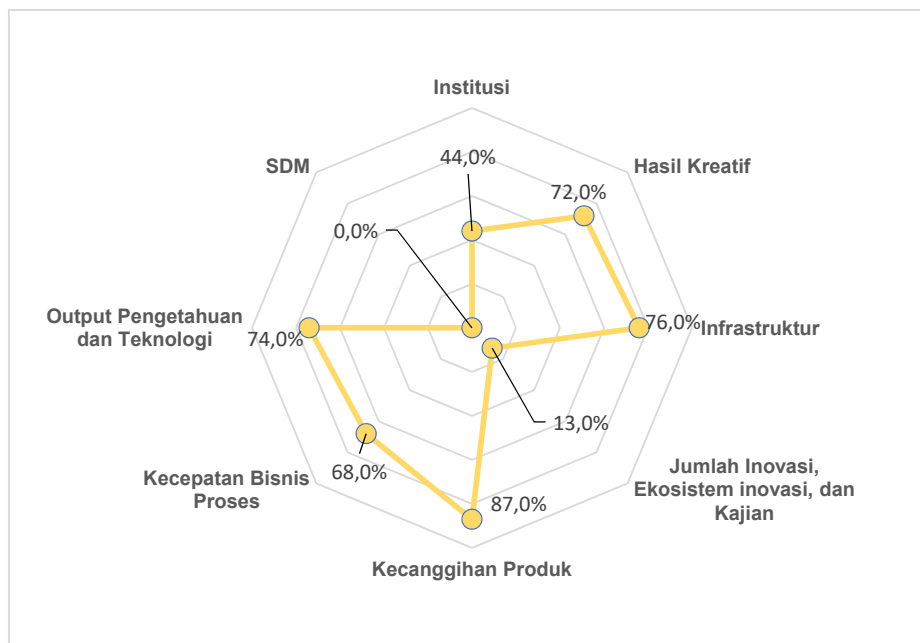
Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator-indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Singkil beserta Skor Kematangannya

Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Singkil beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
destinasi wisata aceh singkil di era New Normal covid 19	0
nginap di hotel bebas Covid 19	0
Belanja Aman di Pasar Swalayan era New Normal Covid 19	0
Pelanduk Asap	42

G. KABUPATEN ACEH TAMIANG



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 87,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Kecanggihan

Produk sudah mencapai skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian terendah adalah variabel SDM, dengan skor capaian sebesar 0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum terpenuhi atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator pada Kabupaten Aceh Tamiang mengalami peningkatan. Hanya terdapat dua indikator yang mengalami penurunan, yaitu Kualitas Peningkatan Perizinan dan Jumlah Peningkatan PAD. Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 10,04%. Capaian tersebut masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana seharusnya Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 5%. Sementara itu, Jumlah Peningkatan PAD juga menurun sebesar 1,30%. Nilai tersebut juga belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%.

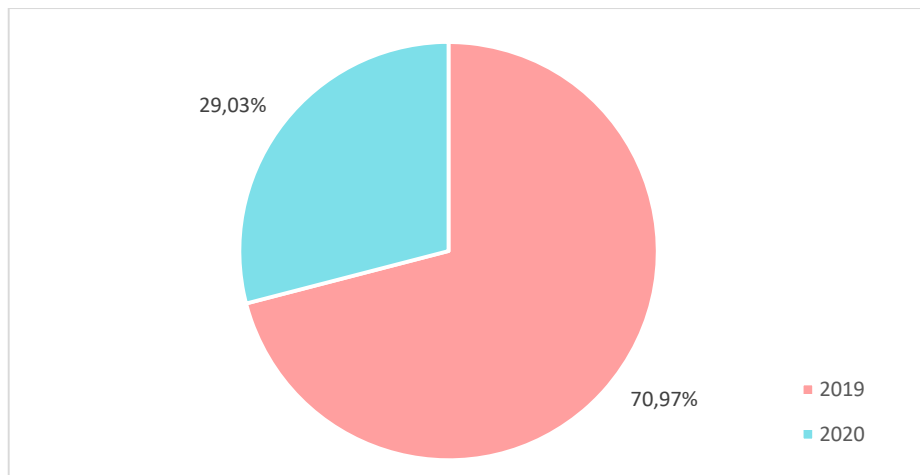
Kabupaten Aceh Tamiang juga memiliki dua indikator yang capaiannya tidak mengalami perubahan, di antaranya adalah Penurunan Angka Kemiskinan dan Nilai IPM. Angka Kemiskinan di Aceh Tamiang tidak mengalami perubahan, namun jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana angka kemiskinan menurun sebesar 0,02%, capaian yang diperoleh masih belum sesuai dengan standar. Sebaliknya, meskipun nilai IPM tidak mengalami

perubahan, hal tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana IPM tidak mengalami perubahan atau tetap (0%).

Selanjutnya, dari 7 indikator capaian yang telah tersaji pada bagan di atas, tiga indikator sisanya terpantau mengalami kenaikan. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Aceh Tamiang naik sebesar 4,58%, dan hal tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut turun sebesar 1,85%. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka mencatat nilai sebesar 72%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 menurun sebesar 72% dibandingkan tahun 2019. Capaian tersebut juga sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 0,92% dibandingkan periode sebelumnya. Terakhir, Jumlah Peningkatan Investasi mencatat perkembangan yang paling signifikan, yakni sebesar 777,45% atau hampir naik 8 kali lipatnya. Peningkatan ini sudah sangat melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana jumlah peningkatan investasi ditargetkan naik sebesar 0,45%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

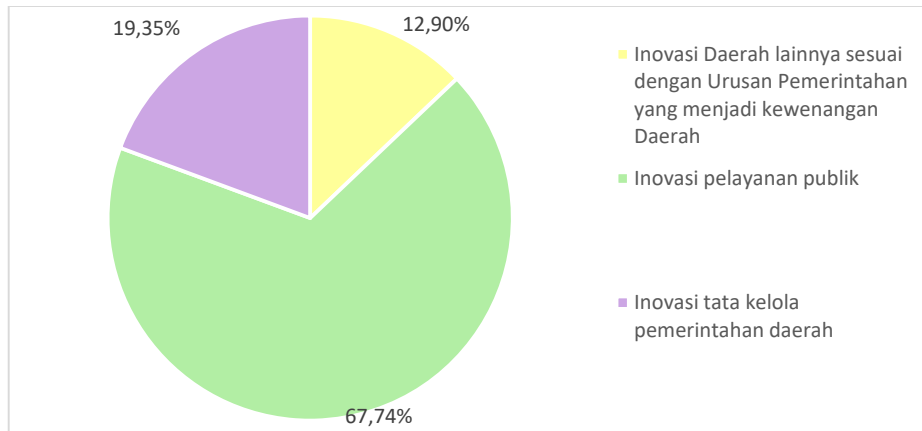


Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang telah diterapkan sejak tahun 2019, yaitu sebanyak

22 (70,97%) inovasi dari total 31 inovasi. Sementara itu, 9 (29,03%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2020.

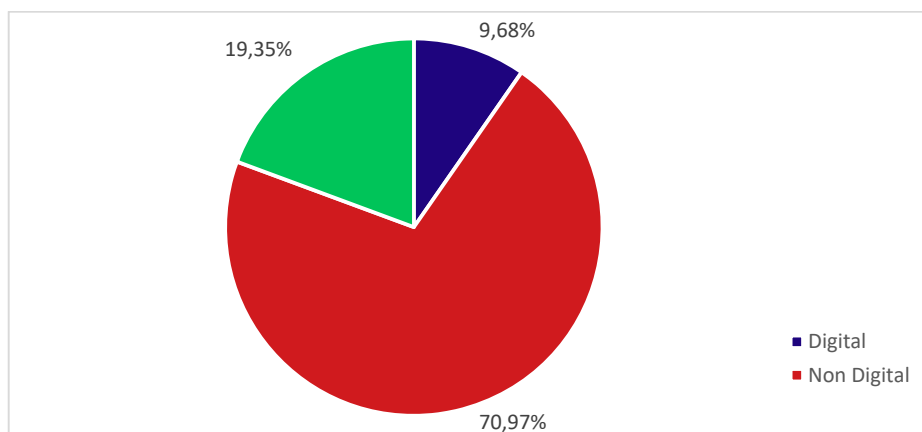
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang terbagi atas inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya. Sebagian besar di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebesar 21 (67,74%) dari 33 inovasi. Sementara itu, 6 (19,35%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 4 (12,90%) inovasi sisanya termasuk ke dalam inovasi lainnya.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

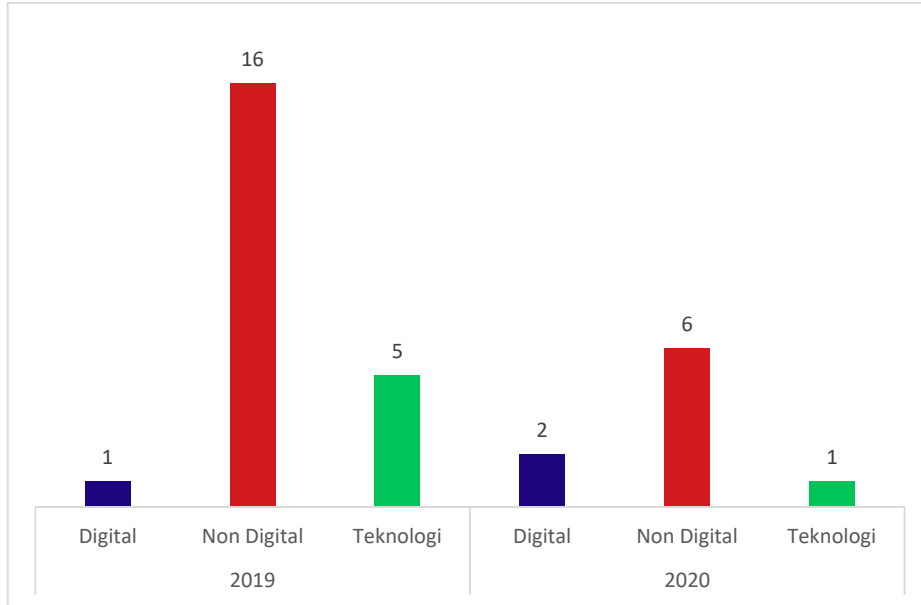


Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Tamiang terbagi atas

inovasi digital, non digital, dan teknologi. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital, yakni sebanyak 22 (70,97%) inovasi. Sementara itu, 6 (19,35%) inovasi merupakan inovasi teknologi dan 3 (9,68%) inovasi sisanya merupakan inovasi non digital.

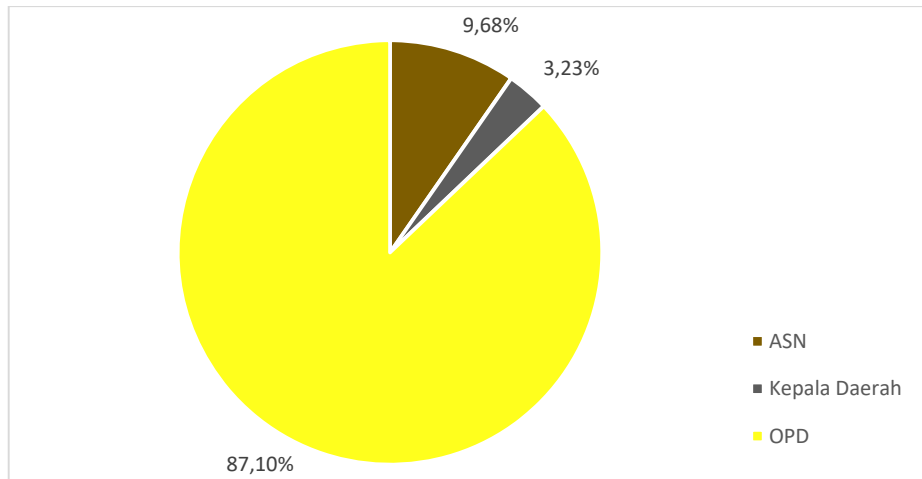
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang sudah mencakup seluruh bentuk inovasi, baik pada tahun 2019 dan tahun 2020. Inovasi non digital merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak pada setiap tahun, di mana pada tahun 2019 terdapat 16 inovasi non digital pada tahun 2019 dan 6 inovasi pada tahun 2020. Sementara itu, terdapat 1 inovasi digital pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2 inovasi. Sebaliknya, inovasi teknologi mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 terdapat 5 inovasi namun pada tahun 2020 menurun menjadi 1 inovasi.

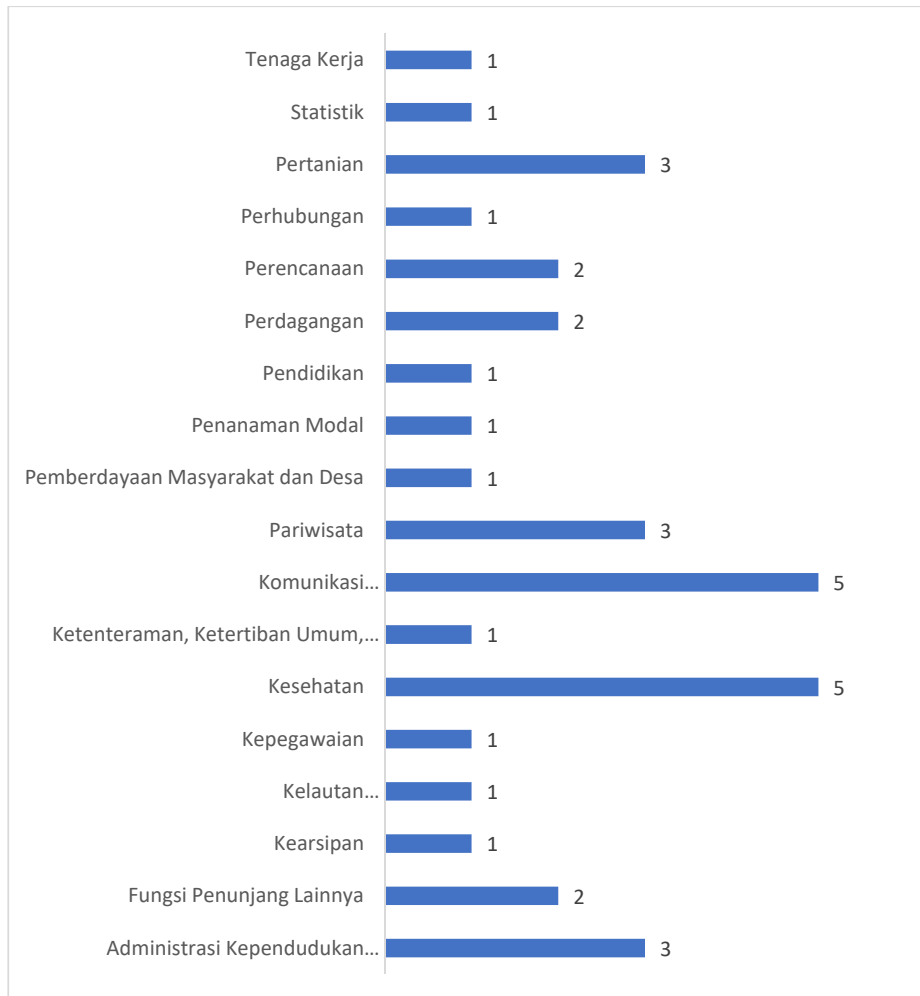
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan inisiatornya, inovasi di Kabupaten Aceh Selatan diinisiasi oleh 3 unsur, yakni OPD, ASN, dan Kepala Daerah. Sebagian besar inovasi tersebut diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 27 (87,10%) inovasi. Di sisi lain, sebanyak 3 (9,68%) inovasi diinisiasi oleh ASN dan 1 (3,23%) sisanya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



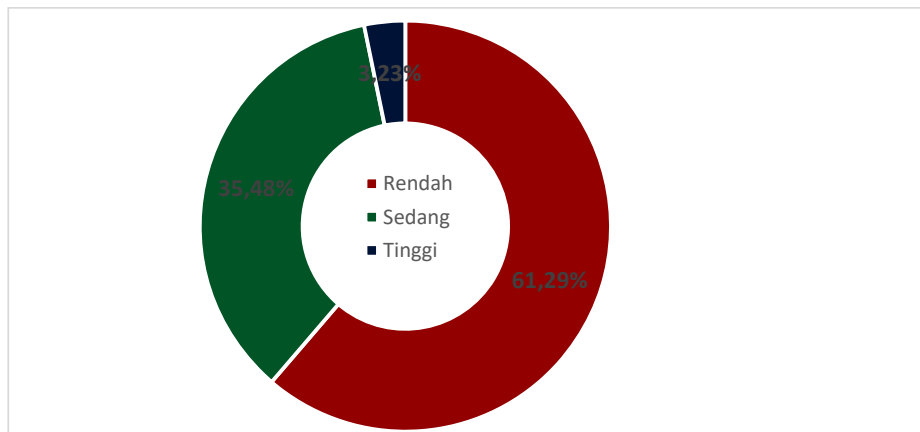
Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Tamiang

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang tersebar pada berbagai urusan pemerintahan. Dari urusan-urusan tersebut, terdapat 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dari ketiga urusan tersebut, urusan kesehatan merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 5 inovasi. Selanjutnya, sebanyak masing-masing 1 inovasi berada pada urusan pendidikan serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Selain ketiga urusan di atas, urusan komunikasi dan informatika merupakan inovasi dengan jumlah urusan terbanyak, yaitu sebanyak 5 inovasi, sama dengan urusan kesehatan. Selanjutnya, urusan pertanian, pariwisata, serta administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil memiliki jumlah inovasi masing-masing sebanyak 3 inovasi. Adapun urusan perencanaan, perdagangan, serta fungsi penunjang lainnya memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 2 inovasi. Terakhir, terdapat masing-masing 1 inovasi pada urusan tenaga kerja, statistik, perhubungan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, kelautan dan perikanan, serta kearsipan.

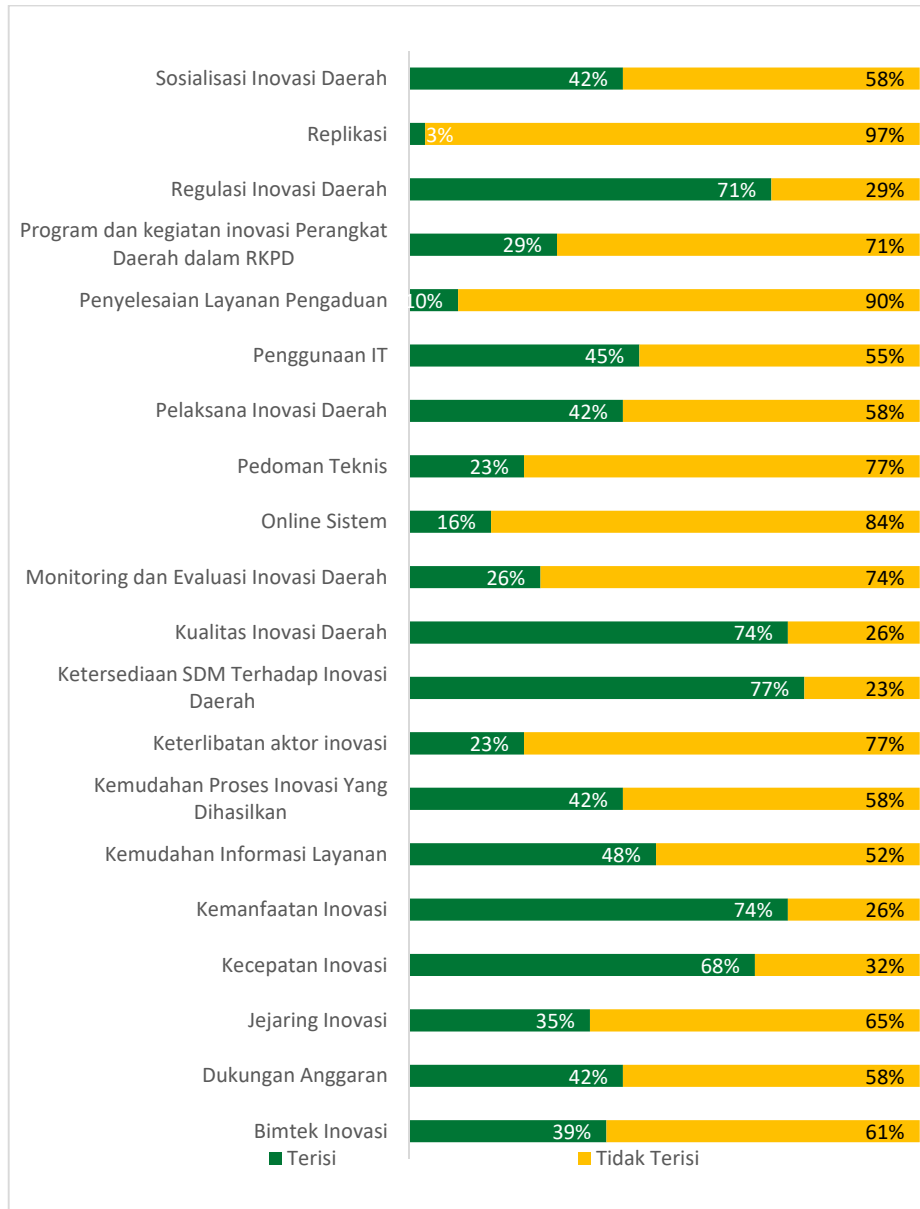
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Tamiang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan tersebar pada 3 kategori skor kematangan. Sebagian besar inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, yaitu sebanyak 19 (61,29%) inovasi dari total 31 inovasi. Sementara itu, 11 (35,48%) inovasi termasuk skor kematangan sedang dan 1 (3,23%) inovasi sisanya sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

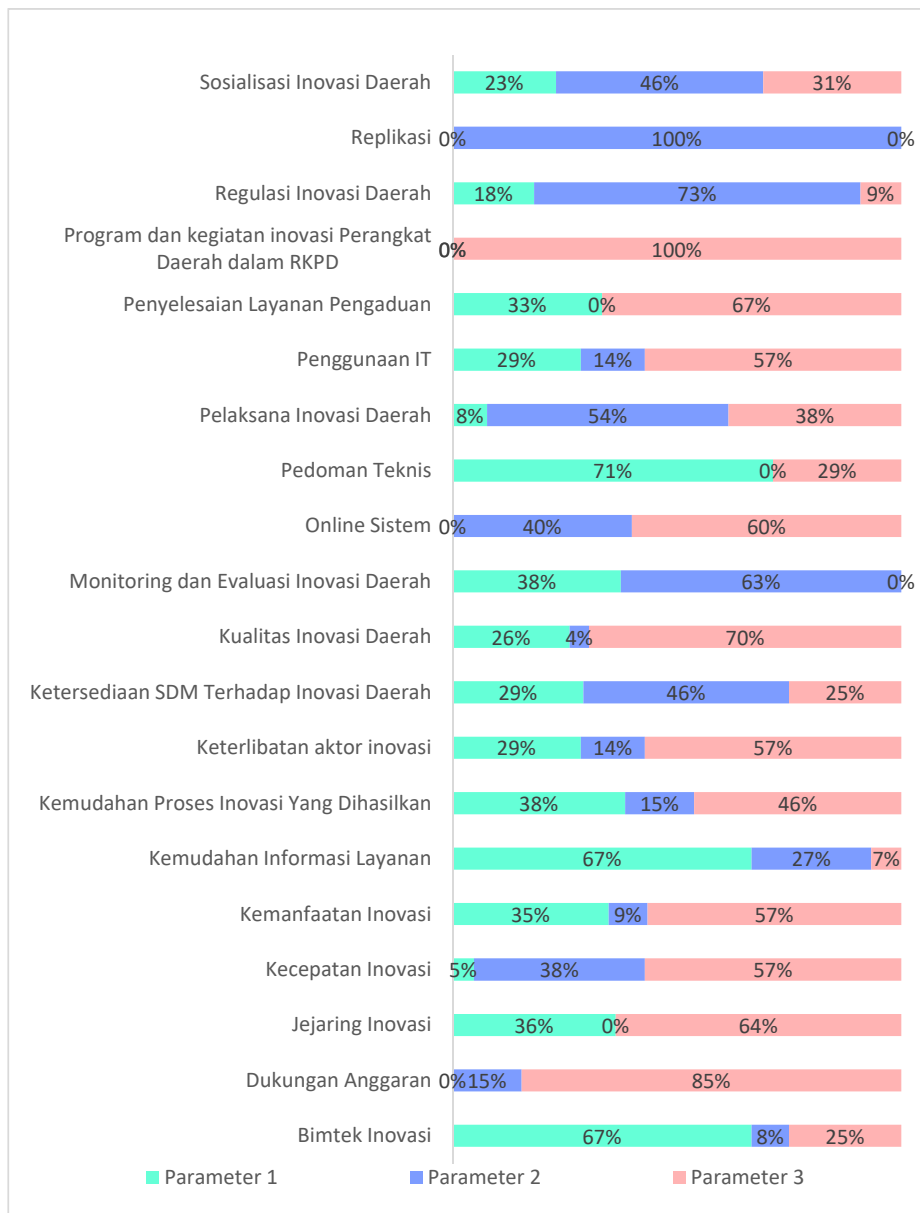


Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Dari 31 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 58,55% sedangkan 41,45% lainnya telah terisi data pendukung. Dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir setengah inovasi sudah terisi data pendukung yang diperlukan. Indikator dengan tingkat keterisian tertinggi yaitu Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dengan

persentase keterisian sebesar 77%. Artinya, 77% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sementara itu, indikator dengan angka keterisian terendah adalah indikator Replikasi sebesar 3%. Dengan kata lain, masih 3% dari inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3

(tiga) tertinggi adalah Program dan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, yaitu sebesar 100%. Artinya, seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis sebesar 71%. Artinya 71% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

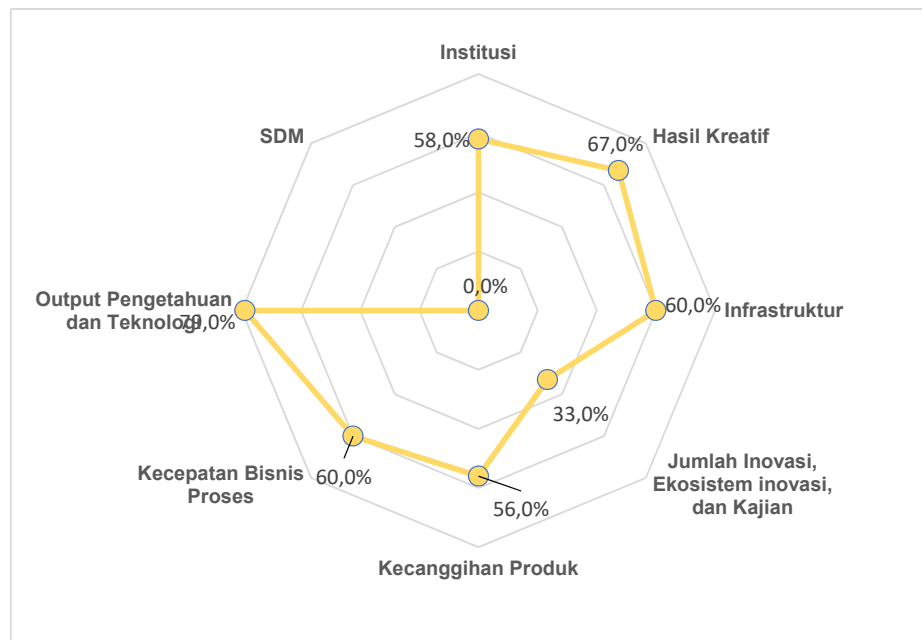
j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tamiang beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tamiang beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
DAFTAR IZIN DARI RUMAH SAJA, SOLUSI TEPAT AGAR TERHINDAR DARI COVID-19	0
PENYEDIAAN "KANTIN KEJUJURAN APD" BAGI PENUMPANG KENDARAAN AGAR TERBEBAS DARI COVID-19	0
GUNAKAN "TANGGOK JARING" SEBAGAI MEDIA DALAM MENJAGA JARAK AGAR TERHINDAR DARI COVID-19	0
LAYANAN UMKM "WAKDE" BINAAN TP-PKK, SOLUSI TEPAT DIRUMAH AJA AGAR TERHINDAR DARI PENYEBARAN COVID-19	0
"MASKER GRATIS UNTUK WISATAWAN AGAR BEBAS COVID-19"	0
"PENYEDIAAN HANDSANITIZER PADA SETIAP MEJA SEBAGAI UPAYA TERHINDAR COVID-19 "	0
WELLCOME DRINK "RAMUAN TRADISIONAL" SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI DINI BEBAS COVID-19	0
PELOBANG MULSA	15
Pemanfaatan Energi Baru terbarukan (Renewable Energi) untuk pengairan Pertanian	15
Pengembangan Ekowisata mangrove dan Tuntong Laut dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pesisir	12
Aplikasi E-Surat	47
APLIKASI TAMIANG PANDE	75
SISTEM PENGELOLAAN BANDWIDTH SATU PINTU	20
Proses Pesan Ambil (PROPAM)	8
Baitul Mal Kampung (BMKP)	16
POJOK SMOKING	14
SISTEM PENGELOLAAN WEB SERVER MANDIRI	63
KAPE BURESTI (Program Inovatif Penatalaksanaan Kader	23

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pemerhati Ibu Hamil Resti)	
RUMAH BESAROK (RUMAH BEBAS ASAP ROKOK)	32
E-RSATAM	61
EKABAR (E LAYANAN KARANG BARU)	12
PATEN KELILING	92
POJOK PELAYANAN TERPADU KEPEGAWAIAN	88
SIPALING MANTAP (SISTEM PATEN KELILING MUDAH AMAN NYAMAN TRANSPARAN AKUNTABILITAS PROFESIONAL)	66
SIPENAKER (SISTEM INFORMASI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN)	101
PINTU SURGA (Pelayanan Terpadu Siap Urus dan Jaga)	47
DATABASE PERTANIAN	68
KEPOVARI DAN DAKUSI UNTUK KESEHATAN REPRODUKSI	58
POJOK PERENCANAAN	74
PUSDATIN (PUSAT DATA DAN INFORMASI)	77
KAMPUNG TERSIPU	59

H. KABUPATEN ACEH TENGAH



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan

Teknologi, yaitu 79,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi mencapai skor yang cukup mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian terendah adalah variabel SDM, dengan skor capaian sebesar 0%. Dengan kata lain, sebagian besar capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut belum terpenuhi atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Tengah

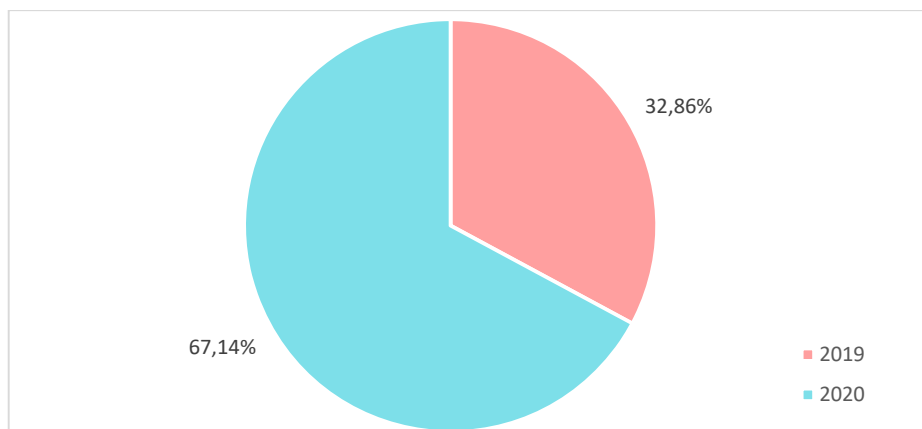
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator pada Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan. Hanya terdapat dua indikator yang tidak mengalami perubahan, di antaranya adalah Penurunan Angka Kemiskinan dan Nilai IPM. Angka Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah tidak mengalami perubahan, namun jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana angka kemiskinan menurun sebesar 0,02%, capaian yang diperoleh masih belum sesuai dengan standar. Sebaliknya, meskipun nilai IPM tidak mengalami perubahan, hal tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana IPM tidak mengalami perubahan atau tetap (0%).

Di sisi lain, dari 7 indikator capaian yang telah tersaji pada bagan di atas, lima indikator sisanya terpantau mengalami kenaikan. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Aceh Tengah naik sebesar 4,41%, dan hal tersebut sudah sesuai

dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana indikator tersebut turun sebesar 1,85%. Kualitas Peningkatan Perizinan juga terpantau naik sebesar 35,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana kualitas peningkatan perizinan mengalami kenaikan sebesar 5%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi meningkat sebesar 9,55% dan sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana terdapat kenaikan sebesar 0,45%. Jumlah Peningkatan PAD juga naik sebesar 2,43%, namun masih belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%. Terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka mencatat nilai positif, namun data yang diinput tidak sesuai dengan yang diminta, mengingat nilai capaian naik lebih dari 100%, tepatnya sebesar 8149%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

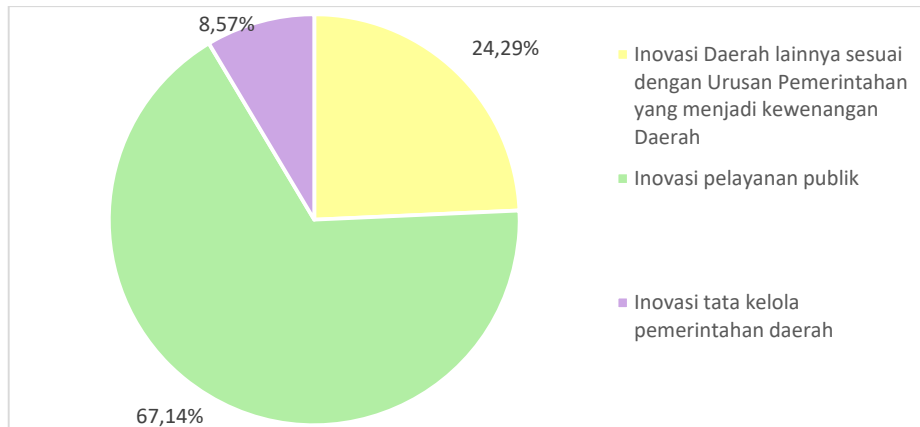
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tengah telah diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 47 (67,14%) inovasi dari total 70 inovasi. Sementara itu, 23 (32,86%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2019.

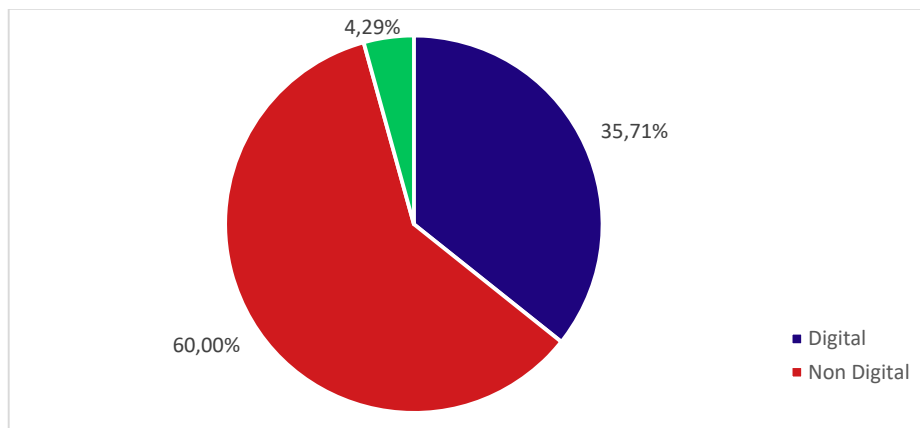
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya. Sebagian besar di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebesar 47 (67,14%) dari 70 inovasi. Sementara itu, 17 (24,29%) inovasi merupakan inovasi lainnya dan 6 (8,57%) inovasi sisanya termasuk ke dalam inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

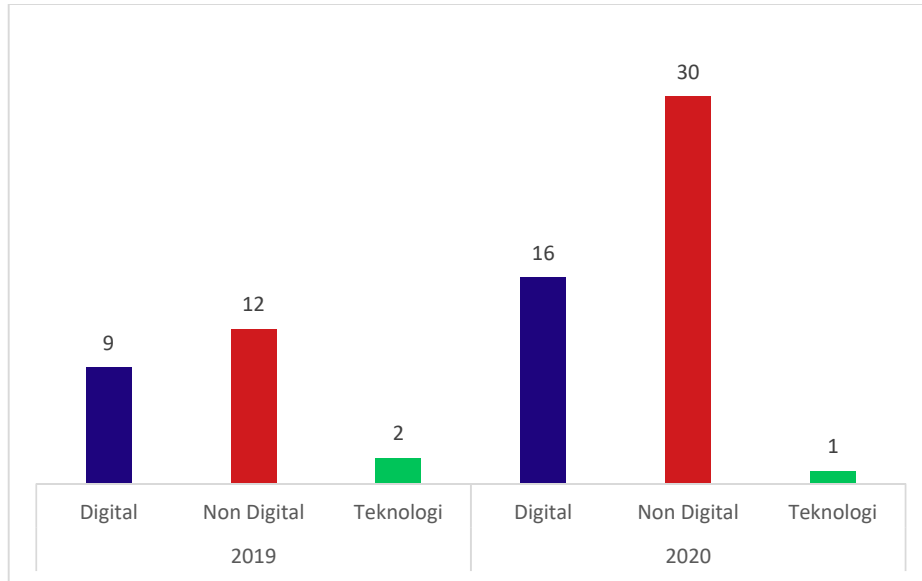


Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas inovasi digital, non digital, dan teknologi. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital, yakni sebanyak 42 (60%) inovasi. Sementara itu, 25 (35,71%)

inovasi merupakan inovasi digital dan 3 (4,29%) inovasi sisanya merupakan inovasi teknologi.

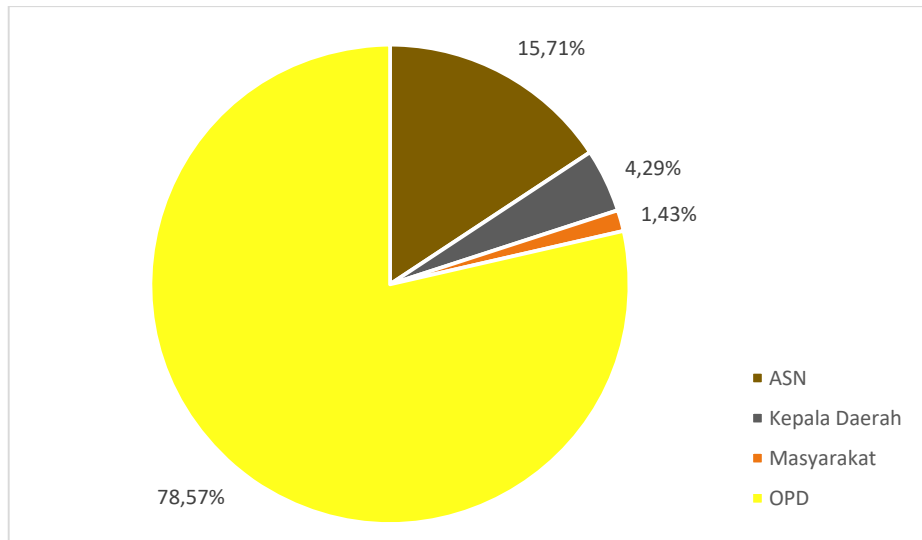
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tengah sudah mencakup seluruh bentuk inovasi, baik pada tahun 2019 dan tahun 2020. Inovasi non digital merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak pada setiap tahun, di mana pada tahun 2019 terdapat 12 inovasi non digital pada tahun 2019 dan 30 inovasi pada tahun 2020. Sementara itu, terdapat 9 inovasi digital pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 16 inovasi. Sebaliknya, inovasi teknologi mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 terdapat 2 inovasi namun pada tahun 2020 menurun menjadi 1 inovasi.

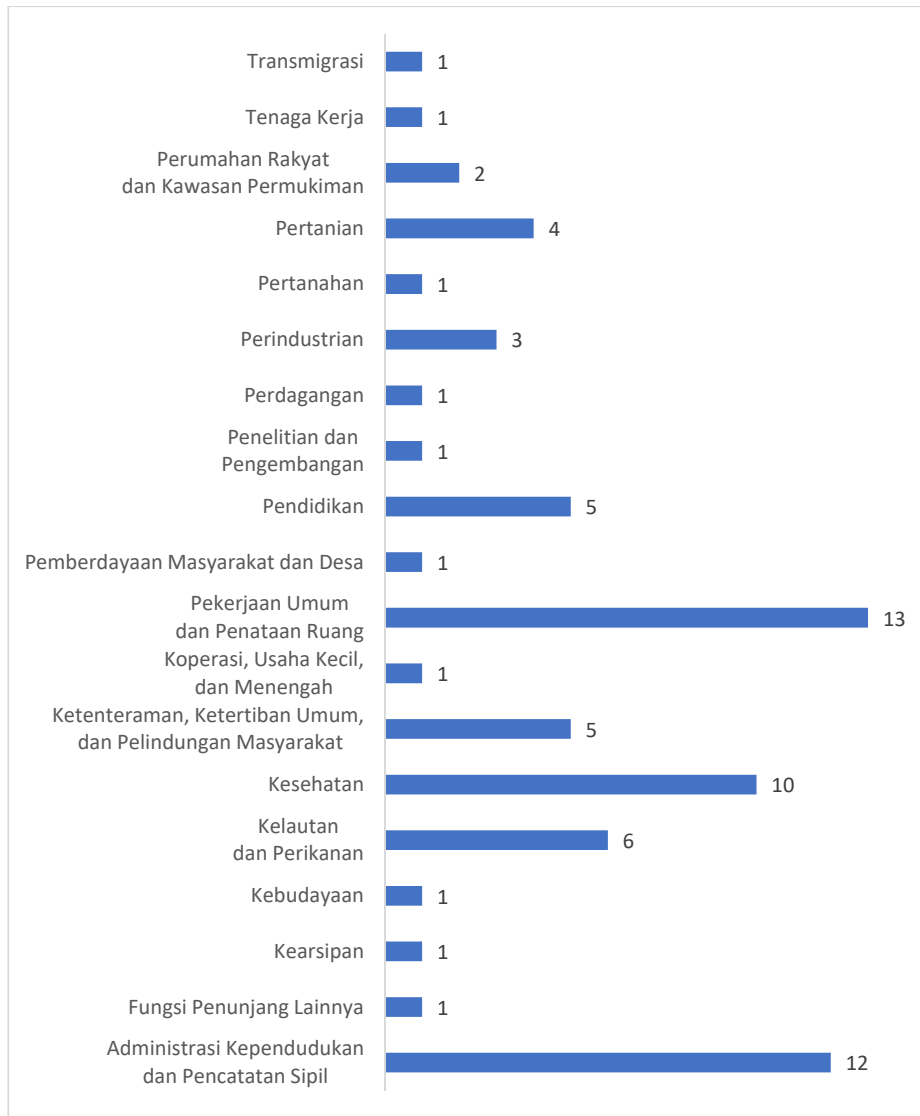
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan inisiatornya, inovasi di Kabupaten Aceh Selatan diinisiasi oleh 4 unsur, yakni OPD, ASN, Masyarakat, dan Kepala Daerah. Sebagian besar inovasi tersebut diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 55 (78,57%) inovasi. Di sisi lain, sebanyak 11 (15,71%) inovasi diinisiasi oleh ASN, 3 (4,29%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, dan 1 (1,43%) sisanya diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Tengah

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Tengah tersebar pada berbagai urusan pemerintahan. Dari urusan-urusan tersebut, terdapat 5 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dari kelima urusan tersebut, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan dengan jumlah inovasi terbanyak, yaitu sebanyak 13 inovasi. Selanjutnya, 10 inovasi berada pada urusan kesehatan, dan sebanyak masing-masing 5 inovasi berada pada urusan pendidikan serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Terakhir, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki jumlah inovasi sebanyak 2 inovasi. Selanjutnya, sebanyak 6 inovasi tergolong dalam urusan kelautan dan perikanan, 4 inovasi tergolong dalam urusan pertanian, dan 3 inovasi termasuk dalam urusan perindustrian. Adapun urusan transmigrasi, tenaga kerja, pertanahan, perdagangan, penelitian dan pengembangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kebudayaan, kearsipan, dan fungsi penunjang lainnya memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 1 inovasi.

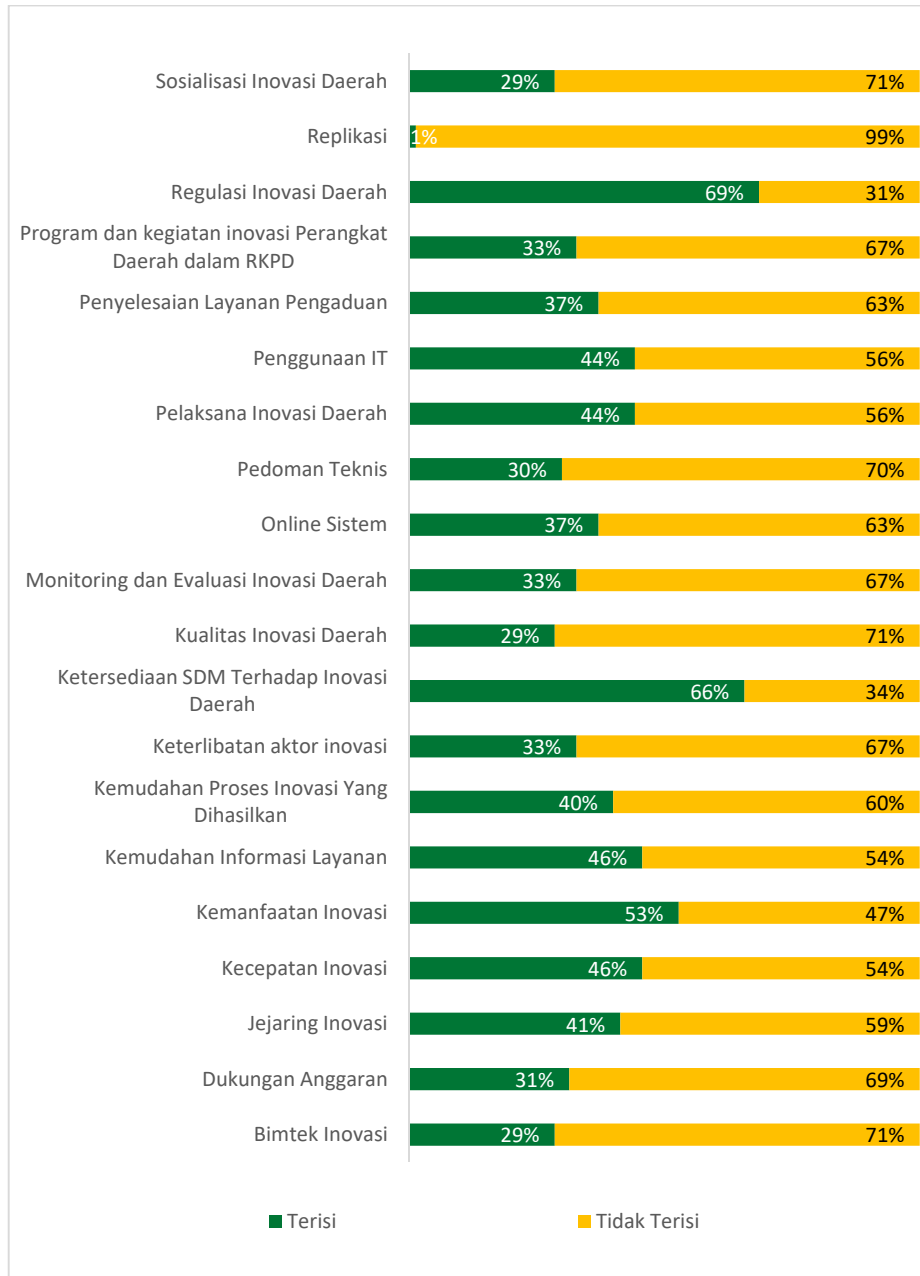
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Tengah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Selatan tersebar pada 3 kategori skor kematangan. Sebagian besar inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, yaitu sebanyak 59 (84,29%) inovasi dari total 70 inovasi. Sementara itu, 5 (7,14%) inovasi termasuk skor kematangan sedang dan 6 (8,57%) inovasi sisanya sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

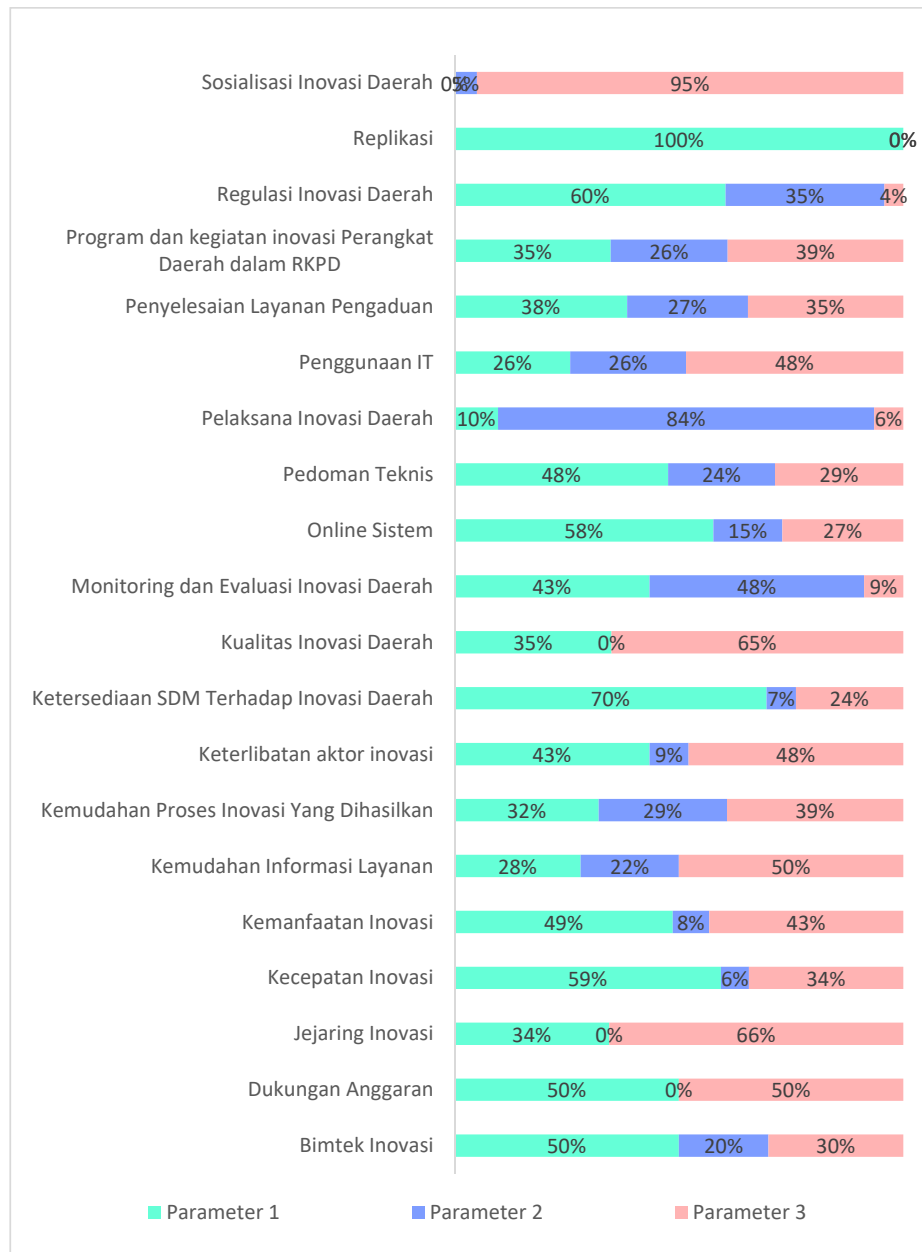


Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Dari 31 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tengah, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 38,50% sedangkan 61,50% lainnya telah terisi data pendukung. Dari rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar inovasi masih belum terisi data pendukung yang diperlukan. Indikator dengan tingkat keterisian

tertinggi yaitu Regulasi Inovasi Daerah, dengan persentase keterisian sebesar 69%. Artinya, 69% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tengah telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut. Sementara itu, indikator dengan angka keterisian terendah adalah indikator Replikasi sebesar 1%. Dengan kata lain, masih 1% dari inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, yaitu sebesar 95%. Artinya, hampir keseluruhan inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 84%. Artinya 84% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tengah beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
TON MUNGADU (Tempat Pengaduan Ketenagakerjaan)	41
SI JEMA TRANS KABUPATEN ACEH TENGAH (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Masyarakat Transmigrasi)	25
LABORATORIUM INOVASI DAERAH	75
TRANPUSI	80
PARENTING DAY KOMITE SEKOLAH	0
PENYULUH BIBES	80
DATIBUN	34
SMIDPT	38
BELICER	48
KERAMAT	6
DINIRAMPUNG	12
GERBANG	6
REGOS	10
KOPIPEKAT	6
On-Going (Pembinaan dan Pendampingan Tahun Berjalan)	0
Kampung Layak Anak	0
WIHENOM	0
ceTAr	0
Sistem Informasi Pelaporan (SIPORLA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22
SI PLAN UJIANKAN (Sistem Informasi Pengambilan Laporan Hasil Uji Kepadatan Jalan)	20
SIJATAN (DATABASE SISTEM INFORMASI JALAN DAN	14

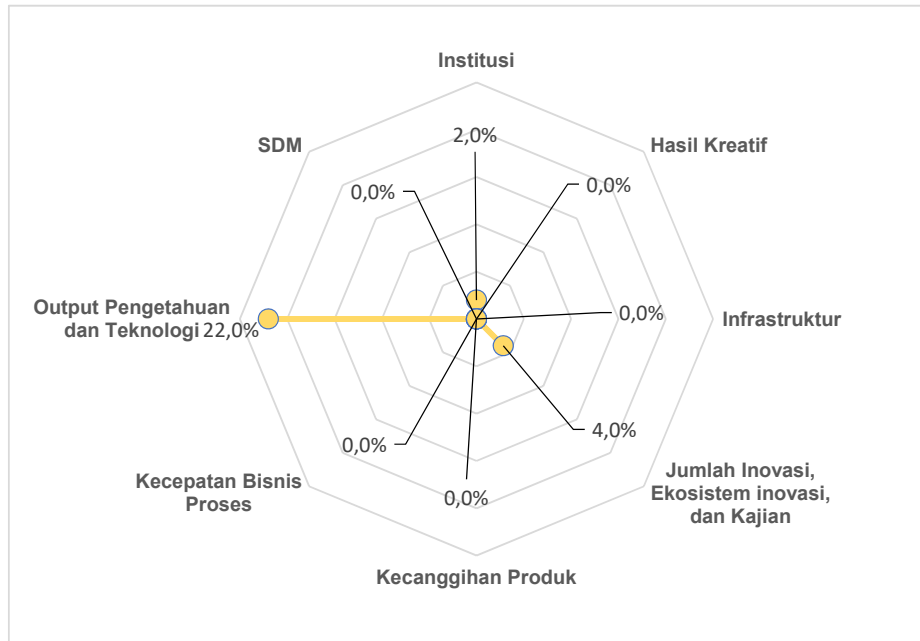
Nama Inovasi	Skor Kematangan
JEMBATAN)	
Aplikasi Informasi Irigasi (All)	10
Informasi dan Peran Serta Penjaga Pintu Air (I3PA) melalui WA Group.	28
SIPPAB (Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat)	32
GETEK TARUK (GERakan TERnaK dan TANam di RUmah Kita)	0
GRUPEL GASING (GRUP PEmetaan/PEngukur Lahan di kecamatan peGASING)	0
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK MENUJU AKREDITASI MEMUASKAN	0
"FORBES" (FORMULIR BRAILLE DISABILITAS)	109
"LOKASI PAS" (LOKET KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABITAS)	8
PEMBUATAN PLATFORM DIGITAL SEBAGAI SARANA PROMOSI INDUSTRI KERAJINAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH	0
PEMBENTUKAN DESA BINAAN KERAWANG GAYO	0
EKONOMI KREATIF KERAWANG GAYO	0
Gerakan Baca Buku KIA selama 7 menit, sebelum Pelayanan Antenatal (GERBABUKATUM)	8
FASILITAS STOCK KOPI PETANI (SISTEM RESI GUDANG)	0
KLINIK KONSULTASI KOPERASI SEHAT	0
PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KARAKTER PIIVO	4
"PAKU LUDES" (Paket Layanan Satu Loker Semua Dokumen Dukcapil Beres)	8
"PANTAS" (PELAYANAN JEMPUT DISABILITAS)	102
"GAS POL" (PETUGAS PELAYANAN ONLINE)	77
"KAMINDUK" (KAMPUNG SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	139
"PINK" (Peningkatan Penerbitan KIA)	8
"PAS GAN" (Pelayanan SMS GATEWAY Notifikasi)	69
AYO KITA SIAR (AYO KitagalakanTANaman obat keluarga untuk lanSla dan penyakit tidak menular)	41
PENTING TAZI (Penanggulangan Stunting Dengan Taman Gizi)	38
GARSIMA (GeRAkan Sayang glgi bersaMa)	43
GASING	36
"PIL DAHAGA" (DUKCAPIL DATANGI RUMAH WARGA)	115
"D'GOOL" (Dukcapil Goes to School)	119
APLIKASI PELAYANAN ONLINE "DUKCAPILKITA"	122
Tamak Bersih	0
Umah Ni Gule	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
GENTING TABAH MENANTI (Gerakan Cegah Stunting Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Kepada Remaja Putri)	24
AYU TING TING (Ayo Cabut Gigi Tidak Nyeri dan Tidak Gegeng)	20
KADER GASING (Kader Cegah Stunting)	17
SIJATAN (DATABASE SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN)	14
Sistem Informasi Pelaporan (SIPORLA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14
Pojok Baca	14
Depik Milenial	0
Pro Weh Jernih	0
Budik Endemik dan Natif	0
GERDAKKAN	0
BIES COVID-19	6
SIPPAB (Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat)	11
Informasi dan Peran Serta Penjaga Pintu Air (I3PA) melalui WA Group.	14
SI PLAN UJIANKAN (Sistem Informasi Pengambilan Laporan Hasil Uji Kepadatan Jalan)	14
Aplikasi Informasi Irigasi (All)	9
MONDOKTRENS	0
Pelayanan Publik	0
Kampung Percontohan Peradilan Adat	0
PACAT ((Perduli Anak Celala Sehat))	0
TON MUNGADU (Tempat Pengaduan Ketenagakerjaan)	41
SI JEMA TRANS KABUPATEN ACEH TENGAH (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Masyarakat Transmigrasi)	25
LABORATORIUM INOVASI DAERAH	75
TRANPUSI	80
PARENTING DAY KOMITE SEKOLAH	0
PENYULUH BIBES	80
DATIBUN	34
SMIDPT	38
BELICER	48
KERAMAT	6
DINIRAMPUNG	12
GERBANG	6
REGOS	10
KOPIPEKAT	6
On-Going (Pembinaan dan Pendampingan Tahun Berjalan)	0
Kampung Layak Anak	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
WIHENOM	0
ceTAr	0
Sistem Informasi Pelaporan (SIPORLA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22
SI PLAN UJIANKAN (Sistem Informasi Pengambilan Laporan Hasil Uji Kepadatan Jalan)	20
SIJATAN (DATABASE SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN)	14
Aplikasi Informasi Irigasi (All)	10
Informasi dan Peran Serta Penjaga Pintu Air (I3PA) melalui WA Group.	28
SIPPAB (Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat)	32
GETEK TARUK (GERakan TERnaK dan TANam di RUmah Kita)	0
GRUPEL GASING (GRUP PEmetaan/PEngukur Lahan di kecamatan peGASING)	0
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK MENUJU AKREDITASI MEMUASKAN	0
"FORBES" (FORMULIR BRAILLE DISABILITAS)	109
"LOKASI PAS" (LOKET KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABITAS)	8
PEMBUATAN PLATFORM DIGITAL SEBAGAI SARANA PROMOSI INDUSTRI KERAJINAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH	0
PEMBENTUKAN DESA BINAAN KERAWANG GAYO	0
EKONOMI KREATIF KERAWANG GAYO	0
Gerakan Baca Buku KIA selama 7 menit, sebelum Pelayanan Antenatal (GERBABUKATUM)	8
FASILITAS STOCK KOPI PETANI (SISTEM RESI GUDANG)	0
KLINIK KONSULTASI KOPERASI SEHAT	0
PENDIDIKAN VOKASI BERBASIS KARAKTER PIIVO	4
"PAKU LUDES" (Paket Layanan Satu Loket Semua Dokumen Dukcapil Beres)	8
"PANTAS" (PELAYANAN JEMPUT DISABILITAS)	102
"GAS POL" (PETUGAS PELAYANAN ONLINE)	77
"KAMINDUK" (KAMPUNG SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	139
"PINK" (Peningkatan Penerbitan KIA)	8
"PAS GAN" (Pelayanan SMS GATEWAY Notifikasi)	69
AYO KITA SIAR (AYO KitagalakanTAnaman obat keluarga untuk lanSla dan penyakit tidak menular)	41
PENTING TAZI (Penanggulangan Stunting Dengan Taman Gizi)	38
GARSIMA (GeRAkan Sayang glgi bersaMa)	43

Nama Inovasi	Skor Kematangan
GASING	36
"PIL DAHAGA" (DUKCAPIL DATANGI RUMAH WARGA)	115
"D'GOOL" (Dukcapil Goes to School)	119
APLIKASI PELAYANAN ONLINE "DUKCAPILKITA"	122
Tamak Bersih	0
Umah Ni Gule	0
GENTING TABAH MENANTI (Gerakan Cegah Stunting Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Kepada Remaja Putri)	24
AYU TING TING (Ayo Cabut Gigi Tidak Nyeri dan Tidak Gegeng)	20
KADER GASING (Kader Cegah Stunting)	17
SIJATAN (DATABASE SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN)	14
Sistem Informasi Pelaporan (SIPORLA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14
Pojok Baca	14
Depik Milenial	0
Pro Weh Jernih	0
Budik Endemik dan Natif	0
GERDAKKAN	0
BIES COVID-19	6
SIPPAB (Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat)	11
Informasi dan Peran Serta Penjaga Pintu Air (I3PA) melalui WA Group.	14
SI PLAN UJIANKAN (Sistem Informasi Pengambilan Laporan Hasil Uji Kepadatan Jalan)	14
Aplikasi Informasi Irigasi (All)	9
MONDOKTRENS	0
Pelayanan Publik	0
Kampung Percontohan Peradilan Adat	0
PACAT ((Perduli Anak Celala Sehat))	0

I. KABUPATEN ACEH TENGGARA



Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Tenggara memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 22,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi masih memiliki skor yang rendah dan belum mencapai skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, beberapa variabel lainnya memiliki skor capaian sebesar 0%, kecuali pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian dan SDM. Dengan kata lain, capaian skor indikator – indikator pada sebagian besar variabel belum terpenuhi atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

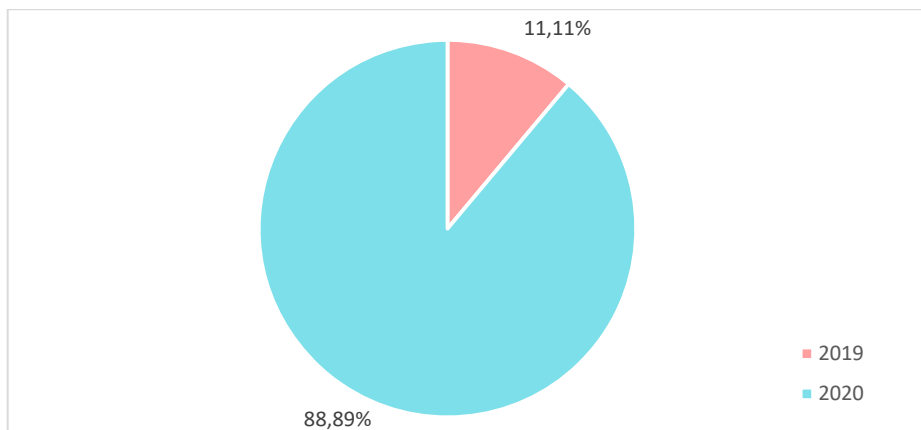
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tidak melakukan pengisian dan tidak ada data pendukung pada seluruh indikator - indikator pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

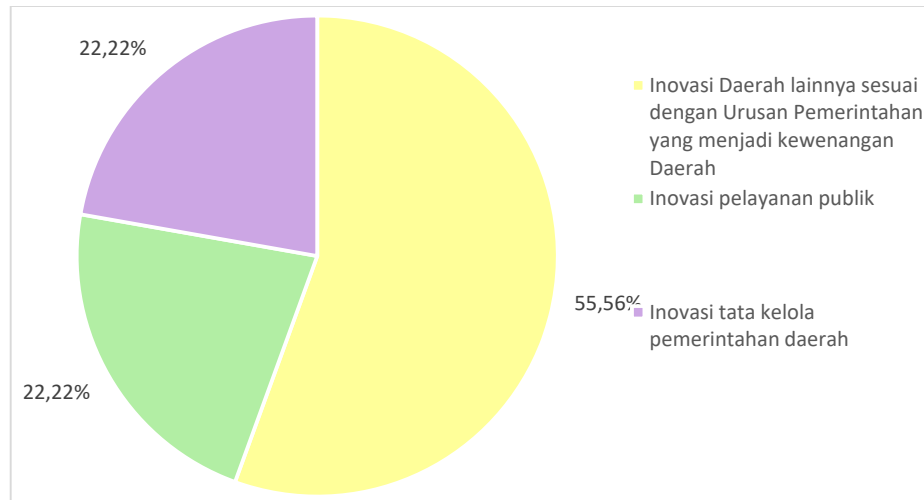


Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara telah diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak

8 (88,89%) inovasi dari total 9 inovasi. Sementara itu, 1 (11,11%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2019.

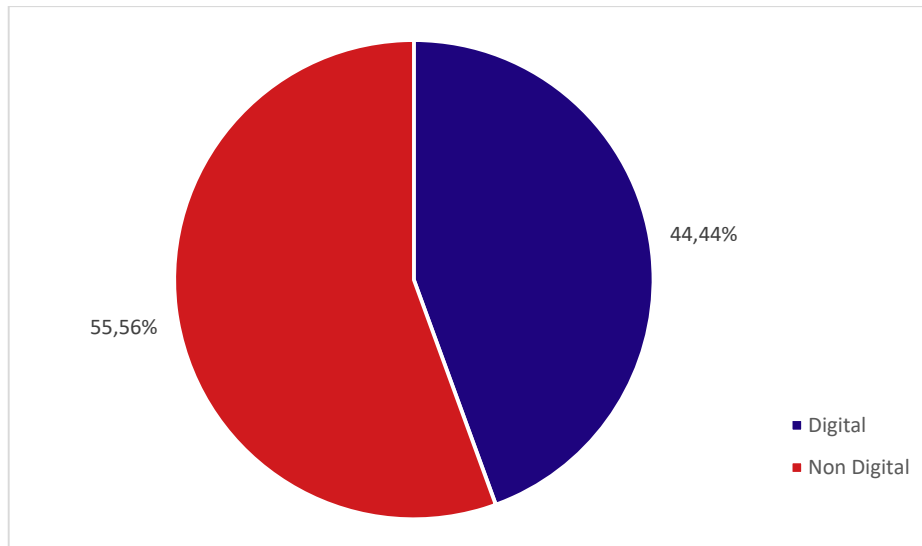
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara terbagi atas inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya. Sebagian besar di antaranya merupakan inovasi daerah lainnya, yaitu sebesar 5 (55,56%) dari 9 inovasi. Sementara itu, 2 (22,22%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik dan 2 (22,22%) inovasi sisanya termasuk ke dalam inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

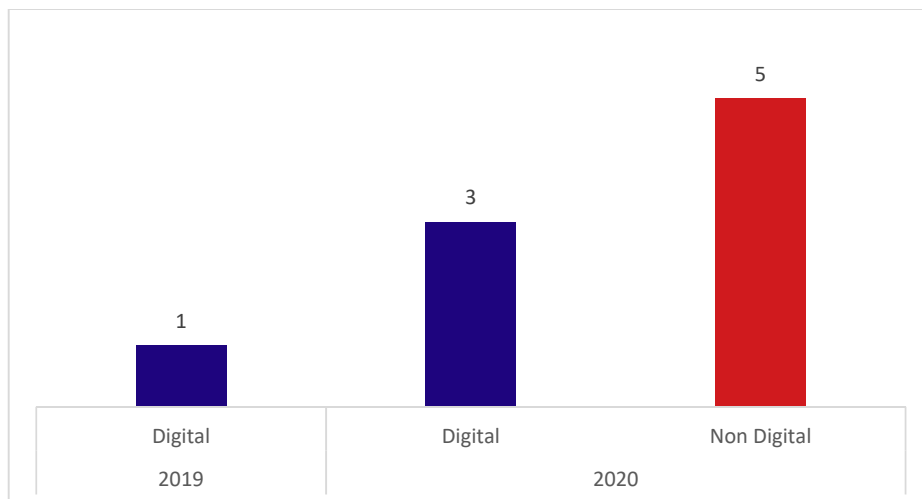
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Tenggara terbagi atas inovasi digital dan non digital. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital, yakni sebanyak 5 (5,55%) inovasi. Sementara itu, 4 (44,44%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

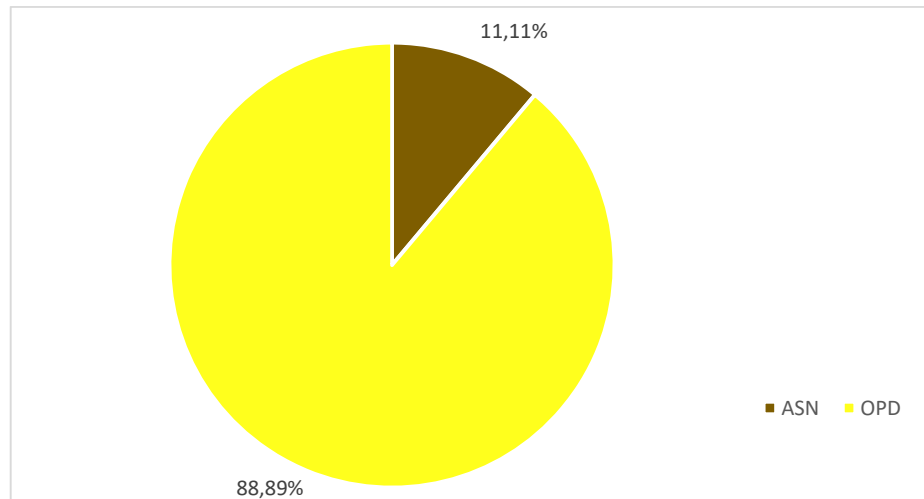


Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019 hanya terdiri dari

inovasi digital, yakni sebanyak 1 inovasi. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlah inovasi digital meningkat menjadi 3 inovasi. Selain itu, terdapat penambahan satu jenis inovasi pada tahun yang sama, yaitu inovasi non digital. Inovasi non digital yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebanyak 5 inovasi.

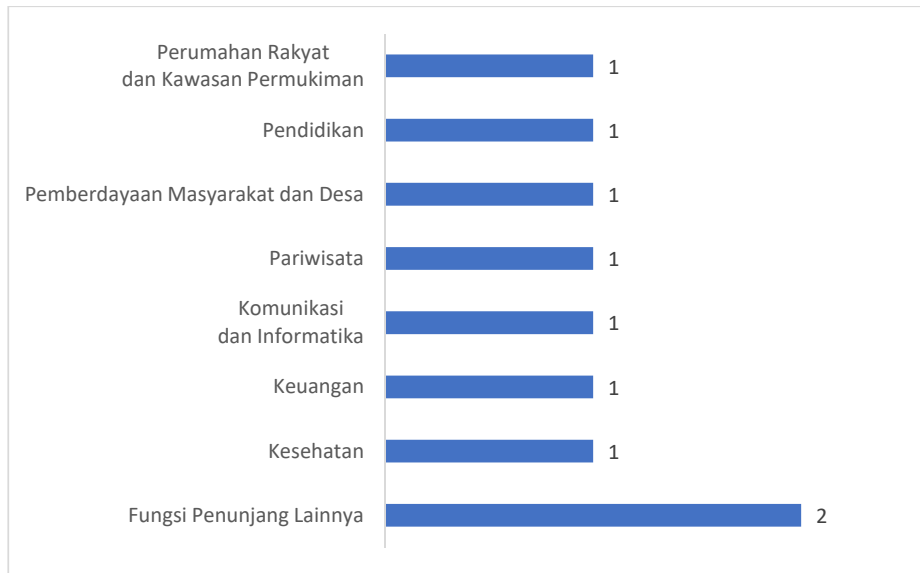
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan inisiatornya, inovasi di Kabupaten Aceh Selatan hanya diinisiasi oleh 2 unsur, yakni OPD dan ASN. Sebagian besar inovasi tersebut diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 8 (88,89%) inovasi. Di sisi lain, sebanyak 1 (11,11%) inovasi sisanya diinisiasi oleh ASN. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, Masyarakat, dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

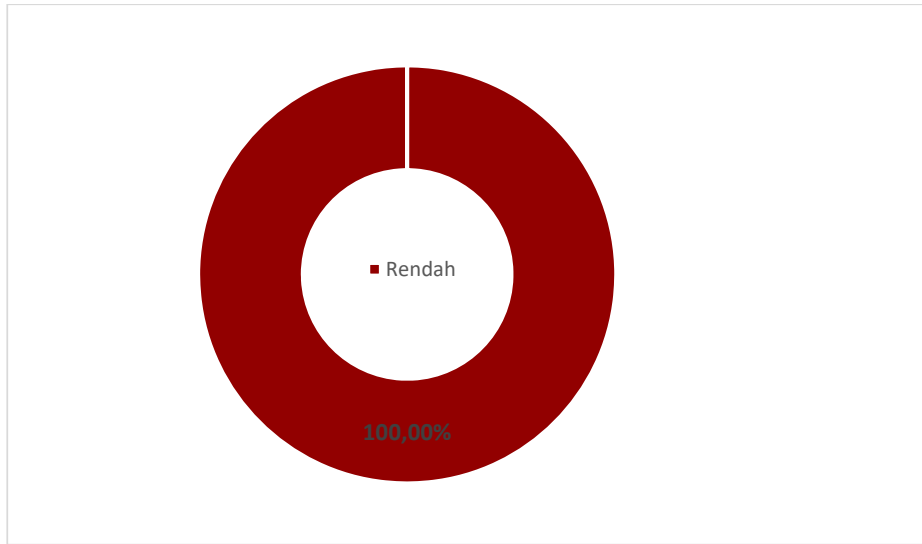
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Tenggara

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara tersebar pada 8 urusan pemerintahan. Dari urusan-urusan tersebut, terdapat 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Dari ketiga urusan tersebut, masing-masing urusan memiliki jumlah inovasi yang sama, yakni sebanyak 1 inovasi. Inovasi terbanyak merupakan inovasi pada urusan fungsi penunjang lainnya, yaitu sebanyak 2 inovasi. Selanjutnya, 10 inovasi berada pada urusan kesehatan, dan sebanyak masing-masing 5 inovasi berada pada urusan pendidikan serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terakhir, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki jumlah inovasi sebanyak 2 inovasi. Adapun urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pariwisata, komunikasi dan informatika, serta keuangan memiliki jumlah inovasi yang sama, yaitu sebanyak 1 inovasi.

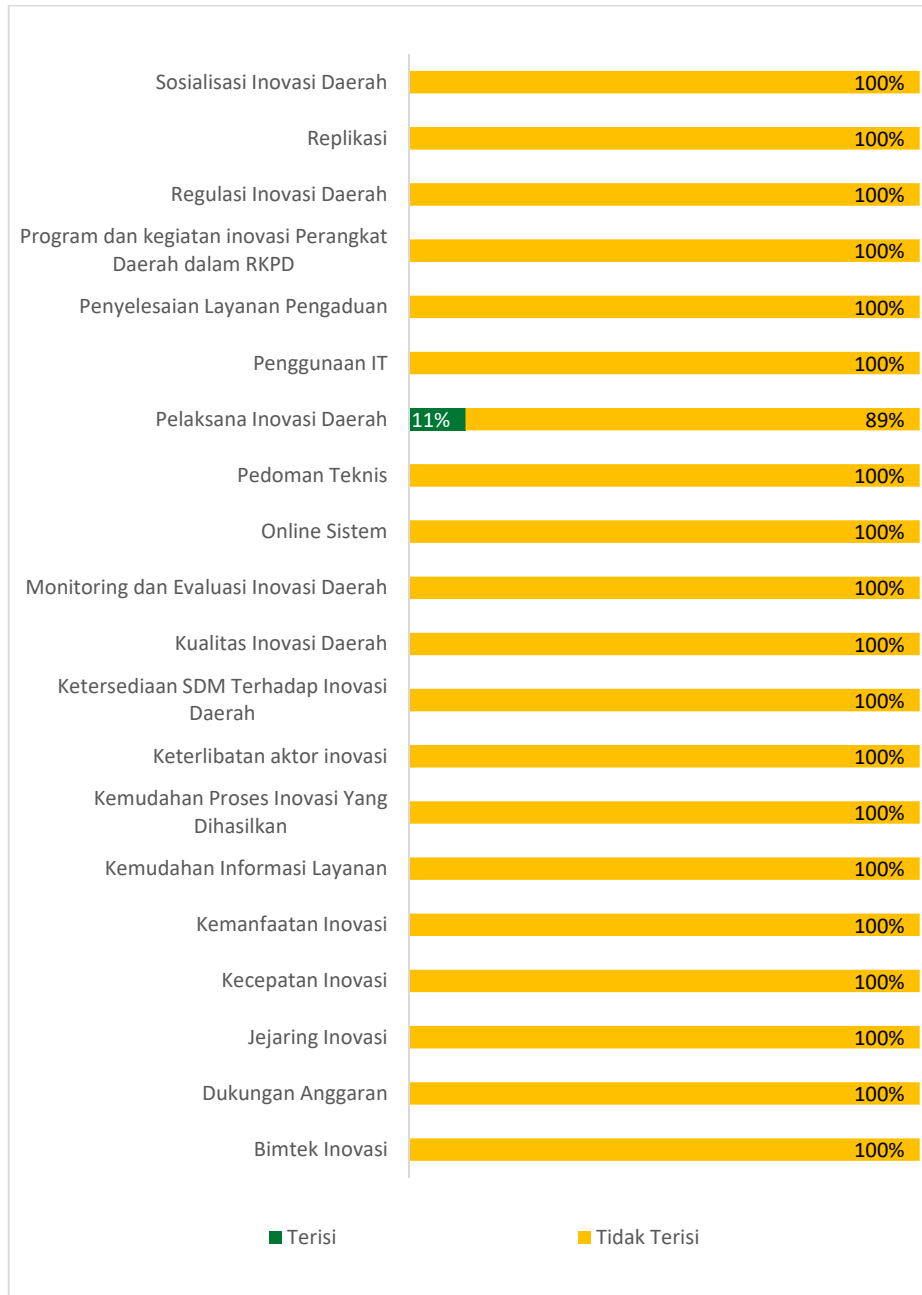
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Tenggara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi (9 inovasi) yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara memiliki skor kematangan yang rendah. Tidak terdapat inovasi yang termasuk skor kematangan sedang maupun skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

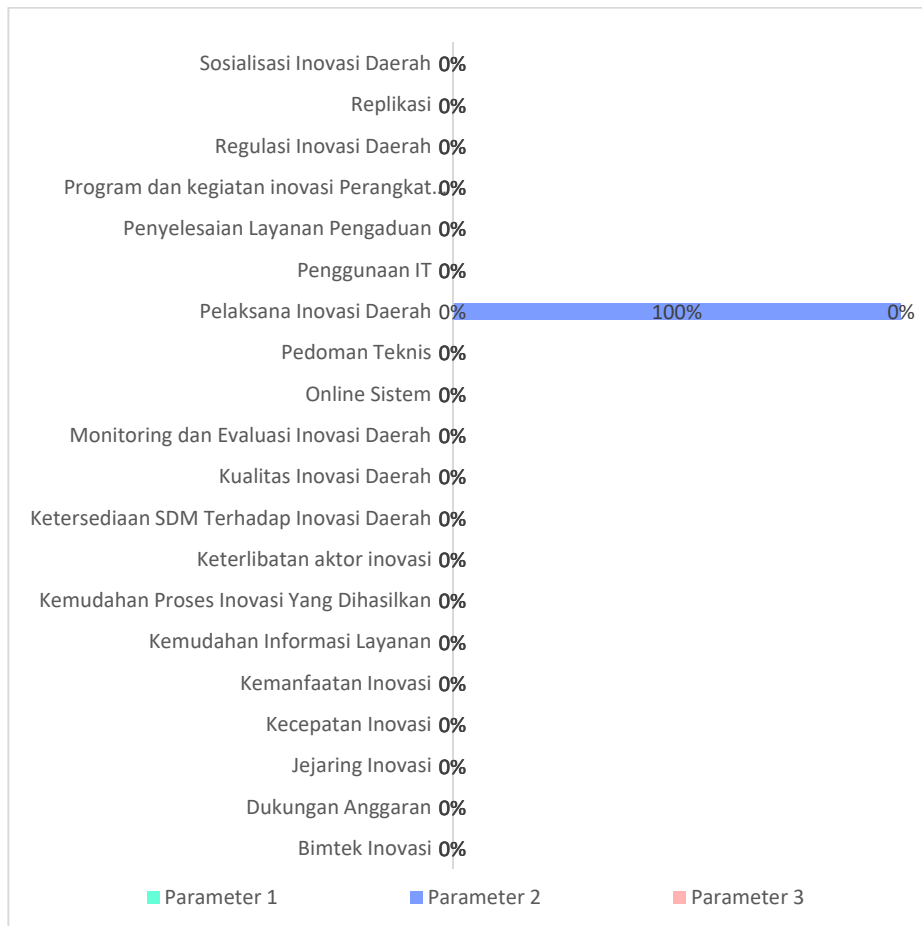


Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Dari 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 99,44% sedangkan 0,56% lainnya telah terisi data pendukung. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh inovasi masih belum terisi data pendukung yang diperlukan. Hanya terdapat 1 indikator yang sudah terisi data

pendukung walaupun persentasenya hanya 11%, yaitu Indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah. Artinya, 11% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Tenggara telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sementara itu, indikator-indikator lainnya menunjukkan angka keterisian sebesar 0%. Dengan kata lain, belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung, diperoleh hasil bahwa hampir seluruh indikator masih belum terisi data pendukung yang diperlukan, baik pada parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu). Satu-satunya indikator yang sudah terisi data pendukung adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah Kemudian dengan tingkat keterisian

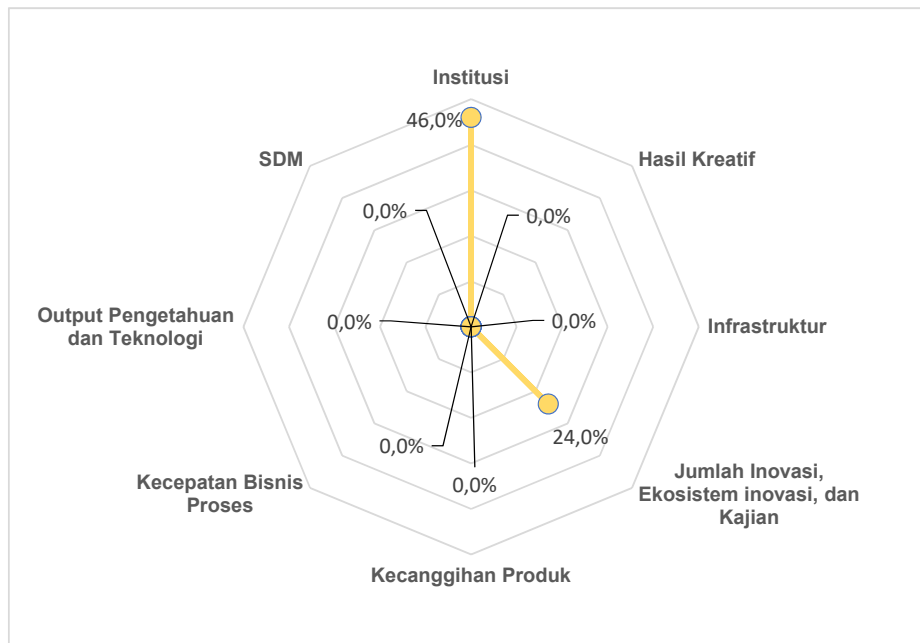
parameter 2 (dua) sebesar 100%. Artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tenggara beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Tenggara beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
ZIKIR PAGI AGARA	0
SUBUH KELILING	0
SIM ASEGAR (Aplikasi Absensi dan Kinerja Guru)	0
SEPATU (Sentra Pelayanan Administrasi Terpadu) Rumah Sakit Sahuddin Kutacane	4
AKSELERASI KEMITRAAN KONSERVASI MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA	0
PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERBATASASN DENGAN KAWASAN HUTAN UNTUK Mendukung INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA	0
PENINGKATAN PAD PADA ZONA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA	0
PEMANFAATAN PRODUKSI OLAHAN MAKANAN HASIL KAWASAN HUTAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH TENGGARA	0
KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA	0

J. KABUPATEN ACEH TIMUR



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 46,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi masih memiliki skor yang cukup rendah dan belum mencapai skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, beberapa variabel lainnya memiliki skor capaian sebesar 0%, kecuali pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian. Dengan kata lain, capaian skor indikator – indikator pada sebagian besar variabel belum terpenuhi atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Timur

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa sebagian indikator pada Kabupaten Aceh Timur mengalami peningkatan, namun ada sebagian lagi yang tidak mengalami perubahan. Selain itu, terdapat satu indikator yang menurun sangat signifikan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun, data yang diinput pada indikator tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diminta mengingat Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan adanya penurunan lebih dari 100%.

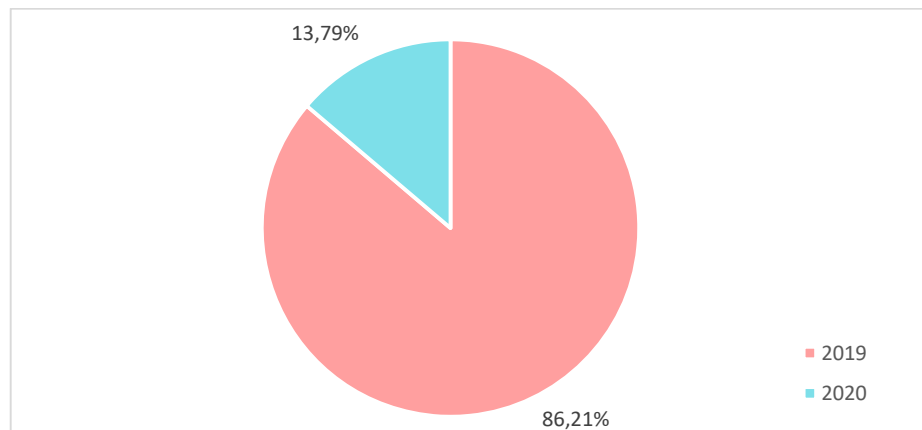
Selanjutnya, terdapat tiga indikator yang tidak mengalami perubahan, di antaranya adalah Penurunan Angka Kemiskinan, Nilai IPM, dan Jumlah Peningkatan Investasi. Angka Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur tidak mengalami perubahan, namun jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana angka kemiskinan menurun sebesar 0,02%, capaian yang diperoleh masih belum sesuai dengan standar. Begitu pula dengan Jumlah Peningkatan Investasi yang juga masih belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana seharusnya terdapat kenaikan sebesar 0,45%. Sebaliknya, meskipun nilai IPM tidak mengalami perubahan, hal tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana IPM tidak mengalami perubahan atau tetap (0%).

Di sisi lain, tiga indikator sisanya terpantau mengalami kenaikan. Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Aceh Timur naik sebesar 3,66%, dan hal tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah

di mana indikator tersebut turun sebesar 1,85%. Kualitas Peningkatan Perizinan juga terpantau naik sebesar 13,88% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana kualitas peningkatan perizinan mengalami kenaikan sebesar 5%. Terakhir, Jumlah Peningkatan PAD juga naik sebesar 7,46%, namun masih belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

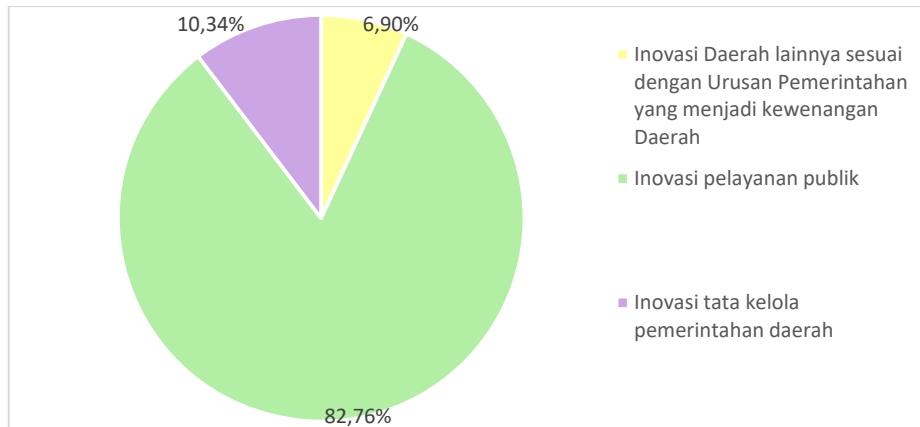
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Timur telah diterapkan sejak tahun 2019, yaitu sebanyak 25 (86,21%) inovasi dari total 29 inovasi. Sementara itu, 4 (13,79%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2020.

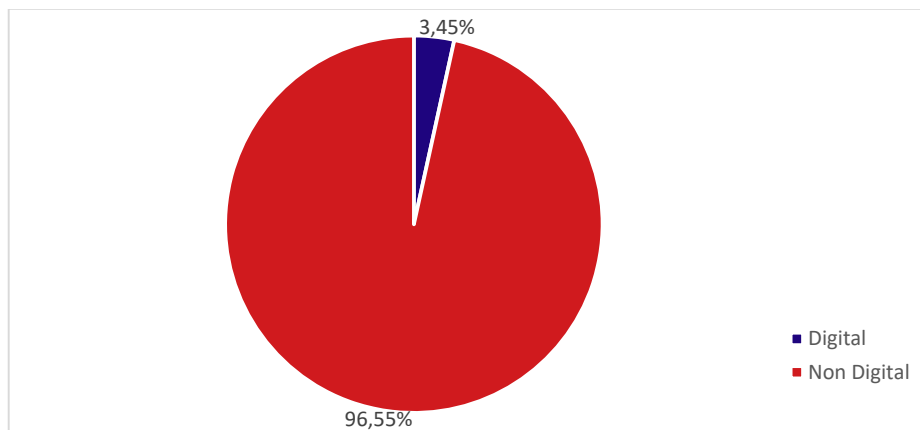
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Timur terbagi atas inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi lainnya. Sebagian besar di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik, yaitu sebesar 24 (82,76%) dari 29 inovasi. Sementara itu, 3 (10,34%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 2 (6,90%) inovasi sisanya termasuk ke dalam inovasi lainnya.

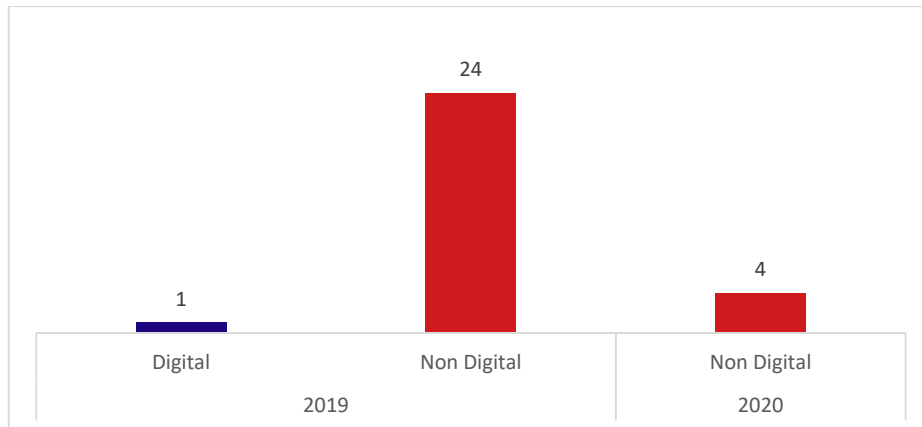
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Timur terbagi atas inovasi digital dan non digital. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital, yakni sebanyak 28 (96,55%) inovasi. Sementara itu, 1 (3,45%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital.

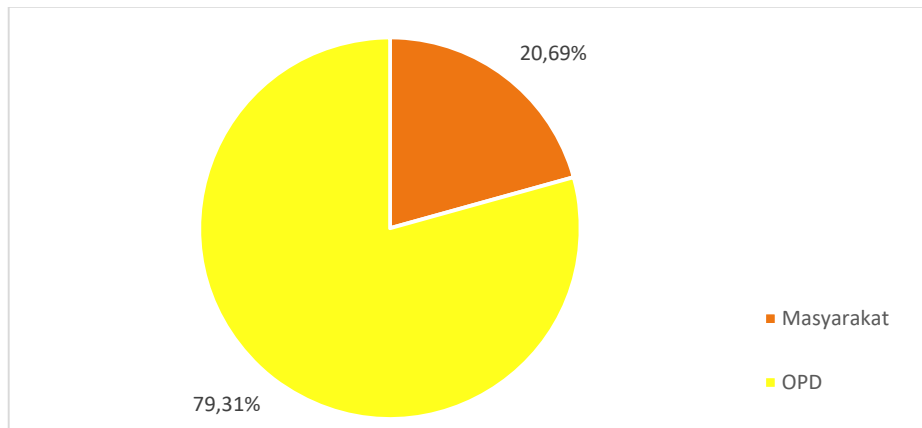
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2019 terbagi atas inovasi digital dan non digital, sedangkan pada tahun 2020 hanya terdapat inovasi non digital. Pada tahun 2019, inovasi non digital merupakan inovasi dengan jumlah terbanyak yakni sebanyak 24 inovasi. Di sisi lain, hanya terdapat 1 inovasi digital pada tahun yang sama. Sementara itu, pada tahun 2020 hanya terdapat 4 inovasi non digital.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

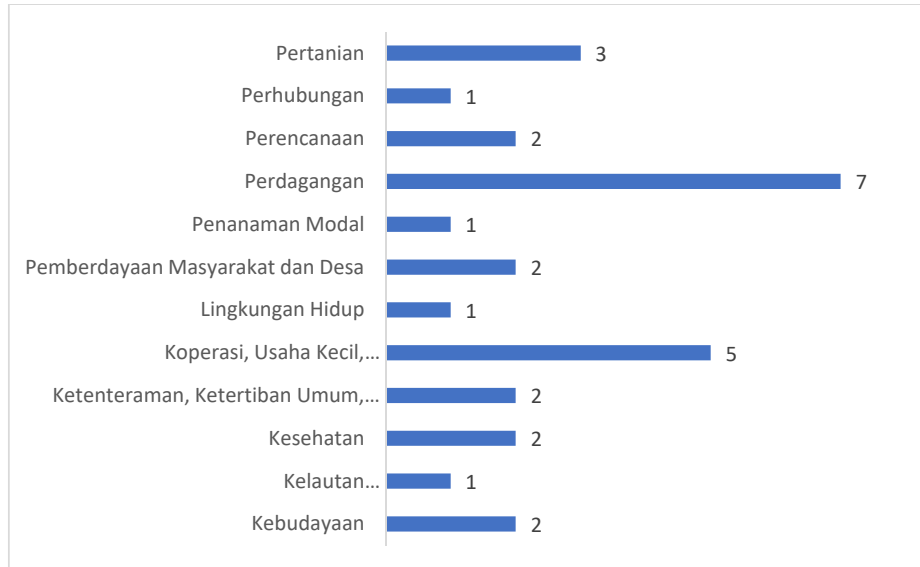


Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Timur

Berdasarkan inisiatornya, inovasi di Kabupaten Aceh Selatan hanya diinisiasi oleh 2 unsur, yakni OPD dan Masyarakat. Sebagian besar inovasi tersebut diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 23 (79,31%) inovasi. Di sisi lain, sebanyak 6 (20,69%)

inovasi sisanya diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, ASN, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

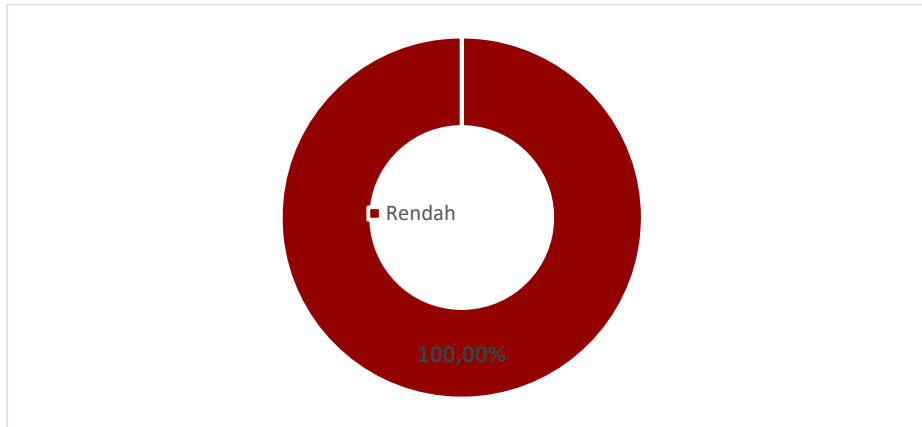
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Timur

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Timur tersebar pada berbagai urusan pemerintahan. Dari urusan-urusan tersebut, terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan Kesehatan serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kedua urusan tersebut memiliki jumlah inovasi yang sama, yaitu masing-masing sebanyak 2 inovasi. Urusan dengan jumlah inovasi tertinggi adalah urusan perdagangan, yaitu sebanyak 7 inovasi. Selanjutnya, 5 inovasi berada pada urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan sebanyak 3 inovasi terdapat pada urusan pertanian. Adapun urusan perencanaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kebudayaan memiliki jumlah inovasi masing-masing sebanyak 2 inovasi. Terakhir, urusan perhubungan, penanaman modal, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 1 inovasi.

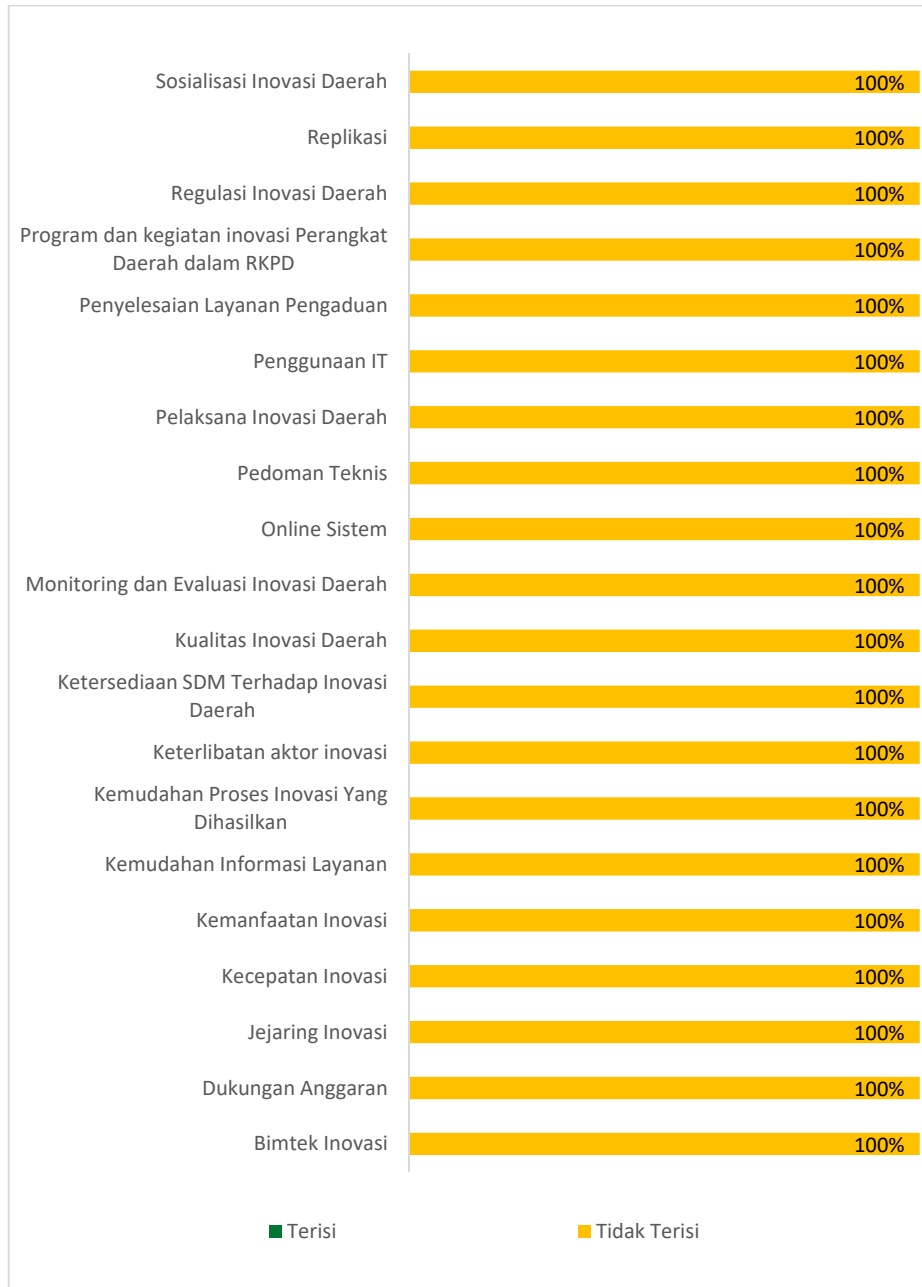
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, seluruh inovasi (29 inovasi) yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Timur memiliki skor kematangan yang rendah. Selain itu, tidak terdapat inovasi yang termasuk skor kematangan sedang maupun skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

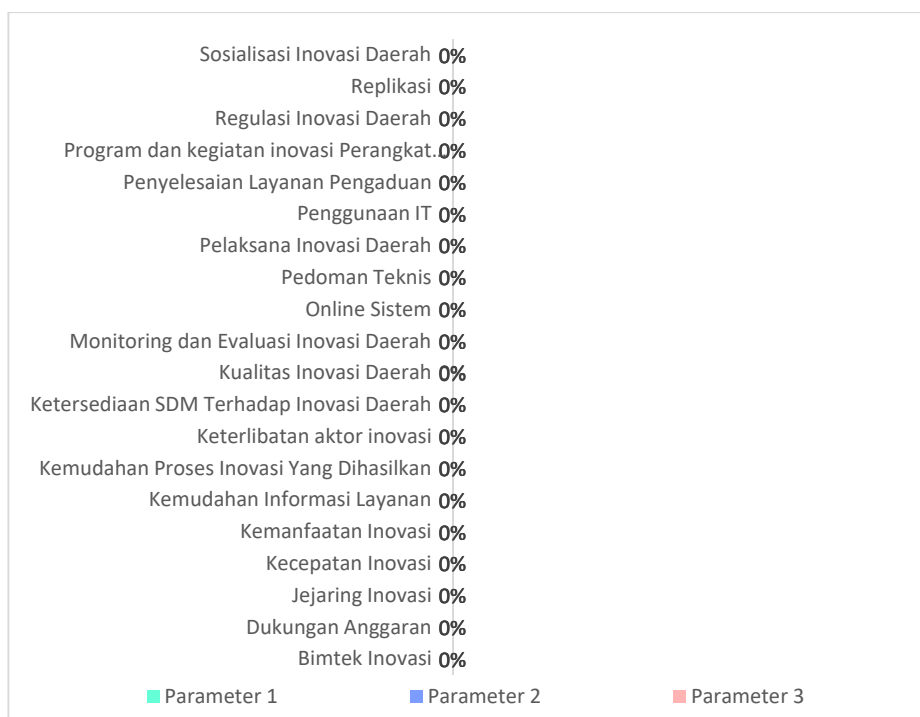
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Timur

Dari 29 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Besar, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% sedangkan 0% lainnya telah terisi data pendukung. Dengan kata lain, seluruh indikator dalam satuan inovasi daerah masih belum terisi data pendukung yang diperlukan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Timur

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung, diperoleh hasil bahwa seluruh indikator masih belum terisi data pendukung yang diperlukan, baik pada parameter 3 (tiga), parameter 2 (dua), maupun parameter 1 (satu).

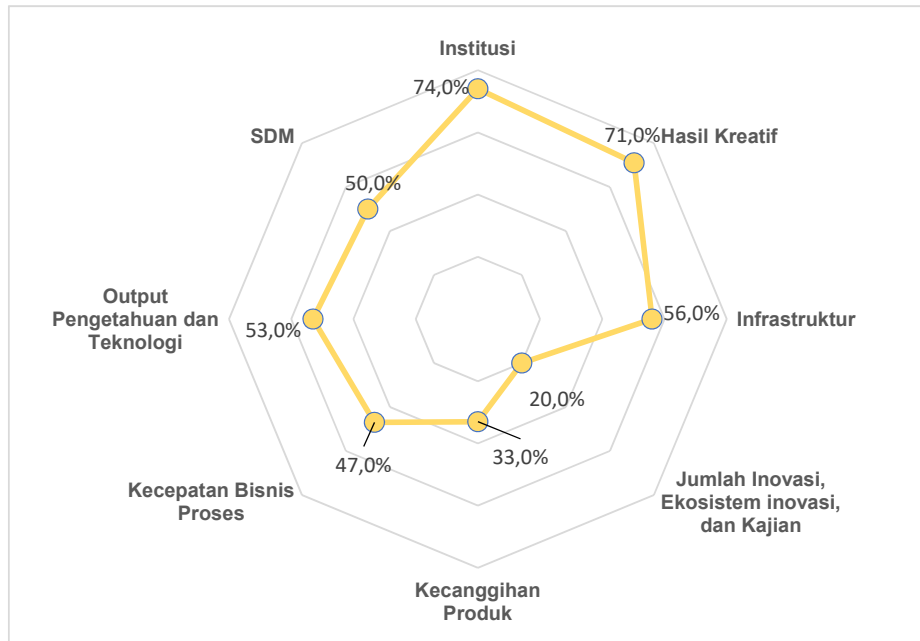
j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Timur beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
MEMUTUSKAN MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI MASA NEW NORMAL	0
MEMUTUSKAN MATA RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI MASA NEW NORMAL	0
Kartu Merah untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19	0
Penerapan Protokoler Kesehatan di Pasar Tradisional Kota Idi Rayeuk	0
Klinik Perencanaan BAPPEDA Aceh Timur	0
Pendederan Bibit Bandeng (BUMG) Seujahtra di Kecamatan Julok	0
Embung Desa Untuk Kesejahteraan Petani di Kec. Julok	0
Pengolahan Gula di Kecamatan Julok	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pengelolaan Sampah Melalui KSM berkah Sampah dikec. Julok	0
Paud dan Posyandu Terpadu di Kecamatan Julok	0
Budidaya Madu Linot (Kelulut) di kecamatan Julok	0
Produksi Ikan Asin (Ikan Kerupuk) di Kecamatan Julok	0
Beronjong Desa Atasi Banjir di Kecamatan Julok	0
Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kuta mandiri di kec. Julok	0
Posyandu Mandiri di Kecamatan Julok	0
Penggunaan Alat Gasrok dari Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0
Penggunaan Alat Tanam Padi CAPLAK dari dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	0
Penertiban Hewan Ternak oleh Satpol PP dan WH	0
Penertiban Baliho oleh Satpol PP dan Wh	0
Budidaya madu kelulut di Kecamatan Pante Bidari	0
Pembuatan sabun cair di Kecamatan Pante Bidari	0
Dodol aneka rasa di kecamatan Pante Bidari	0
Seni Kriya di Kecamatan Nurussalam	0
Pemanfaatan limbah tempe menjadi biogas	0
Sapu Lidi Warna di Kecamatan Darul Aman	0
Pendataan langsung mustahig ke lapangan oleh Baitul Mal	0
Pelaksanaan Safari Ramadhan	0
Pelatihan Tahij Mayat (Memandikan dan Menshalatkan Jenazah)	0
Muhibbah Ramadhan Kabupaten Aceh Timur	0

K. KABUPATEN ACEH UTARA



Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Aceh Utara memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 74,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi memiliki skor yang sudah cukup mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian tersendah adalah Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian yaitu sebesar 20,0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



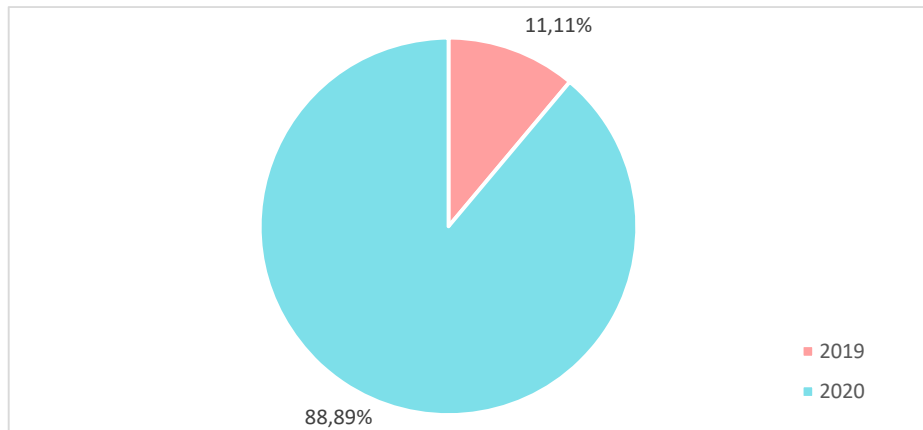
Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Utara

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh indikator pada Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan yang signifikan. Hanya terdapat satu indikator yang mengalami penurunan, yaitu Jumlah Peningkatan PAD. Indikator tersebut menurun sebesar 48,01%, dan nilai tersebut belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana seharusnya Jumlah Peningkatan PAD meningkat 8%.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Timur mengalami peningkatan sebanyak 0,07%. Dengan kata lain, jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 ditargetkan turun 0,07% dibandingkan tahun 2019. Indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,92%. Selanjutnya, Penurunan Angka Kemiskinan tercatat naik sebesar 0,37%, artinya angka kemiskinan turun sebanyak 0,37%. Nilai tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebanyak 0,02%. Demikian pula dengan nilai IPM yang naik sebesar 0,67%. Nilai IPM tersebut sudah memenuhi standarnya di mana nilai IPM ditargetkan tidak mengalami perubahan atau tetap (0%). Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Aceh Timur juga naik sebesar 3,66%, dan nilai tersebut sudah memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Pendapatan Perkapita turun 1,85%. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi berkembang cukup signifikan, yakni sebesar 25,17%. Kenaikan tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan paling tidak sebesar 0,45%. Adapun indikator capaian dengan perkembangan paling signifikan adalah Kualitas Peningkatan Perizinan. Indikator tersebut naik sebesar 48,57%, dan sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Kualitas Peningkatan Perizinan meningkat sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

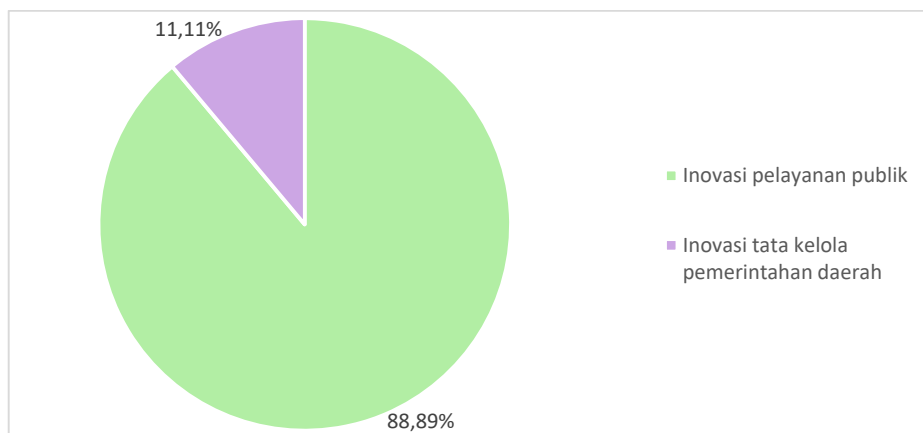
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Utara telah diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 8 (88,89%) inovasi dari total 9 inovasi. Sementara itu, 1 (11,11%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2019.

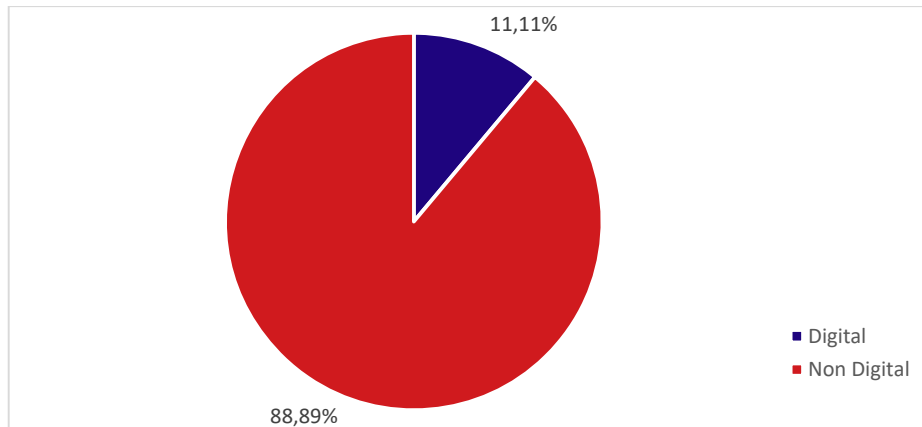
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Utara terbagi atas inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sebagian besar di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 8 (88,89%) dari 9 inovasi. Sementara itu, 1 (11,11%) inovasi sisanya termasuk ke dalam inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan tidak terdapat inovasi lainnya.

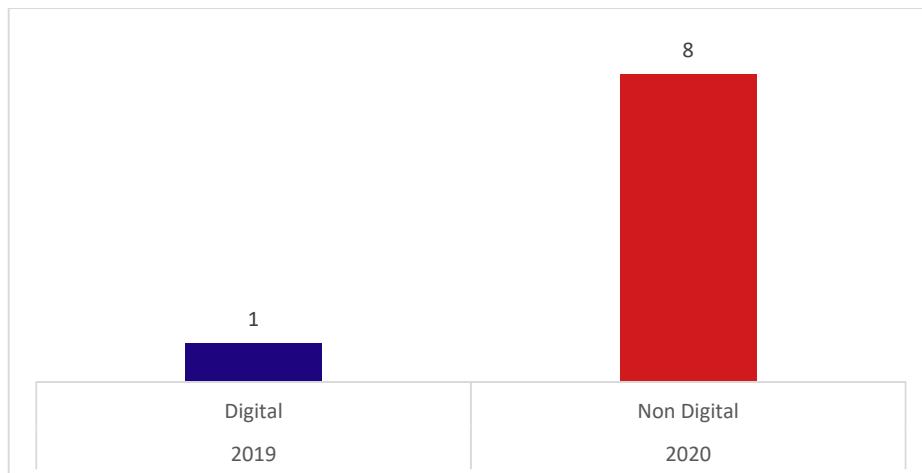
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 115. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Aceh Utara terbagi atas inovasi digital dan non digital. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital, yakni sebanyak 8 (88,89%) inovasi. Sementara itu, 1 (11,11%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital.

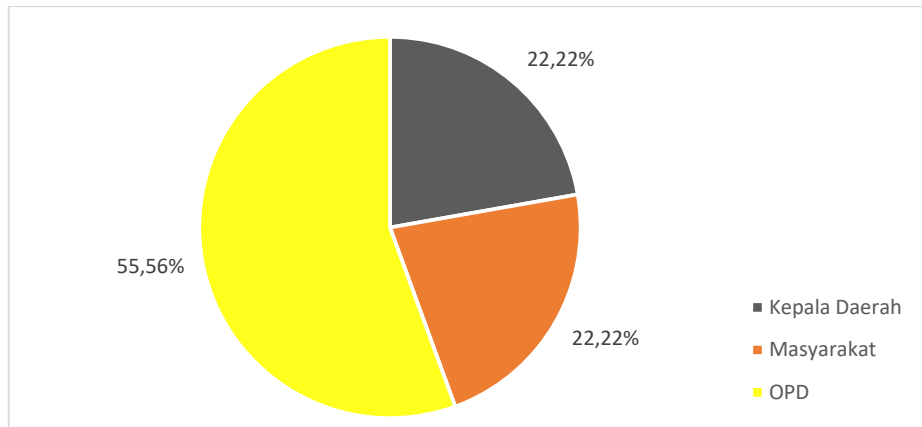
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 116. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 hanya terdiri dari inovasi digital, yakni sebanyak 1 inovasi. Sementara itu, pada tahun 2020 inovasi yang terlapor hanya merupakan inovasi non digital, yakni sebanyak 8 inovasi.

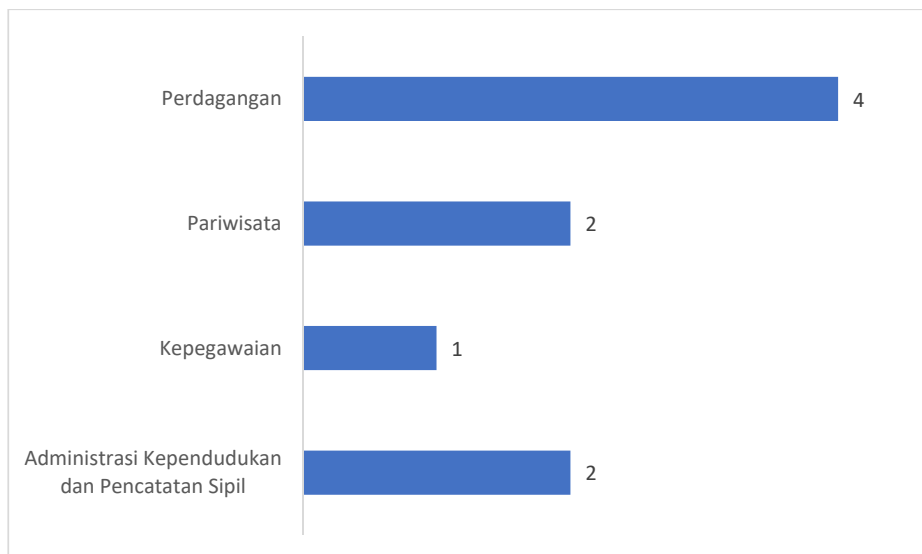
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 117. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan inisiatornya, inovasi di Kabupaten Aceh Selatan diinisiasi oleh 3 unsur, yakni OPD, Kepala Daerah, dan Masyarakat. Sebagian besar inovasi tersebut diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 5 (55,56%) inovasi. Di sisi lain, masing-masing sebanyak 2 (22,22%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan ASN belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

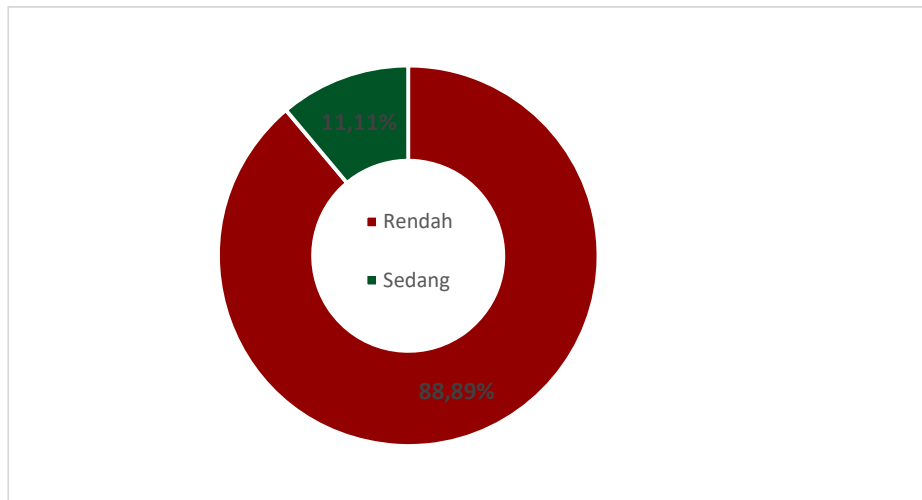


Gambar 118. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Aceh Utara

Inovasi daerah pada Kabupaten Aceh Utara tersebar pada 4 urusan pemerintahan. Namun dari urusan-urusan tersebut masih belum ada yang terkait

dengan urusan wajib pelayanan dasar. Urusan perdagangan memiliki jumlah inovasi paling banyak, yakni sebanyak 4 inovasi. Selanjutnya, urusan pariwisata serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 2 inovasi. Adapun urusan kepegawaian memiliki jumlah inovasi sebanyak 1 inovasi.

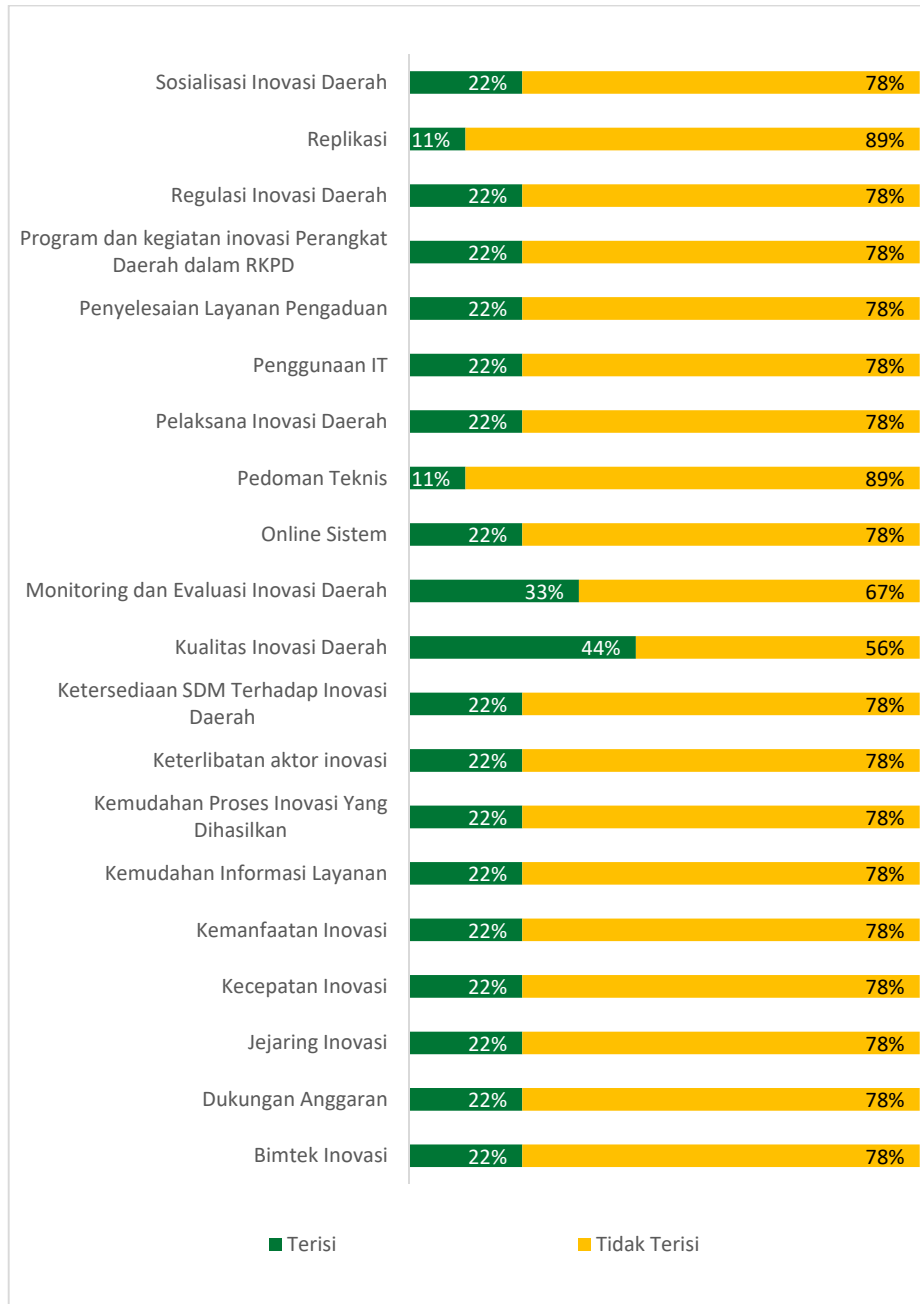
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Aceh Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, hampir seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Utara memiliki skor kematangan yang rendah. Sebanyak 8 (88,89%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, dan 1 (11,11%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan yang sedang. Sementara itu, tidak terdapat inovasi yang termasuk skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

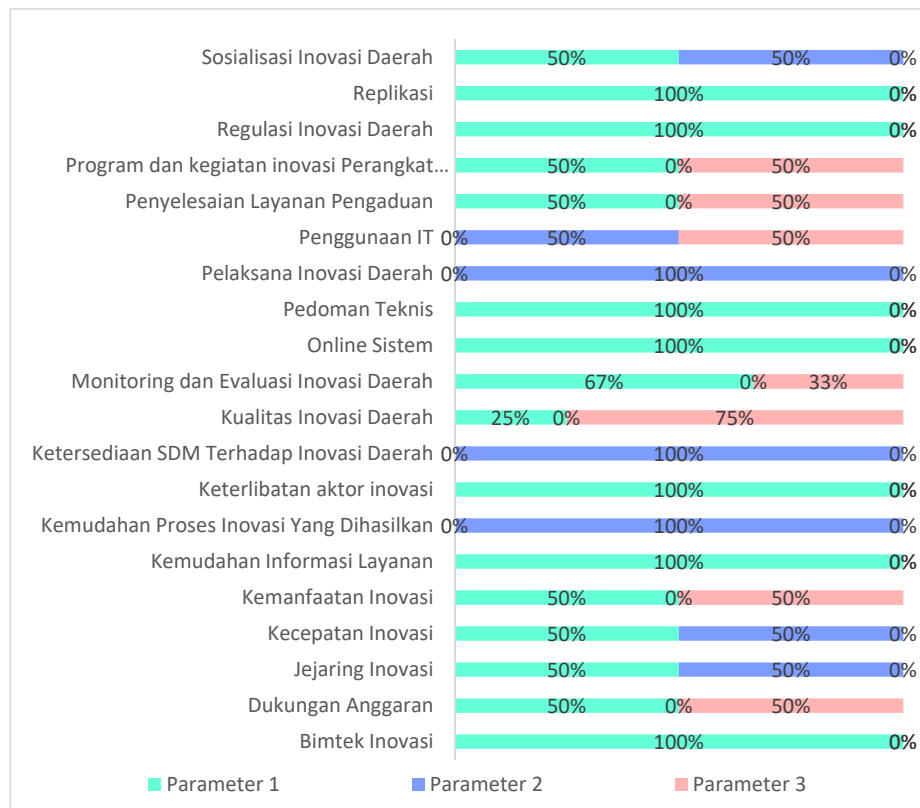


Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara

Dari 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Utara, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 77,22% sedangkan 22,78% lainnya telah terisi data pendukung. Dapat disimpulkan bahwa tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah

Kabupaten Aceh Utara masih cukup rendah. Indikator dengan tingkat keterisian data pendukung tertinggi adalah Indikator Kualitas Inovasi Daerah, dengan tingkat keterisian 44%. Artinya, 44% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Aceh Utara telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sementara itu, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Pedoman Teknis dan Replikasi yaitu sebesar 11%. Artinya, 11% dari inovasi terlapor telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 121. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah sebesar 75%, artinya 75% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dan Kemudahan Proses Inovasi yang

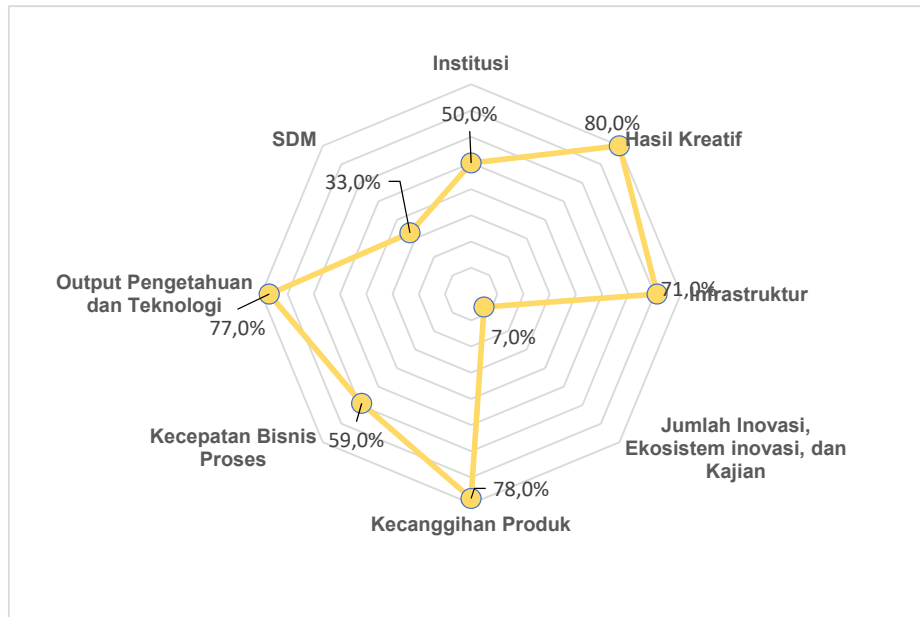
Dihasilkan sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi, Regulasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, *Online System*, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, dan Bimtek Inovasi sebesar 100%. Dengan kata lain, seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator-indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kabupaten Aceh Utara beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Berbelanja aman bebas Covid-19	0
Tanpa ragu belanja di swalayan masa Covid-19	0
Ayo Berwisata Aman bebas Covid-19	0
Siap Melayani dimasa Pandemi Covid-19	0
Tetap Menjaga Kesehatan di Kondisi Covid-19 New Normal di Restouran	15
Berbelanja aman bebas Covid-19	0
Wisatawan Kembali Menawan	15
LAYANAN TRILLIS (Three In One Ibu Melahirkan Sehat)	41
LAYANAN TRILLIS (Three In One Ibu Melahirkan Sehat)	87

L. KABUPATEN BENER MERIAH



Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bener Meriah memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 80,0%. Artinya, secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif memiliki skor yang sudah cukup mendekati skor maksimal (parameter 3). Sementara itu, variabel dengan capaian tersendah adalah Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian yaitu sebesar 7,0%. Dengan kata lain, secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



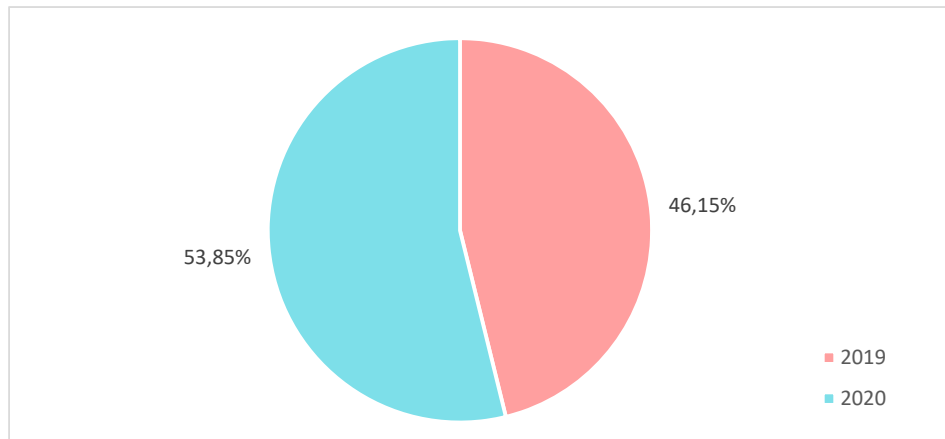
Gambar 123. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bener Meriah

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruh indikator pada Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang tidak mengalami perubahan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, dan Jumlah Pendapatan Perkapita. Jika ditelisik lebih lanjut, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mengalami perubahan, namun capaian tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Tingkat Pengangguran Terbuka naik sebesar 0,92%. Hal tersebut juga terjadi pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita. Jika dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun 1,85%, capaian Kabupaten Bener Meriah sudah memenuhi standarnya. Di sisi lain, Jumlah Peningkatan Investasi masih belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah, di mana Jumlah Peningkatan Investasi seharusnya mengalami peningkatan paling tidak sebesar 0,45%.

Selanjutnya, nilai IPM sedikit meningkat sebesar 0,01%, dan peningkatan tersebut sudah memenuhi standarnya di mana nilai IPM tidak mengalami perubahan atau tetap (0%). Penurunan Angka Kemiskinan juga mencatat kenaikan yang sedikit, yakni 0,07%. Artinya, angka kemiskinan mengalami penurunan 0,07% dibandingkan periode sebelumnya. Nilai tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebanyak 0,02%. Adapun Jumlah Peningkatan PAD memiliki peningkatan yang paling signifikan, yakni sebanyak 45,96%. Kenaikan tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Jumlah Peningkatan PAD meningkat 8%. Terakhir, Kualitas Peningkatan Perizinan naik sebesar 4,34%, namun indikator tersebut masih sedikit di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah di mana Kualitas Peningkatan Perizinan harusnya meningkat sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

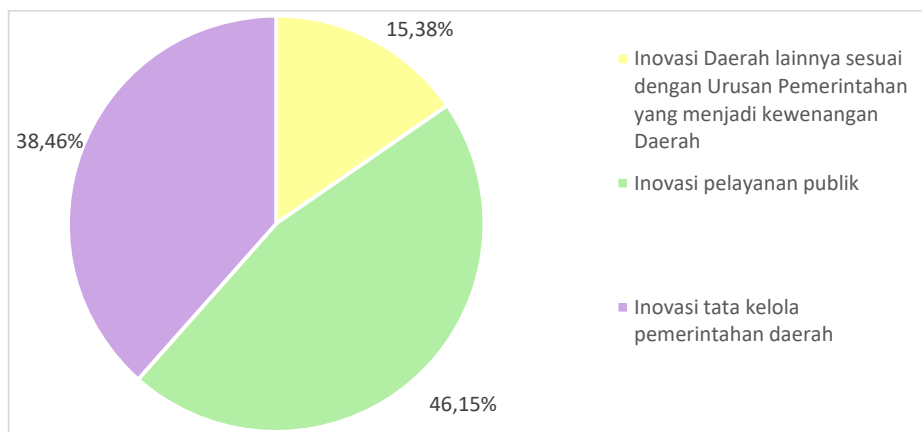
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bener Meriah telah diterapkan sejak tahun 2020, yaitu sebanyak 7 (53,85%) inovasi dari total 13 inovasi. Sementara itu, 6 (46,15%) inovasi sisanya diterapkan sejak tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

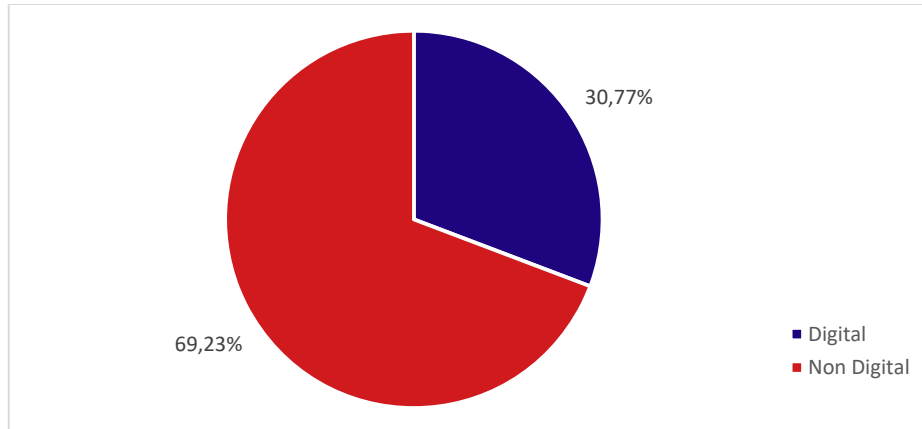


Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan bentuknya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bener Meriah terbagi atas inovasi pelayanan publik, novasi tata kelola pemerintahan daerah, dan inovasi lainnya. Sebagian besar di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 6 (46,15%) dari 13 inovasi. Sementara itu, 5

(38,46%) inovasi termasuk ke dalam inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan 2 (15,38%) merupakan inovasi lainnya.

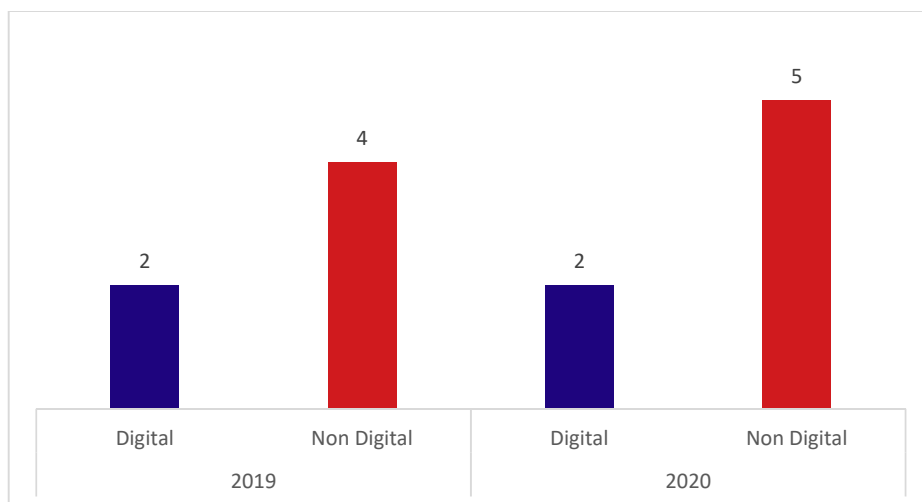
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 126. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Bener Meriah terbagi atas inovasi digital dan non digital. Mayoritas inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital, yakni sebanyak 9 (69,23%) inovasi. Sementara itu, 7 (30,77%) inovasi sisanya merupakan inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

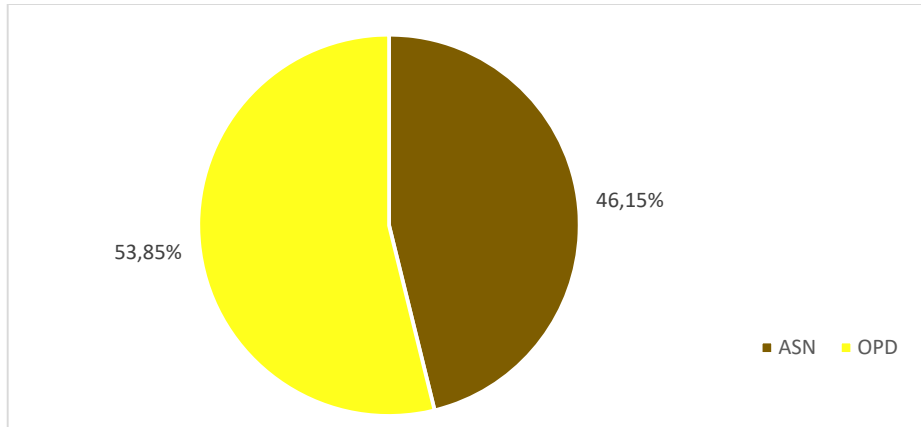


Gambar 127. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2019 dan 2020 terdiri dari inovasi digital dan non digital. Inovasi digital yang dilaporkan pada tahun 2020 dan

2021 memiliki jumlah yang sama, yakni sebanyak 2 inovasi. Sementara itu, inovasi non digital yang dilaporkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 inovasi, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 5 inovasi.

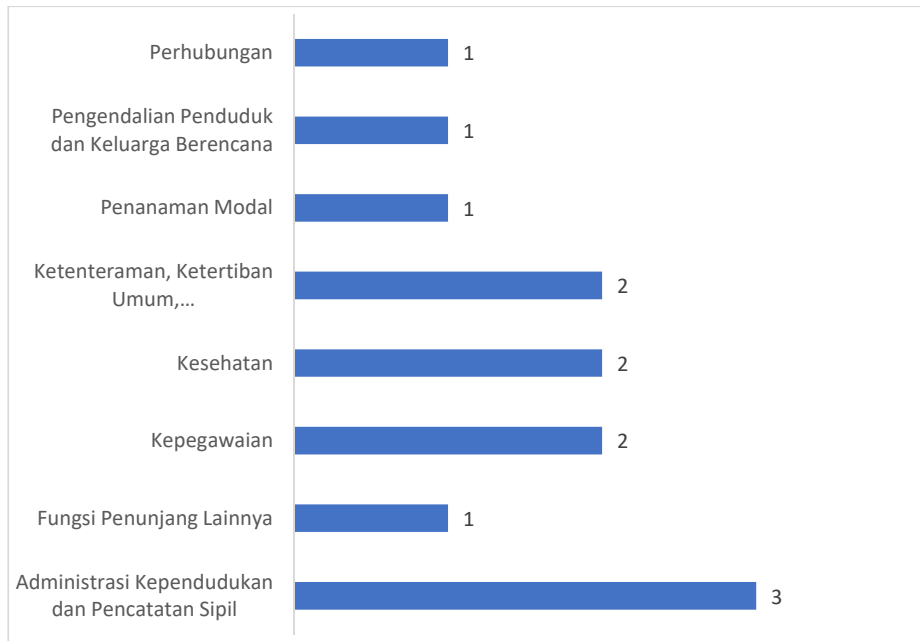
e. **Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 128. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan inisiatornya, inovasi di Kabupaten Aceh Selatan diinisiasi oleh 2 unsur, yakni OPD dan ASN. Sebagian besar inovasi tersebut diinisiasi oleh OPD, yaitu sebanyak 7 (53,85%) inovasi. Di sisi lain, sebanyak 6 (46,15%) inovasi sisanya diinisiasi oleh ASN. Sementara itu, inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, Kepala Daerah dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

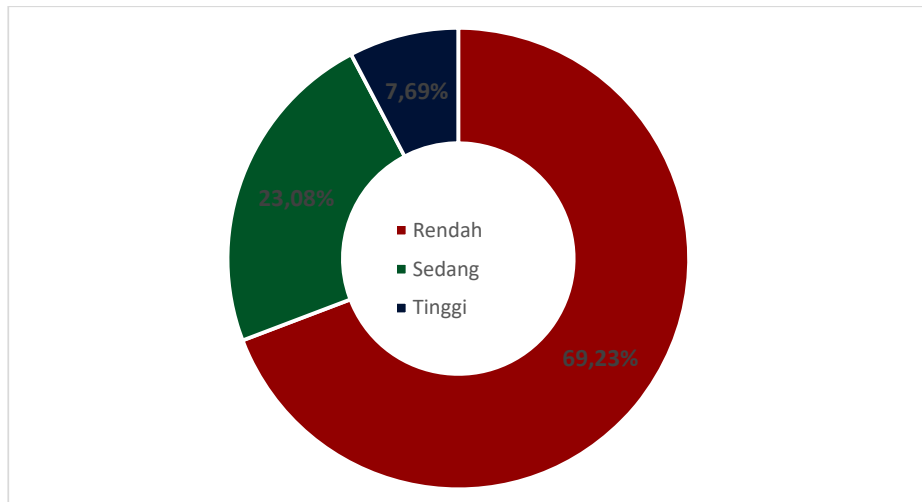
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 129. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bener Meriah

Inovasi daerah pada Kabupaten Bener Meriah tersebar pada 8 urusan pemerintahan. Dari urusan-urusan tersebut, terdapat 2 urusan yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar, yakni ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta kesehatan. Kedua urusan tersebut memiliki jumlah inovasi yang sama, yakni sebanyak 2 inovasi. Adapun urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki jumlah inovasi paling banyak, yakni sebanyak 3 inovasi. Selanjutnya, 2 inovasi termasuk dalam urusan kepegawaian. Adapun urusan perhubungan, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, penanaman modal, serta fungsi penunjang lainnya memiliki jumlah inovasi sebanyak masing-masing 1 inovasi.

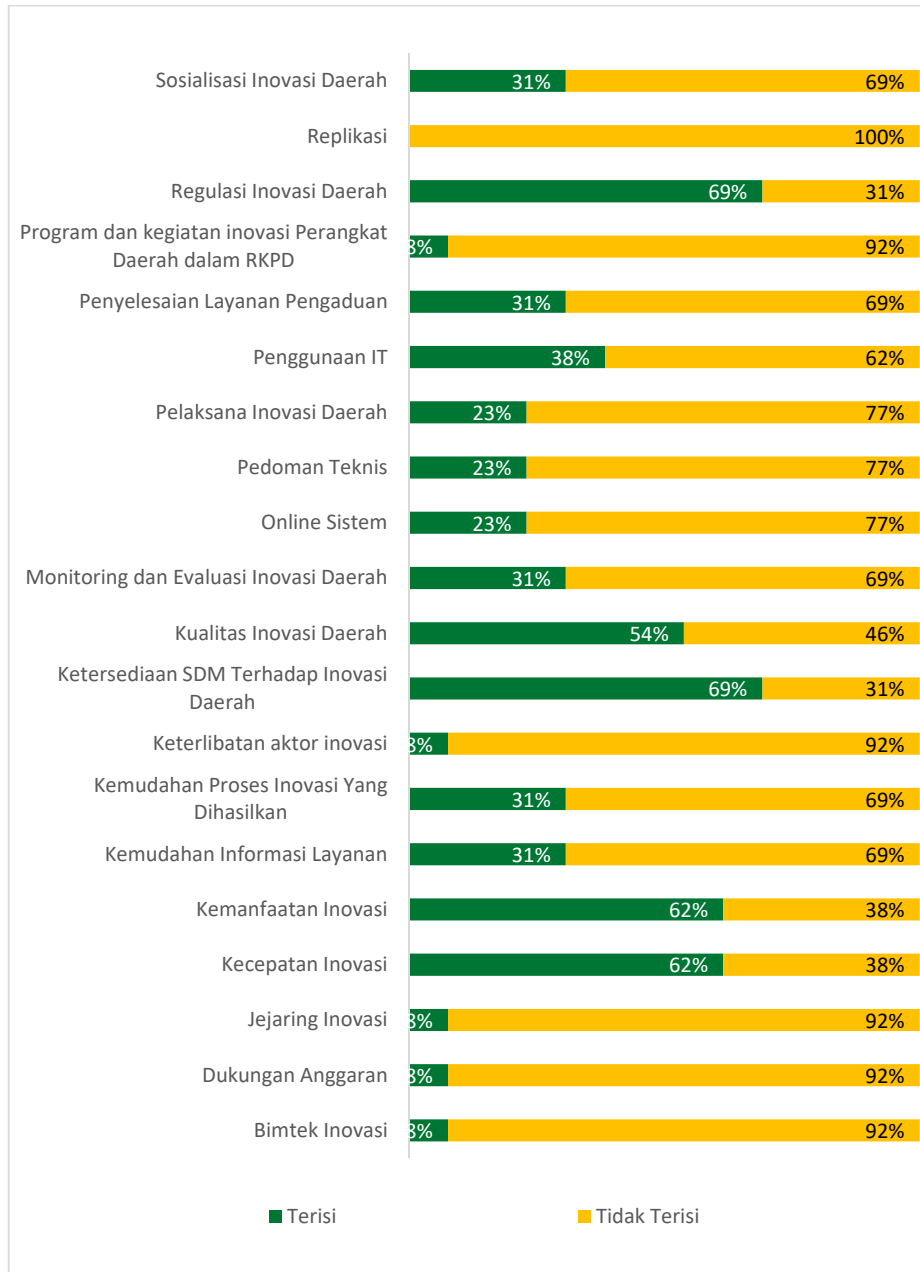
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bener Meriah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan inovasinya, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bener Meriah tersebar pada skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi. Sebagian besar inovasi, tepatnya 9 (69,23%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah. Sementara itu, 3 (23,08%) inovasi memiliki skor kematangan sedang dan 1 (7,69%) inovasi sisanya memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

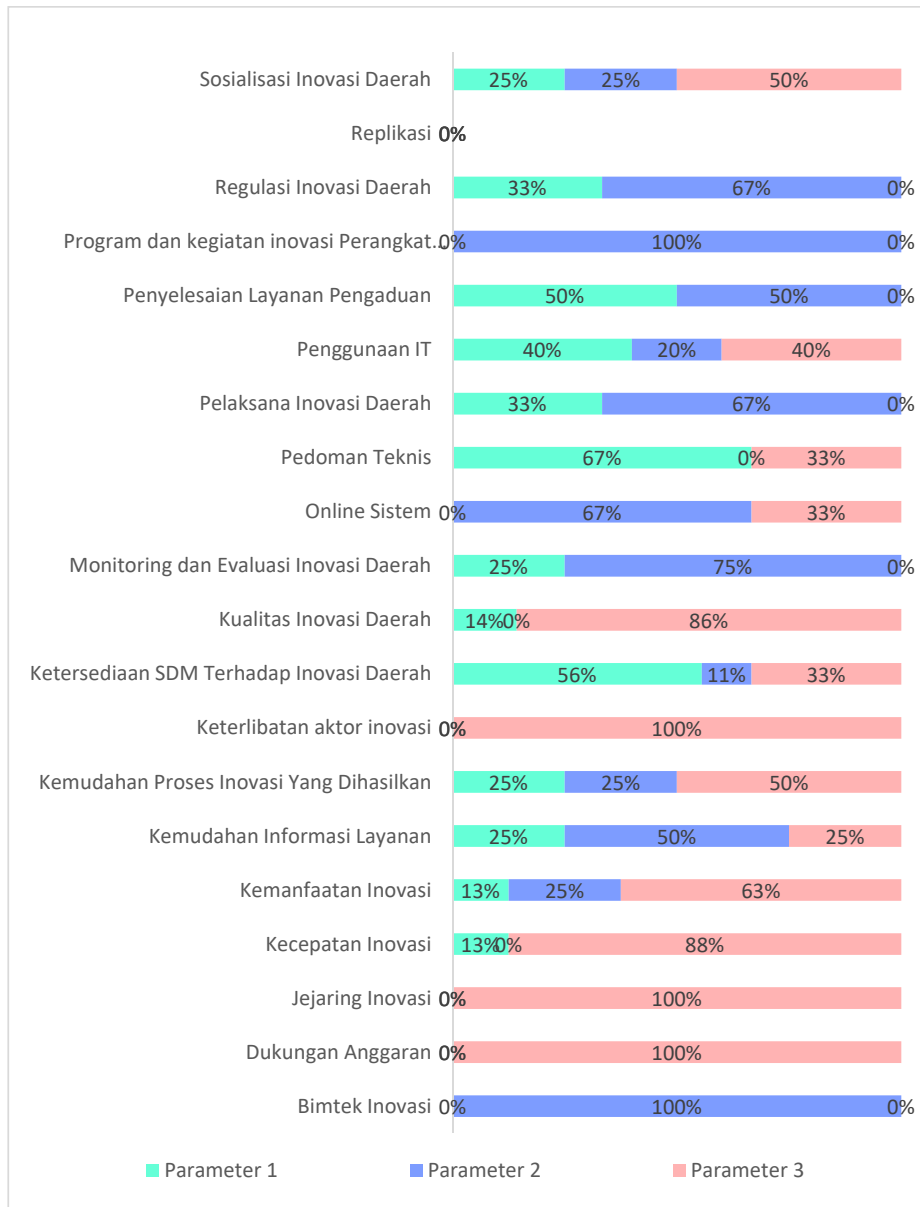


Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bener Meriah

Dari 9 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bener Meriah, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 69,23% sedangkan 30,77% lainnya telah terisi data pendukung. Dapat disimpulkan bahwa tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah Kabupaten Bener Meriah sudah cukup baik. Indikator dengan tingkat keterisian

data pendukung tertinggi adalah Regulasi Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, dengan tingkat keterisian 69%. Artinya, 69% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bener Meriah telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sementara itu, indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 0%. Artinya, belum ada inovasi terlapor yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 132. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Bener Meriah

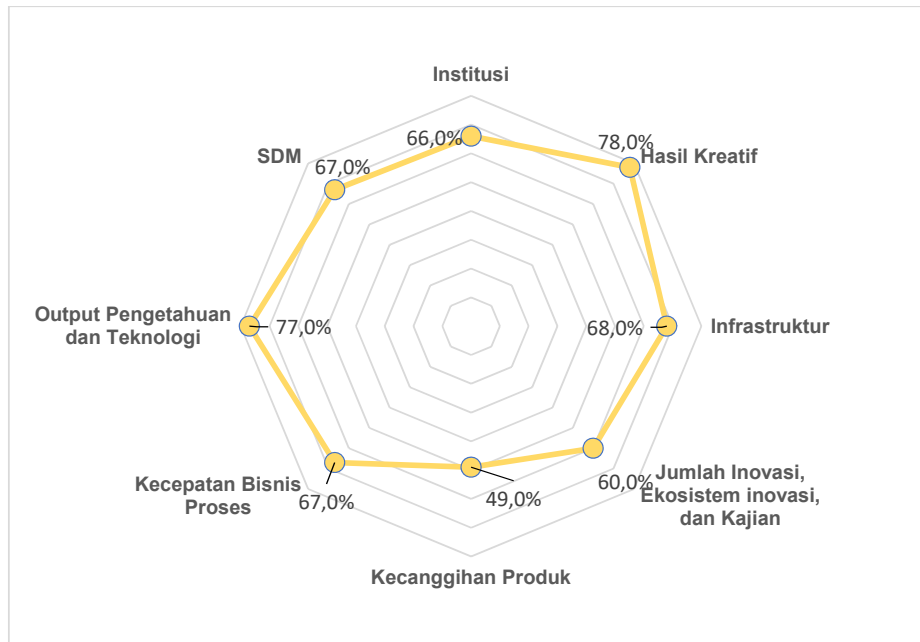
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Jejaring Inovasi dan Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dan RKPD serta Bimtek Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis sebesar 67%. Dengan kata lain, 67% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Bener Meriah beserta Skor Kematangannya

Tabel 13. Daftar Inovasi Kabupaten Bener Meriah beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Inovasi PIZSEL- 1 Jam (Pengurusan Izin Selesai 1 Jam) di DPMPTSP-Bener Meriah	8
Pelayanan Angkutan Umum yang "SEHAT" (Siap, Ekonomis, Higienis, Aman dan Tertib)	8
Dokumentasi dan Monitoring Pelaksanaan Apel Pagi ASN Melalui Media Sosial Facebook Group	0
Jemput Dora (jemput donor darah)	59
Gasrampung (Petugas Registrasi Kampung)	53
Alib Bata (Anak Lahir Bidan Beri Akta)	49
PROKLIM	0
DP3AKB MENYAPA	0
POS RESIK (Posyandu Remaja Sehat Inovatif dan Kreatif)	0
Sistem Informasi Kepegawaian	0
Klinik Kopi	102
PEDIS (PELAYANAN DISABILITAS)	5
Si Peling (Sistem Pelayanan Keliling)	53

M.KABUPATEN BIREUEN



Gambar 133. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bireuen

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, mayoritas Kabupaten Bireuen memiliki skor yang mendekati parameter 2. Skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 78.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Sedangkan skor terendah pada variabel Kecanggihan Produk yaitu 49.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut mendekati parameter 2.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 134. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bireuen

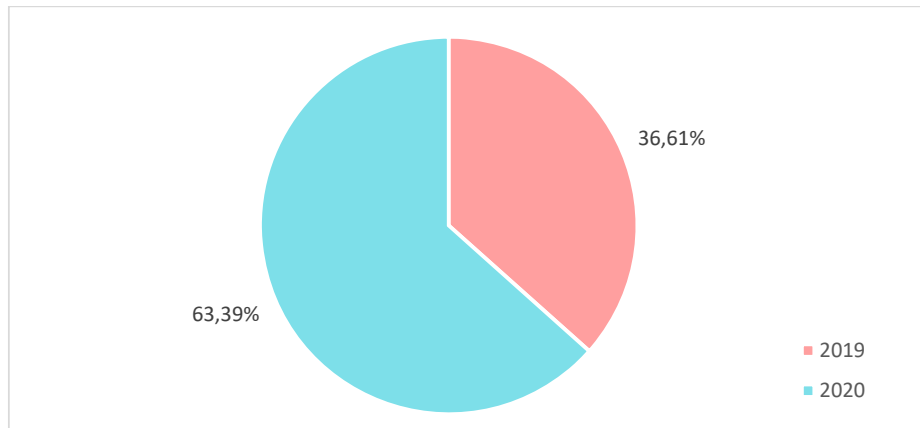
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen terjadi perkembangan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi perbaikan pada beberapa indikator yaitu adanya peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1.34%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 turun sebesar 1.34% dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah, kemudian indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 1.13%, artinya penduduk miskin pada Kabupaten Bireuen turun sebesar 1.13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator Nilai IPM juga menunjukkan peningkatan sebesar 0.01% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap, demikian juga dengan Jumlah Peningkatan Investasi yang meningkat sebesar 150%.

Terdapat beberapa indikator lainnya pada Kabupaten Bireuen yang belum mengalami perbaikan yaitu indikator Kualitas Peningkatan Perizinan turun sebesar 20.45% dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%, kemudian Jumlah Peningkatan PAD pada Kabupaten Bireuen menunjukkan kenaikan sebesar 3.60%, namun nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%, sedangkan Jumlah Pendapatan Perkapita

menunjukkan penurunan sebesar 0.35%, nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang memiliki batas penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

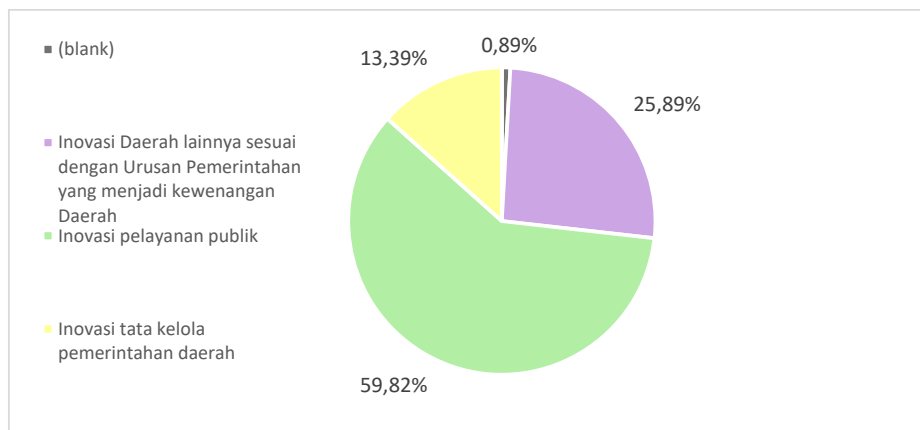
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Biereun

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 36.61% atau 41 inovasi dari 112 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Biereun tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 63.39% atau 71 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

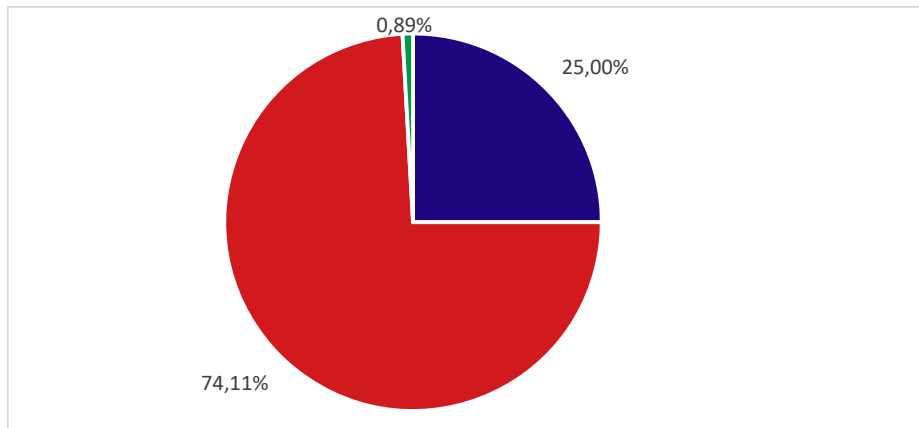


Gambar 136. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Biereun

Berdasarkan bentuk inovasinya, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Biereun merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sejumlah 67 inovasi (59.82%), sedangkan 29 inovasi (25.89%) yang dilaporkan merupakan

inovasi daerah lainnya, dan 15 inovasi (13.39%) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, sementara 0.89% atau 1 inovasi lainnya yang dilaporkan oleh Kabupaten Bireun tidak termasuk dalam kategori inovasi pelayanan publik, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maupun inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

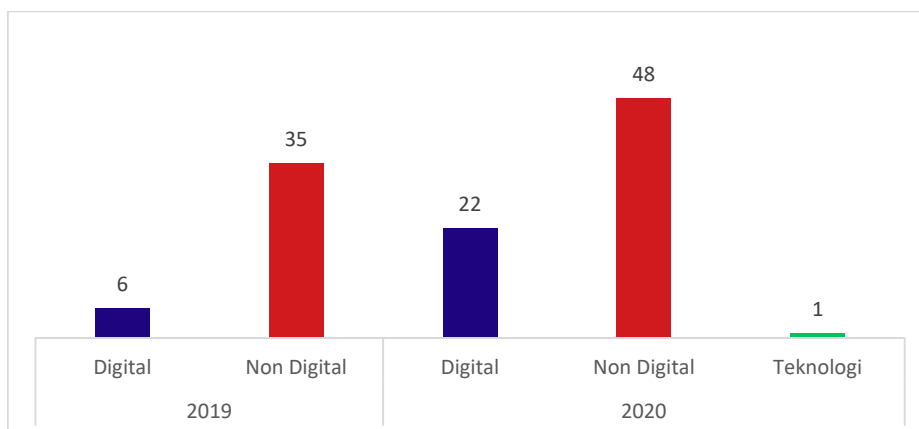
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 137. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Bireun

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 3 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bireun yaitu inovasi digital, inovasi non digital dan inovasi teknologi. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital sebesar 74,11% atau 83 inovasi dari 112 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Bireuen, kemudian 25% atau 28 inovasi merupakan Inovasi Digital, dan 0,89% atau 1 inovasi lainnya merupakan Inovasi Teknologi.

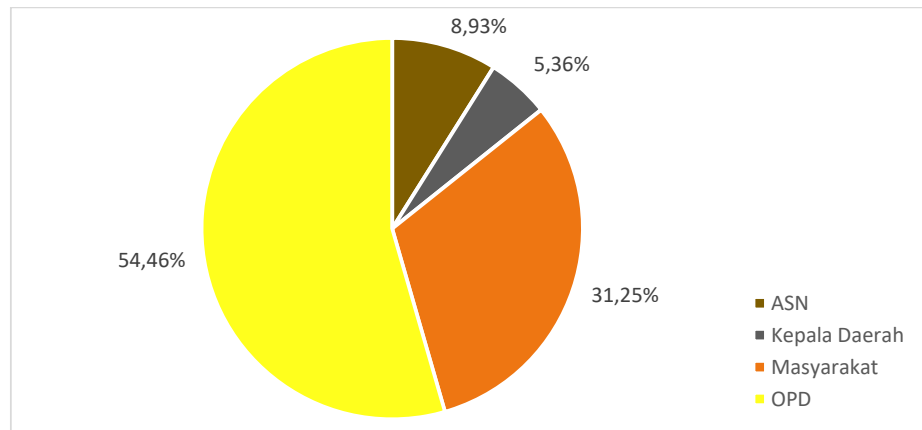
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 138. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bireun

Dapat dilihat bahwa jumlah Inovasi digital dan inovasi non digital mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2019 untuk inovasi digital yang diterapkan sejumlah 6 inovasi sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 inovasi, demikian juga dengan Inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 35 inovasi lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 48 inovasi, selain itu juga terdapat peningkatan pada inovasi teknologi dimana pada tahun 2019 tidak ada inovasi teknologi yang diterapkan oleh Kabupaten Bireun kemudian tahun 2020 terdapat 1 inovasi teknologi.

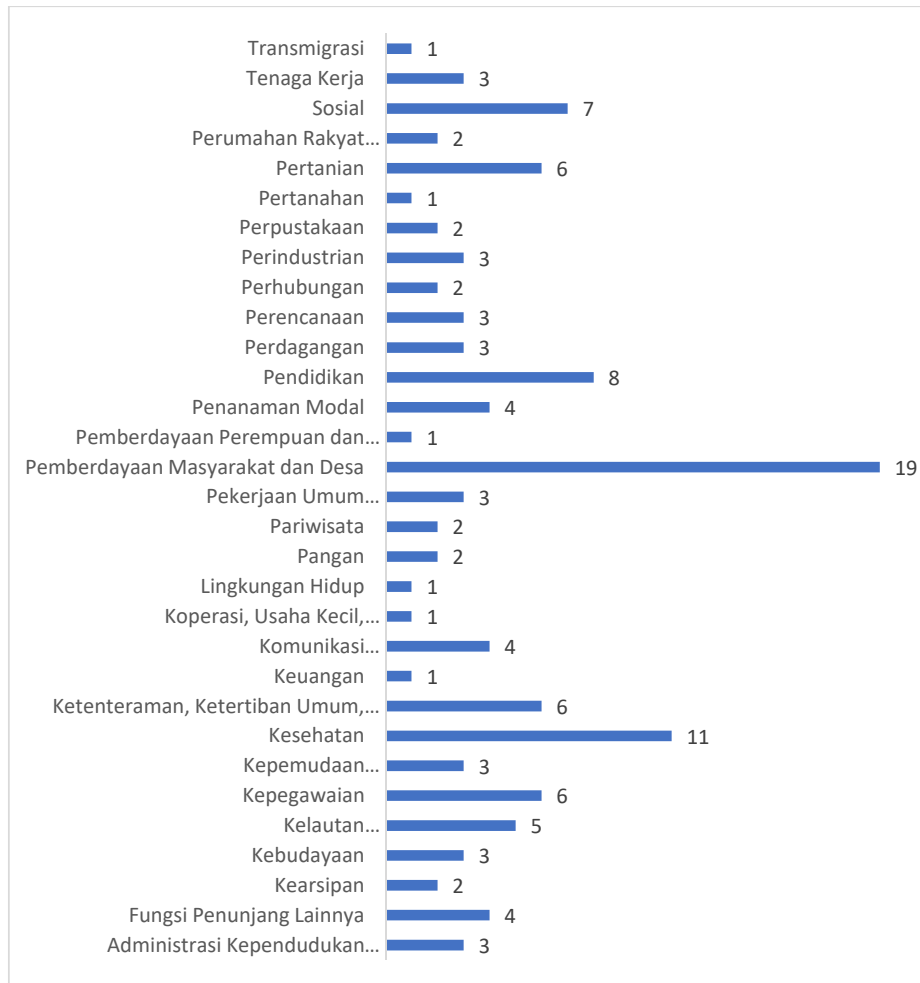
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 139. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kabupaten Bireun

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bireun pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh perangkat daerah sebesar 54,46% (61 inovasi), kemudian 31,25% (35 inovasi) diinisiasi oleh masyarakat, sedangkan 8,93% (10 inovasi) diinisiasi oleh ASN, dan 5,36% (6 inovasi) lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

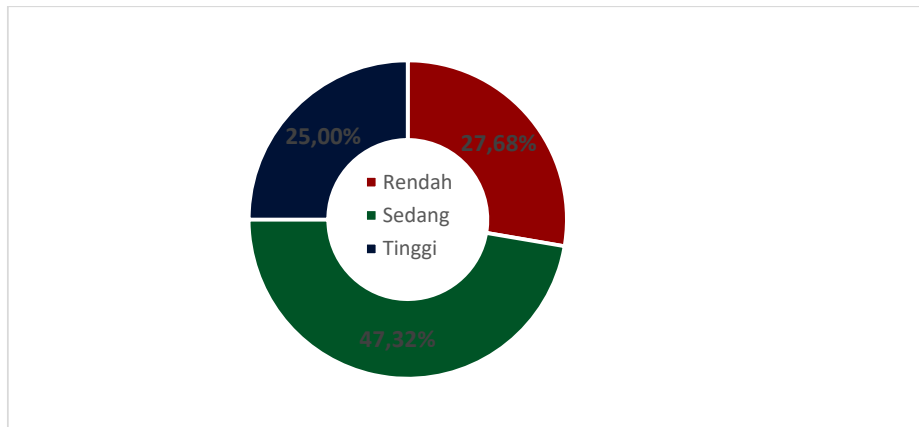
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 140. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bireuen

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Bireuen berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 31 urusan. Urusan yang paling banyak adalah pemberdayaan masyarakat dan desa dengan 19 inovasi dari 112 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat seluruh urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 7 inovasi, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 2 inovasi, pendidikan dengan 8 inovasi, pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 3 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan 6 inovasi, kesehatan dengan 11 inovasi.

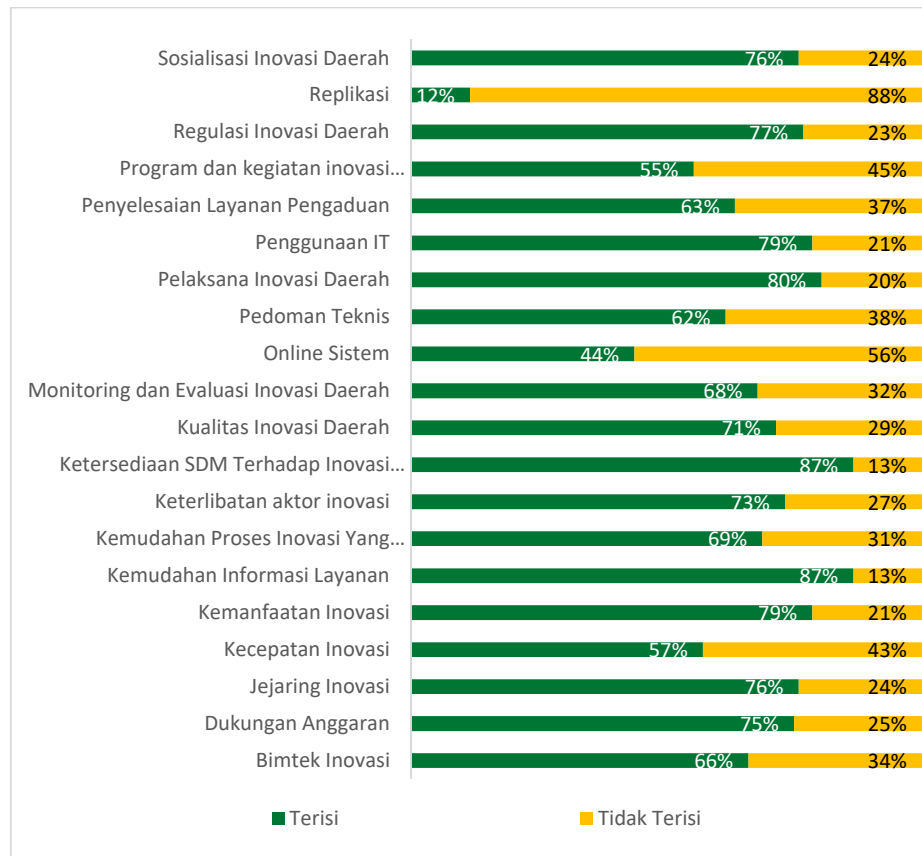
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 141. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Bireuen

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Kabupaten Bireuen, mayoritas inovasi memiliki kategori skor kematangan sedang (skor kematangan antara 50 – 100) sebesar 47.32% (53 inovasi) dari 112 inovasi yang dilaporkan, selain itu dari inovasi yang dilaporkan tersebut terdapat kategori inovasi dengan skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50 pada Kabupaten Bireuen sebesar 27,68% (31 inovasi), sedangkan untuk inovasi yang telah mencapai skor kematangan tinggi yaitu skor kematangan diatas 100 sebesar 25% (28 inovasi).

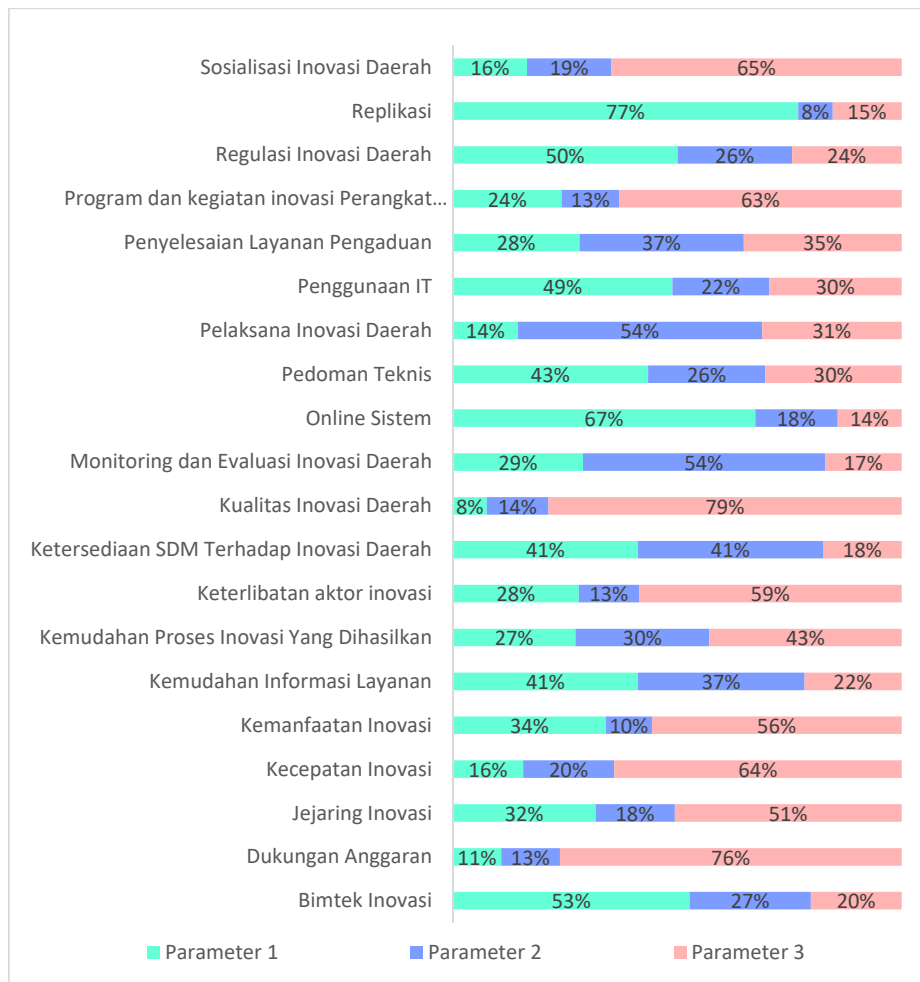
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 142. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bireun

Dari 112 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bireun, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 32.28%. Sedangkan, 67.72% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah dan Kemudahan Informasi Layanan merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 87% artinya 97 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bireun telah terisi data pendukung dari kedua indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 12% artinya hanya 13 dari 112 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 143. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Bireun

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Kualitas Inovasi Daerah sebesar 79% artinya 79% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah dan indikator Monitoring dan Evaluasi inovasi daerah yaitu sebesar 54% artinya 54% dari inovasi yang telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter kedua untuk indikator tersebut. Sedangkan, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 77%

artinya mayoritas inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Biereun beserta Skor Kematangannya

Tabel 14. Daftar Inovasi Kabupaten Biereun beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
MATAHARI (Manajemen Asuhan Tradisional Sehat dan Mandiri)	135
"SiKeling" (Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling)	132
PASIR BUMEDA (Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Budidaya Udang Vaname Dana Desa)	130
Kelompok Informasi Gampong (KIG) Berbasis Digital	122
e-KEURANI (Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi Berbasis Elektronik)	122
KONVERGANJA (Perencanaan Pengembangan Ekonomi Alternative Melalui Konversi Tanaman Ganja ke Tanaman Jagung)	120
PELUMAS SITUAH (Pelayanan Untuk Masyarakat Siap Tunggu Di Rumah)	117
One Day Service	117
PELANA SIDIAN (Pelayanan untuk Anak Siap Diantar)	117
PRAMA: PRAJA MASYARAKAT	117
One Day Service	116
"RGG" (Rumoh Gizi Gampong)	116
SELAWATAN (Sekolah Lapang Wanita Tani)	116
KREASI KOLAK (Koordinasi Rencana Aksi Kabupaten/Kota Layak Anak)	113
Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIMPELIK)	112
MENJUS: MEDIASI NON JUSTISI	111
CAKAP: CEGAH KESEMBRAUTAN AKSI PROAKTIF	111
Layanan campuran (Blended Service)	106
Zona PPDB	105
ASEDESE (Ayo Sekolah Dengan Selamat)	105
BILA SIDADI MELONTAR	105
Apresiasi Gampong Sehat	103
SANBUS	103
Mé Bu Gatéing	101
SULE (Sistem Unit Layanan Elektronik)	100
Mesin Pencacah Pakan Ternak	100
EXTREME ADVENTURE LAUNCHING EKOWISATA ARUNG JERAM PANTE	100

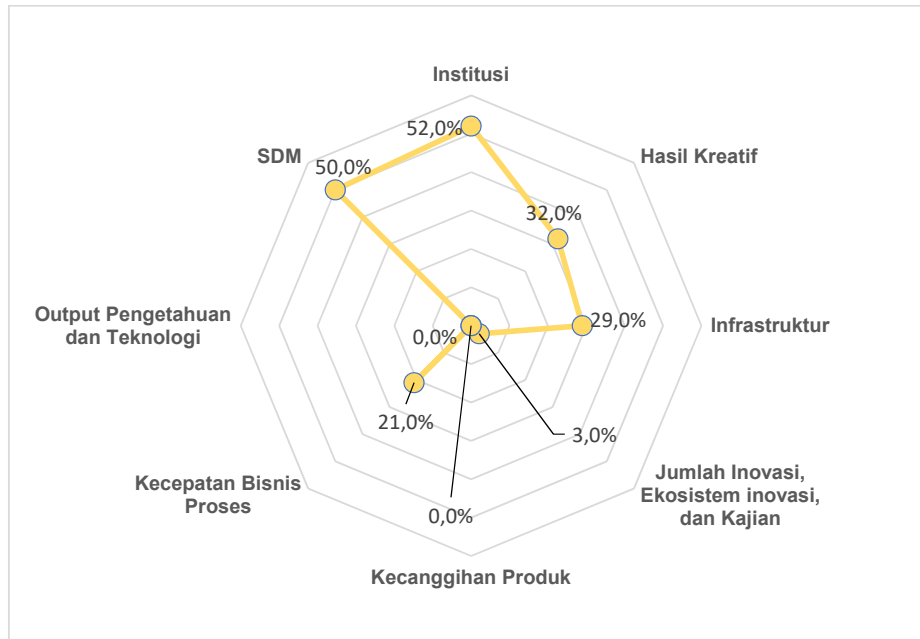
Nama Inovasi	Skor Kematangan
PEUSANGAN	
BIMA AKSI (Bina Marga Siap Beraksi)	100
Kawasan Bebas Asap Rokok dan Anti Narkoba Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen	99
LAJANG TERUS (Layani, Jalankan Tertib Ukur Selalu)	99
BENUR JAYA	97
AKSI EMAS (AKTIFITAS PIJAT REFLEXY UNTUK MEMBANTU MENGATASI STRES DAN KECEMASAN PADA ANAK) DI PAUD RUMOH ACEH, DESA LHOK AWE-AWE, KECAMATAN KUALA	97
BUMG MALAKA	96
KONVERGANJA (PENGEMBANGAN EKONOMI ALTERNATIF MELALUI KONVERSI TANAMAN GANJA KE TANAMAN JAGUNG DI KABUPATEN BIREUEN)	96
Jasa Sewa Peralatan Dan Dekorasi Pelaminan Desa Kuta Barat Makmur	96
Mesin Granulator Pupuk Organik	95
Mesin Pembelah Biji Pinang Produksi Posyantekdes Maju Bersama Desa Paya Rangkuluh	95
Sule Letter	94
e-KEURANI (Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi Berbasis Elektronik)	94
KESATRIA “ Kesenian Tradisional Aceh Kabupaten Bireuen “	94
Su_Gampong	91
JINGKI IE (HYDROLIC RUM PUMP)	91
PAK HEBAT (Pakan Herbal Jilat)	91
ALAT CETAK BATA INTERLOCK MANUAL	88
BANTUAN MODAL USAHA ZAKAT PRODUKTIF	87
Kecap Manis (Kelas edukasi Calon Pengantin Menuju Pernikahan Sehat dan Harmonis)	85
PANEL RUMAH RISHA	83
Klinik Akuntansi	83
Sentra Industri Geulanggang Maju Mandiri	83
(KERAMAT) Kerukunan Umat Beragama	81
Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	80
Pengajian Dirassah Khassah	79
Optimalisasi Akses Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	78
Bireuen Kota Santri	78

Nama Inovasi	Skor Kematangan
"MUZAKARAH" (Muzakarah Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen)	77
Media Publikasi dan Informasi (MEDIASI)	75
Pembangunan Rumah Sehat Sederhana	75
"LEMBAGA STEMPEL" ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN	73
KENANGAN DARI INTAN (Kerajinan Tangan Dari Kesenian Rotan)	72
SIBELUT - Sistem Informasi Berbasis Lumbung Data	71
BINA KESEHATAN SEKOLAH/ MADRASAH (UKS/M)	71
Sanitasi Air Bersih Berbasis Masyarakat Gampong Bate Dabai Makmur	70
BE ACONG (BEASISWA DIPLOMA ACEH CAROENG)	70
TAUBAT " Tausiyah Melalui Khutbah Jum'at"	68
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR	65
Mesin Pencacah Pakan Ternak Produksi Posyantekdes Maju Bersama Desa Paya Rangkuluh	62
SABUN CAIR LONGRAH	62
HIRAMA (Program Hidup Rukun, Aman, Toleransi, Umat Beragama)	61
BIREUEN GLEEH	61
INVENTARISASI DATA DAYAH/PESANTREN	60
PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN PADA RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	59
TEH DAUN KELOR "CHIE JEBS"	58
BATA RINGAN (HEBEL)	58
GlaucousTea (Original Butterfly Pea Tea) Produk Industri Rumah Tangga dari Bunga Telang	58
Optimalisasi Akses Produk Hukum Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	56
AIP (Aceh International Percussion)	55
Pangkat Paperless	54
Bantuan Modal Usaha Kecil No Olah No Riba	52
BATA RINGAN FOAM	52
AMBULAN MEU PEP PEP	51
Jasa Sewa Peralatan Dan Dekorasi Pelaminan Desa Kuta Barat Makmur	50
JEMBATAN LADA (Jemput Bahan Pembuatan Laporan Daerah)	48
GARDUKES (Garam Dapur Untuk Kesehatan)	48
Perpustakaan Gampong Meubaca (GACA)	46

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Alat Cang Situk	41
PENGAWALAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI BERSAMA LINTAS SEKTOR MELALUI KASTA(Kamoe Sajan Gata)	41
JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)	40
Budidaya Jangkrik Desa Leubu Cot kecamatan Makmur	35
PELAYANAN DATA UREUNG GASIN (PEUDUG) ONLINE	35
Posyandu Terintegrasi - Program Inovasi Desa Geulumpang Baroh Kecamatan Kuala	33
SUDES (STAF URUSAN DESA)	33
Cangkir Tongkat Ali	32
inovasi Tribun Lapangan Bola desa alue dua kecamatan Makmur	26
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan Botol Air Mineral Bekas	25
Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kesejahteraan Sosial	23
Penetasan Telur Sederhana Desa Paya Dua Kecamatan Makmur	19
Layanan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi	18
CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) IKUT SERTA DALAM PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH	9
PAMITEKA (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	8
Budidaya Madu Kelulut (Linot) Kegiatan Inovasi BUMG Desa Meuse	6
TANDIKARAT (Tandatangan Elektronik pada surat menyurat)	4
Aplikasi Asap Cair pada Tambak Ramah Lingkungan	2
BERTAPA (Bermalam Aman Tanpa Corona)	0
"SI JEUMPA" (SISTEM BELANJA TANPA JUMPA)	0
PATARANA (PANTAI JANGKA BEBAS CORONA)	0
LAKSAMANA (LAYANAN KHUSUS PERIZINAN SIMPEL dan AMAN CORONA)	0
Sharing data antar komputer klien	0
TALK SHOW SOSIALISASI ZAKAT	0
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	0
SIC	0
Penggunaan Mesin Cuci Motor/Mobil Sebagai	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Mesin Penyemprotan Rumput (Gulma) dan Tanaman	
PEMASJUNG (Perpustakaan Masyarakat Bebas Kunjung)	0

N. KABUPATEN GAYO LUES



Gambar 144. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Gayo Lues memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 52%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi memiliki capaian skor yang mendekati parameter 2, sedangkan skor terendah pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, dan variabel Kecanggihan Produk yaitu 0%, artinya indikator – indikator pada kedua variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 145. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

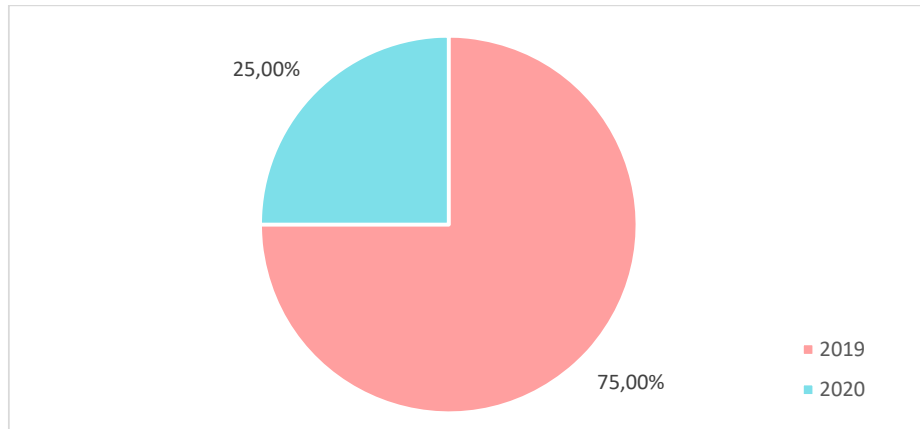
Melalui grafik capaian aspek satuan pemerintah daerah di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues terjadi perkembangan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi perbaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.27%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.27% dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0.55%, artinya penduduk miskin pada Kabupaten Gayo Lues turun sebesar 0.55% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana nilai pada indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Indikator Nilai IPM meningkat sebesar 0.35% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Jumlah Peningkatan PAD pada Kabupaten Gayo Lues juga menunjukkan kenaikan sebesar 13.59% dimana nilai tersebut diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 8% demikian juga dengan Jumlah Peningkatan Investasi meningkat sebesar 409.40%.

Terdapat beberapa indikator lain pada Kabupaten Gayo Lues yang belum mengalami perbaikan yaitu Kualitas Peningkatan Perizinan menunjukkan penurunan sebesar 19.30% dimana nilai tersebut lebih rendah dan memiliki selisih

yang cukup jauh dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Demikian pula dengan Jumlah Pendapatan Perkapita turun sebesar 5.38% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya hanya turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

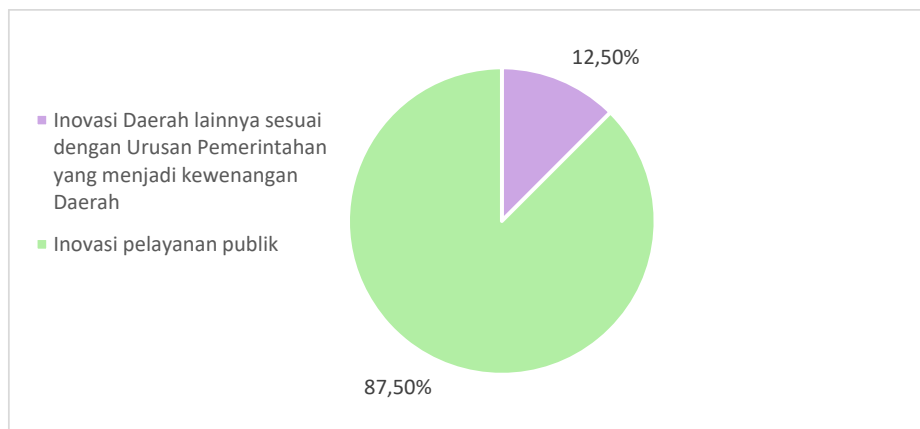
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 146. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, 75% atau 6 inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan terdapat 25% atau 2 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

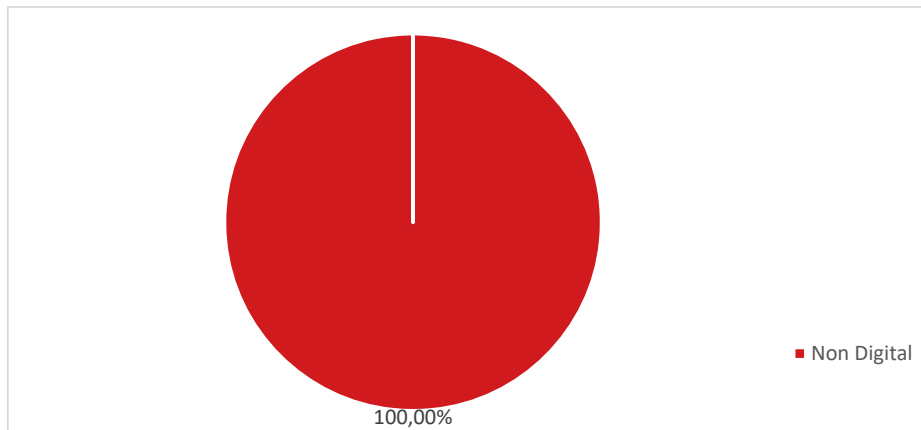


Gambar 147. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 87.50% (7 inovasi), sedangkan 12.50% atau 1 inovasi lainnya yang dilaporkan merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

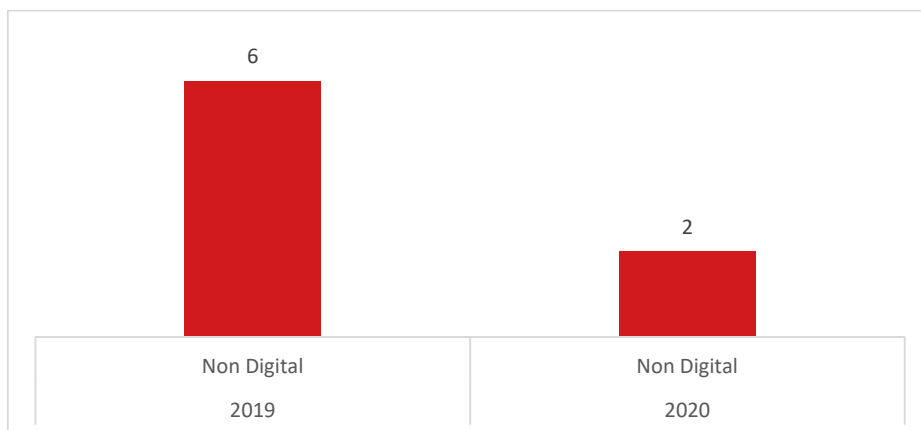
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 148. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Pada indeks inovasi daerah tahun penilaian 2021, jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues merupakan inovasi Non digital. Sementara inovasi digital maupun teknologi belum dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues pada tahun tersebut.

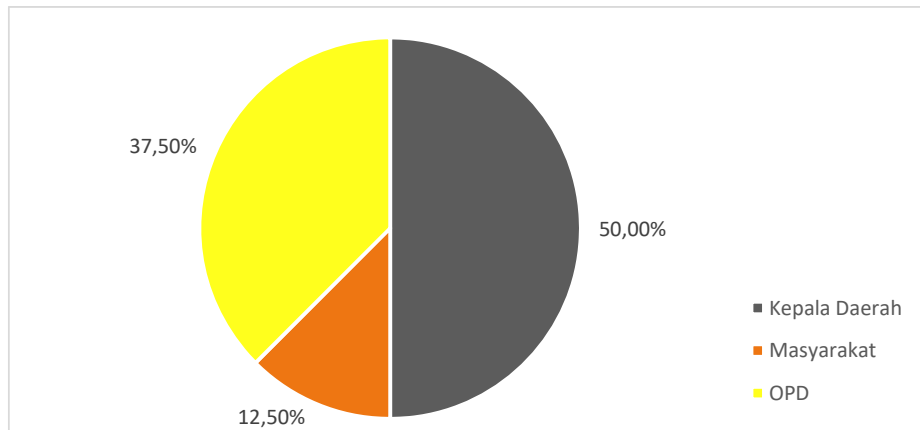
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 149. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Grafik diatas menunjukkan progres jumlah inovasi berdasarkan tahun dan jenis inovasi yang di diterapkan Kabupaten Gayo Lues. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi non digital yang diterapkan sejumlah 6 inovasi, sedangkan tahun 2020 inovasi non digital turun menjadi 2 inovasi.

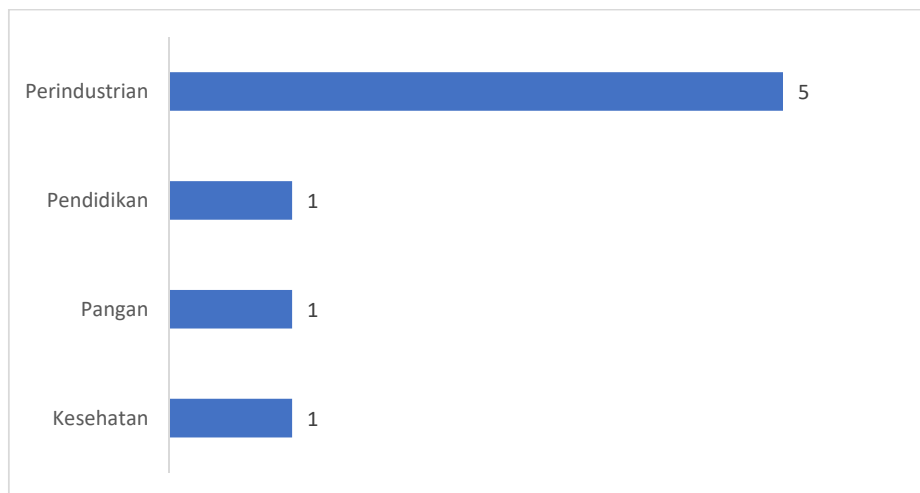
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 150. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Gayo Lues

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Kepala Daerah yaitu sebesar 50% (4 inovasi), sedangkan 37,50% (3 inovasi) dari inovasi yang dilaporkan diinisiasi oleh OPD, dan 12,50% (1 inovasi) diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

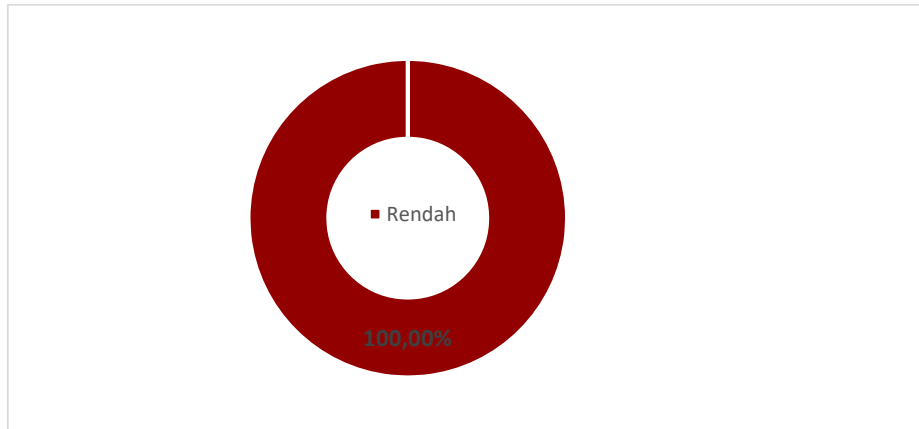
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 151. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Gayo Lues

Dari sebaran inovasi daerah tersebut dapat dilihat terdapat 4 urusan yaitu perindustrian, pendidikan, pangan, dan kesehatan. Urusan yang paling banyak adalah urusan perindustrian dengan 5 inovasi dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues, terdapat 2 dari urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Pendidikan dengan 1 inovasi dan urusan kesehatan dengan 1 inovasi, sedangkan untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

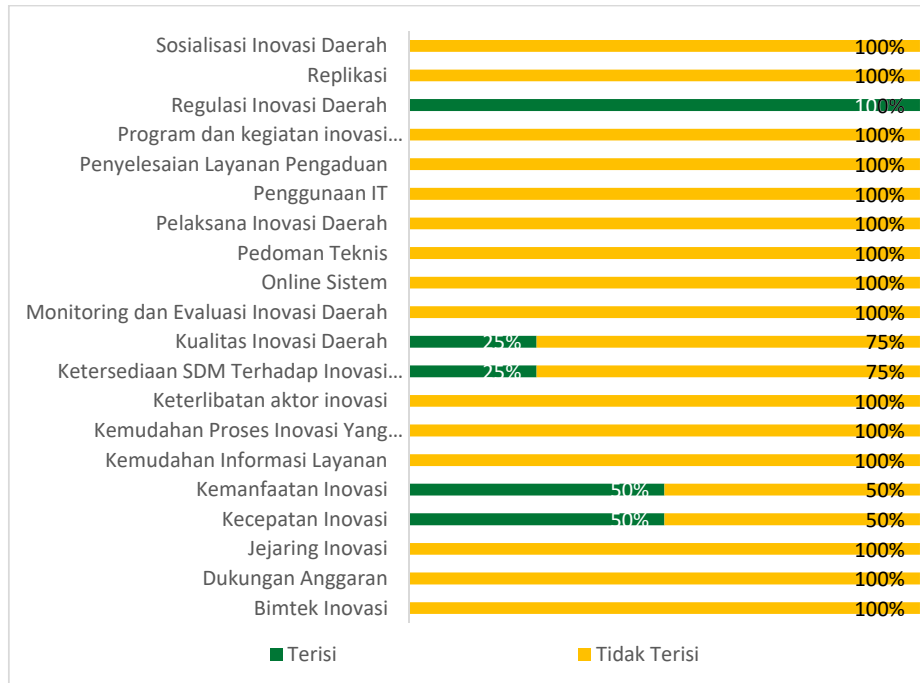
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 152. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Gayo Lues

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi dengan kategori skor kematangan di bawah 50 (skor kematangan rendah) sebesar 100%, dan tidak ada inovasi dengan skor kematangan antara 50 – 100 (skor kematangan sedang) maupun inovasi dengan skor kematangan diatas 100 (skor kematangan tinggi), artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues memiliki tingkat skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

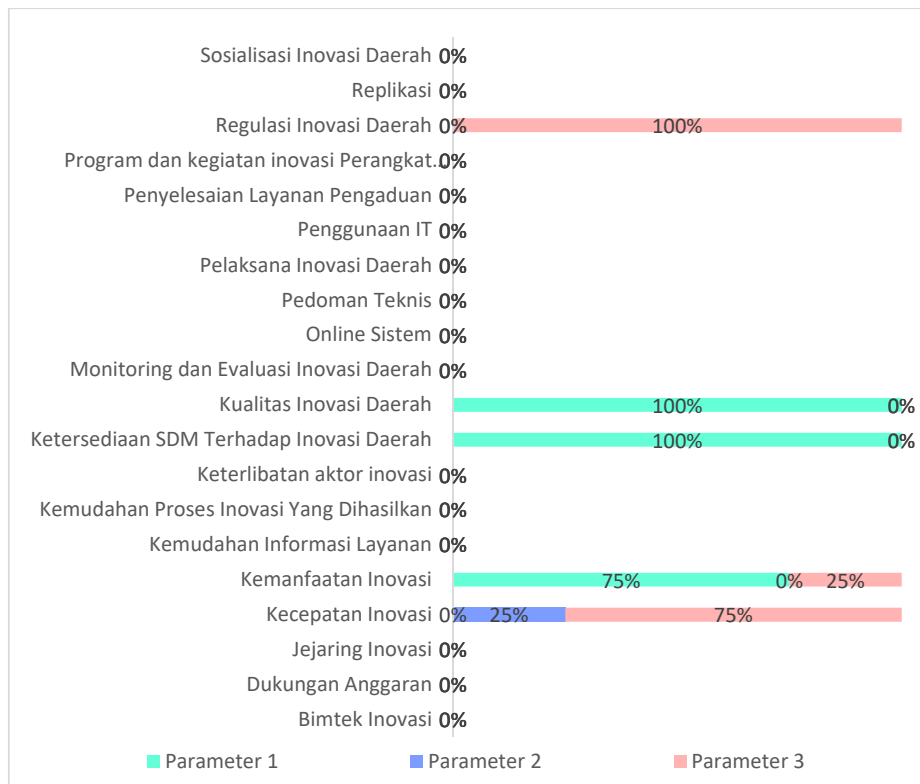


Gambar 153. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 87,50%. Sedangkan, 12,50% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Gayo Lues telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

Berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung indeks inovasi daerah, dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten Gayo Lues masih banyak terdapat indikator – indikator yang tidak terisi data pendukung atau tingkat keterisian 0% yaitu indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran, dan Bimtek Inovasi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 154. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues

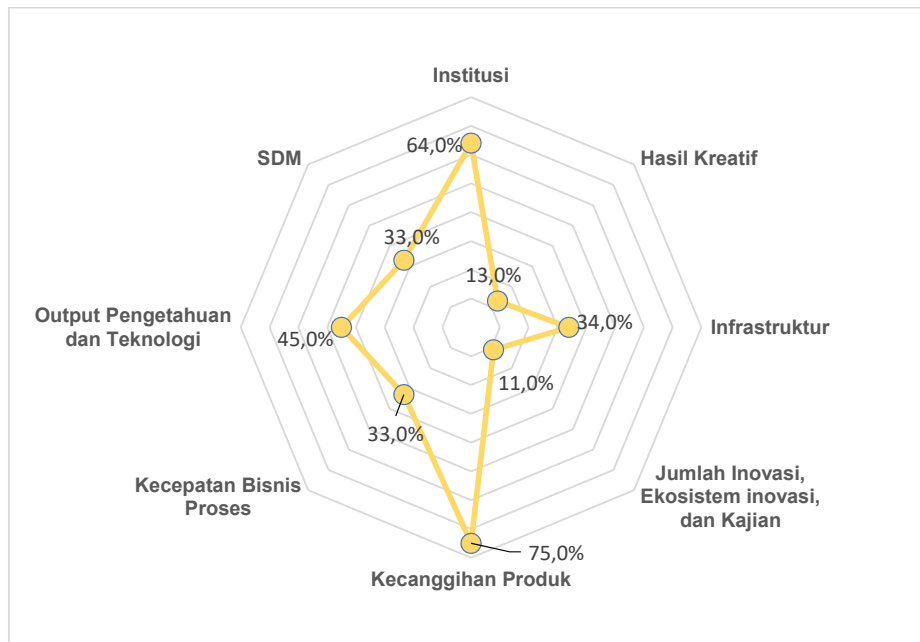
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter ketiga untuk indikator tersebut. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi sebesar 25% artinya 25% dari inovasi yang telah terisi data pendukung indikator kecepatan inovasi termasuk dalam kategori parameter 2 (dua). Sedangkan, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut, namun perlu diperhatikan juga berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah bahwa inovasi yang mengisi indikator kualitas inovasi daerah dan ketersediaan SDM hanya 2 inovasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Gayo Lues beserta Skor Kematangannya

Tabel 15. Daftar Inovasi Kabupaten Gayo Lues beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pin Penghargaan	36
Ketel Berbahan Bakar Oli Bekas dengan Blower	33
Ketel Berbahan Bakar Oli Bekas	26
Bawang Merah salah satu komoditi unggulan untuk menjamin ketahanan pangan di sela Covid-19 menghadapi New Normal life di Pasar Tradisional Kabupaten Gayo Lues	12
Pengolahan SDA Menjadi Sabun Mandi Cair	12
Pengolahan Serewangi menjadi Hand Sanitizer	12
Pengolahan SDA Menjadi Sabun Mandi	12
Buku Ibu Hamil Berbahasa Gayo	12

O. KABUPATEN NAGAN RAYA



Gambar 155. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Nagan Raya memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 75%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Kecanggihan Produk sudah

memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3), namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 11% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 156. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Nagaland Raya

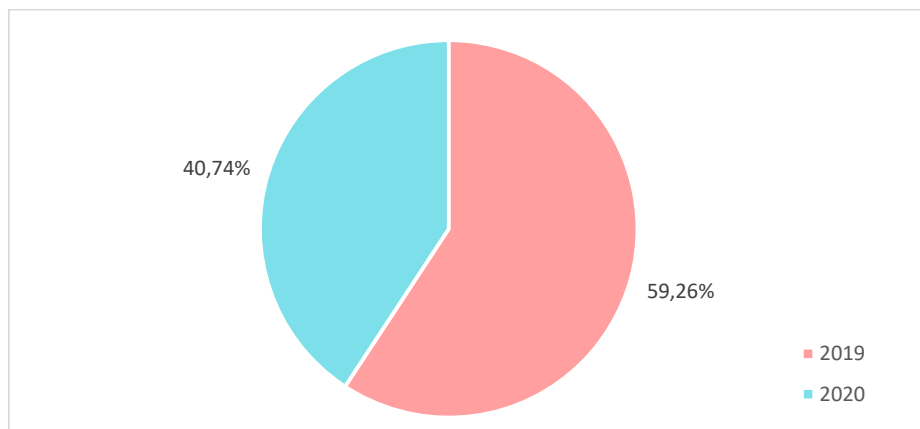
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagaland Raya belum mengalami perbaikan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi perbaikan pada beberapa indikator yaitu peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.24%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 turun sebesar 0.24% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0.27%, artinya penduduk miskin pada Kabupaten Nagaland Raya turun 0.27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana nilai pada indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang sebesar 0.02%. Nilai IPM meningkat sebesar 0.07% dimana nilai tersebut juga lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0.00% atau tetap, kemudian Jumlah Peningkatan Investasi pada Kabupaten Nagaland Raya menunjukkan peningkatan sebesar 294.87% dimana nilai tersebut diatas standar nasional indeks inovasi daerah sebesar 0.45%. Demikian juga dengan Jumlah Pendapatan Perkapita naik

sebesar 4.70% dimana nilai tersebut juga lebih besar dari standar nasional indeks inovasi daerah yang memiliki batas penurunan 1.85%.

Terdapat beberapa indikator lain pada Kabupaten Nagan Raya yang belum mengalami perbaikan yaitu Kualitas Peningkatan Perizinan menunjukkan penurunan sebesar 62.45% dimana nilai tersebut cukup jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%, demikian juga dengan Jumlah Peningkatan PAD yang mengalami penurunan sebesar 20.68% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

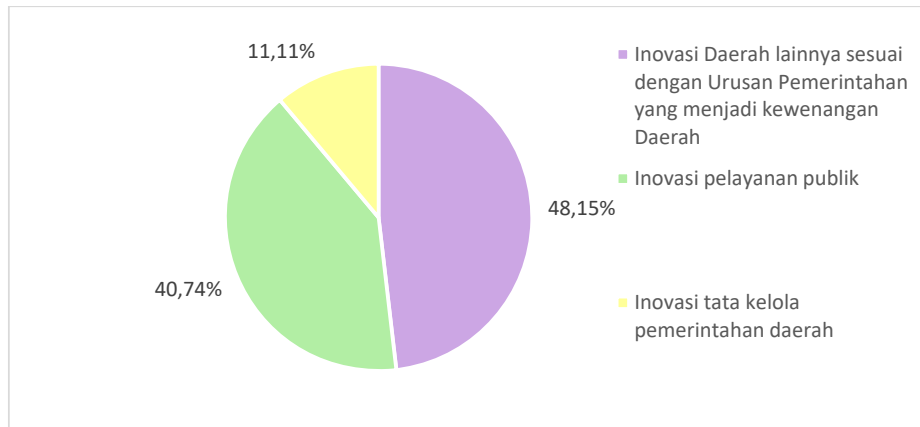
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 157. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 59,26% atau 16 inovasi dari 27 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagan Raya tersebut diterapkan pada tahun 2019 sedangkan 40,74% atau 11 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

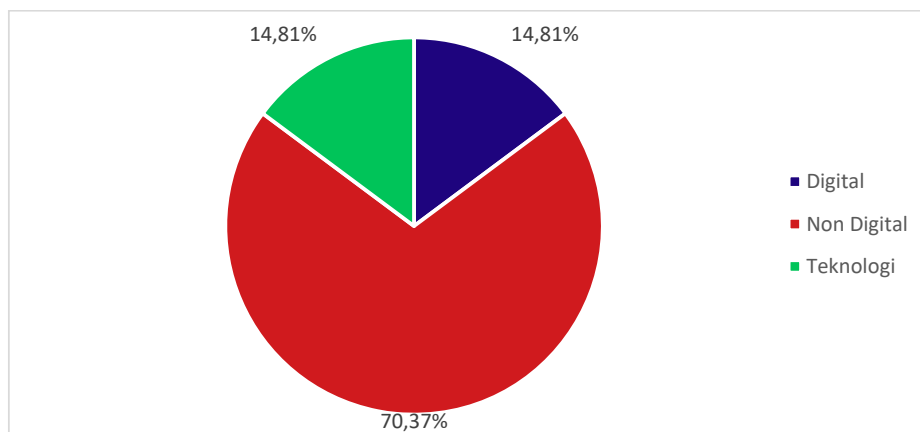
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 158. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Nagaland

Berdasarkan bentuk inovasinya, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagaland merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebesar 48.15% (17 inovasi), dan 40.74% (11 inovasi) yang dilaporkan merupakan bentuk inovasi pelayanan publik, sedangkan 11.11% (3 inovasi) lainnya merupakan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

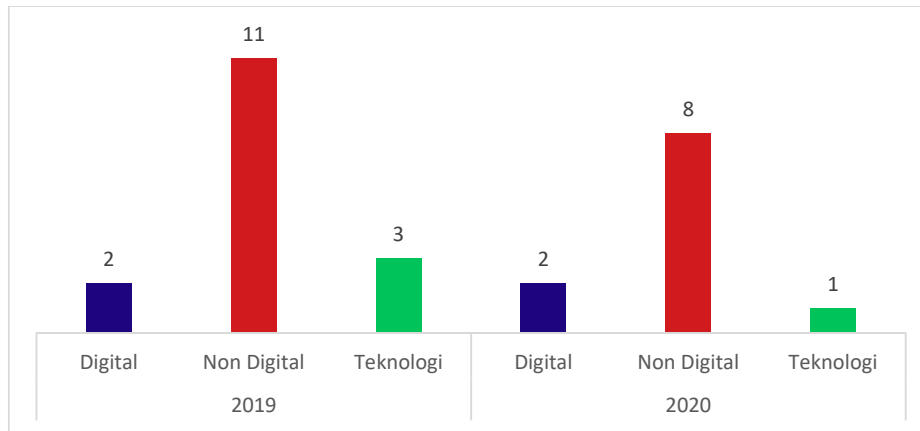


Gambar 159. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nagaland

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 3 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagaland yaitu inovasi digital, inovasi non digital, dan inovasi teknologi. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital yaitu sebesar 70.37% atau 19 inovasi dari 27 inovasi daerah yang dilaporkan, kemudian 14.81% (4

inovasi) merupakan Inovasi Digital, dan 14.81% atau 4 inovasi lainnya merupakan Inovasi Teknologi.

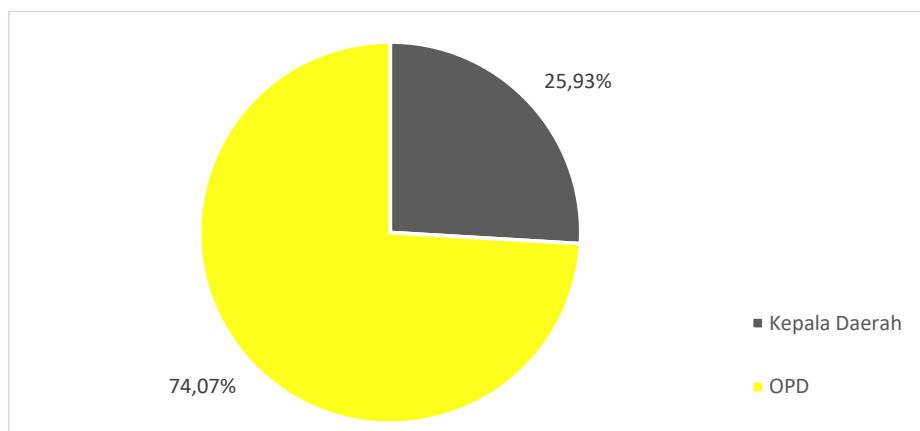
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 160. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Dapat dilihat bahwa jumlah Inovasi non digital dan inovasi teknologi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2019 untuk inovasi non digital yang diterapkan sejumlah 11 inovasi kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 8 inovasi, demikian juga dengan Inovasi teknologi yang menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2019 sejumlah 3 inovasi sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi, sedangkan untuk inovasi digital tahun 2019 dan 2020 cenderung tidak ada perubahan atau tetap yaitu sebanyak 2 inovasi.

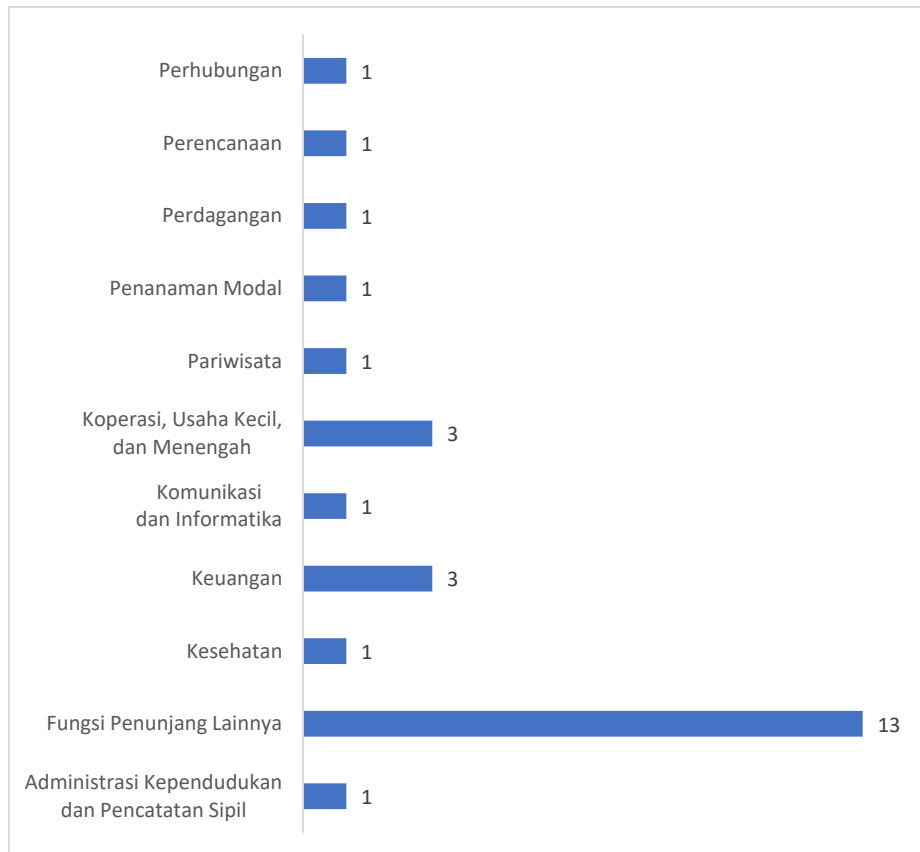
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 161. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Nagan Raya

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh perangkat daerah yaitu sebesar 74.07% (20 inovasi), sedangkan 25.93% (7 inovasi) lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

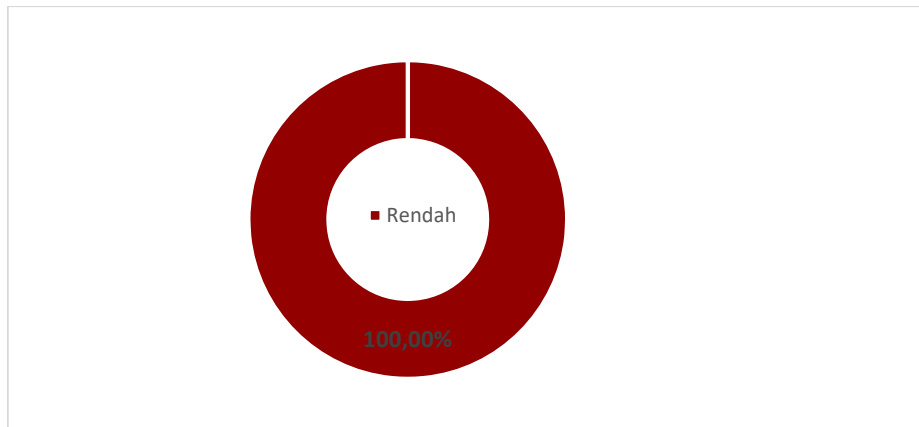
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 162. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Nagan Raya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Nagan Raya berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 11 urusan. Urusan yang paling banyak adalah urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan 13 inovasi dari 27 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 1 inovasi.

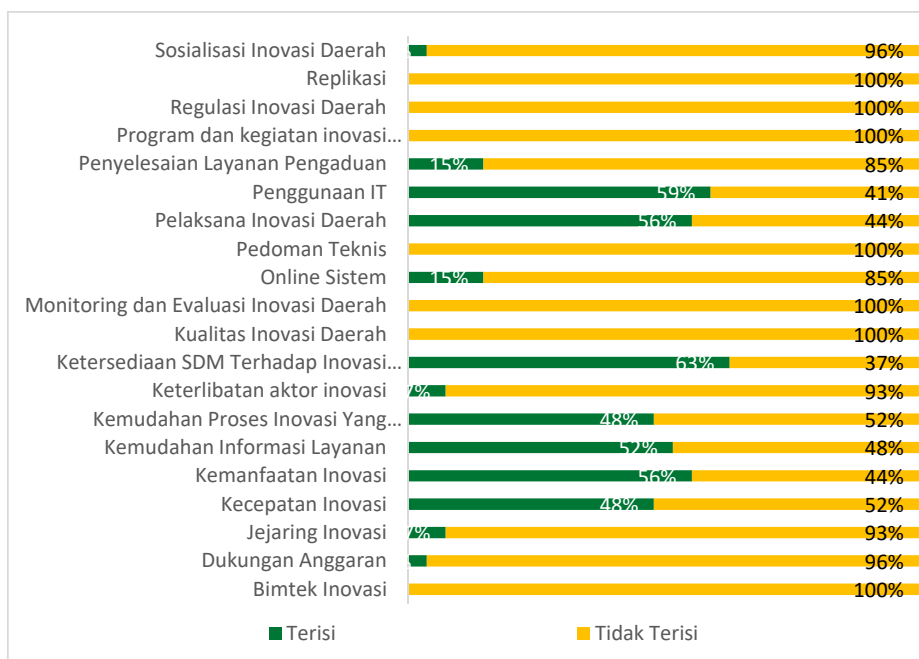
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 163. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Nagan Raya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi dengan kategori skor kematangan di bawah 50 (skor kematangan rendah) sebesar 100%, dan tidak ada inovasi dengan skor kematangan antara 50 – 100 (skor kematangan sedang) maupun inovasi dengan skor kematangan diatas 100 (skor kematangan tinggi), artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagan Raya memiliki tingkat skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

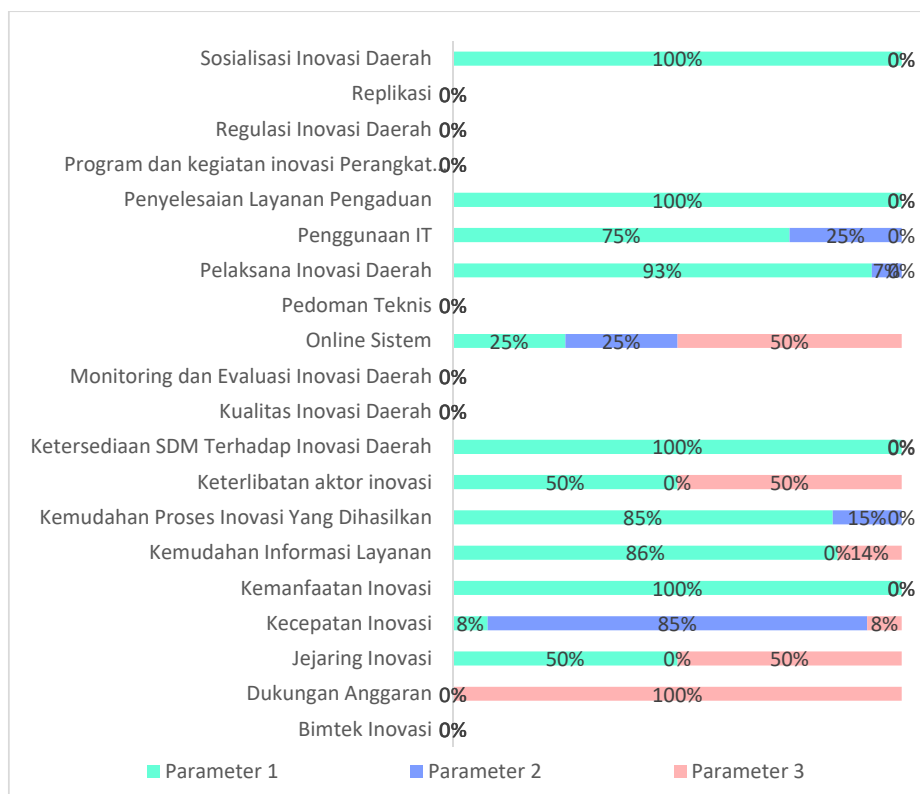


Gambar 164. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nagan Raya

Dari 27 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagan Raya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 78.33%. Sedangkan, 21.67% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 63% artinya 17 dari 27 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Nagan Raya telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

Berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung indeks inovasi daerah, dapat dilihat bahwa pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya terdapat beberapa indikator yang memiliki persentase sebesar 0% yaitu indikator Replikasi, Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, dan Bimtek Inovasi. Artinya indikator- indikator tersebut tidak terisi data pendukung.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 165. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah pada Kabupaten Nagan Raya

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter ketiga untuk indikator tersebut, namun perlu diingat bahwa inovasi yang mengisi indikator Dukungan Anggaran hanya 1 inovasi. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi sebesar 85% artinya 85% dari inovasi yang telah terisi data pendukung indikator kecepatan inovasi termasuk dalam kategori parameter 2 (dua). Sedangkan, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah dan Kemanfaatan Inovasi sebesar 100% artinya semua inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut, namun perlu diperhatikan juga berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah bahwa inovasi yang mengisi indikator sosialisasi inovasi daerah hanya 1 inovasi saja, sedangkan inovasi yang mengisi indikator penyelesaian layanan pengaduan 4 inovasi, dan indikator ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah dan kemanfaatan inovasi terisi data pendukung sebanyak 17 inovasi.

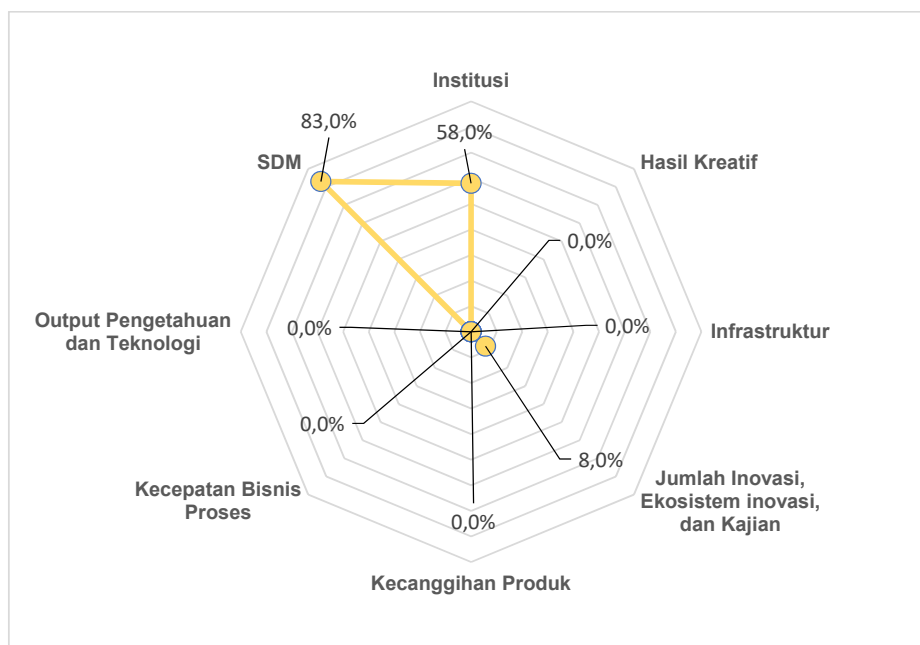
j. Daftar Inovasi Kabupaten Nagan Raya beserta Skor Kematangannya

Tabel 16. Daftar Inovasi Kabupaten Nagan Raya beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
E-SURAT	8
AKON BPKD (Aplikasi Kehadiran Online)	8
Aplikasi SISMIOP NG dan Payment Operation Management System PBB-P2 Kabupaten Nagan Raya	4
Pasar Tradisional C-19	0
Mini Market C-19	0
Hotel C-19	0
DPMPSTSP C-19	0
Restoran C-19	0
PARIWISATA C-19	0
TRANSPORTASI UMUM C-19	0
e-musrenbang kecamatan	0
e-renja	0
Layanan Mandiri Tiket Antrian Berobat	0

Nama Inovasi	Skor Kematangan
MUSRENA	0
Rumah Layak Huni Fakir	0
Rumah Layak Huni Miskin	0
Peduli Fakir	0
Peduli Muallaf	0
Senif Gharimin	0
Senif Fisabilillah	0
Senif Ibnu Sabil	0
Peduli Miskin	0
D-SEKTORAL	0
Perekaman E-KTP	0
Forum Tuha Peut Kecamatan Darul Makmur	0
Analisis Produk Hukum Daerah	0
PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Darul Makmur	0

P. KABUPATEN PIDIE

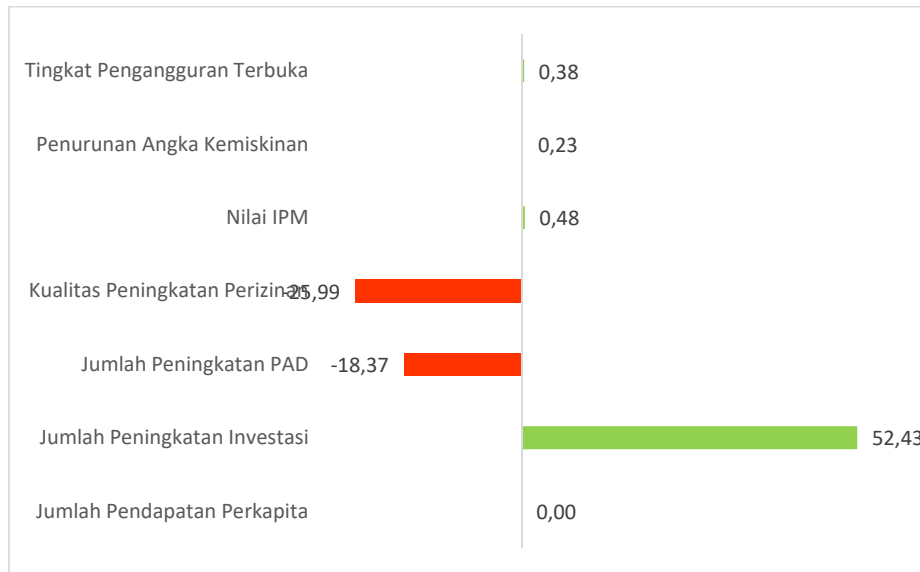


Gambar 166. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pidie

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pidie memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun terdapat banyak variabel yang memiliki skor rendah yaitu 0%, artinya indikator – indikator pada variabel – variabel tersebut tidak terisi data pendukung. Variabel yang memiliki skor rendah tersebut yaitu Variabel

Hasil Kreatif, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 167. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pidie

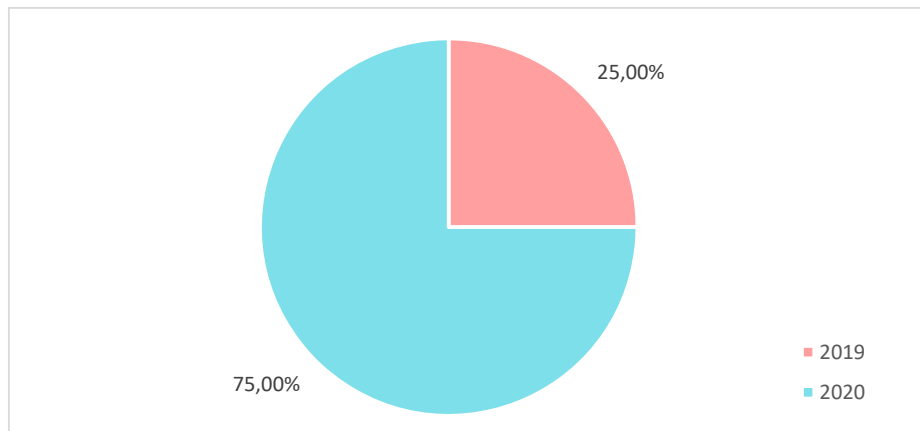
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie mengalami perkembangan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.38%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 turun sebesar 0.38% dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai indikator tersebut sudah berada diatas standar nasional parameter indeks inovasi. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0.23%, artinya penduduk miskin pada Kabupaten Pidie turun sebesar 0.23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai IPM meningkat sebesar 0.48% dimana nilai tersebut juga diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0.00% atau tetap, kemudian indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan sebesar 52.43% dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 0.45%. Sedangkan Jumlah Pendapatan Perkapita tidak ada perubahan atau tetap 0%.

Terdapat beberapa indikator lain pada Kabupaten Pidie yang belum mengalami perbaikan yaitu Kualitas Peningkatan Perizinan yang menunjukkan penurunan sebesar 25.99% dimana nilai tersebut lebih rendah dan memiliki selisih

yang cukup jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5 %, demikian juga dengan Jumlah Peningkatan PAD menunjukkan penurunan sebesar 18.37% dimana nilai tersebut juga lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

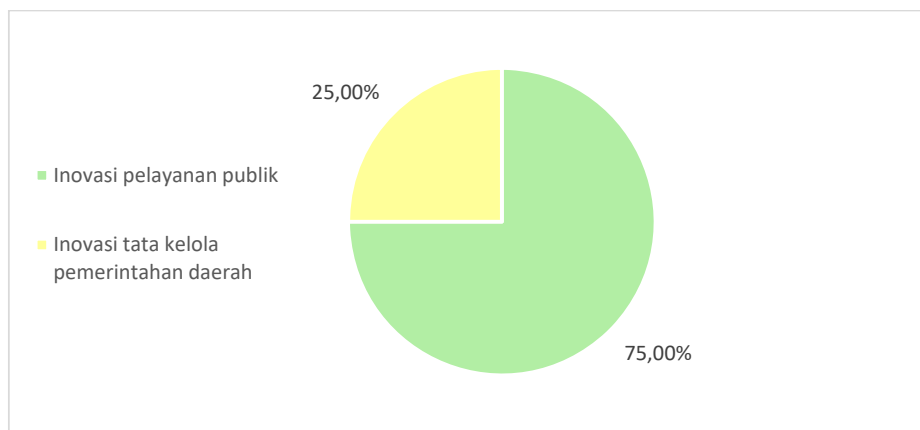
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 168. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Pidie

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 75% atau 3 inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 25% atau 1 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

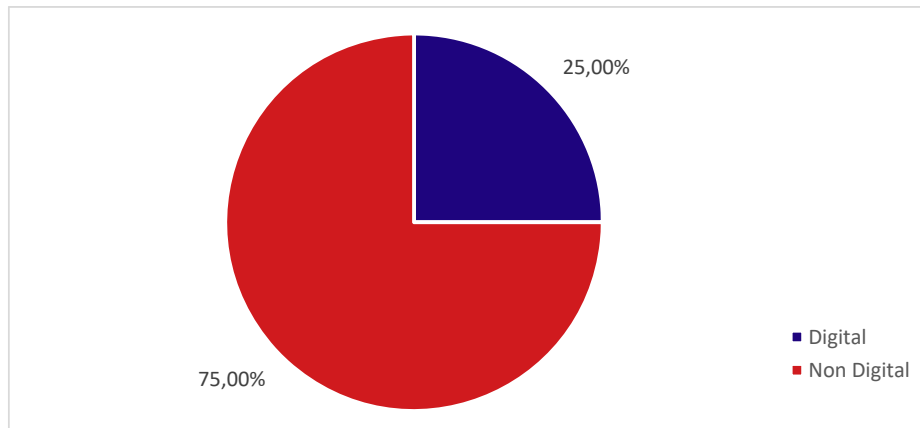
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 169. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pidie

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 75% (3 inovasi), sedangkan 25% (1 inovasi) lainnya yang dilaporkan merupakan bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

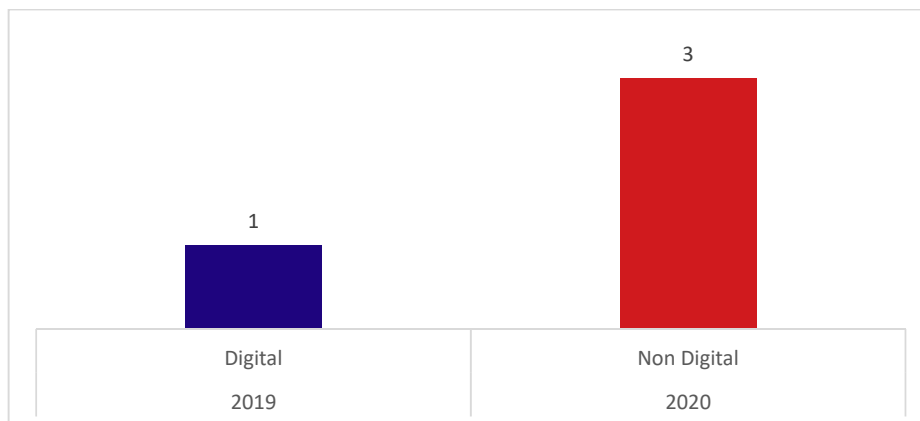
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 170. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Pidie

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pidie adalah inovasi non digital sebesar 75% (3 inovasi) dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan, sedangkan 25% (1 inovasi) lainnya merupakan Inovasi Digital.

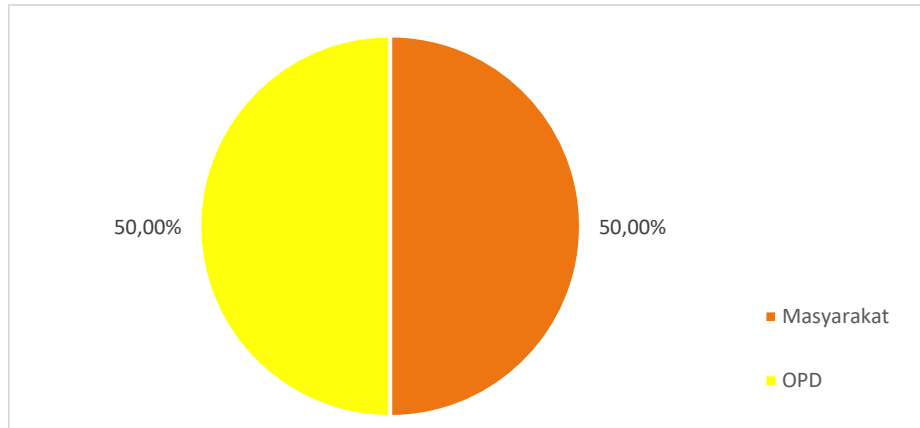
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 171. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pidie

Dapat dilihat bahwa tahun 2019 hanya Jenis Inovasi digital saja yang diterapkan oleh Kabupaten Pidie sejumlah 1 inovasi sedangkan untuk Jenis inovasi non digital dan teknologi belum terlaporkan pada tahun tersebut. Kemudian tahun 2020 jenis inovasi yang diterapkan hanya Inovasi non digital sejumlah 3 inovasi.

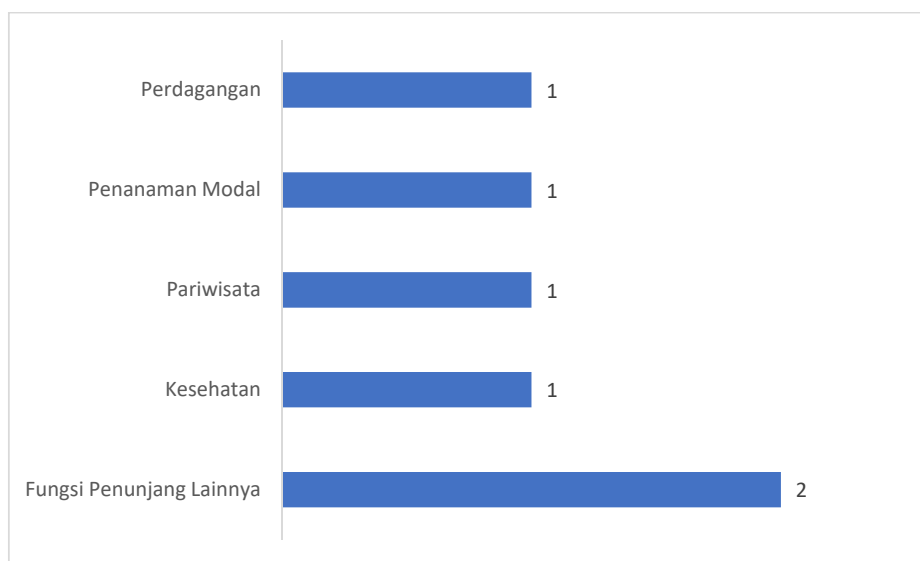
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 172. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kabupaten Pidie

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie pada tahun 2021 diinisiasi oleh Masyarakat dan perangkat daerah dengan rincian 50% (2 inovasi) diinisiasi oleh Masyarakat, sedangkan 50% (2 inovasi) lainnya diinisiasi oleh perangkat daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

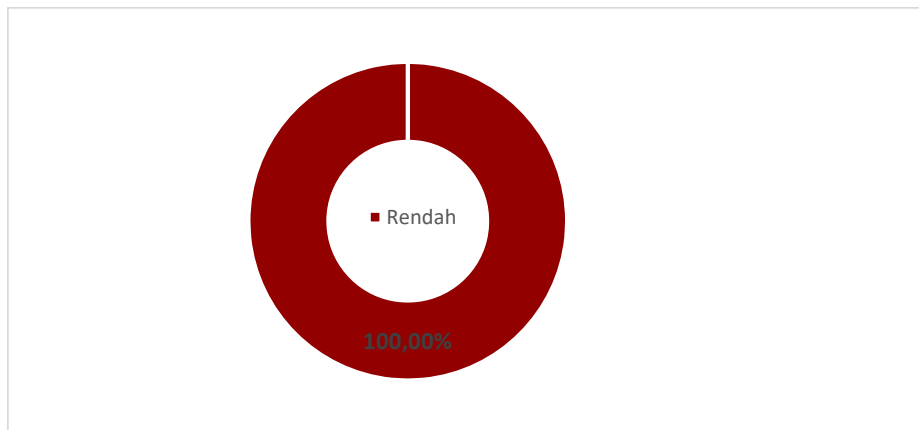
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 173. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pidie

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Pidie berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 5 urusan. Urusan yang paling banyak adalah urusan Fungsi Penunjang Lainnya dengan 2 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

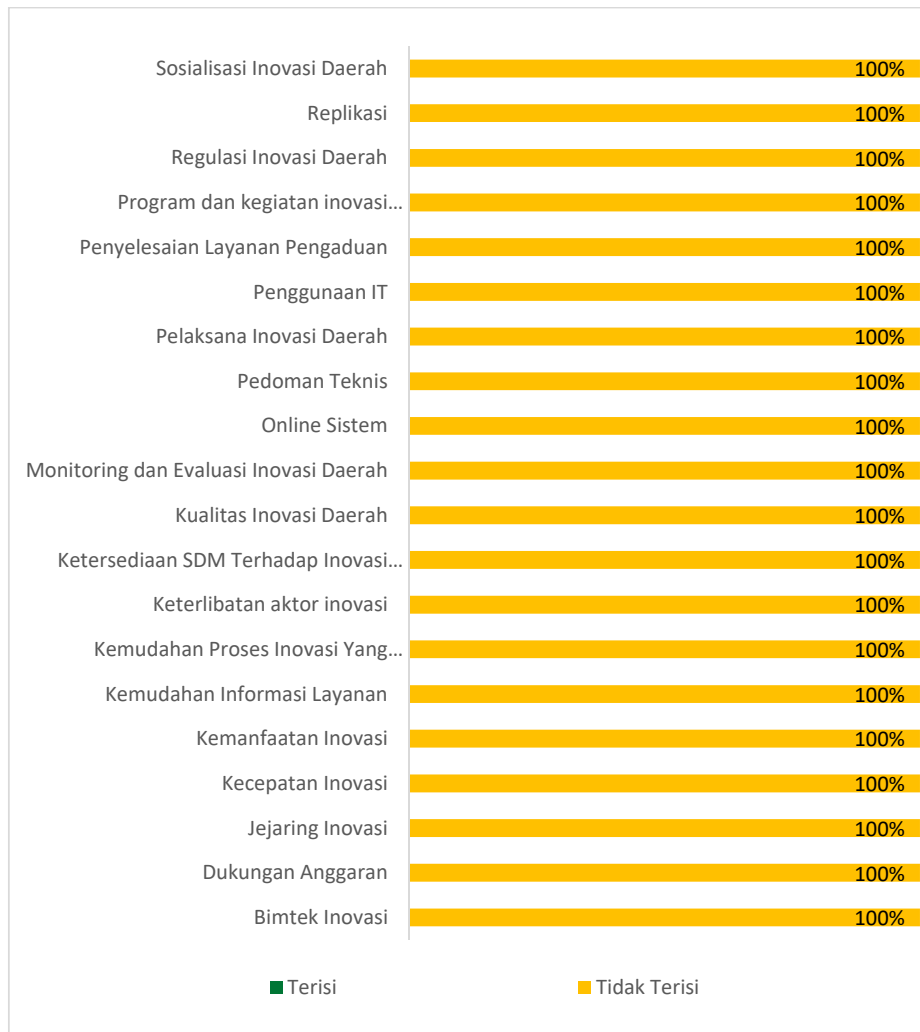
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 174. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Pidie

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi dengan skor kematangan di bawah 50 (skor kematangan rendah) sebesar 100%, dan tidak ada inovasi dengan skor kematangan antara 50 – 100 (skor kematangan sedang) maupun inovasi dengan skor kematangan di atas 100 (skor kematangan tinggi). Artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie memiliki tingkat skor kematangan rendah.

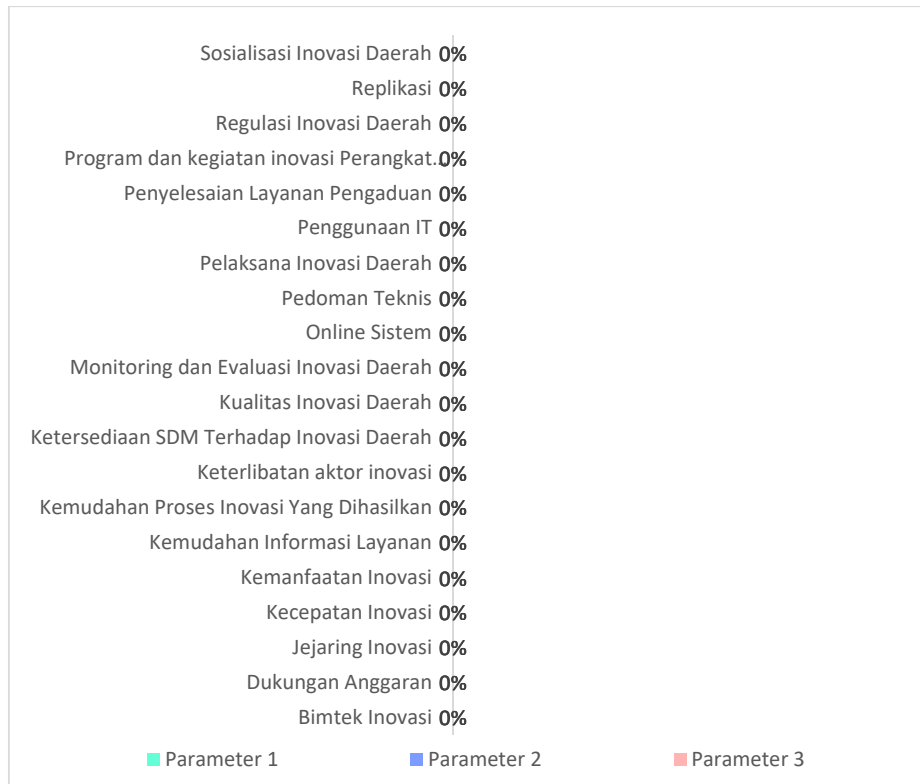
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 175. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie

Dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie tidak dilengkapi dengan data pendukung.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 176. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Pidie

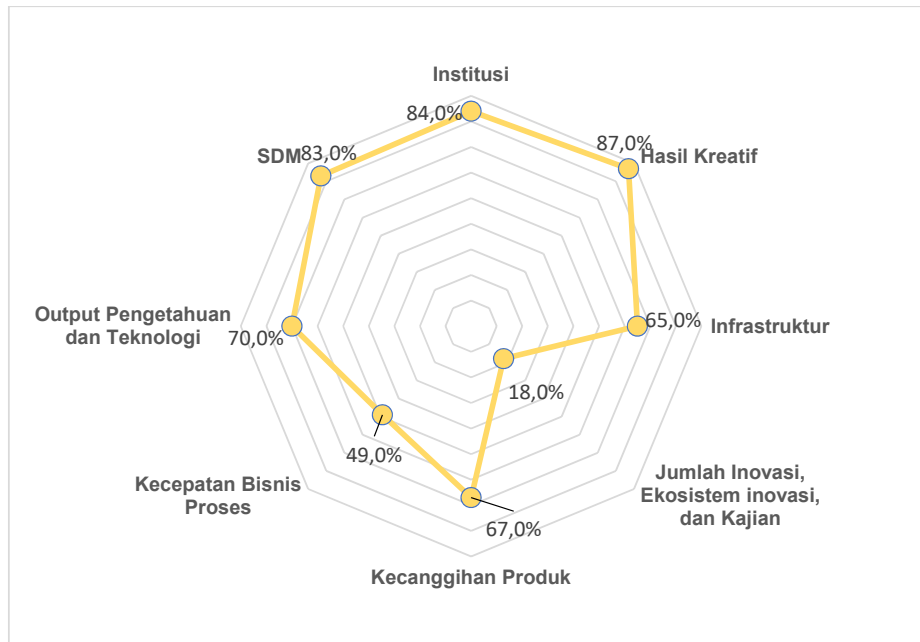
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah diperoleh hasil bahwa seluruh indikator dari inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie tidak terisi data pendukung baik di parameter 1, parameter 2 maupun parameter 3.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Pidie beserta Skor Kematangannya

Tabel 17. Daftar Inovasi Kabupaten Gayo Pidie beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Pelayanan DPMPTSP dalam Menerapkan Standar Protokol Covid-19 Menuju New Normal	0
Penerapan Standar Protokol Covid-19 di Pasar modern	0
Pelayanan Sektor perhotelan dalam Menerapkan Standar Protokol Covid-19 Menuju New Normal	0
Aplikasi SIMBLUD	0

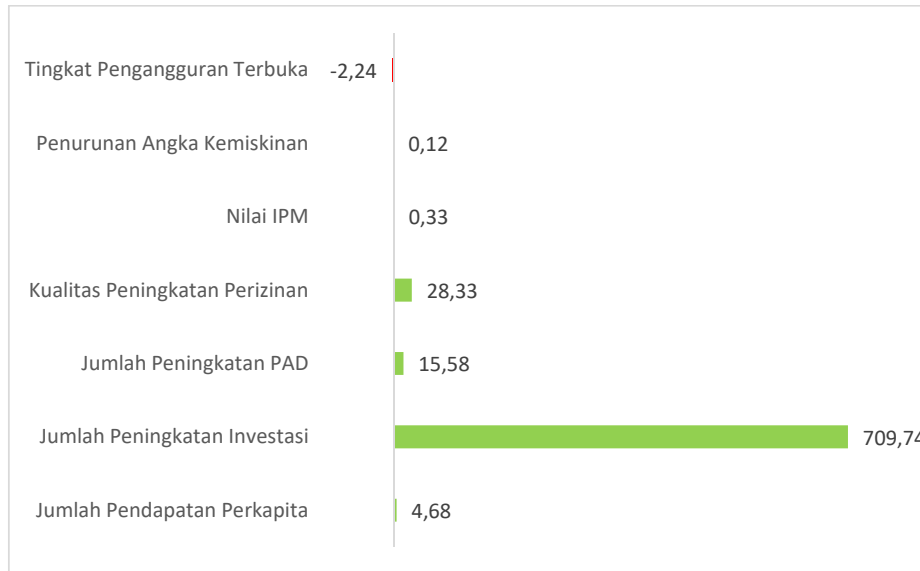
Q. KABUPATEN PIDIE JAYA



Gambar 177. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pidie Jaya memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 87.0%. Secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 18.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 178. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pidie Jaya

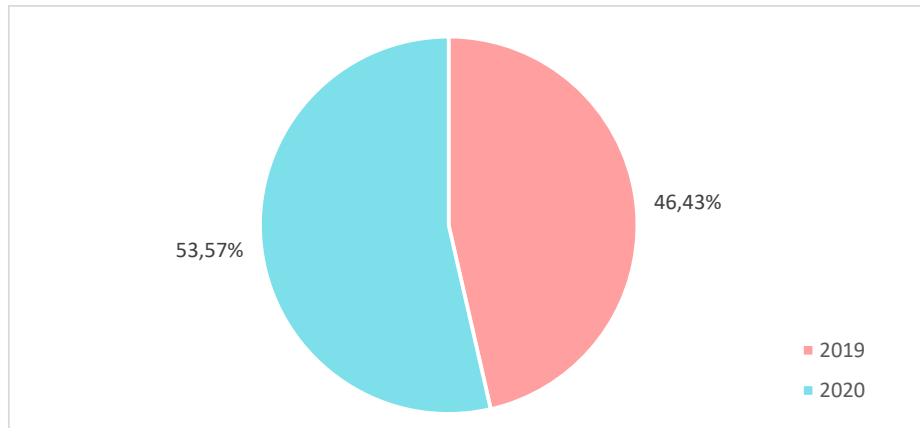
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya terjadi perkembangan yang cukup signifikan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi perbaikan pada beberapa indikator yaitu indikator penurunan angka kemiskinan meningkat sebesar 0.12%, artinya penduduk miskin pada Kabupaten Pidie Jaya tahun 2020 turun sebesar 0.12% dibandingkan dengan tahun 2019. kemudian Indikator Nilai IPM naik sebesar 0.33% dimana nilai tersebut juga lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Demikian juga dengan Indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang menunjukkan kenaikan sebesar 28.33% nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Jumlah Peningkatan PAD pada Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan kenaikan sebesar 15.58% dimana nilai tersebut jauh lebih baik karena berada diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 8%. Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar 709.74%. Demikian juga dengan Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang naik sebesar 4.68% dimana nilai tersebut juga diatas standar nasional indeks inovasi daerah yang memiliki batas penurunan sebesar 1.85%. Namun terdapat indikator yang belum mengalami perbaikan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka yang menunjukkan penurunan sebesar 2.24%, artinya jumlah pengangguran terbuka

tahun 2020 naik sebesar 2.24% dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah pengangguran hanya naik sebesar 0.92%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

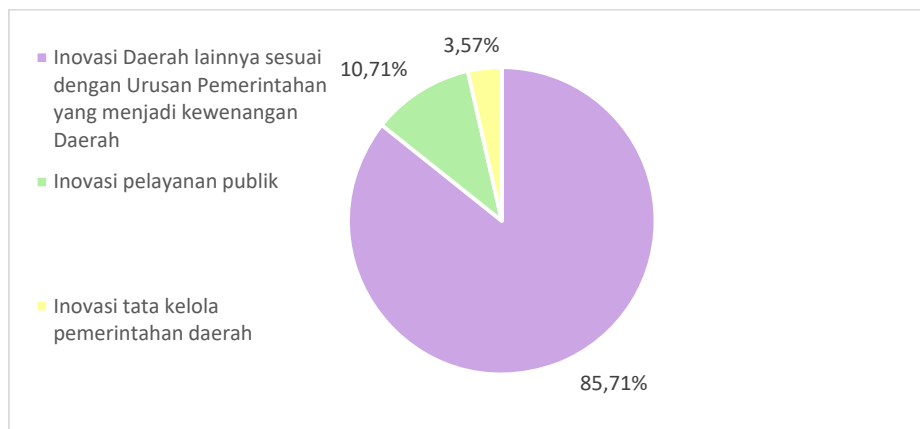
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 179. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Pidie Jaya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 53.57% atau 15 inovasi dari 28 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie Jaya tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 46.63% atau 13 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

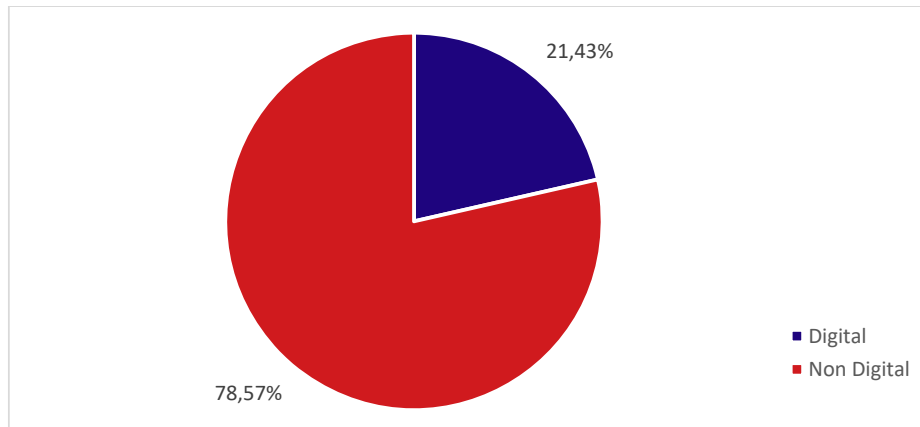


Gambar 180. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan bentuk inovasinya, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie Jaya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebesar 85.71% (24

inovasi), 10.71% atau 3 inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi pelayanan publik, dan 3.57% atau 1 inovasi lainnya merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

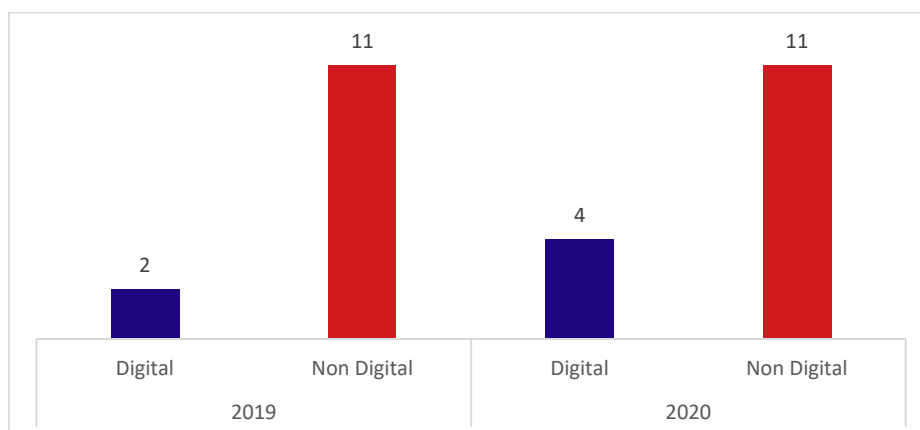
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 181. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie Jaya yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital sebesar 78.57% atau 22 inovasi dari 28 inovasi daerah yang dilaporkan, sedangkan 21.43% atau 6 inovasi lainnya merupakan Inovasi Digital.

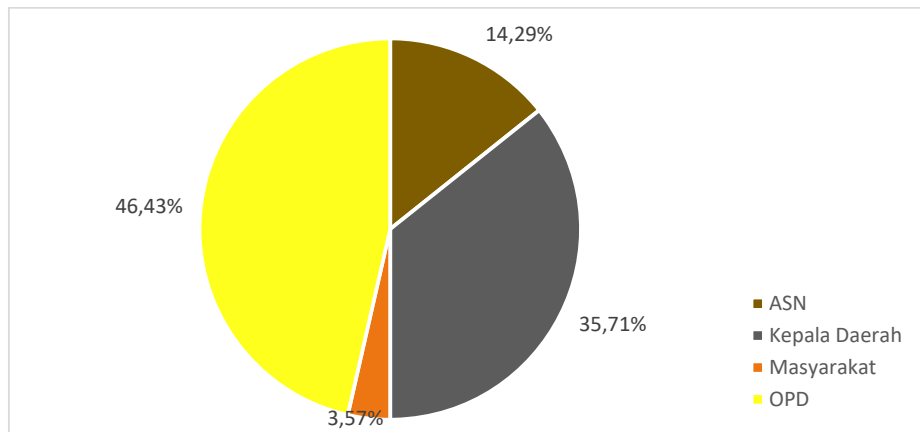
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 182. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Dapat dilihat bahwa Jenis Inovasi digital mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2019 untuk inovasi digital yang diterapkan pada Kabupaten Pidie Jaya sejumlah 2 inovasi, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 4 inovasi, Sedangkan Inovasi non digital tidak mengalami perubahan yang signifikan atau tetap dimana pada tahun 2019 dan tahun 2020 inovasi yang diterapkan Kabupaten Pidie Jaya sejumlah 11 inovasi.

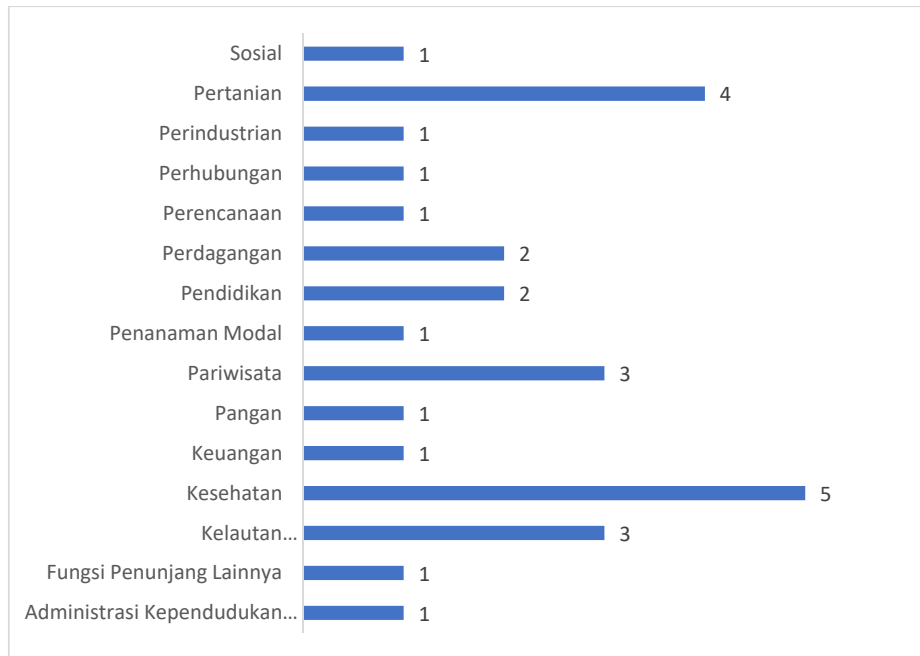
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 183. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Perangkat Daerah sebesar 46.43% (13 inovasi), kemudian sebesar 35.71% (10 inovasi) diinisiasi oleh Kepala Daerah, sedangkan 14.29% (4 inovasi) diinisiasi oleh ASN, dan 3.57% (1 inovasi) lainnya diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

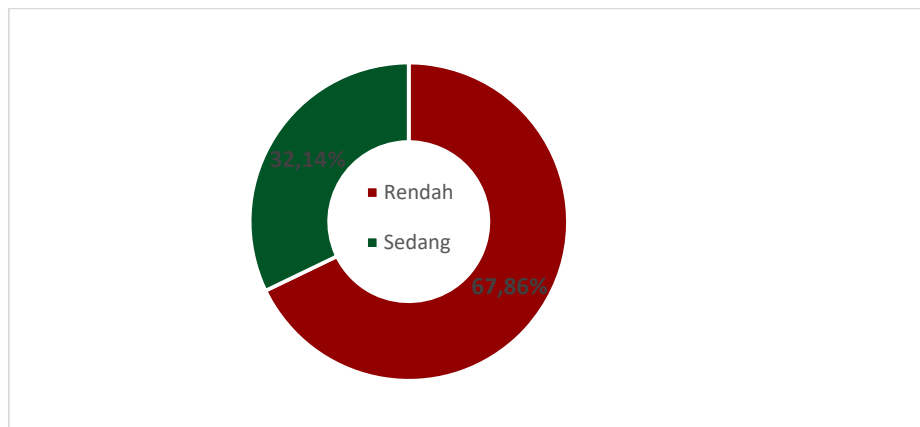
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 184. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kabupaten Pidie Jaya

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 15 urusan. Urusan yang paling banyak adalah urusan kesehatan dengan 5 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 1 inovasi, pendidikan dengan 2 inovasi, kesehatan dengan 5 inovasi.

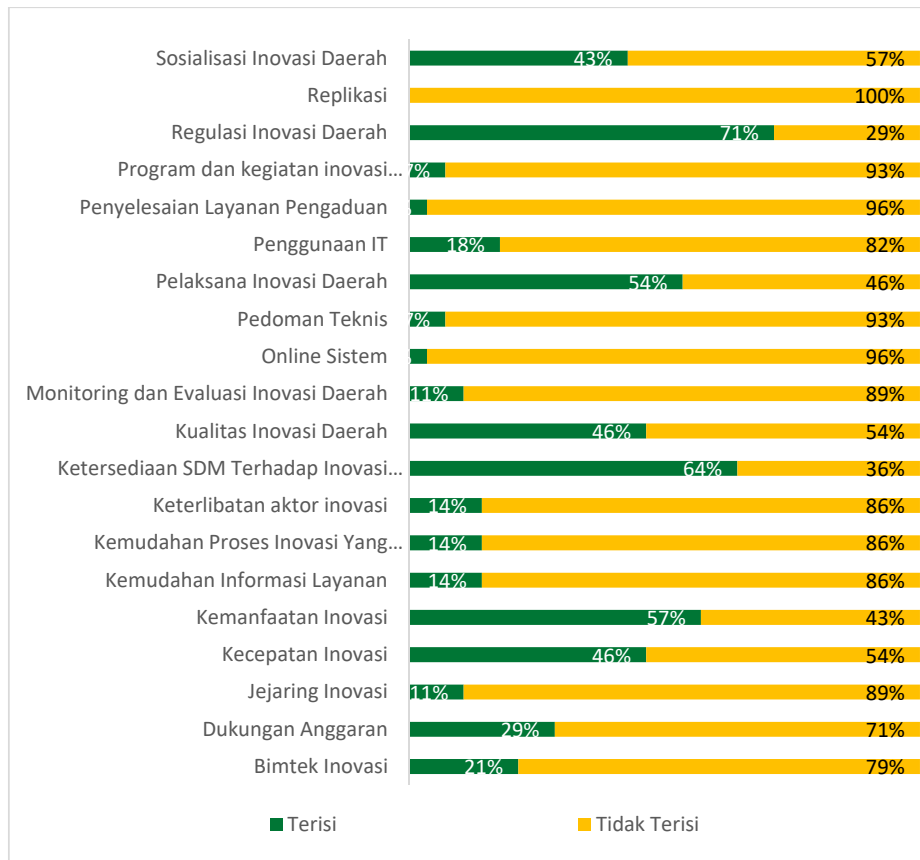
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 185. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Pidie Jaya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Kabupaten Pidie Jaya, mayoritas inovasi memiliki kategori skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50 sebesar 67.86% (19 inovasi), sedangkan inovasi dengan kategori skor kematangan sedang (skor kematangan antara 50 – 100) sebesar 32.14% (9 inovasi) dari 28 inovasi yang dilaporkan.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

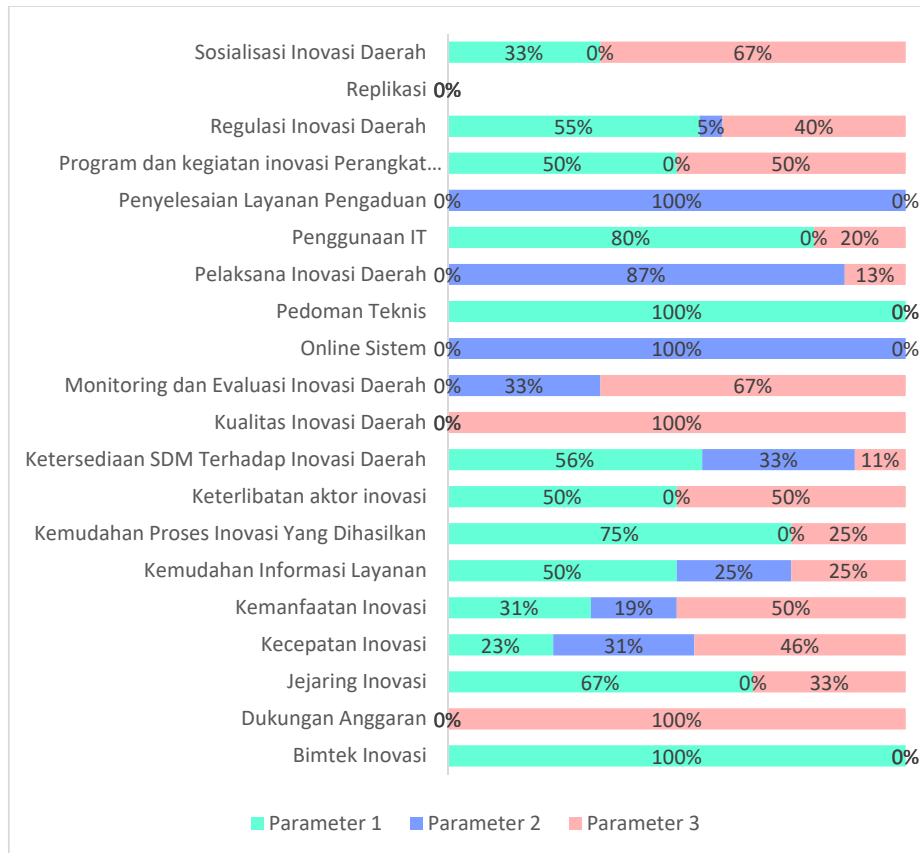


Gambar 186. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pidie Jaya

Dari 28 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie Jaya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 73.21%. Sedangkan, 26.79% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 71% artinya 20 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pidie Jaya telah terisi data pendukung dari indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah

indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan tidak terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 187. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Pidie Jaya

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Kualitas Inovasi Daerah dan Dukungan Anggaran sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Kualitas Inovasi Daerah dan Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan indikator Online Sistem yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter kedua untuk indikator tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa inovasi yang mengisi indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan indikator Online Sistem hanya 1 inovasi.

Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis dan Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut, demikian juga seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa inovasi yang mengisi indikator Pedoman Teknis hanya 2 inovasi.

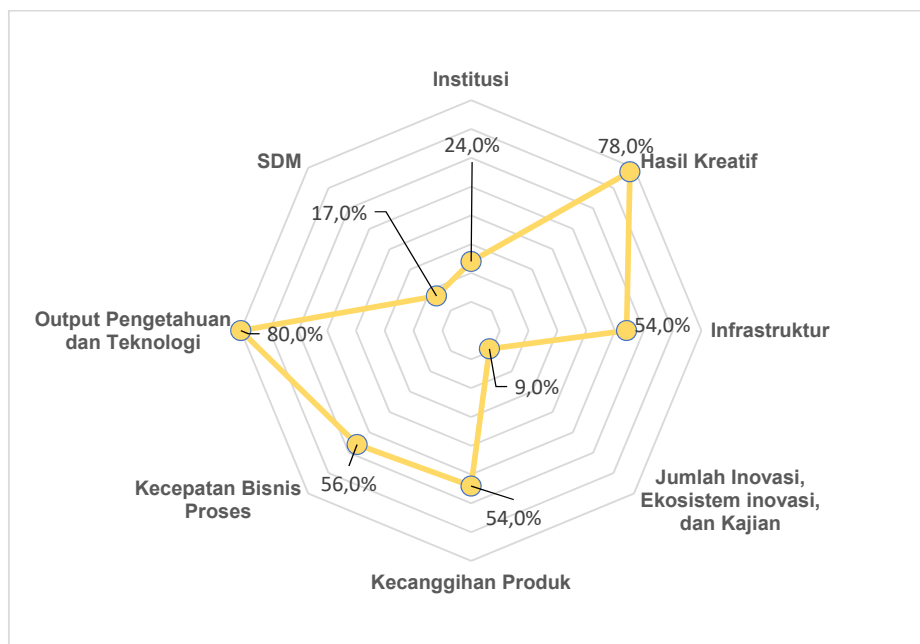
j. Daftar Inovasi Kabupaten Pidie Jaya beserta Skor Kematangannya

Tabel 18. Daftar Inovasi Kabupaten Pidie Jaya beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Si-Pedati (optimalisasi Peran Petugas Registrasi gampong (PRG) dalam Upaya Peningkatan Pelaporan Data Kematian Berbasis IT di Kabupaten Pidie Jaya)	80
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF	73
PENDIDIKAN BERKARAKTER ISLAMI	71
SI PETASAN (STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DENGAN MEMANFAATKAN BASIS DATA TERPADU (BDT) KABUPATEN PIDIE JAYA)	68
BEDAH KAMAR LANJUT USIA	63
PENGEMBANGAN USAHA GARAM DENGAN SISTEM GEOMEMBRAN	63
AMBULAN MEU PEP PEP	60
Ksusi (Keluarga Sukseskan ASI Eksklusif)	57
SERUNI (Sertifikat Rutin Imunisasi)	54
DUTA PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT) DI SEKOLAH	45
GESIRAM YODIUM (Gerakan Konsumsi Garam Yodium)	42
PEMBESARAN UDANG VANAMEI DENGAN MENGGUNAKAN TERPAL PLASTIK PADA TAMBAK PEMBUDIDAYA	42
PENGEMBANGAN COLD STORADGE PADA HASIL PENANGKAPAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA	39
Pengendalian Hama Tikus dengan Musuh Alami Tyto Alba (Rumah Burung Hantu)	33
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)	31
KEGIATAN DEMONTRASI FARMING (DEMFARM) PADI NON HIBRIDA	21
Pengembangan Industri Rumahan Kabupaten Pidie Jaya	16

Nama Inovasi	Skor Kematangan
VERIFIKASI RKA, RKAP, DPA dan SKPK MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL E-VERIFIKASI BERBASIS WEB PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE JAYA	16
Pengendalian Hama Tikus dengan Musuh Alami Tyto Alba (Burung Hantu / Siburhan)	12
GERAKAN TANAM SERENTAK DENGAN PENERAPAN SITAJAR LEGOWO	12
PASAR TRADISIONAL C -19 KAB. PIDIE JAYA	0
PASAR MODERN C-19 KAB. PIDIE JAYA	0
RESTORAN C - 19 KAB. PIDIE JAYA	0
HOTEL C - 19	0
PTSP C - 19 KAB. PIDIE JAYA	0
TEMPAT WISATA C-19 KAB. PIDIE JAYA	0
TRANSPORTASI UMUM C-19 KAB. PIDIE JAYA	0
OPTIMALISASI KINERJA PUSAT PENGENDALIAN DAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) MELALUI SISTEM INFORMASI SIGUNA	0

R. KABUPATEN SIMEULUE



Gambar 188. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Simeulue

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Simeulue memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 78%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 9% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

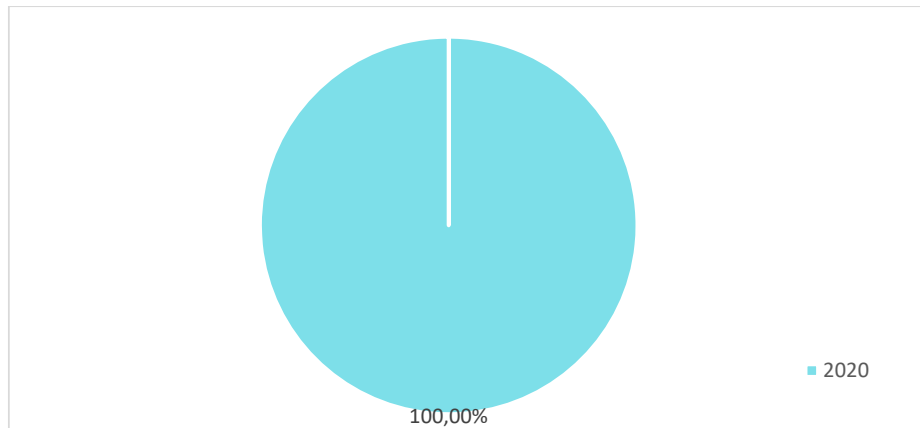
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,00
Penurunan Angka Kemiskinan	0,00
Nilai IPM	0,00
Kualitas Peningkatan Perizinan	0,00
Jumlah Peningkatan PAD	0,00
Jumlah Peningkatan Investasi	0,00
Jumlah Pendapatan Perkapita	0,00

Gambar 189. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Simeulue

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue tidak melakukan pengisian dan tidak ada data pendukung pada seluruh indikator - indikator pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

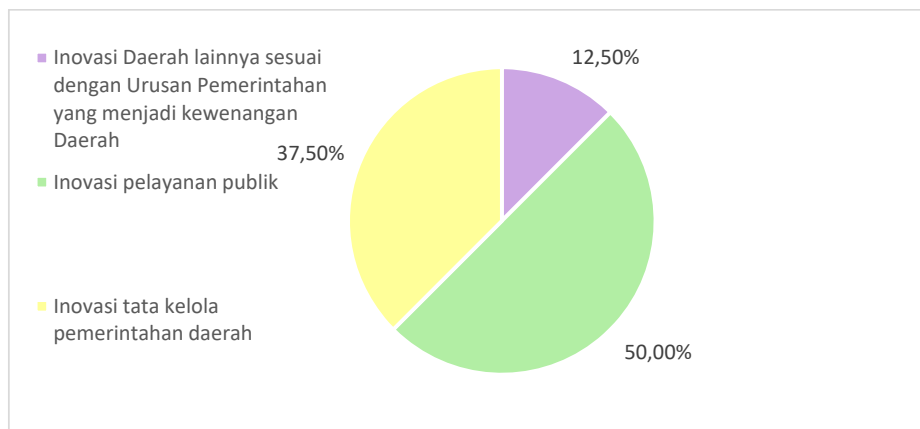
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 190. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kabupaten Simeulue

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 100% atau 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019.

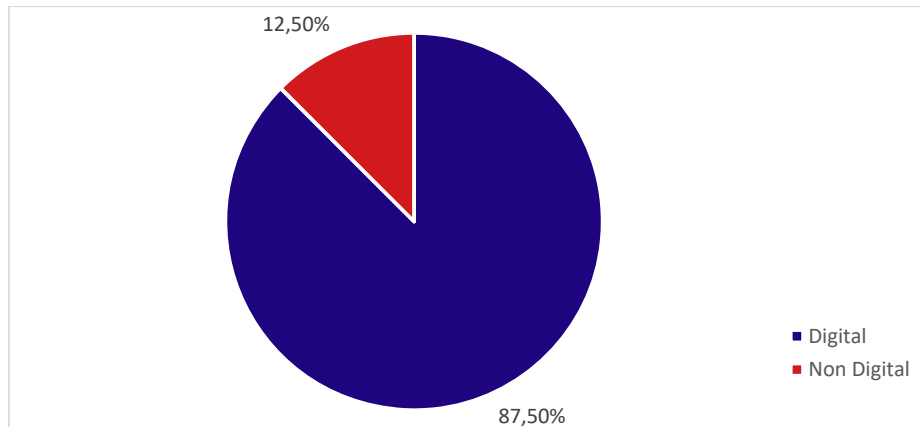
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 191. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Simeulue

Berdasarkan bentuk inovasinya, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue merupakan inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 50% (4 inovasi), 37.50% atau 3 inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, dan sebesar 12.50% atau 1 inovasi lainnya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

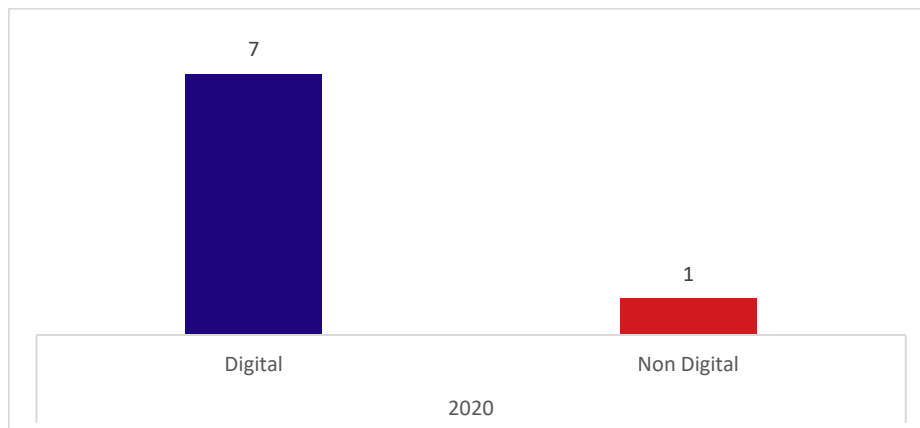
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 192. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kabupaten Simeulue

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi digital sebesar 87.50% atau 7 inovasi dari 8 inovasi daerah yang dilaporkan, sedangkan 12.50% atau 1 inovasi lainnya merupakan Inovasi non digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

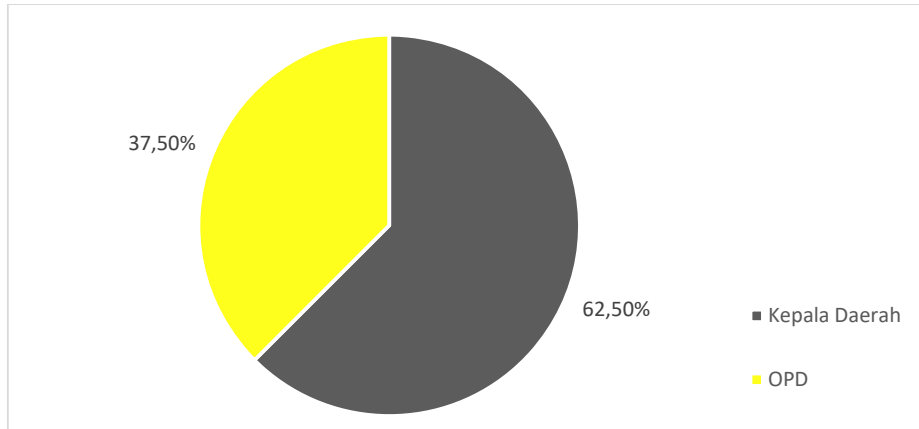


Gambar 193. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Simeulue

Dapat dilihat bahwa tahun 2019 hanya Jenis Inovasi digital saja yang diterapkan oleh Kabupaten Simeulue sejumlah 7 inovasi, sedangkan untuk Jenis inovasi non digital dan teknologi belum terlaporkan pada tahun tersebut. Kemudian tahun 2020 jenis inovasi yang diterapkan hanya Inovasi non digital saja sejumlah 1

inovasi dan tidak ada inovasi digital maupun inovasi teknologi yang dilaporkan pada tahun tersebut.

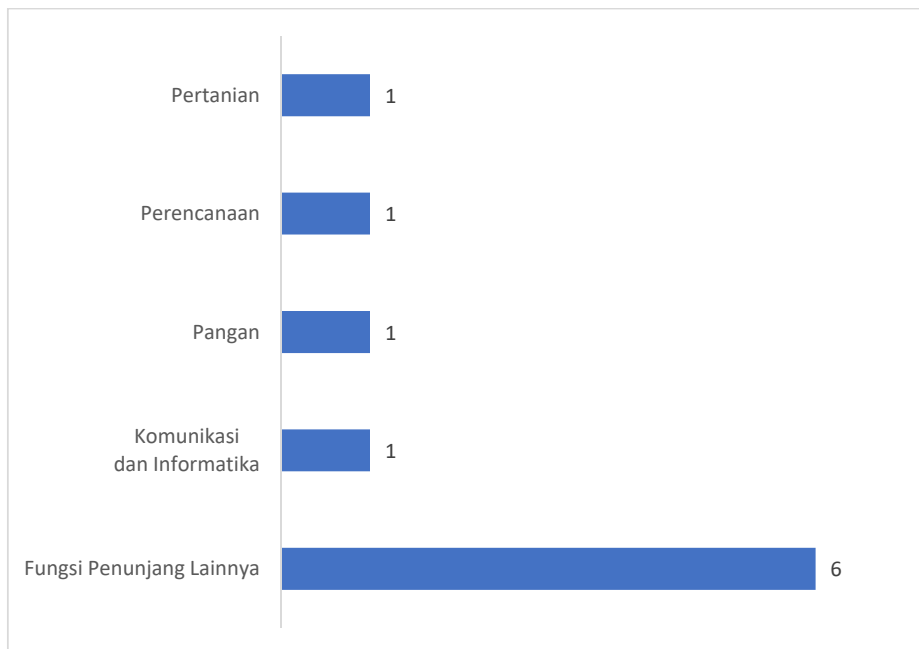
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 194. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kabupaten Simeulue

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Kepala Daerah sebesar 62.50% (5 inovasi), kemudian sebesar 37.50% (3 inovasi) lainnya diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Masyarakat, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

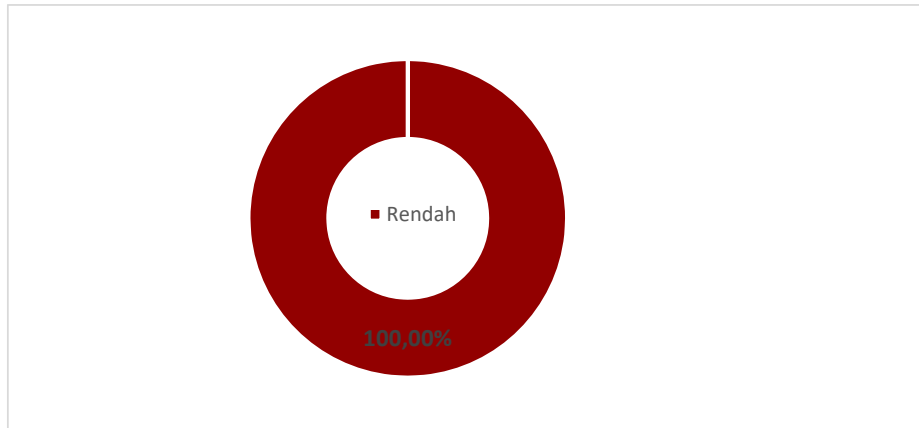
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 195. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kabupaten Simeulue

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Simeulue berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 5 urusan. Urusan yang paling banyak adalah urusan fungsi penunjang lainnya dengan 6 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak ada urusan wajib pelayanan dasar yang terlupakan.

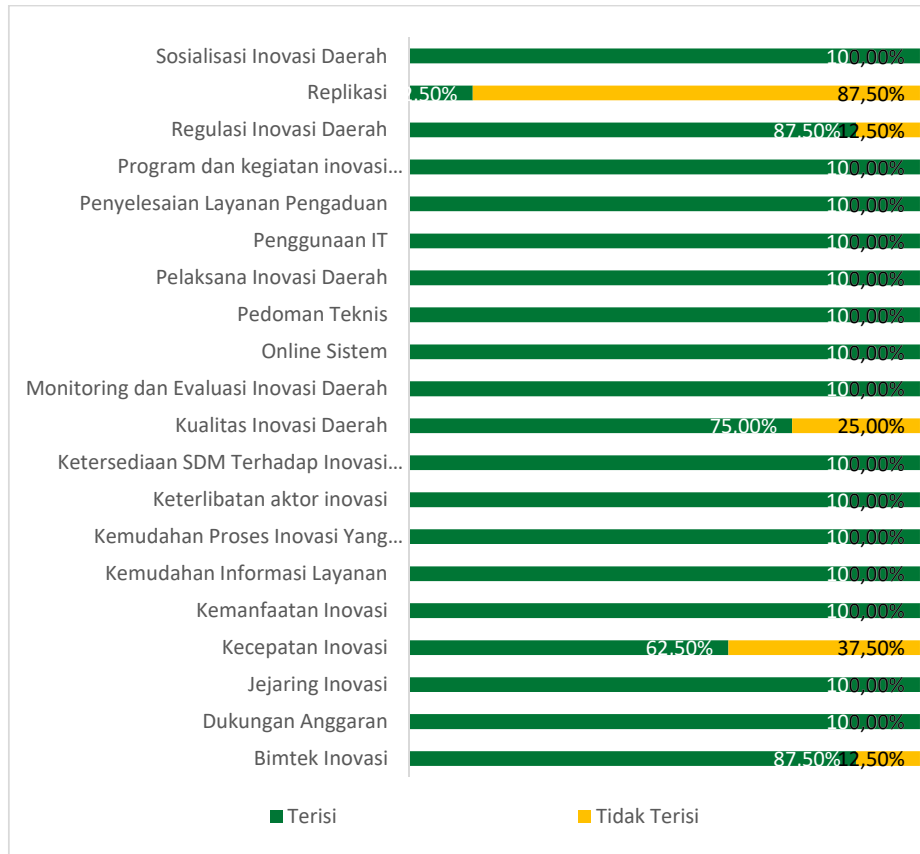
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 196. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kabupaten Simeulue

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi dengan skor kematangan di bawah 50 (skor kematangan rendah) sebesar 100%, dan tidak ada inovasi dengan skor kematangan antara 50 – 100 (skor kematangan sedang) maupun inovasi dengan skor kematangan diatas 100 (skor kematangan tinggi), artinya semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue memiliki tingkat skor kematangan rendah.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

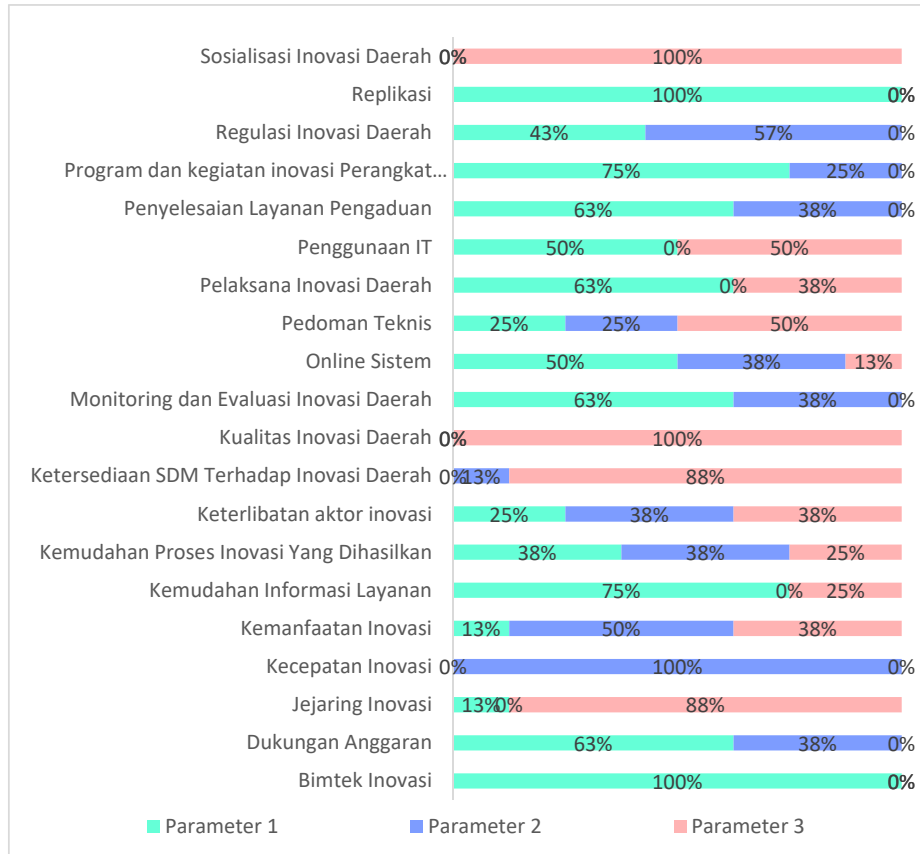


Gambar 197. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Simeulue

Dari 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 8.75%. Sedangkan, 91.25% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu indikator sosialisasi inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi perangkat daerah dalam RKPD, penyelesaian layanan pengaduan, penggunaan IT, pelaksana inovasi daerah, pedoman teknis, online sistem, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, kemudahan informasi layanan, kemanfaatan inovasi, jejaring inovasi, dan dukungan anggaran. Artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 12.50% artinya hanya 1 dari 8 inovasi yang dilaporkan Kabupaten Simeulue telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 198. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kabupaten Simeulue

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Sosialisasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter kedua untuk indikator tersebut. Indikator dengan tingkat

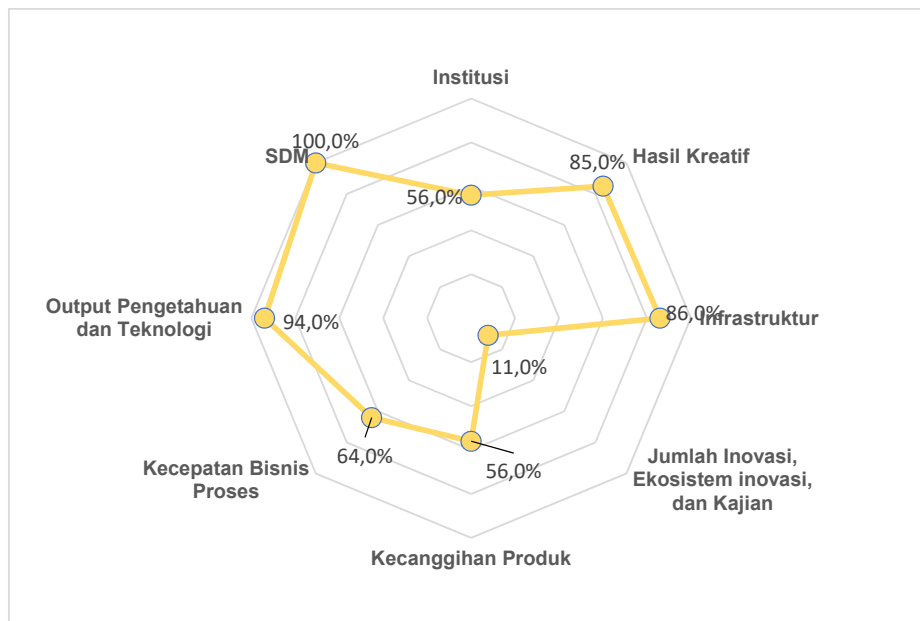
keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut, namun perlu diperhatikan juga berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah bahwa inovasi yang mengisi indikator sosialisasi inovasi daerah hanya 1 inovasi saja.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Simeulue beserta Skor Kematangannya

Tabel 19. Daftar Inovasi Kabupaten Simeulue beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SIMORFIN (Sistem Monitoring Realisasi Fisik Infrastruktur)	29
Satu Desa satu Hafizh	29
Gerakan HUMASA SEBEL - KHUMAHA HEBA	21
Safari Ramadhan	21
Safari Subuh	21
SIREFIKA (Sistem Informasi Realisasi Fisik dan Keuangan)	6
Keterbukaan informasi melalui Facebook	6
SIPERAN (Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan)	0

S. KOTA BANDA ACEH



Gambar 199. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banda Aceh

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Banda Aceh memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 100%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 11% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 200. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banda Aceh

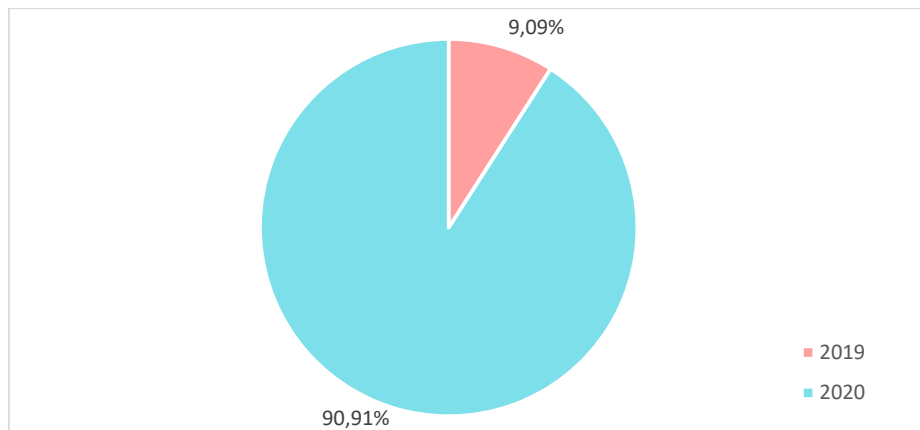
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banda Aceh belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.62%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 2.62% dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana nilai pada indikator tersebut belum sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya jumlah pengangguran terbuka hanya naik sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0.32%, artinya jumlah penduduk miskin pada Kota Banda Aceh turun 0.32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana nilai pada indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan sebesar 0.34% dimana nilai tersebut juga

sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Pemerintah Kota Banda Aceh mengalami penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 38.99% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD turun sebesar 3.09% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami penurunan sebesar 53.41% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Banda Aceh turun sebesar 1.78% namun nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang memiliki batas penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

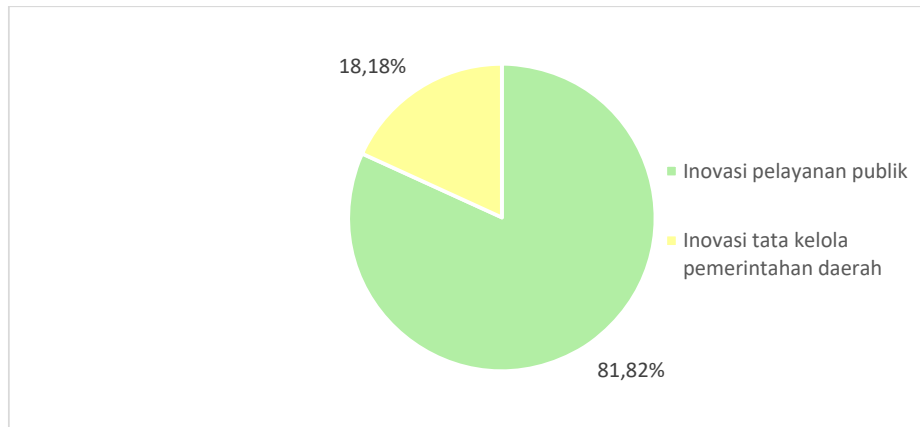
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 201. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Banda Aceh

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 90.91% atau 10 inovasi dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banda Aceh tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 9.09% atau 1 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

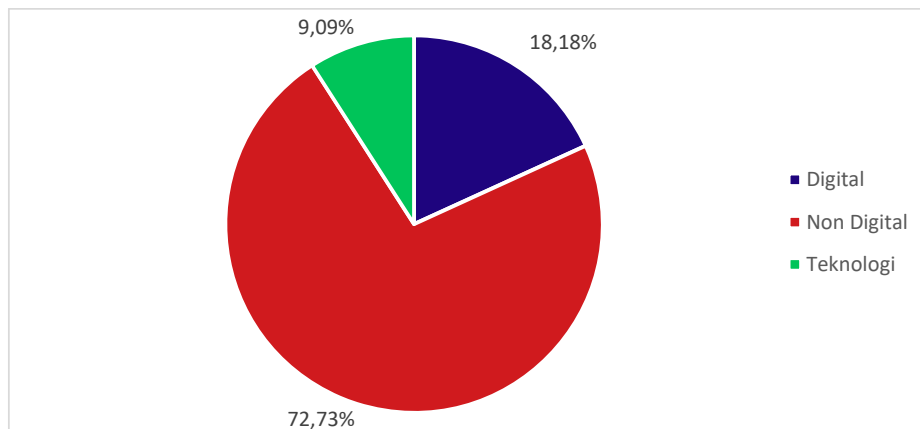
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 202. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banda Aceh

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Banda Aceh merupakan Inovasi Pelayanan Publik yaitu sebesar 81.82% (9 inovasi), sementara 18.18% atau 2 inovasi lainnya yang dilaporkan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

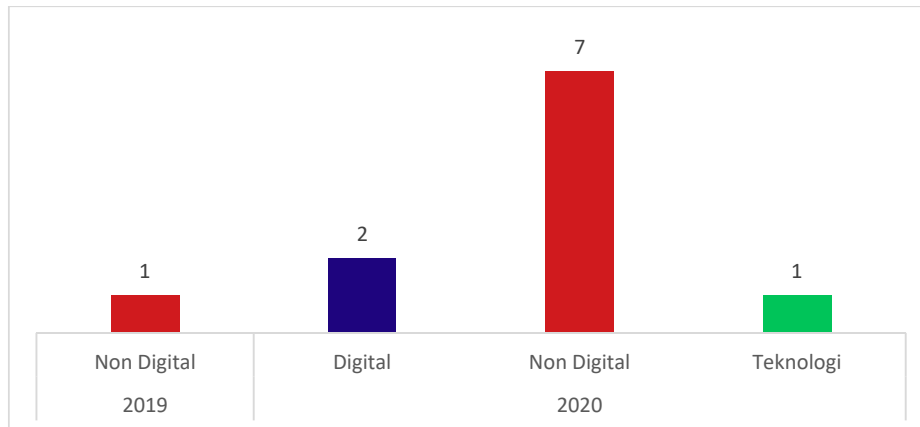
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 203. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banda Aceh

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Simeulue yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi digital sebesar 72.73% atau 8 inovasi dari 11 inovasi daerah yang dilaporkan, kemudian 18.18% atau 2 inovasi merupakan Inovasi Digital, dan 9,09% atau 1 inovasi lainnya merupakan Inovasi Teknologi.

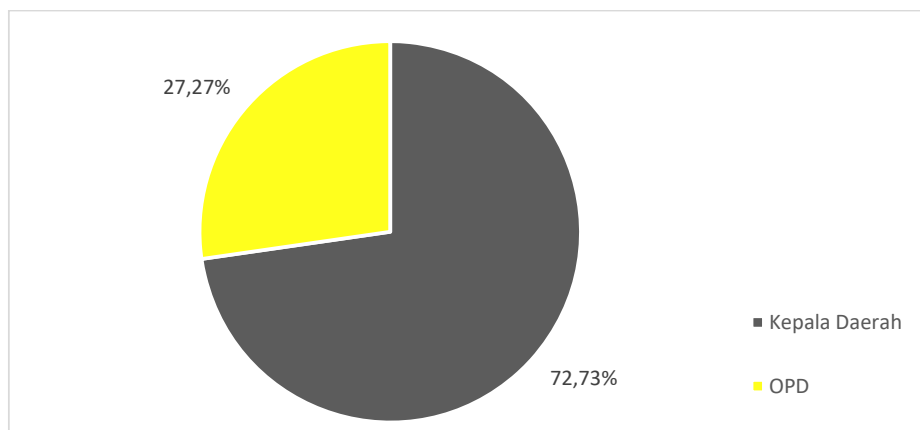
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 204. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banda Aceh

Dapat dilihat bahwa jumlah inovasi digital, inovasi non digital dan inovasi teknologi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2019 untuk inovasi non digital yang diterapkan sejumlah 1 inovasi sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7 inovasi. Tahun 2019 inovasi yang diterapkan oleh Kota Banda Aceh hanya inovasi non digital, sedangkan inovasi digital dan inovasi teknologi belum dilaporkan pada tahun tersebut. Sementara tahun 2020 inovasi yang diterapkan Kota Banda Aceh tidak hanya inovasi non digital saja, terdapat inovasi digital sejumlah 2 inovasi dan inovasi teknologi sejumlah 1 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

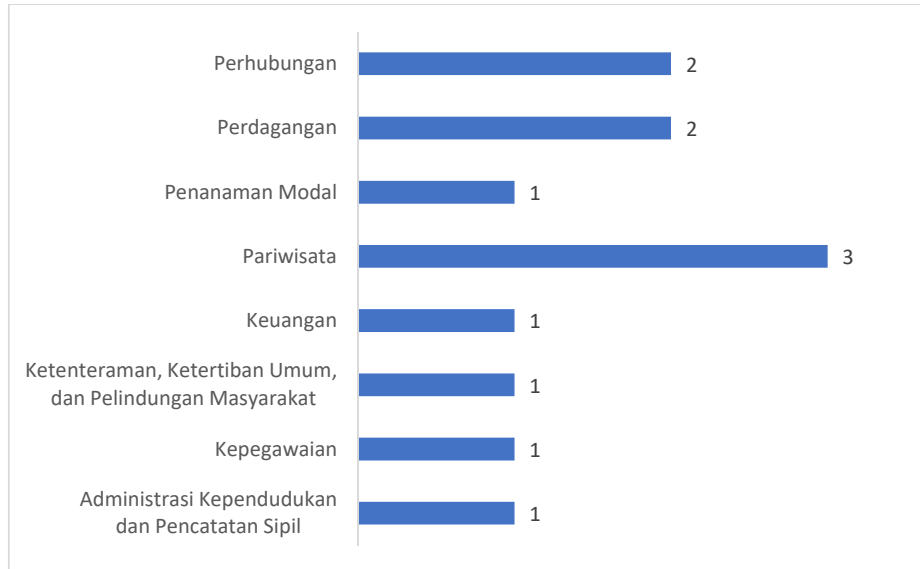


Gambar 205. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Banda Aceh

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Kepala Daerah sebesar 72.73% (8 inovasi), sedangkan 27.27% (3 inovasi) lainnya diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Sementara untuk

inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Masyarakat, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

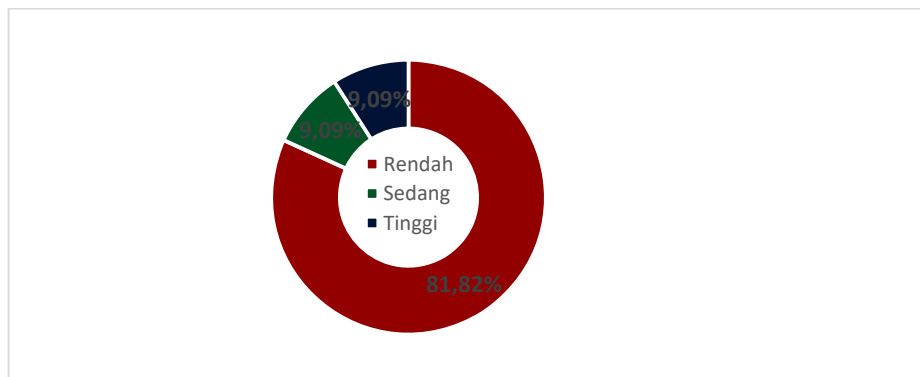
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 206. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Banda Aceh

Sebaran inovasi daerah pada Kota Banda Aceh berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 8 urusan. Urusan yang paling banyak adalah Pariwisata dengan 3 inovasi dari 11 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

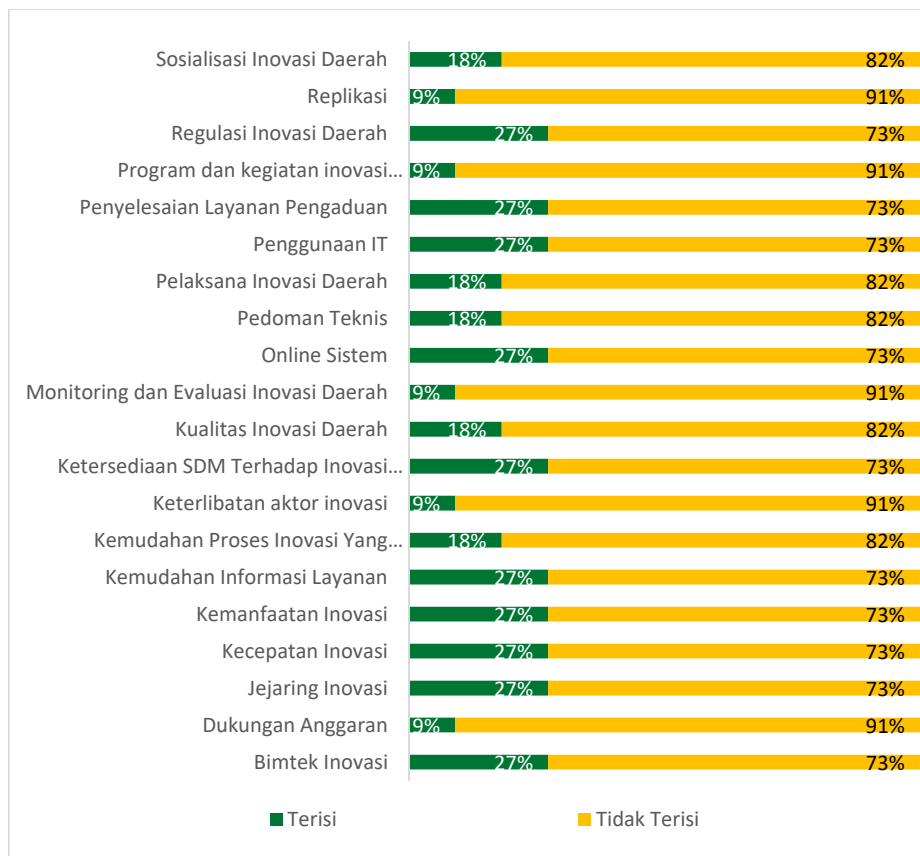
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 207. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Banda Aceh

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Kota Banda Aceh, mayoritas inovasi memiliki kategori skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50 sebesar 81.82% (9 inovasi), selain itu terdapat inovasi yang memiliki kategori skor kematangan sedang (skor kematangan antara 50 – 100) sebesar 9.09% (1 inovasi) dari 11 inovasi yang dilaporkan, sedangkan untuk inovasi dengan kategori skor kematangan tinggi yaitu skor kematangan diatas 100 memiliki proporsi yang sama dengan skor kematangan sedang yaitu sebesar 9.09% (1 inovasi).

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



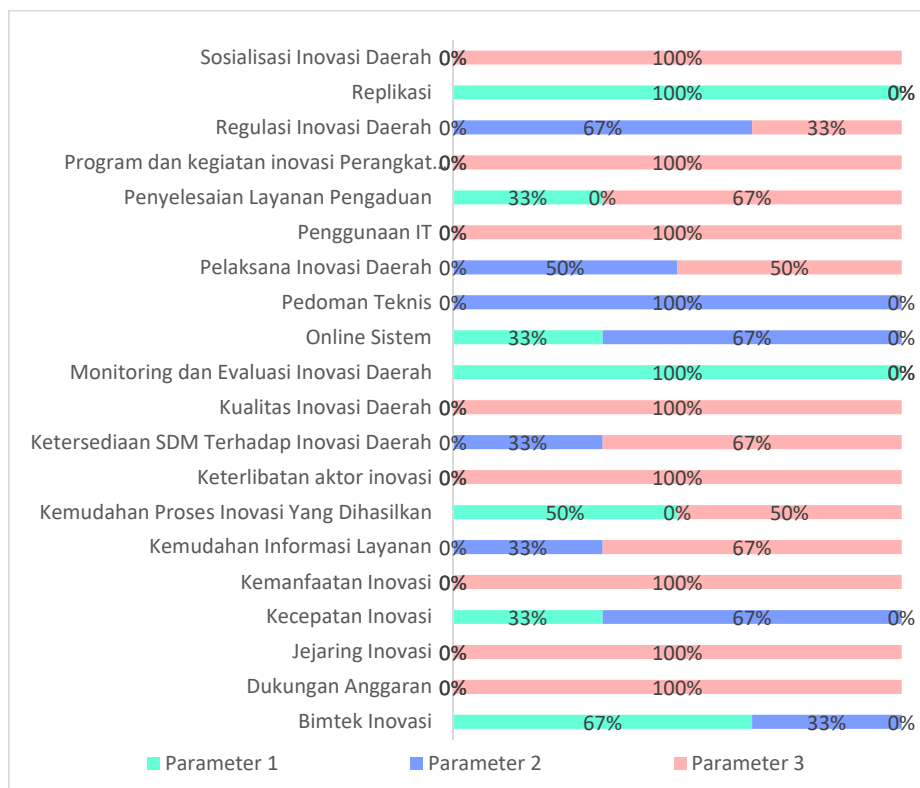
Gambar 208. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banda Aceh

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banda Aceh, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 79.55%. Sedangkan, 20.45% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Online Sistem, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah,

Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi dan Bimtek Inovasi merupakan indikator – indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 27% artinya 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banda Aceh telah terisi data pendukung dari indikator – indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi, Program dan Kegiatan inovasi perangkat Daerah dalam RKPD, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 9% artinya hanya 1 dari 11 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator – indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 209. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Banda Aceh

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah,

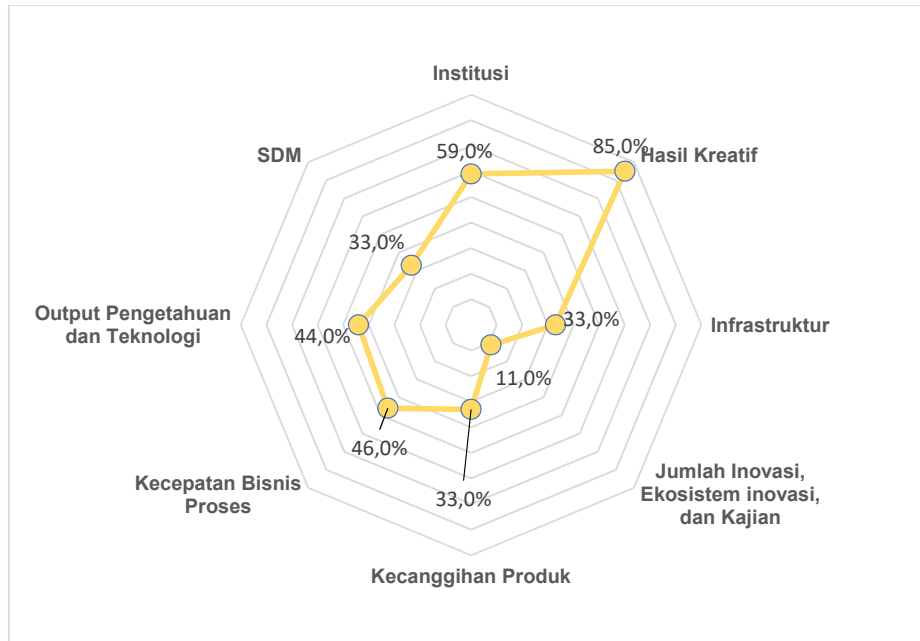
Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga, berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah bahwa inovasi yang mengisi indikator Kualitas Inovasi Daerah adalah 2 inovasi, indikator Keterlibatan Aktor inovasi dan Dukungan Anggaran adalah 1 inovasi, indikator Kemanfaatan Inovasi dan indikator Jejaring Inovasi adalah 3 inovasi. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter kedua untuk indikator tersebut, namun perlu diperhatikan juga berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung bahwa inovasi yang mengisi indikator Pedoman Teknis hanya 2 inovasi. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut, demikian juga seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa inovasi yang mengisi indikator Replikasi dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah hanya 1 inovasi.

j. Daftar Inovasi Kota Banda Aceh beserta Skor Kematangannya

Tabel 20. Daftar Inovasi Kota Banda Aceh beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Retribusi Non Tunai	118
MITRA AKTA KELAHIRAN BAYI UPAYA PELAYANAN (MAKBUL)	87
Aplikasi Ekinerja 4.0	16
New Normal (Pasar Modern Kota Banda Aceh)	0
New Normal (Mall Pelayanan Publik/ PTSP Kota Banda Aceh)	0
Pasar Tradisional C-19 Kota Banda Aceh	0
Hotel C-19 Kota Banda Aceh	0
Restoran C-19 Kota Banda Aceh	0
Tempat Wisata C-19 Kota Banda Aceh	0
Transportasi Umum C-19 Kota Banda Aceh	0
KANASIPOLANG (Aplikasi Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	0

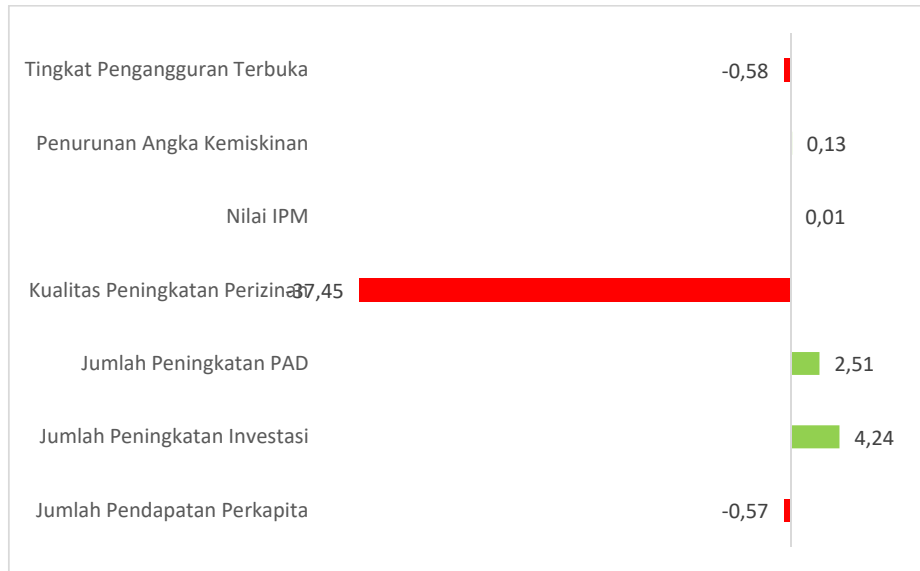
T. KOTA LANGSA



Gambar 210. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Langsa

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Langsa memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 85%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian yang tersebar pada 15 urusan cukup rendah, yaitu 11% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 211. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Langsa

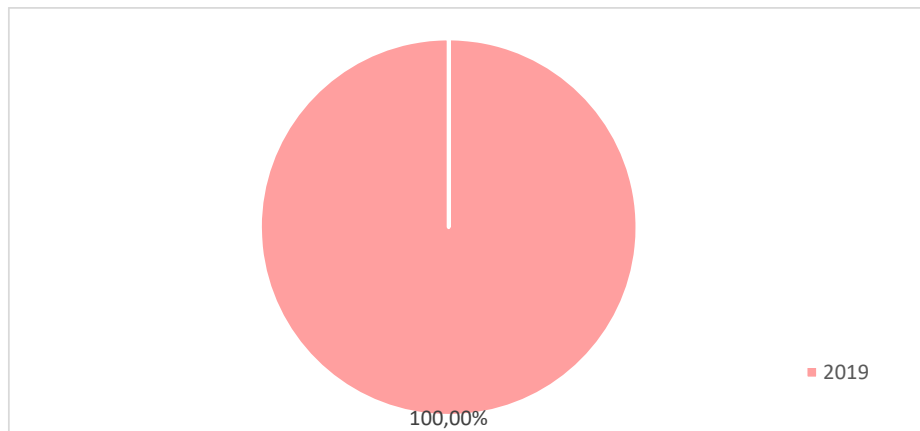
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya mengalami perkembangan yang signifikan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan penurunan sebesar 0.58%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.58%. Dimana nilai tersebut masih dalam batas standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang memiliki batas peningkatan sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0.13%, artinya penduduk miskin pada Kota Langsa turun sebesar 0.13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana nilai pada indikator tersebut sudah melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Nilai IPM meningkat sebesar 0.33% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Langsa mengalami penurunan sebesar 0.57%, nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah dengan batas penurunan sebesar 1.85%.

Pemerintah Kota Langsa mengalami penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 37.45% dimana nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD pada Kota Langsa menunjukkan kenaikan sebesar 2.51%, namun nilai tersebut masih lebih rendah

dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%. Demikian pula dengan Jumlah Peningkatan Investasi meningkat sebesar 4.24%, namun nilai tersebut juga masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 5%. Aspek Satuan Inovasi Daerah

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

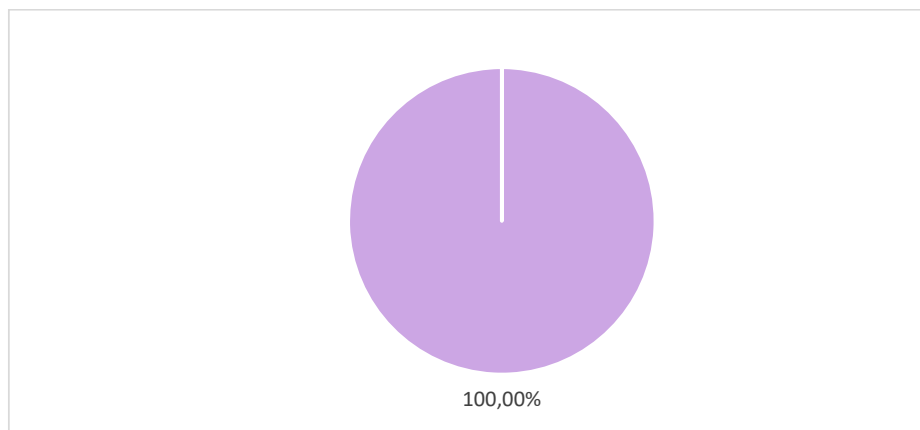
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 212. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Langsa

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 100% atau hanya 1 inovasi saja yang dilaporkan oleh Kota Langsa diterapkan pada tahun 2019 dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada tahun 2020.

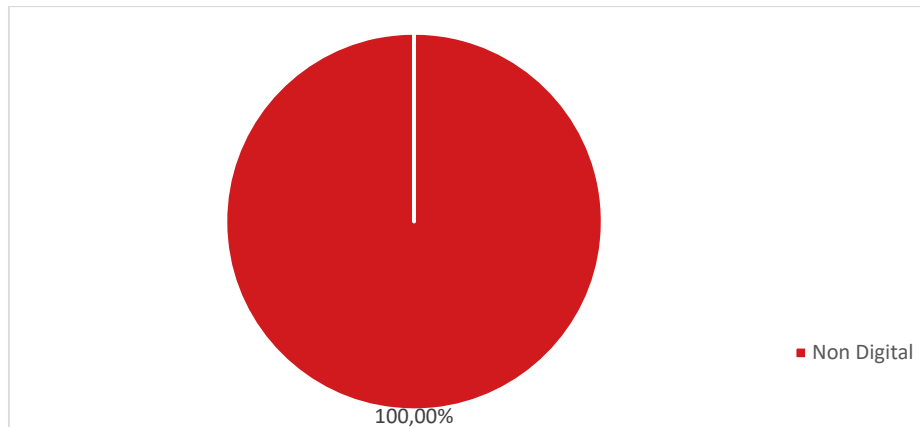
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 213. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Langsa

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Langsa merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebesar 100% (1 inovasi)

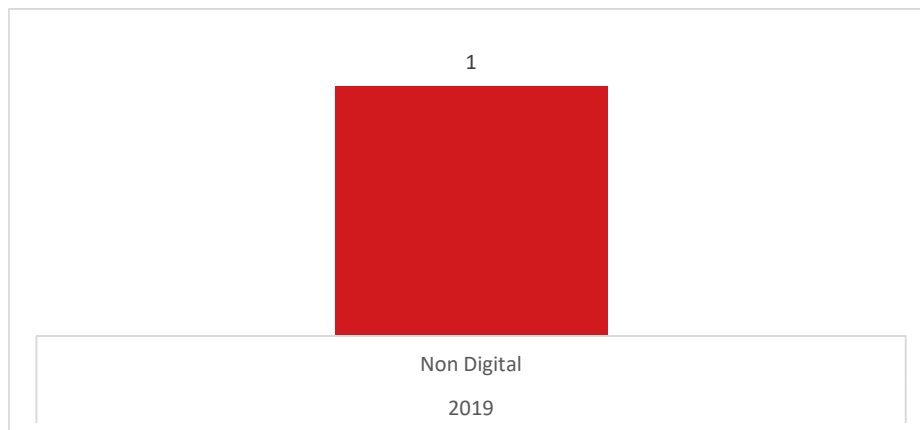
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 214. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Langsa

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya, inovasi yang dilaporkan Kota Langsa merupakan inovasi Non Digital.

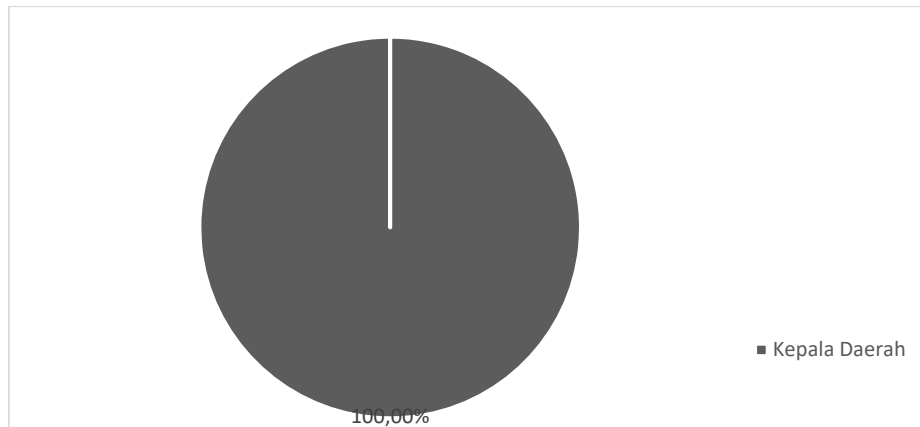
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 215. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Langsa

Dapat dilihat bahwa Kota Langsa hanya melaporkan 1 inovasi saja dengan jenis inovasi non digital yang diterapkan pada tahun 2019.

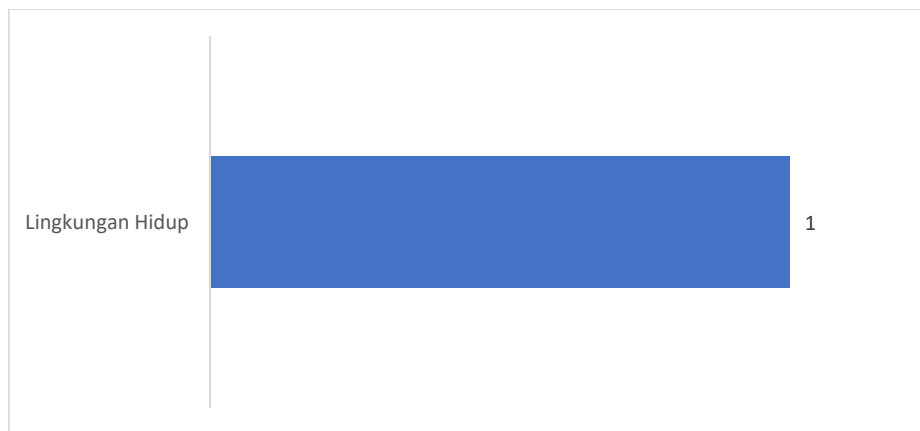
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 216. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Langsa

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Langsa pada tahun 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah sebesar 100% (1 inovasi).

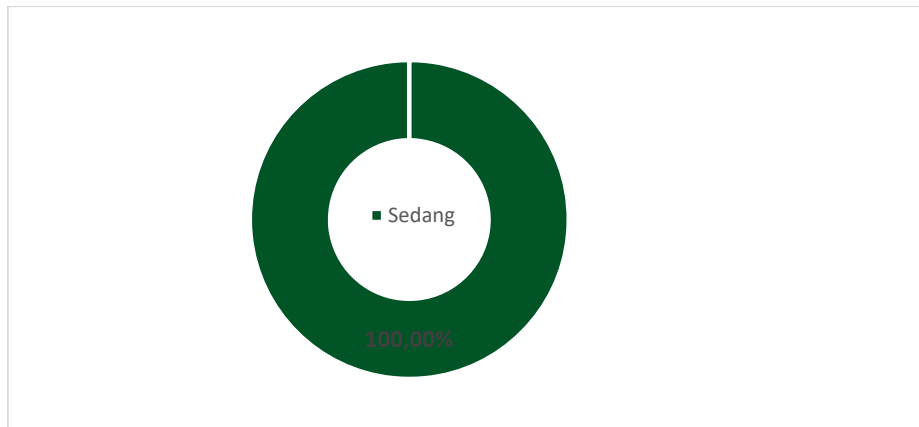
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 217. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Langsa

Inovasi yang dilaporkan oleh Kota Langsa merupakan inovasi dengan urusan lingkungan hidup sebanyak 1 inovasi. Dari sebaran data tersebut tidak ada inovasi dengan urusan wajib yang dilaporkan.

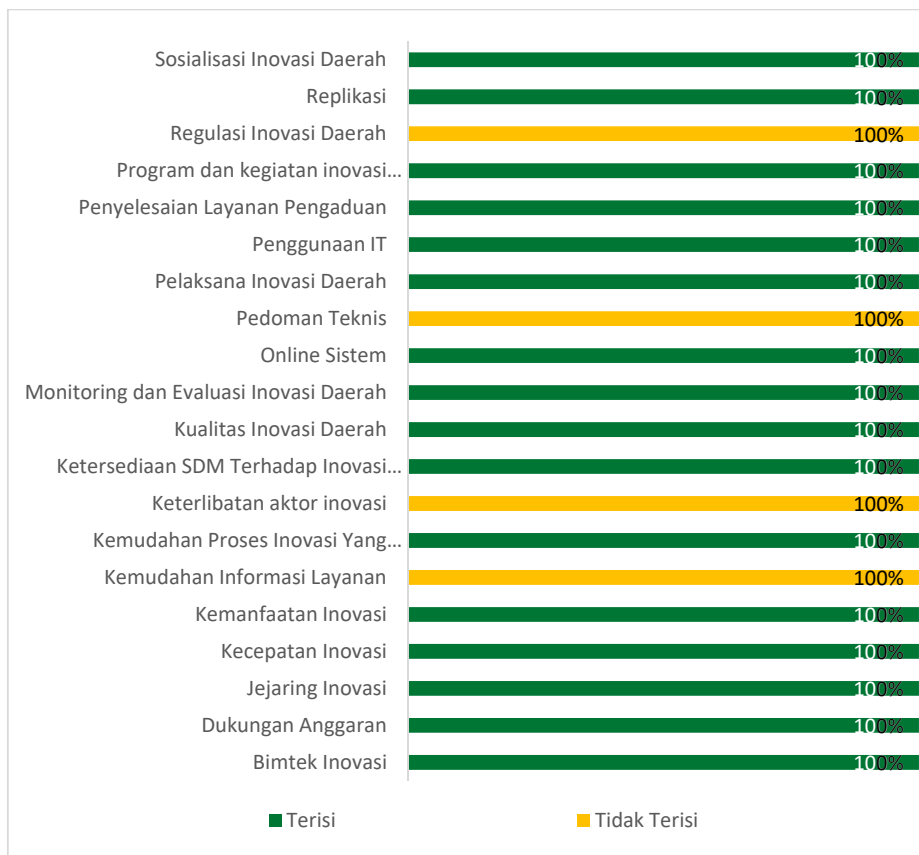
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 218. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Langsa

Inovasi yang dilaporkan Kota Langsa memiliki kategori skor kematangan sedang yaitu skor kematangan antara 50 – 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

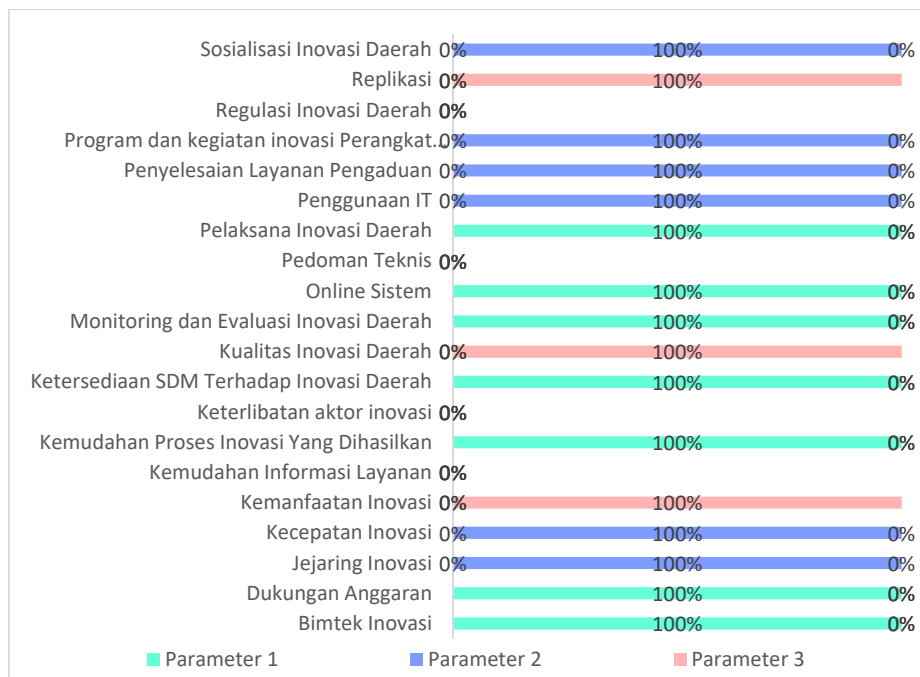


Gambar 219. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Langsa

Dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Langsa, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 20%. Sedangkan, 80% lainnya telah terisi data pendukung. Mayoritas indikator dari inovasi yang dilaporkan Kota Langsa memiliki tingkat keterisian 100% yaitu Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Replikasi, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, Dukungan Anggaran dan Bimtek Inovasi. Artinya dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Langsa telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Keterlibatan Aktor Inovasi dan Kemudahan Informasi Layanan yaitu sebesar 0% artinya dari 1 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Langsa tidak terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 220. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Langsa

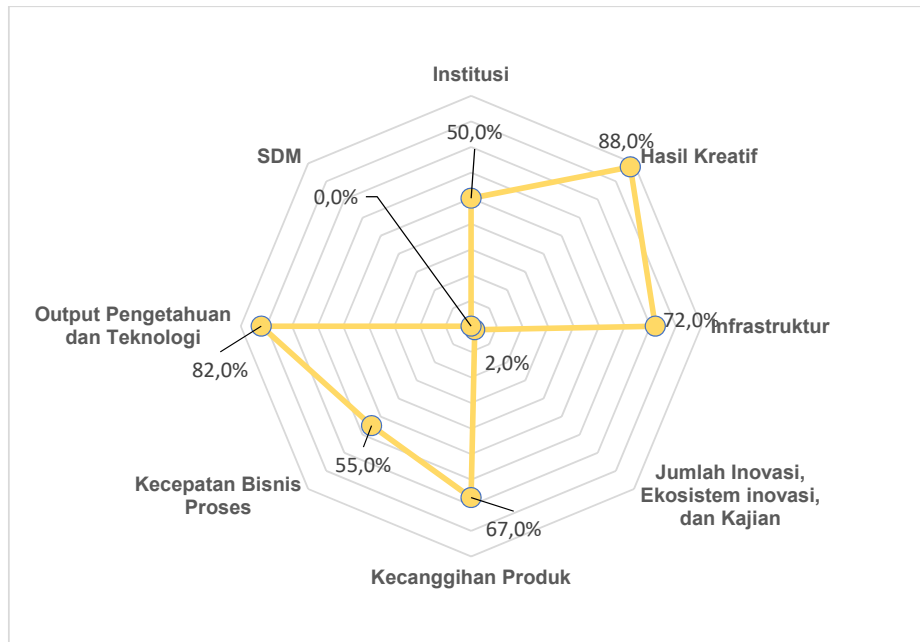
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Replikasi, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi sebesar 100% artinya dari 1 inovasi yang dilaporkan Kota Langsa telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Kecepatan Inovasi dan Jejaring Inovasi yaitu sebesar 100% artinya dari 1 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter kedua untuk indikator – indikator tersebut. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Dukungan Anggaran dan Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya dari 1 inovasi yang dilaporkan Kota Langsa telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Langsa beserta Skor Kematangannya

Tabel 21. Daftar Inovasi Kota Langsa beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
BUDAYA GOTONG ROYONG DI KOTA LANGSA	77

U. KOTA LHOKSUMAWE



Gambar 221. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Lhoksumawe

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Lhoksumawe memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 88%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun pada variabel SDM memiliki skor rendah yaitu 0%, artinya indikator – indikator pada variabel tersebut tidak terisi data pendukung.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



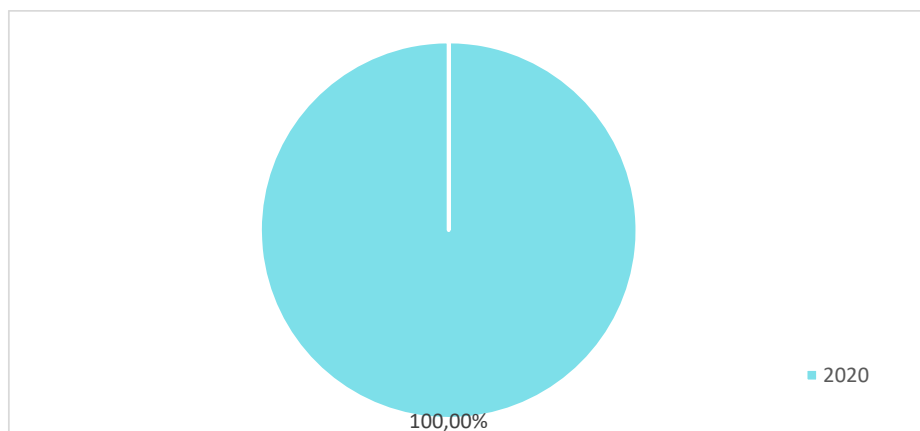
Gambar 222. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Lhoksumawe

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kota Lhoksumawe belum mengalami perkembangan yang signifikan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0% artinya tidak terjadi perubahan. Penurunan Angka Kemiskinan pada Kota Lhoksumawe menunjukkan angka 0% atau tidak terjadi perubahan dimana nilai standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 0.02%. Demikian juga dengan Nilai IPM yang menunjukkan angka 0% atau tetap.

Pemerintah Kota Lhoksumawe mengalami penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 26.34% dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD pada Kota Langsa menunjukkan kenaikan sebesar 39.47%, nilai tersebut diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Demikian pula dengan Jumlah Peningkatan Investasi yang meningkat sebesar 6.88%, nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 5%. Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Langsa juga mengalami peningkatan sebesar 3.24% dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang memiliki batas penurunan 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

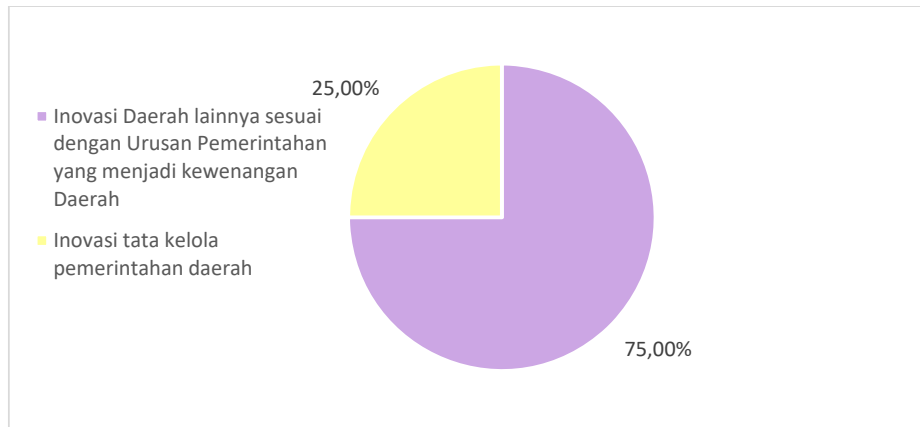
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 223. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Lhoksumawe

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 100% atau 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Lhoksumawe tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan tidak ada inovasi yang dilaporkan pada tahun 2019.

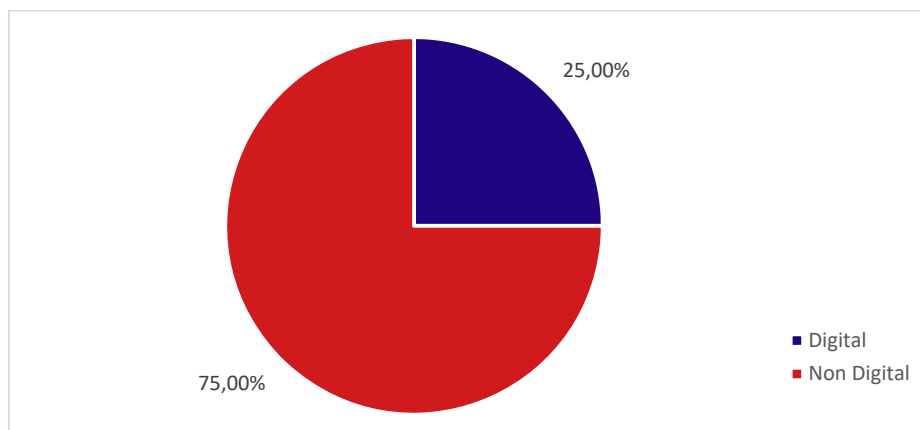
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 224. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Lhoksumawe

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Lhoksumawe adalah Inovasi Daerah Lainnya yaitu sebesar 75% (3 inovasi), sementara 25% atau 1 inovasi lainnya yang dilaporkan merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

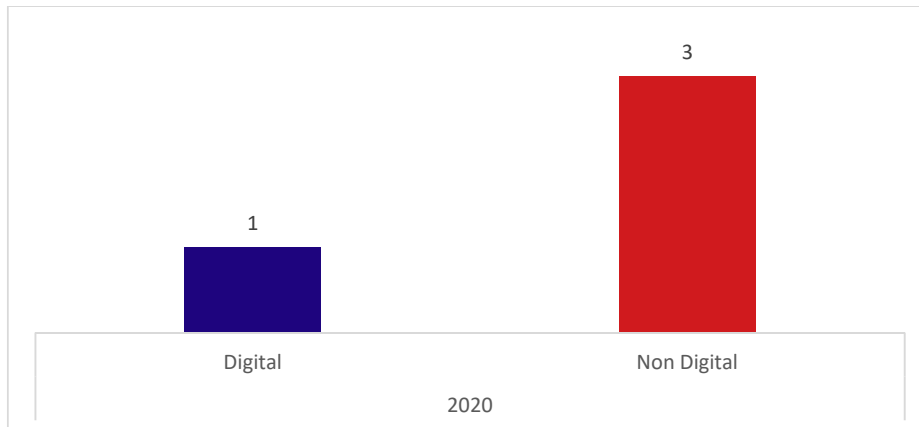


Gambar 225. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Lhoksumawe

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kota Lhoksumawe

yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital sebesar 75% atau 3 inovasi dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan, kemudian 25% atau 1 inovasi lainnya merupakan Inovasi Digital.

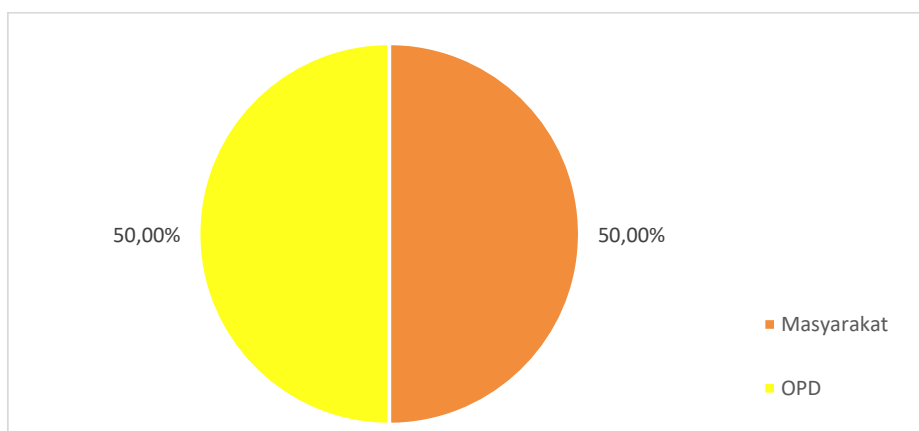
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 226. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Lhoksumawe

Dapat dilihat bahwa tahun 2019 belum ada inovasi yang dilaporkan Kota Lhoksumawe baik inovasi digital, non digital, maupun teknologi. Sedangkan tahun 2020 jenis inovasi yang diterapkan Kota Lhoksumawe terdiri dari inovasi digital sejumlah 1 inovasi dan inovasi non digital sejumlah 3 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

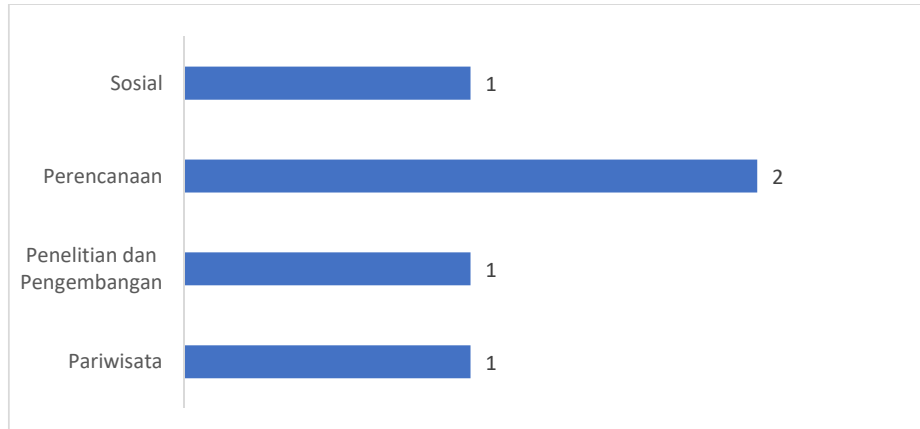


Gambar 227. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Lhoksumawe

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Lhoksumawe pada tahun 2021 memiliki proporsi yang sama yaitu diinisiasi oleh Masyarakat dan OPD dengan rincian 50% (2 inovasi) diinisiasi oleh Masyarakat, sedangkan 50% (2 inovasi)

lainnya diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

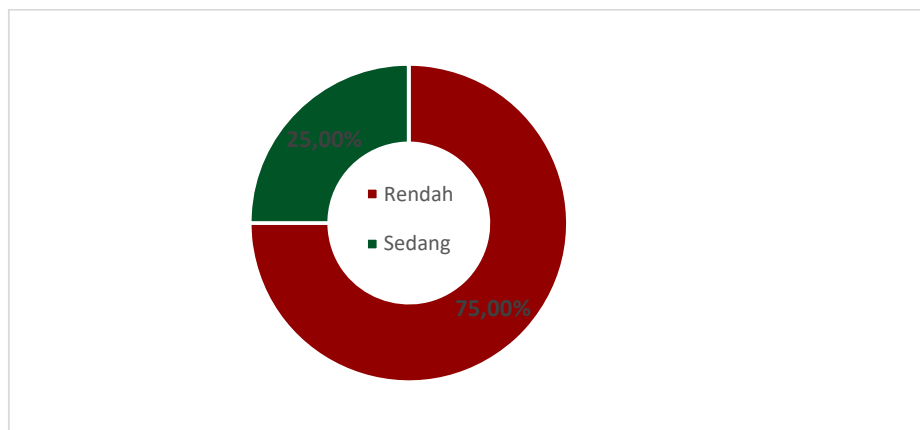
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 228. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Lhoksumawe

Sebaran inovasi daerah pada Kota Lhoksumawe berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar pada 4 urusan. Urusan yang paling banyak adalah Perencanaan dengan 2 inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu, urusan sosial dengan 1 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

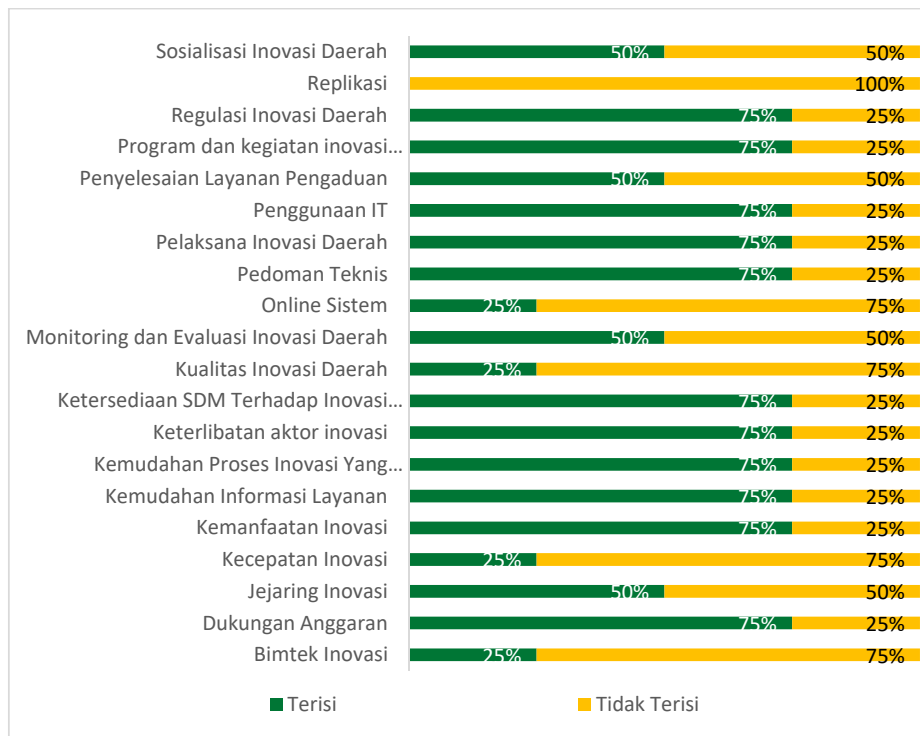


Gambar 229. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Lhoksumawe

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Kota Lhoksumawe, mayoritas inovasi yang memiliki skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50 sebesar 75% (3 inovasi), sedangkan untuk inovasi yang

telah mencapai skor kematangan sedang (skor kematangan antara 50 – 100) sebesar 25% (1 inovasi) dari 4 inovasi yang dilaporkan.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

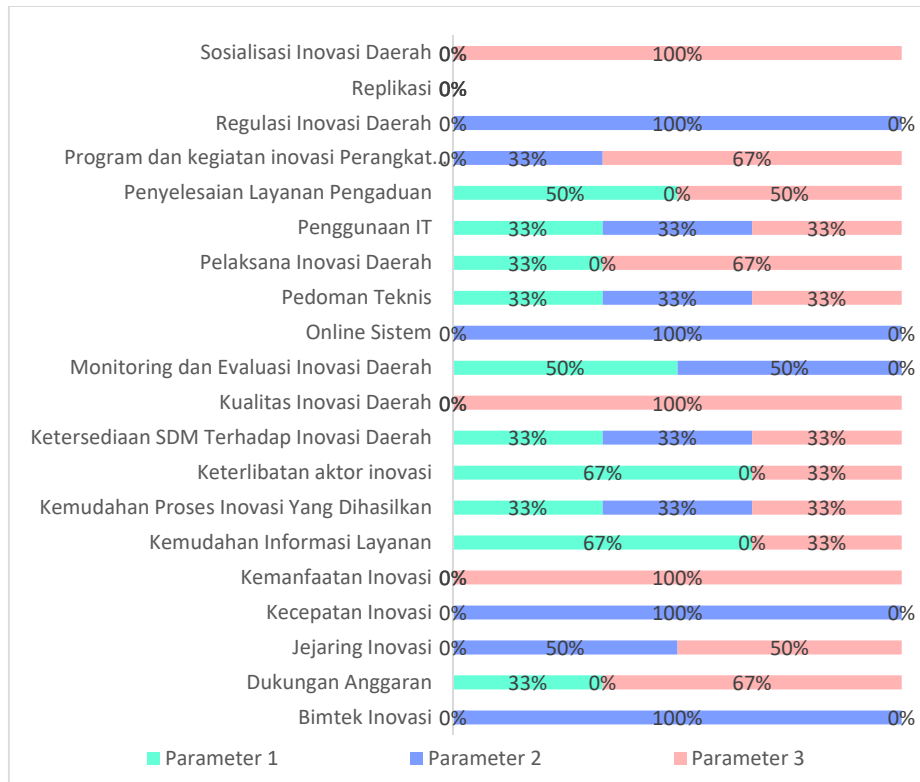


Gambar 230. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Lhoksumawe

Dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Lhoksumawe, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 43.75%. Sedangkan, 56.25% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran merupakan indikator – indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 75% artinya 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Lhoksumawe telah terisi data pendukung dari indikator – indikator tersebut.

Sedangkan indikator Replikasi memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu sebesar 0%. Artinya seluruh inovasi yang dilaporkan tidak terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 231. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Lhoksumawe

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Sosialisasi Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, dan Kemanfaatan Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah, Online Sistem, Kecepatan Inovasi, dan Bimtek Inovasi yaitu sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung termasuk dalam kategori parameter kedua untuk indikator – indikator tersebut. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi dan Kemudahan Informasi

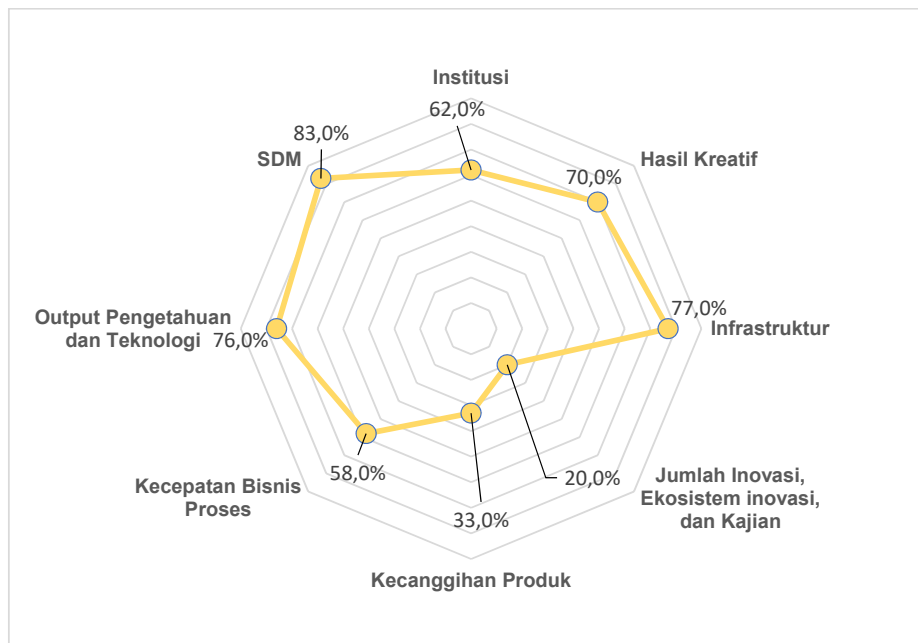
Layanan sebesar 67% artinya 67% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Lhoksumawe beserta Skor Kematangannya

Tabel 22. Daftar Inovasi Kota Lhoksumawe beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Kota Lhokseumawe Menuju New Normal	52
Bantuan Dana Santunan Untuk Warga Meninggal Dunia	20
Wisata Sawah Blang Mangat	0
E-Planning	0

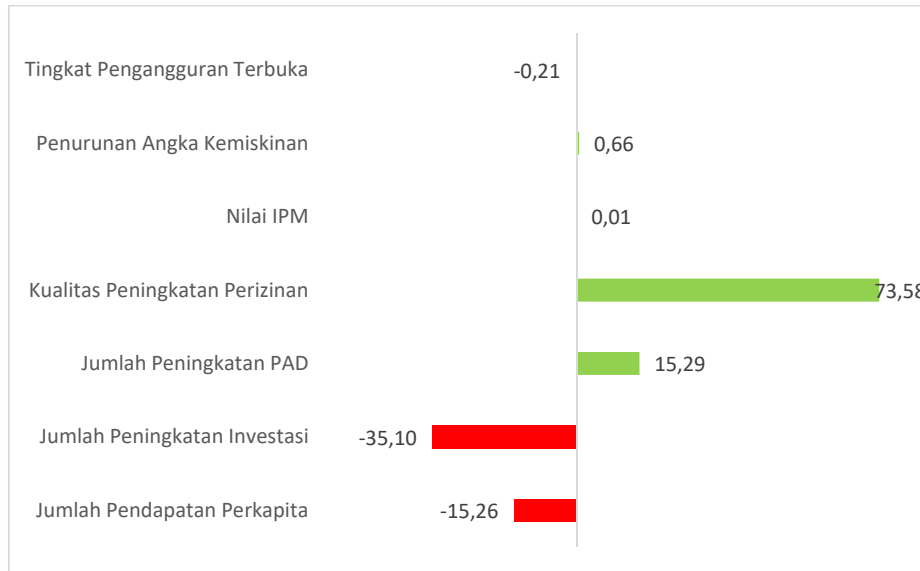
V. KOTA SABANG



Gambar 232. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sabang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Sabang memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 20% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



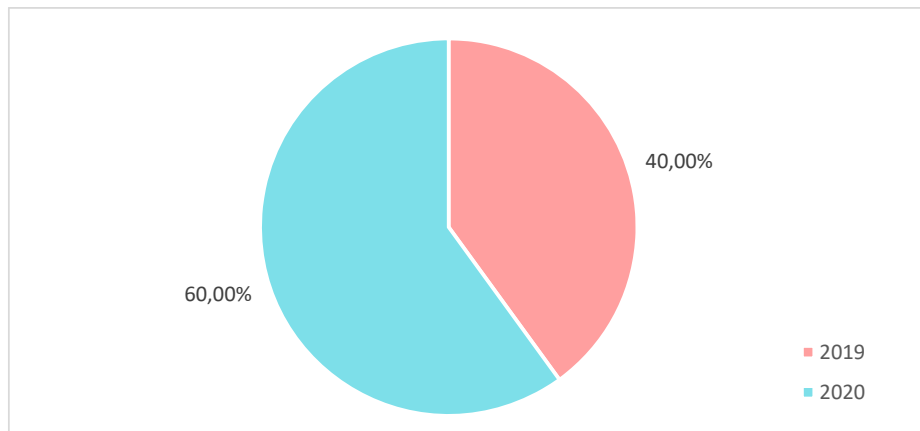
Gambar 233. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sabang

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan tahun 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kota Sabang terjadi perkembangan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi perbaikan pada beberapa indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.21%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 naik sebesar 0.21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana nilai tersebut masih dalam batas standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang memiliki batas peningkatan sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 0.66% artinya penduduk miskin pada Kota Sabang turun sebesar 0.66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai IPM naik sebesar 0.01% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Pemerintah Kota Sabang juga mengalami peningkatan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 73.58%, dimana nilai tersebut juga sudah lebih baik karena diatas standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 5%. Demikian juga dengan Jumlah Peningkatan PAD meningkat sebesar 15.29% dimana nilai tersebut juga lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 8%.

Sedangkan Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 35.10% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%. Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kota Sabang turun sebesar 15.26% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

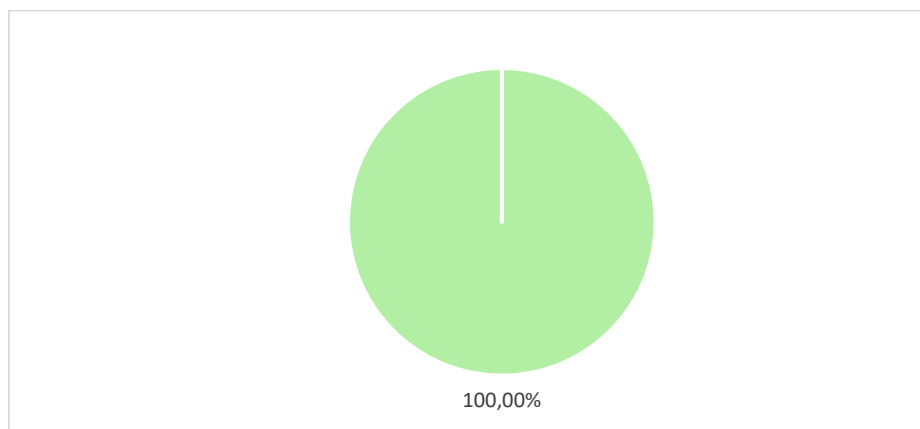
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 234. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Sabang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 40% atau 6 inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sabang tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 60% atau 9 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

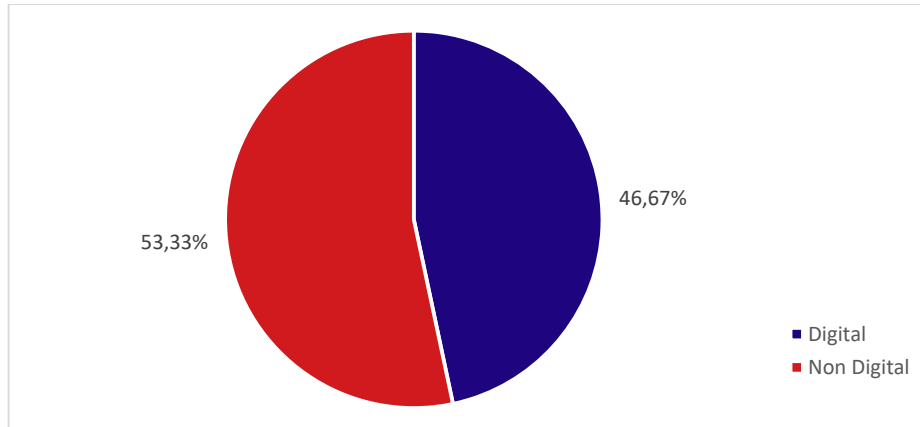
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 235. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sabang

Berdasarkan bentuk inovasinya, secara keseluruhan inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sabang merupakan Inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 100% (15 inovasi).

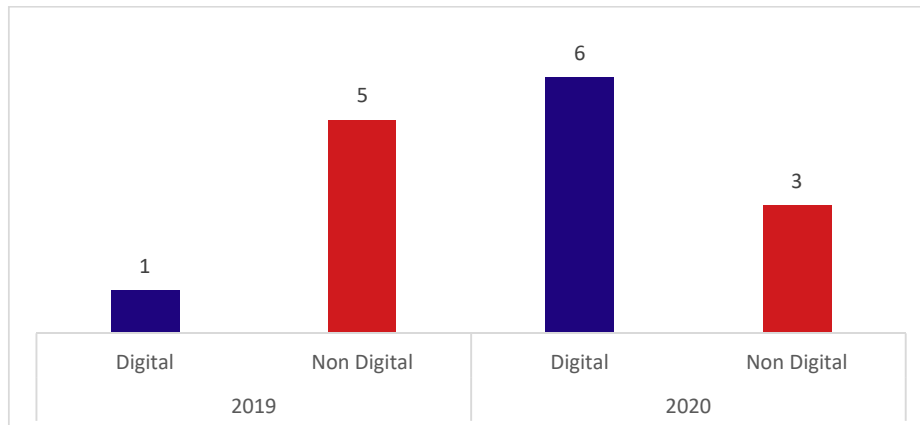
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 236. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Sabang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sabang yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital sebesar 53.33% atau 8 inovasi dari 15 inovasi daerah yang dilaporkan, sedangkan 46.67% atau 7 inovasi lainnya merupakan Inovasi Digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

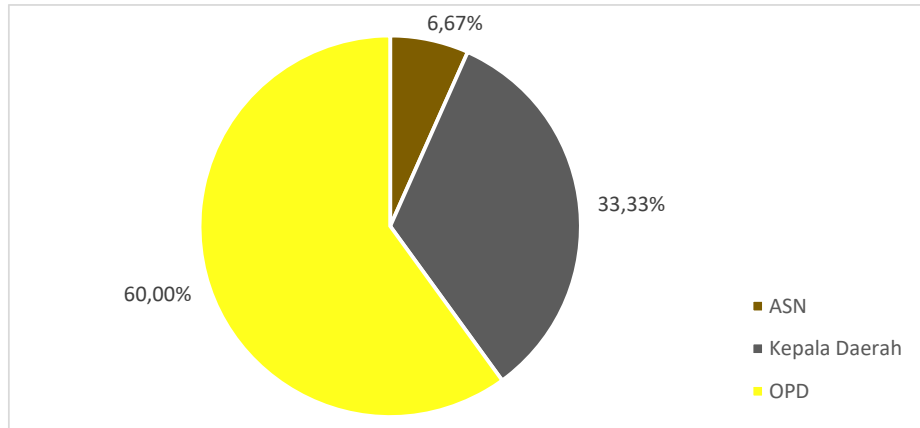


Gambar 237. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sabang

Dapat dilihat bahwa jumlah Inovasi digital mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2019 untuk inovasi digital yang diterapkan

sejumlah 1 inovasi sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 6 inovasi. Sedangkan Inovasi non digital mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dimana pada tahun 2019 inovasi non digital yang diterapkan sejumlah 5 inovasi kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 3 inovasi.

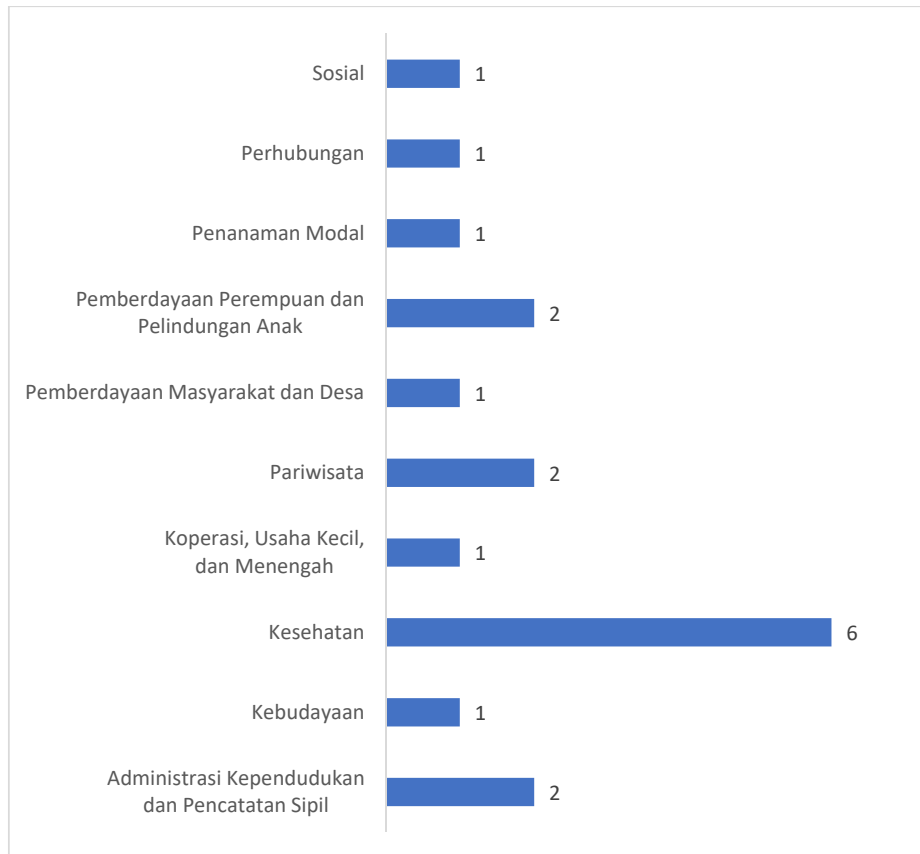
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 238. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Sabang

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sabang pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Perangkat Daerah sebesar 60% (9 inovasi), kemudian sebesar 33.33% (5 inovasi) diinisiasi oleh Kepala Daerah, sedangkan 6.67% (1 inovasi) lainnya diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

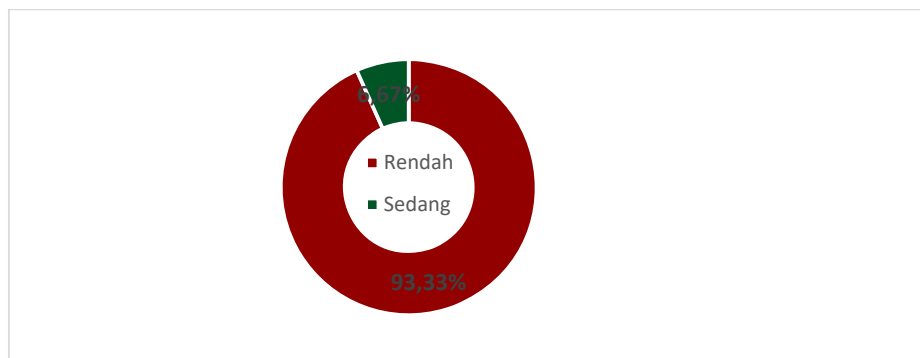
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 239. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Sabang

Sebaran inovasi daerah pada Kota Sabang berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar dalam 10 urusan. Urusan yang paling banyak adalah kesehatan dengan 6 inovasi dari 15 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial dengan 1 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 6 inovasi.

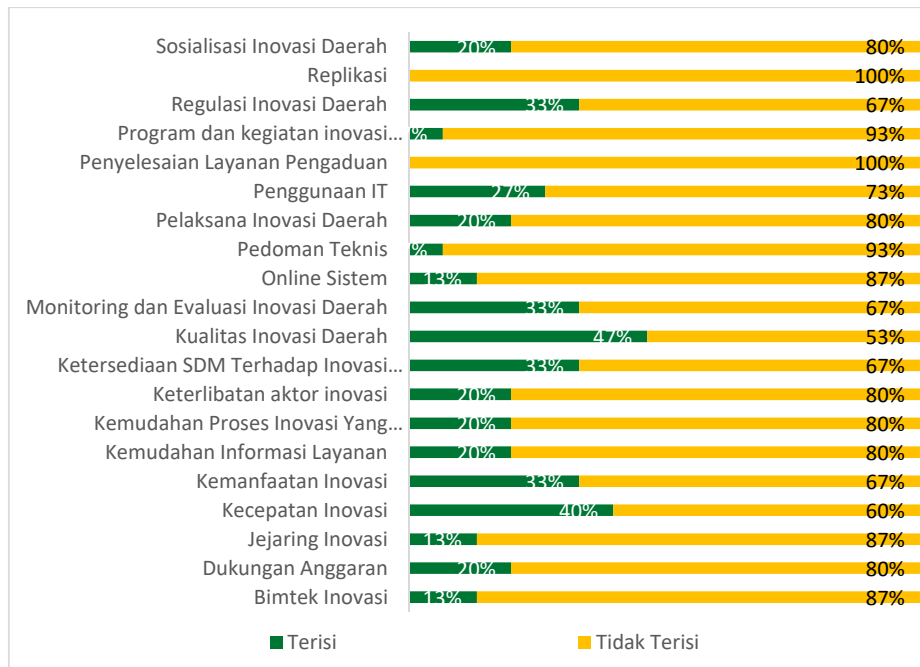
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 240. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Sabang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Kota Sabang, mayoritas inovasi yang memiliki skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50 sebesar 93.33% (14 inovasi), sedangkan untuk inovasi dengan kategori skor kematangan sedang (skor kematangan antara 50 – 100) sebesar 6.67% (1 inovasi) dari 15 inovasi yang dilaporkan.

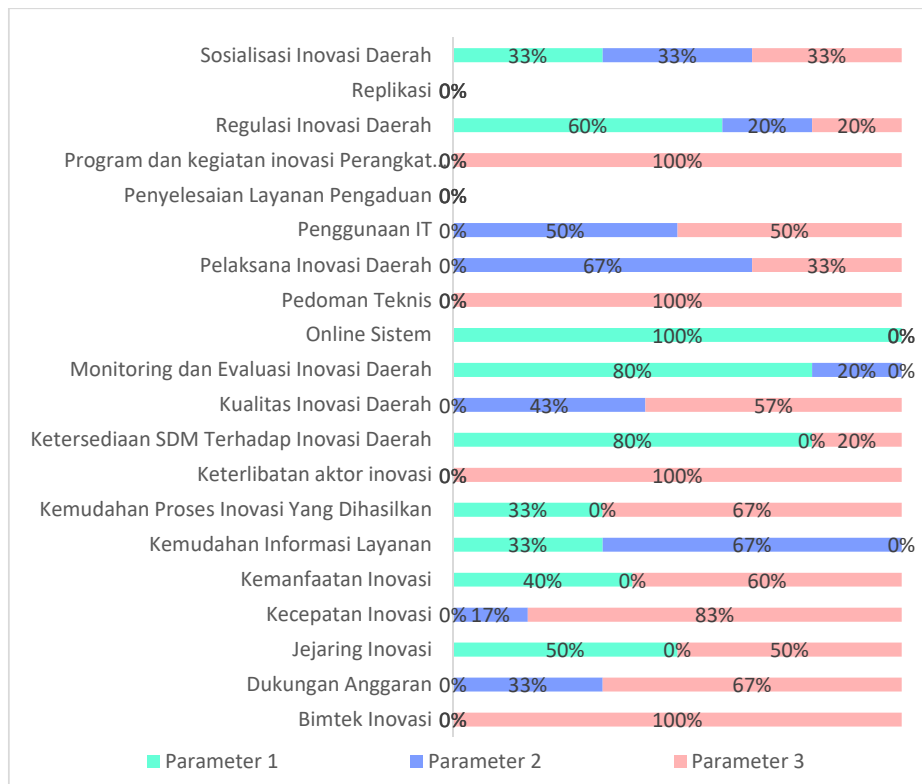
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 241. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sabang

Dari 15 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sabang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 79%. Sedangkan, 21% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 47% artinya 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sabang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi dan penyelesaian layanan pengaduan yaitu sebesar 0% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan tidak terisi data pendukung dari kedua indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 242. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Sabang

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pedoman Teknis, Keterlibatan Aktor Inovasi dan Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Namun perlu diperhatikan juga berdasarkan grafik tingkat keterisian data pendukung inovasi daerah bahwa inovasi yang mengisi indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pedoman Teknis hanya 1 inovasi. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Pelaksana Inovasi Daerah dan kemudahan Informasi Layanan sebesar 67% artinya 67% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter kedua untuk indikator – indikator tersebut. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem sebesar 100% artinya seluruh

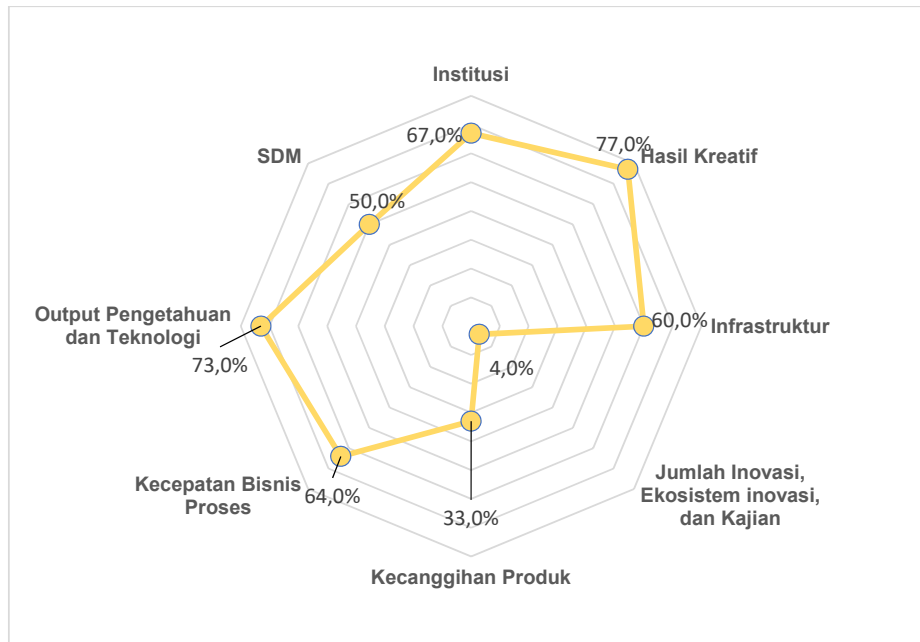
inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kota Sabang beserta Skor Kematangannya

Tabel 23. Daftar Inovasi Kota Sabang beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Gerakan Untuk Anak Sehat (GEUNASEH) Sabang	93
AMBULANCE MEU PEP PEP	47
Poli igoe rakan aneuk miet (POLIRAM)	38
MINUM JAMU TIAP JUMAT (MIJATJUM)	32
GO-JENTELMEN adalah Antar Jemput dokumen	24
AMBULANCE MEU PEP PEP	15
“MIJATJUM (MINUM JAMU TIAP JUM’AT)”	15
Penerapan New Normal Restoran/ Rumah Makan di Kota Sabang	0
PENERAPAN NEW NORMAL SEKTOR HOTEL COVID-19	0
PENERAPAN NEW NORMAL SEKTOR TEMPAT WISATA DI KOTA SABANG	0
PENERAPAN NEW NORMAL SEKTOR PTSP KOTA SABANG	0
PENERAPAN NEW NORMAL SEKTOR TRANSPORTASI UMUM DI KOTA SABANG	0
GO-JENTELMEN (JEMPUT ANTAR LANGSUNG DOKUMEN)	0
E-Dinsos, PMG, PP dan PA	0
Berbusana sesuai Syariat bagi wisatawan Domestik dan Mancanegara	0

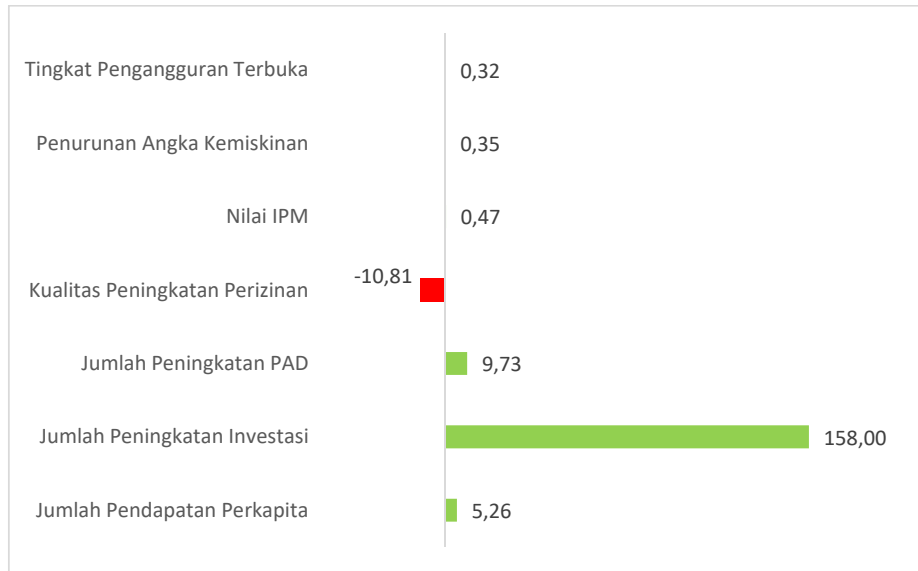
W. KOTA SUBULUSSALAM



Gambar 243. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Subulussalam

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Subulussalam memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 77%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 4% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 244. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Subulussalam

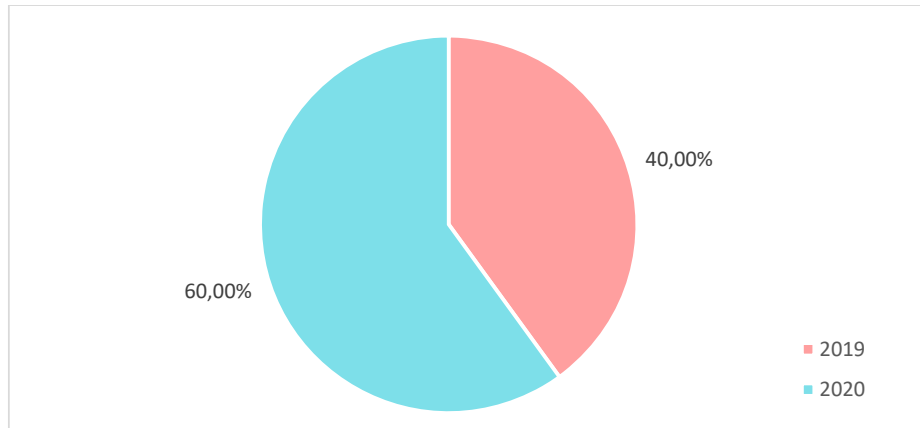
Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah Kota Subulussalam terjadi perkembangan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan terjadi peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.32%, artinya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2020 turun sebesar 0.32% dibandingkan tahun 2019. Kemudian Indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga meningkat sebesar 0.35% artinya jumlah penduduk miskin pada Kota Subulussalam mengalami penurunan, dimana nilai pada indikator tersebut sudah sesuai dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah. Nilai IPM meningkat sebesar 0.47% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap.

Pemerintah Kota Subulussalam mengalami penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan sebesar 10.81% nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Jumlah Peningkatan PAD meningkat sebesar 9.73% dimana nilai tersebut lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 8%. Jumlah Peningkatan Investasi pada Kota Subulussalam juga mengalami peningkatan sebesar 158%. Demikian juga dengan Jumlah Pendapatan Perkapita naik sebesar 5.26% dimana nilai tersebut juga sudah lebih

baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

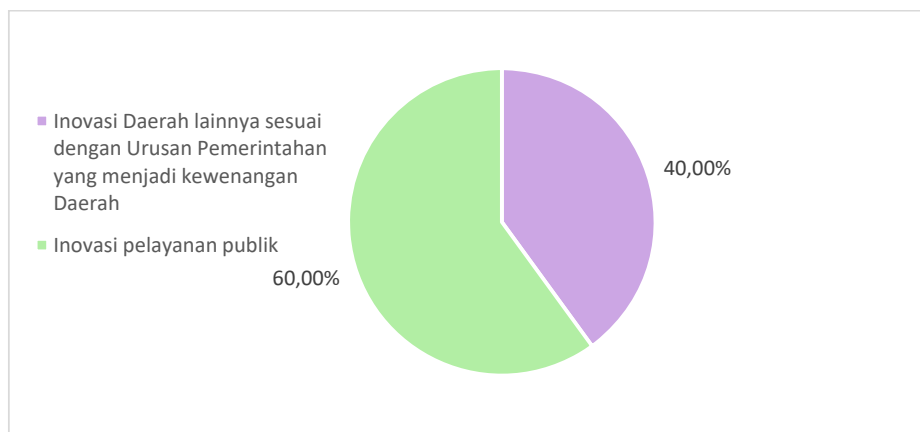
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 245. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi Pada Kota Subulussalam

Dilihat dari tahun penerapan inovasi sebesar 60% atau 3 inovasi dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Subulussalam tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 40% atau 2 inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

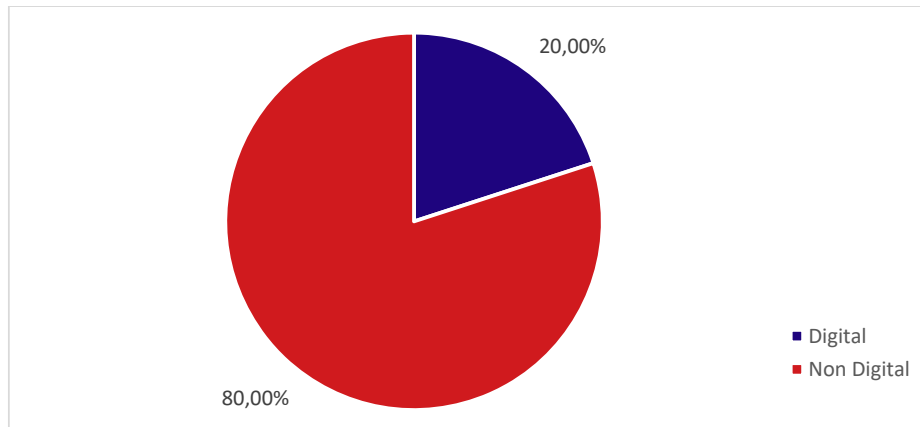


Gambar 246. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Subulussalam

Berdasarkan bentuk inovasinya, inovasi yang dilaporkan merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan inovasi pelayanan publik. Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Subulussalam adalah Inovasi pelayanan publik yaitu sebesar 60% (3

inovasi), sementara 40% atau 2 inovasi lainnya yang dilaporkan merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

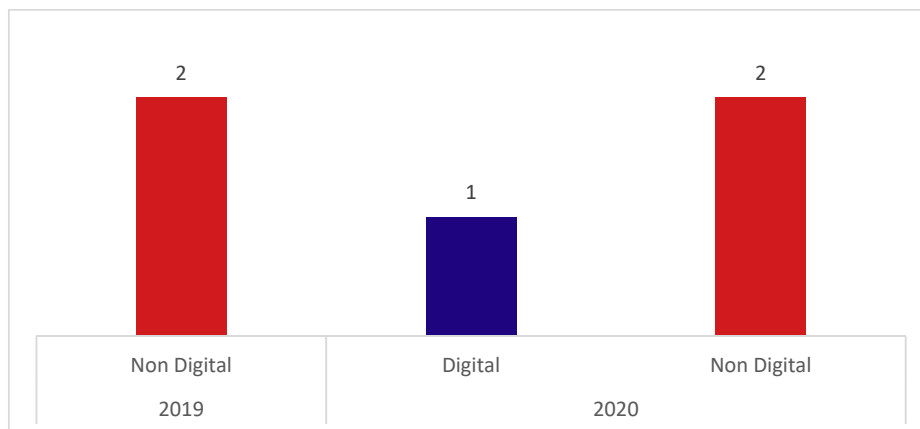
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 247. Diagram Persentase Inovasi Berdasarkan Jenis Inovasi Kota Subulussalam

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat berdasarkan jenis inovasinya terdapat 2 jenis inovasi yang dilaporkan oleh Kota Subulussalam yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Mayoritas jenis inovasi yang dilaporkan adalah inovasi non digital sebesar 80% atau 4 inovasi dari 5 inovasi daerah yang dilaporkan, sedangkan 20% atau 1 inovasi lainnya merupakan Inovasi Digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

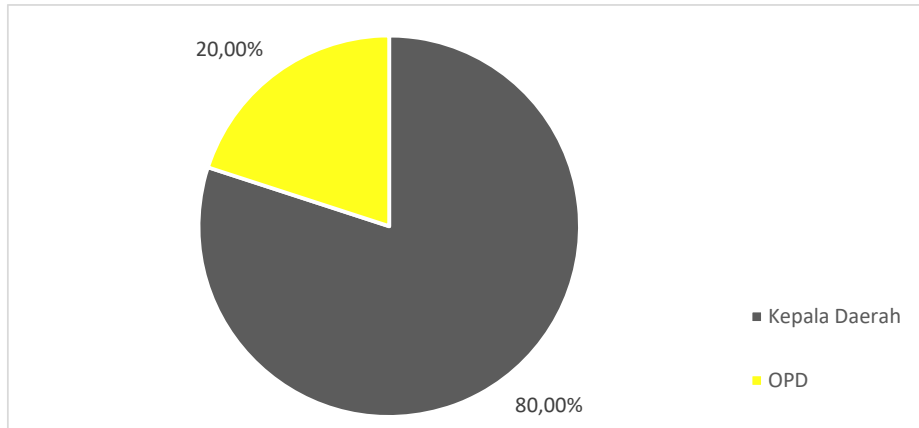


Gambar 248. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Subulussalam

Dapat dilihat bahwa jumlah Inovasi non digital pada Kota Subulussalam tidak mengalami perubahan secara signifikan atau cenderung tetap dimana pada tahun

2019 dan tahun 2020 inovasi non digital yang diterapkan Kota Subulussalam sejumlah 2 inovasi, sementara inovasi digital tahun 2019 masih belum dilaporkan, sedangkan pada tahun 2020 untuk inovasi digital yang diterapkan sejumlah 1 inovasi.

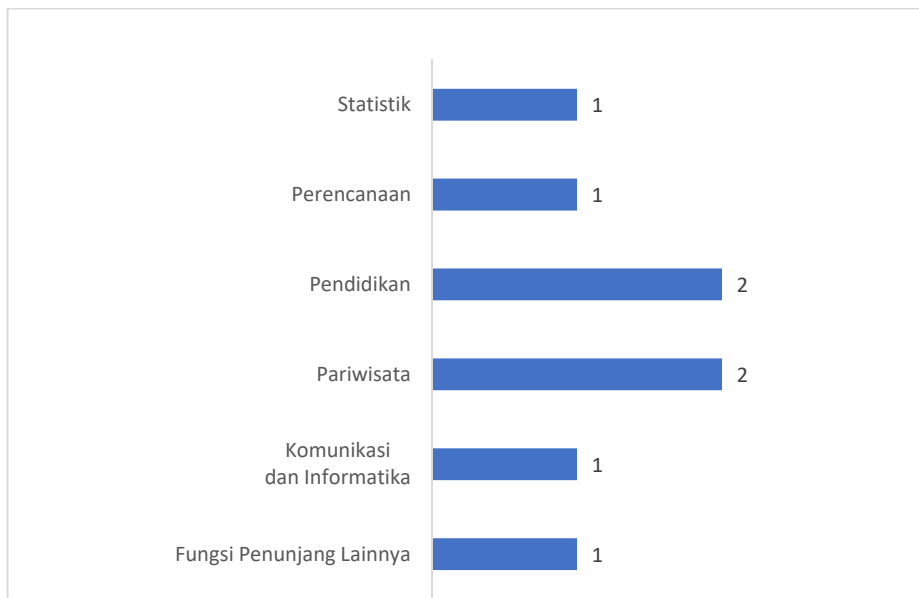
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 249. Persentase Inovasi Berdasarkan Inisiator Inovasi Pada Kota Subulussalam

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Subulussalam pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh Kepala Daerah sebesar 80% (4 inovasi), sedangkan 20% (1 inovasi) lainnya diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat, ASN, dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

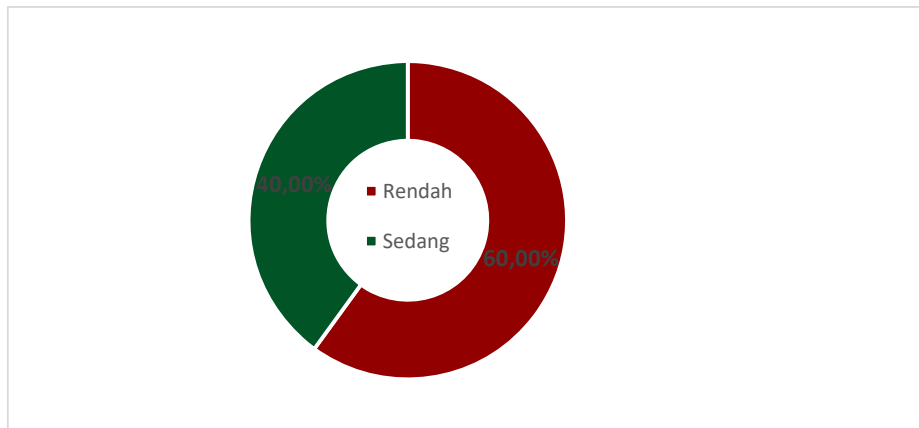
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 250. Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pada Kota Subulussalam

Sebaran inovasi daerah pada Kota Subulussalam berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata yang tersebar dalam 6 urusan. Urusan yang paling banyak adalah urusan Pendidikan dan pariwisata dengan 2 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang terlaporkan.

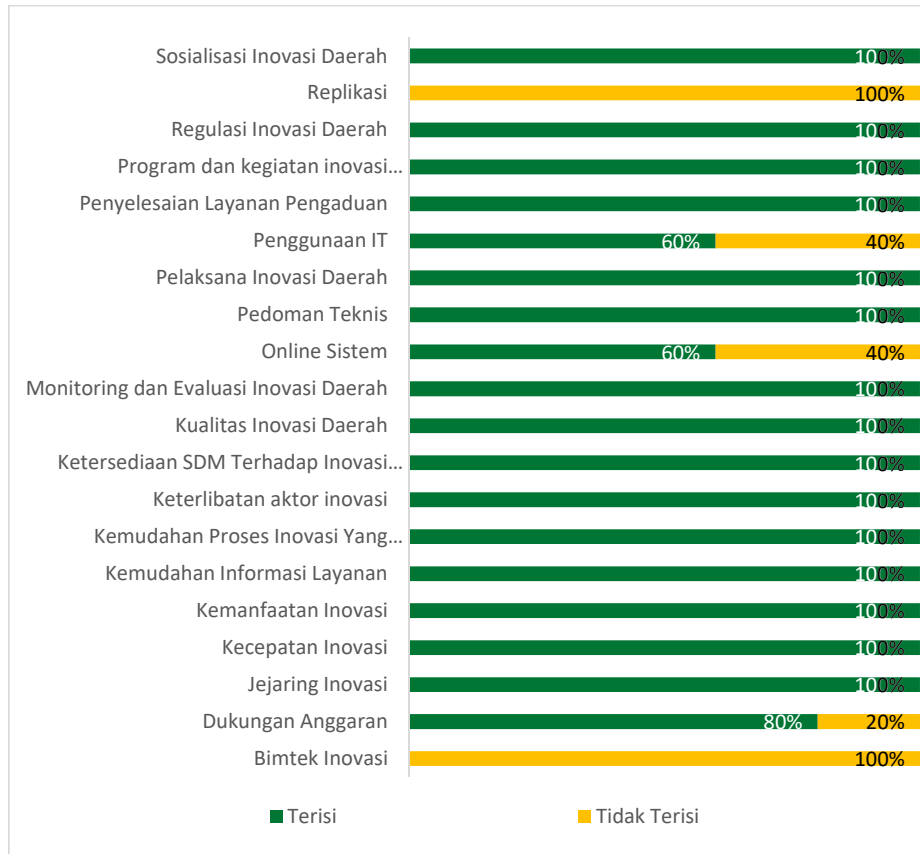
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 251. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan Pada Kota Subulussalam

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi pada Kota Subulussalam, mayoritas inovasi memiliki skor kematangan rendah yaitu skor kematangan dibawah 50 sebesar 60% (3 inovasi), sedangkan untuk inovasi dengan kategori skor kematangan sedang (skor kematangan antara 50 – 100) sebesar 40% (2 inovasi) dari 5 inovasi yang dilaporkan.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

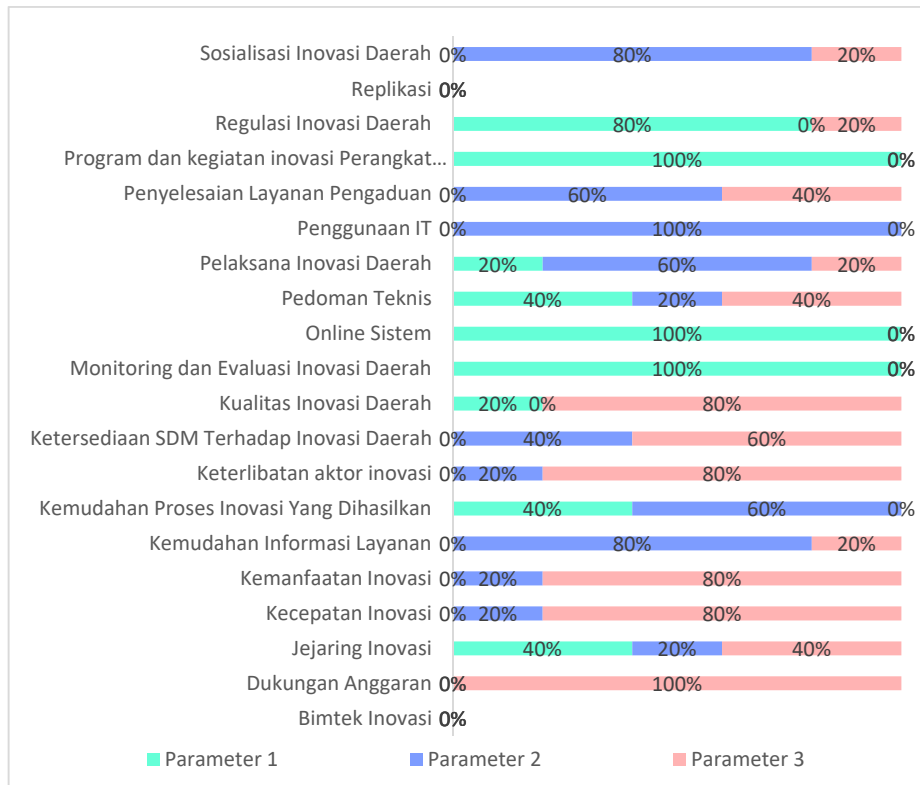


Gambar 252. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung Dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Subulussalam

Dari 5 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Subulussalam, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 15%. Sedangkan, 85% lainnya telah terisi data pendukung. Mayoritas indikator dari inovasi yang dilaporkan Kota Subulussalam memiliki tingkat keterisian 100%, yaitu indikator sosialisasi inovasi daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Program Dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kulaitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, dan Jejaring Inovasi. Artinya seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Subulussalam telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi dan Indikator Bimtek Inovasi yaitu sebesar 0% artinya seluruh inovasi yang dilaporkan tidak terisi data pendukung dari kedua indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah IID



Gambar 253. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Pada Kota Subulussalam

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah Indikator Dukungan Anggaran sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah Indikator Penggunaan IT sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penggunaan IT termasuk dalam kategori parameter kedua. Indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Online Sistem dan indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya

seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut sesuai dengan kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kota Subulussalam beserta Skor Kematangannya

Tabel 24. Daftar Inovasi Kota Sabang beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Kemah Durian	45
Satu Rumah Satu Sarjana (1R1S)	24
Kemah Durian	55
Satu Rumah Satu Sarjana (1R1S)	24
PEMBANGUNAN SATU DATA SUBULUSSALAM (SADA DATA SADA PETA)	70



BAB III

PEMBAHASAN REKOMENDASI

Fokus pembahasan pada bagian ini akan dibatasi pada hal-hal yang menjadi kekurangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh pada variabel-variabel dan indikator satuan Inovasi daerah dan perumusan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Ini dikarenakan variabel dan indikator tersebut merupakan indikator input dan proses pendorong inovasi, sementara variabel dan indikator pada satuan pemerintah daerah adalah indikator makro pemerintah daerah yang ditempatkan sebagai indikator output makro pada pemerintah daerah.

A. KABUPATEN ACEH BARAT

Kabupaten Aceh Barat pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 56.88 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Barat pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel telah berada di atas 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel yang masih belum mencapai 60% yaitu kecanggihan produk. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 25. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 8 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Barat tersebar di 3 (tiga) urusan yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan kesehatan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada 2 (dua) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan kesehatan. Berdasarkan

hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan tinggi. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 10 dan 11 merupakan Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa hampir semua indikator telah terisi secara penuh. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen dibawah 60% yaitu pada indikator replikasi dan bimtek Inovasi. Persentase bukti dukung terbesar sudah menunjukkan pada parameter 3 namun masih perlu dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 26. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Barat

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Bimtek Inovasi (50%)	2. Regulasi Inovasi Daerah (17%)
	3. Bimtek Inovasi (0%)
	4. Online Sistem (17%)
	5. Monev Inovasi Daerah (17%)
	6. Kemudahan Informasi Layanan (17%)
	7. Pelaksana Inovasi Daerah (33%)
	8. Pedoman Teknis (33%)
	9. Ketersediaan SDM (33%)
	10. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (50%)
	11. Jejaring Inovasi (50%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

B. KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Kabupaten Aceh Barat Daya pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 42.36 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel telah berada di atas 60%. Hal ini perlu dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Berdasarkan Gambar 19 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Barat Daya tersebar di 8 (delapan) urusan yaitu perindustrian, perdagangan, pendidikan, pariwisata, KUKM, Kesehatan, kepegawaian, dan fungsi penunjang lainnya. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada 2 (dua) urusan yaitu pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah dan sedang. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 21 dan 22. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator telah terisi. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang

menunjukkan keterisian dokumen dibawah 60%. Persentase bukti dukung terbesar sudah menunjukkan pada parameter 3 namun masih perlu dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 27. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Barat Daya

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (7%)	2. Regulasi Inovasi Daerah (0%)
3. Sosialisasi Inovasi Daerah (20%)	3. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (7%)
4. Pedoman Teknis (20%)	4. Pelaksana Inovasi Daerah (20%)
5. Penyelesaian Layanan Pengaduan (20%)	5. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (21%)
6. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (20%)	6. Online Sistem (25%)
7. Kemudahan Informasi Layanan (27%)	7. Sosialisasi Inovasi Daerah (25%)
8. Online Sistem (27%)	8. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (30%)
9. Bimtek Inovasi (40%)	9. Penggunaan IT (30%)
10. Keterlibatan aktor Inovasi (53%)	10. Bimtek Inovasi (33%)
11. Dukungan Anggaran (53%)	11. Jejaring Inovasi (38%)
12. Jejaring Inovasi (53%)	12. Keterlibatan aktor inovasi (50%)
	13. Kecepatan Inovasi (57%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

C. KABUPATEN ACEH BESAR

Kabupaten Aceh Besar pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 6.76 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Besar pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel tidak tercapai (0%).

**Tabel 28. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Capaian Variabel
Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021**

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran • menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah • melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda • meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • menyosialisasikan layanan pengaduan kepada

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
	layanan pengaduan	seluruh sasaran manfaat, <ul style="list-style-type: none"> tanggap menindaklanjuti aduan yang ada menginventarisir seluruh aduan dan tinjupnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> melakukan monev inovasi secara berkala membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 30 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Besar tersebar di 6 (enam) urusan yaitu social, perhubungan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata, dan kesehatan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada 2 (dua) urusan sosial dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 32 dan 33 yang merupakan Grafik Tingkat Keterisian

Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa semua indikator tidak terisi bukti dukung. Optimalisasi keterisian dokumen harus dilakukan pada seluruh indikator.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

D. KABUPATEN ACEH JAYA

Kabupaten Aceh Jaya pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 60.29 dan masuk pada kategori Sangat Inovatif. Melihat Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Jaya pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel telah berada di atas 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk yang belum mencapai 60%. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 29. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Jaya Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 41 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Jaya telah tersebar di 27 (dua puluh tujuh). Inovasi telah ada pada 5 (lima) urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18(delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi relative telah tersebar di sebagian besar urusan pemerintah daerah. Optimalisasi masih dapat dilakukan dengan mendorong perangkat daerah yang belum berpartisipasi memberikan kontribusi pada Inovasi daerah melalui mekanisme *reward* dan *punishment* yang berlaku sesuai kearifan local pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator telah diisi. Gambar 44 Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah persentase bukti dukung terbesar telah menunjukkan pada parameter 3. Optimalisasi masih dapat dilakukan pada indikator yang keterisian dokumen masih kurang dari 60% dan kesesuaian bukti dukung dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

**Tabel 30. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
Kabupaten Aceh Jaya**

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (7%)	1. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (0%)
2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (40%)	2. Online Sistem (0%)
	3. Pedoman Teknis (0%)
	4. Replikasi (0%)
	5. Sosialisasi Inovasi Daerah (9%)
	6. Kemudahan Informasi Layanan (11%)
	7. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (13%)
	8. Pelaksana Inovasi Daerah (19%)
	9. Penggunaan IT (32%)
	10. Bimtek Inovasi (34%)
	11. Jejaring Inovasi (35%)
	12. Kualitas Inovasi Daerah (51%)
	13. Kemanfaatan Inovasi (55%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

E. KABUPATEN ACEH SELATAN

Kabupaten Aceh Selatan pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 13.68 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Selatan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 31. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Output Pengetahuan dan teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah • melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda • meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, • tanggap menindaklanjuti aduan yang ada • menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan monev inovasi secara berkala • membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
		pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarluaskan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 52 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Selatan hanya ada di 1 (satu) urusan yaitu keuangan. Belum ada Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 54 dan 55. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa seluruh indikator tidak diisi dan tidak mempunyai bukti dukung. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian dokumen masih harus dilakukan pada seluruh indikator.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

F. KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kabupaten Aceh Singkil pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 4.52 dan masuk pada kategori Kurang inovatif. Melihat Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Singkil pada

bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah hamper seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Variabel yang telah berada di atas 60% adalah variabel hasil kreatif. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 32. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran • menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah • melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda • meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
		untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, • tanggap menindaklanjuti aduan yang ada • menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 63 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Singkil tersebar di 4 (empat) urusan yaitu perindustrian, perdagangan, pariwisata, administrasi kependudukan dan catatan sipil. Belum Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang

digambarkan oleh Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator tidak diisi dan tidak mempunyai bukti dukung. Optimalisasi keterisian dokumen masih harus dilakukan pada hampir seluruh indikator.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter masih minim. Parameter 3 hanya dapat terpenuhi pada indikator kualitas Inovasi dan kemanfaatan Inovasi.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

G. KABUPATEN ACEH TAMIANG

Kabupaten Aceh Tamiang pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 25.23 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel telah berada di atas 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan Gambar 74 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Tamiang tersebar di 18 (delapan belas) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada 3 (tiga) urusan pendidikan, trantibumlinmas, dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Kondisi yang digambarkan oleh Gambar 76 dan 77 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator belum terisi, namun persentase pengisian parameter telah menunjukkan lebih banyak di parameter 3. Optimalisasi perlu dilakukan pada dokumen indikator yang belum mencapai 60% dan pengisian parameter belum mencapai 60% di parameter 3.

Tabel 33. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Aceh Tamiang

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (3%)	1. Replikasi (0%)
2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (10%)	2. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (0%)
3. Online Sistem (16%)	3. Kemudahan Informasi Layanan (7%)
4. Pedoman Teknis (23%)	4. Regulasi Inovasi Daerah (9%)
5. Keterlibatan aktor Inovasi (23%)	5. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (25%)
6. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (26%)	6. Bimtek Inovasi (25%)
7. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (29%)	7. Pedoman Teknis (29%)
8. Jejaring Inovasi (35%)	8. Sosialisasi Inovasi Daerah (31%)
9. Bimtek Inovasi (39%)	9. Pelaksana Inovasi Daerah (38%)
10. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (42%)	10. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (46%)
11. Sosialisasi Inovasi Daerah (42%)	11. Kecepatan Inovasi (57%)
12. Dukungan Anggaran (42%)	12. Kemanfaatan Inovasi (57%)
13. Pelaksana Inovasi Daerah (42%)	13. Keterlibatan aktor Inovasi (57%)
14. Penggunaan IT (45%)	14. Penggunaan IT (57%)
15. Kemudahan Informasi Layanan (48%)	

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

H. KABUPATEN ACEH TENGAH

Kabupaten Aceh Tengah pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 27.03 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tengah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel telah berada di atas 30% sehingga tidak perlu perhatian khusus (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk yang belum mencapai 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 34. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 85 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Tengah tersebar di 19 (sembilan belas) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada 4 (empat) urusan yaitu perumahan rakyat dan permukiman, pendidikan, PU dan Tata Ruang, Trantibumlinmas dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada perangkat daerah yang belum aktif dalam pelaksanaan Inovasi untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah

melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator tidak terisi. Optimalisasi harus dilakukan hampir pada seluruh indikator kecuali indikator regulasi Inovasi daerah dan ketersediaan SDM terhadap Inovasi daerah.

Grafik 88. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa paling besar berada pada parameter 1. Optimalisasi keterisian parameter dalam indikator kesesuaian dokumen harus dilakukan pada hampir semua indikator yang belum mencapai 60% pada parameter 3. Indikator yang sudah mencapai 60 % pada parameter 3 yaitu sosialisasi Inovasi daerah, kualitas Inovasi daerah, dan jejaring Inovasi daerah.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

I. KABUPATEN ACEH TENGGARA

Kabupaten Aceh Tenggara pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 1.30 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 35. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran • menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah • melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda • meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, • tanggap menindaklanjuti aduan yang ada

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
		<ul style="list-style-type: none"> menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> melakukan monev inovasi secara berkala membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 96 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Tenggara tersebar di 8 (delapan) urusan yaitu perumahan rakyat dan permukiman, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pariwisata, komunikasi, keuangan, kesehatan, dan fungsi penunjang lainnya. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada urusan pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang

digambarkan oleh Gambar 98 dan 99 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator tidak diisi dan tidak mempunyai bukti dukung. Indikator hanya terisi sebanyak 11% pada indikator pelaksana Inovasi daerah dengan keseluruhan bukti dukung pada parameter 2. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian dokumen masih harus dilakukan pada seluruh indikator.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

J. KABUPATEN ACEH TIMUR

Kabupaten Aceh Timur pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 12.92 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 100 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Timur pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Timur berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 36. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran • menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah • melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda • meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, • tanggap menindaklanjuti aduan yang ada • menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan monev inovasi secara berkala • membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar 107 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Timur tersebar di 12 (dua belas) urusan yaitu pertanian, perhubungan, perencanaan, perdagangan, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, lingkungan hidup, Koperasi dan UKM, trantibumlinmas, kesehatan, kelautan, dan kebudayaan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada pada urusan trantibumlinmas dan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 109 dan 110 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator

Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa semua indikator tidak diisi dan tidak mempunyai bukti dukung. Optimalisasi keterisian dan kesesuaian dokumen masih harus dilakukan pada seluruh indikator.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

K. KABUPATEN ACEH UTARA

Kabupaten Aceh Utara pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 25.54 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Aceh Utara pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel telah berada di atas 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada hampir seluruh variabel belum mencapai 60% kecuali hasil kreatif. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 37. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 118 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Aceh Utara tersebar di 4 (empat) urusan yaitu perdagangan, pariwisata, kepegawaian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Belum ada Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 119. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 120 dan 121 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah dan Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas indikator tidak terisi. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada seluruh indikator. Persentase bukti dukung terbesar masih menunjukkan pada parameter 1. Optimalisasi harus dilakukan pada hampir indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60% kecuali indikator kualitas inovasi daerah.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

L. KABUPATEN BENER MERIAH

Kabupaten Bener Meriah pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 21.61 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 122. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bener Meriah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah

seluruh variabel telah berada di atas 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecepatan bisnis proses yang belum mencapai 60%. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 38. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Bener Meriah Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat • tanggap menindaklanjuti aduan yang ada • menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan

Berdasarkan Gambar 129 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Bener Meriah tersebar di 8 (delapan) urusan. Inovasi telah ada pada 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar yaitu trantibumlinmas dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi

antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 130. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 131 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator tidak diisi. Gambar 132 Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah persentase bukti dukung terbesar telah menunjukkan pada parameter 3. Optimalisasi masih dapat dilakukan pada indikator yang keterisian dokumen masih kurang dari 60% dan kesesuaian bukti dukung dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 39. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Bener Meriah

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Regulasi Inovasi Daerah (0%)
2. Bimtek Inovasi (8%)	2. Replikasi (0%)
3. Dukungan Anggaran (8%)	3. Bimtek Inovasi (0%)
4. Jejaring Inovasi (8%)	4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
5. Keterlibatan aktor Inovasi (8%)	5. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (0%)
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (8%)	6. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (0%)
7. Online Sistem (23%)	7. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)
8. Pedoman Teknis (23%)	8. Kemudahan Informasi Layanan (25%)
9. Pelaksana Inovasi Daerah (23%)	9. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (33%)
10. Kemudahan Informasi Layanan (31%)	10. Online Sistem (33%)
11. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (31%)	11. Pedoman Teknis (33%)
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan (31%)	12. Penggunaan IT (40%)
13. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (31%)	13. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (50%)
14. Sosialisasi Inovasi Daerah (31%)	14. Sosialisasi Inovasi Daerah (50%)
15. Penggunaan IT (38%)	
16. Kualitas Inovasi Daerah (54%)	

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat

daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

M. KABUPATEN BIEREUN

Kabupaten Biereun pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 52.76 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 133. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Biereun pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Biereun berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 40. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Biereun Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar 141 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Biereun tersebar di 31 (tiga puluh satu) urusan. Terdapat seluruh Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar yakni urusan sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat, dan urusan kesehatan. Hal ini perlu dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Berdasarkan Gambar 142. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Bireun menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 143. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator telah diisi dan mempunyai bukti dukung. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen dibawah 60%.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 114. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih dapat dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 41. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Bireun

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (12%)	1. Online Sistem (14%)
2. Program pada RKPD (55%)	2. Replikasi (15%)
3. Online Sistem (44%)	3. Monev Inovasi Daerah (17%)
4. Kecepatan Inovasi (57%)	4. Ketersediaan SDM (18%)
	5. Bimtek Inovasi (20%)
	6. Kemudahan Informasi Layanan (22%)
	7. Regulasi Inovasi Daerah (24%)
	8. Penggunaan IT (30%)
	9. Pedoman Teknis (30%)
	10. Pelaksana Inovasi Daerah (31%)
	11. Penyelesaian Layanan Pengaduan (35%)
	12. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan (43%)
	13. Jejaring Inovasi (51%)
	14. Kemanfaatan Inovasi (56%)
	15. Keterlibatan Aktor Inovasi (59%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

N. KABUPATEN GAYO LUES

Kabupaten Gayo Lues pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 18.99 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 145. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Gayo Lues pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah, yaitu terdapat variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan hasil kreatif karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Gayo Lues berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 42. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjupnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar.152 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Gayo Lues tersebar di 4 (empat) urusan yaitu perindustrian, pendidikan, pangan, dan kesehatan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 2(dua) urusan yakni pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 153. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 154. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator tidak mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 155 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter harus dioptimalkan agar dapat sesuai dengan parameter tertinggi yaitu parameter 3.

Tabel 43. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Gayo Lues

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Sosialisasi Inovasi Daerah (0%)	1. Sosialisasi Inovasi Daerah (0%)
2. Replikasi (0%)	2. Replikasi (0%)
3. Program pada RKPD (0%)	3. Program pada RKPD (0%)
4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)	4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
5. Penggunaan IT (0%)	5. Penggunaan IT (0%)
6. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)	6. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)
7. Pedoman Teknis (0%)	7. Pedoman Teknis (0%)
8. Online Sistem (0%)	8. Online Sistem (0%)
9. Monev Inovasi Daerah (0%)	9. Monev Inovasi Daerah (0%)
10. Keterlibatan Aktor Inovasi (0%)	10.
11. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)	11. Kualitas Inovasi Daerah (0%)
12. Kemudahan Informasi Layanan (0%)	12. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (0%)
13. Jejaring Inovasi (0%)	13. Keterlibatan Aktor Inovasi (0%)
14. Dukungan Anggaran (0%)	14. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)
15. Bimtek Inovasi (0%)	15. Kemudahan Informasi Layanan (0%)
16. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (25%)	16. Jejaring Inovasi (0%)
17. Kualitas Inovasi Daerah (25%)	17. Dukungan Anggaran (0%)
18. Kecepatan Inovasi (50%)	18. Bimtek Inovasi (0%)
19. Kemanfaatan Inovasi (50%)	19. Kemanfaatan Inovasi (25%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

O. KABUPATEN NAGAN RAYA

Kabupaten Nagan Raya pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 14.86 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 156. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Nagan Raya pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu variabel hasil kreatif perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, infrastruktur, dan hasil kreatif karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 44. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
		pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar.163 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Nagan Raya tersebar di 11 (sebelas) urusan yaitu perhubungan, perencanaan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata, urusan koperasi, usahakecil, dan menengah, komunikasi dan informatika, keuangan, kesehatan, fungsi penunjang lainnya, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni urusan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18(delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 164. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa seluruh inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 165. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator tidak mempunyai bukti dukung. Keterisian bukti dukung di atas 60% hanya pada indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (63%).

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 166. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter harus dioptimalkan agar dapat sesuai dengan parameter tertinggi yaitu parameter 3.

Tabel 45. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Nagan Raya

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
---------------------------------	--

1. Replikasi (0%)	1. Sosialisasi Inovasi Daerah (0%)
2. Regulasi Inovasi Daerah (0%)	2. Replikasi (0%)
3. Program pada RKPD (0%)	3. Regulasi Inovasi Daerah (0%)
4. Pedoman Teknis (0%)	4. Program pada RKPD (0%)
5. Monev Inovasi Daerah (0%)	5. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
6. Kualitas Inovasi Daerah (0%)	6. Penggunaan IT (0%)
7. Bimtek Inovasi (0%)	7. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)
8. Sosialisasi Inovasi Daerah (4%)	8. Pedoman Teknis (0%)
9. Dukungan Anggaran (4%)	9. Monev Inovasi Daerah (0%)
10. Keterlibatan Aktor Inovasi (7%)	10. Kualitas Inovasi Daerah (0%)
11. Jejaring Inovasi (7%)	11. Ketersediaan SDM (0%)
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan (15%)	12. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)
13. Online Sistem (15%)	13. Kemanfaatan Inovasi (0%)
14. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (48%)	14. Bimtek Inovasi (0%)
15. Kecepatan Inovasi (48%)	15. Kecepatan Inovasi (8%)
16. Kemudahab Informasi Layanan (52%)	16. Kemudahan Informasi Layanan (14%)
17. Pelaksana Inovasi Daerah (56%)	17. Online Sistem (50%)
18. Kemanfaatan Inovasi (56%)	18. Keterlibatan Aktor Inovasi (50%)
19. Penggunaan IT (59%)	19. Jejaring Inovasi (50%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

P. KABUPATEN PIDIE

Kabupaten Pidie pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 13.92 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 167. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pidie pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu mayoritas variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis

proses, kecanggihan produk, infrastruktur, dan hasil kreatif karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Pidie berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 46. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Pidie Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
		koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	melakukan monev inovasi secara berkala, membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan Gambar.174 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Pidie tersebar di 5 (lima) urusan yaitu perdagangan, penanaman modal, pariwisata, kesehatan, fungsi penunjang lainnya. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan

yakni urusan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18(delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 175. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa seluruh inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 176. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa seluruh indikator tidak mempunyai bukti dukung. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 177. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa tidak ada bukti dukung pengisian parameter, sehingga harus dioptimalkan agar dapat sesuai dengan parameter tertinggi yaitu parameter 3.

Tabel 47. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pidie

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
- semua indikator tidak terisi bukti dukung (keterisian dokumen 0%)	- semua indikator tidak terisi bukti dukung (keterisian dokumen 0%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Q. KABUPATEN PIDIE JAYA

Kabupaten Pidie Jaya pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 33.47 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 178. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pidie Jaya pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel kecepatan bisnis proses karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 48. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan

Berdasarkan Gambar.185 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Pidie Jaya tersebar di 15 (lima belas) urusan yaitu sosial, pertanian, perindustrian, perhubungan, perencanaan, perdagangan, pendidikan, penanaman modal, pariwisata, pangan, keuangan, kesehatan, kelautan dan perikanan, fungsi penunjang lainnya, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada di 3 (tiga) urusan yakni sosial, pendidikan, kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 186. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 187. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator tidak mempunyai bukti dukung. Keterisian bukti dukung di atas 60% hanya pada indikator Regulasi Inovasi Daerah (71%) dan .Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah (64%).

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 188. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih perlu dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 49. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Pidie Jaya

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (4%)	2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
3. Online Sistem (4%)	3. Pedoman Teknis (0%)

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
4. Program pada RKPD (7%)	4. Online Sistem (0%)
5. Pedoman Teknis (7%)	5. Bimtek Inovasi (0%)
6. Monev Inovasi Daerah (11%)	6. Ketersediaan SDM (11%)
7. Jejaring Inovasi (11%)	7. Pelaksana Inovasi Daerah (13%)
8. Keterlibatan Aktor Inovasi (14%)	8. Penggunaan IT (20%)
9. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (14%)	9. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (25%)
10. Kemudahan Informasi Layanan (14%)	10. Kemudahan Informasi Layanan (25%)
11. Penggunaan IT (18%)	11. Jejaring Inovasi (33%)
12. Bimtek Inovasi (21%)	12. Regulasi Inovasi Daerah (40%)
13. Dukungan Anggaran (29%)	13. Kecepatan Inovasi (46%)
14. Sosialisasi Inovasi Daerah (43%)	14. Program pada RKPD (50%)
15. Kualitas Inovasi Daerah (46%)	15. Keterlibatan Aktor Inovasi (50%)
16. Kecepatan Inovasi (46%)	16. Kemanfaatan Inovasi (50%)
17. Pelaksana Inovasi Daerah (54%)	
18. Kemanfaatan Inovasi (57%)	

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

R. KABUPATEN SIMEULUE

Kabupaten Simeulue pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 13.29 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 189. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Simeulue pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel infrastruktur, kecepatan bisnis proses, dan kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten

Simeulue berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 50. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Simeulue Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjutnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar.196 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Simeulue tersebar di 5 (lima) urusan yaitu pertanian, perencanaan, pangan, komunikasi dan informatika, fungsi penunjang lainnya. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak ada urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18(delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 197. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa semua inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Kondisi yang digambarkan oleh Gambar 198. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator telah terisi. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen dibawah 60%.

**Tabel 51. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
Kabupaten Simeulue**

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (2.5%)	1. Replikasi (0%)
	2. Regulasi Inovasi Daerah (0%)
	3. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD (0%)
	4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
	5. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (0%)
	6. Kecepatan Inovasi (0%)
	7. Dukungan Anggaran (0%)
	8. Bimtek Inovasi (0%)
	9. Online Sistem (13%)
	10. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (25%)
	11. Kemudahan Informasi Layanan (25%)
	12. Pelaksana Inovasi Daerah (38%)
	13. Keterlibatan Aktor Inovasi (38%)
	14. Kemanfaatan Inovasi (38%)
	15. Pengguna IT (50%)
	16. Pedoman Teknis (50%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

S. KOTA BANDA ACEH

Kota Banda Aceh pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 22.52 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat Gambar 200. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banda Aceh pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kota Banda Aceh berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 52. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Banda Aceh Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar.207 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Banda Aceh tersebar di 8 (delapan) urusan yaitu perhubungan, perdagangan, penanaman modal, pariwisata, keuangan, ketentraman, urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat

daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 208. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 209. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator tidak mempunyai bukti dukung. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 210. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih dapat dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 53. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Banda Aceh

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (9%)	1. Replikasi (0%)
2. Program pada RKPD (9%)	2. Pedoman Teknis (0%)
3. Monev Inovasi Daerah (9%)	3. Online Sistem (0%)
4. Keterlibatan Aktor Inovasi (9%)	4. Monev Inovasi Daerah (0%)
5. Dukungan Anggaran (9%)	5. Kecepatan Inovasi (0%)
6. Sosialisasi Inovasi Daerah (18%)	6. Bimtek Inovasi (0%)
7. Pelaksana Inovasi Daerah (18%)	7. Regulasi Inovasi Daerah (33%)
8. Pedoman Teknis (18%)	8. Pelaksana Inovasi Daerah (50%)
9. Kualitas Inovasi Daerah (18%)	9. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (50%)
10. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (18%)	
11. Regulasi Inovasi Daerah (27%)	
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan (27%)	
13. Penggunaan IT (27%)	
14. Online Sistem (27%)	
15. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (27%)	
16. Kemudahan Informasi Layanan (27%)	
17. Kemanfaatan Inovasi (27%)	

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
18. Kecepatan Inovasi (27%)	
19. Jejaring Inovasi (27%)	
20. Bimtek Inovasi (27%)	

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

T. KOTA LANGSA

Kota Langsa pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 44.28 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 211. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Langsa pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel output pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, kecepatan bisnis proses, dan kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kota Langsa berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 54. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Langsa Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah perda jika Perda, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Perkada, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
		internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan Teknologi	Keterlibatan aktor inovasi	melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda, meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tindak lanjutnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar.218 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, hanya 1 (satu) Inovasi yang dilaporkan Kota Langsa dengan urusan Lingkungan Hidup dan tidak terdapat Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 219. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Langsa menunjukkan bahwa inovasi yang dilaporkan menunjukkan nilai kematangan sedang. Kondisi yang digambarkan oleh Gambar 220. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator telah terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 221. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang

dilampirkan dalam pengisian parameter harus dioptimalkan agar dapat sesuai dengan parameter tertinggi yaitu parameter 3.

Tabel 55. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Langsa

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 di bawah 60%
1. Regulasi Inovasi Daerah (0%)	1. Sosialisasi Inovasi Daerah (0%)
2. Pedoman Teknis (0%)	2. Regulasi Inovasi Daerah (0%)
3. Keterlibatan Aktor Inovasi (0%)	3. Program pada RKPD (0%)
4. Kemudahan Informasi Layanan (0%)	4. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
	5. Penggunaan IT (0%)
	6. Pelaksana Inovasi Daerah (0%)
	7. Pedoman Teknis (0%)
	8. Online Sistem (0%)
	9. Monev Inovasi Daerah (0%)
	10. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah (0%)
	11. Keterlibatan Aktor Inovasi (0%)
	12. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)
	13. Kemudahan Informasi Layanan (0%)
	14. Kecepatan Inovasi (0%)
	15. Jejaring Inovasi (0%)
	16. Dukungan Anggaran
	17. Bimtek Inovasi

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

U. KOTA LHOKSUMAWA

Kota Lhoksumawe pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 16.52 dan masuk pada kategori kurang Inovatif. Melihat Gambar 222. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Lhoksumawe pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu

tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel kecepatan bisnis proses karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kota Lhoksumawe berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

**Tabel 56. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Lhoksumawe Berdasarkan Capaian Variabel
Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021**

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan

Berdasarkan Gambar.229 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Lhoksumawe tersebar di 4 (empat) urusan yaitu sosial, perencanaan, penelitian dan pengembangan, pariwisata. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah

terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 230. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Lhoksumawe menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 232. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih perlu dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 57. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Lhoksumawe

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Online Sistem (25%)	1. Replikasi (0%)
2. Kualitas Inovasi Daerah (25%)	2. Regulasi Inovasi Daerah (0%)
3. Kecepatan Inovasi (25%)	3. Online Sistem (0%)
4. Bimtek Inovasi (25%)	4. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (0%)
5. Sosialisasi Inovasi Daerah (50%)	5. Kecepatan Inovasi (0%)
6. Penyelesaian Layanan Pengaduan (50%)	6. Bimtek Inovasi (0%)
7. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah (50%)	7. Penggunaan IT (33%)
8. Jejaring Inovasi (50%)	8. Pedoman Teknis (33%)
	9. SDM terhadap Inovasi Daerah (33%)
	10. Keterlibatan Aktor Inovasi (33%)
	11. Proses Inovasi yang Dihasilkan (33%)
	12. Kemudahan Informasi Layanan (33%)
	13. Penyelesaian Layanan Pengaduan (50%)
	14. Jejaring inovasi (50%)

V. KOTA SABANG

Kota Sabang pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 24.16 dan masuk pada kategori kurang Inovatif. Melihat Gambar 233. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sabang pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel kecepatan bisnis proses, dan kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kota Sabang berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 58. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Sabang Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat, tanggap menindaklanjuti aduan yang ada dan menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar.240 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Sabang tersebar di 10 (sepuluh) urusan yaitu sosial, perhubungan, penanaman modal, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pariwisata, urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, kesehatan, kebudayaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 2 (dua) urusan yakni sosial dan urusan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 241. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Sabang menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Hal ini sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh Gambar 242. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator tidak mempunyai bukti dukung.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 243. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang

berada parameter 3, namun masih perlu dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 59. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Sabang

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)	2. Penyelesaian Layanan Pengaduan (0%)
3. Program pada RKPD (7%)	3. Online Sistem (0%)
4. Pedoman Teknis (7%)	4. Monev Inovasi Daerah (0%)
5. Online Sistem (13%)	5. Kemudahan Informasi Layanan (0%)
6. Jejaring Inovasi (13%)	6. Regulasi Inovasi Daerah (20%)
7. Bimtek Inovasi (13%)	7. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah (20%)
8. Sosialisasi Inovasi Daerah (20%)	8. Sosialisasi Inovasi Daerah (33%)
9. Pelaksana Inovasi Daerah (20%)	9. Pelaksana Inovasi Daerah (33%)
10. Keterlibatan Aktor Inovasi (20%)	10. Penggunaan IT (50%)
11. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (20%)	11. Jejaring Inovasi (50%)
12. Kemudahan Informasi layanan (20%)	12. Kualitas Inovasi Daerah (57%)
13. Dukungan Anggaran (20%)	
14. Penggunaan IT (27%)	
15. Regulasi Inovasi Daerah (33%)	
16. Monev Inovasi Daerah (33%)	
17. Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah (33%)	
18. Kemanfaatan Inovasi (33%)	
19. Kecepatan Inovasi (40%)	
20. Kualitas Inovasi Daerah (47%)	

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

W. KOTA SUBULUSSALAM

Kota Subulussalam pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 31.44 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat Gambar 244. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Subulussalam pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah yaitu tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi perlu dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kota Subulussalam berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 60. Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Subulussalam Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
Kecanggihan produk	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan Gambar.251 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Subulussalam tersebar di 6 (enam) urusan yaitu statistik, perencanaan, pendidikan, pariwisata, komunikasi dan informatika, fungsi penunjang lainnya. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8(delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan

pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan Gambar 252. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Subulussalam menunjukkan bahwa mayoritas inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Kondisi yang digambarkan oleh Gambar 253. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas dari indikator telah terisi. Optimalisasi keterisian dokumen masih dapat dilakukan pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen dibawah 60%.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 254. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter sudah banyak yang berada parameter 3, namun masih perlu dioptimalkan lagi pada indikator yang menunjukkan keterisian dokumen yang berada pada parameter 3 dibawah 60%.

Tabel 61. Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Subulussalam

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Bimtek Inovasi (0%)	2. Program pada RKPD (0%)
	3. Penggunaan IT (0%)
	4. Online Sistem (0%)
	5. Monev Inovasi Daerah (0%)
	6. Bimtek Inovasi (0%)
	7. Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan (0%)
	8. Sosialisasi Inovasi Daerah (20%)
	9. Regulasi Inovasi Daerah (20%)
	10. Pelaksana Inovasi Daerah (20%)
	11. Kemudahan Informasi Layanan (20%)
	12. Penyelesaian Layanan Pengaduan

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
	(40%)
	13. Pedoman Teknis (40%)
	14. Jejaring Inovasi (40%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.